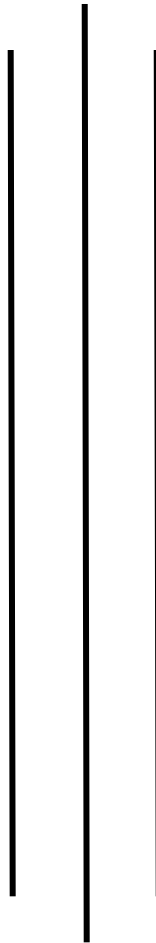




**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DENPASAR TAHUN 2017**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2016**

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2017.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas dan pada saat penyusunan RKPD ini Kota Denpasar belum menetapkan RPJMD maka yang dipakai pedoman adalah RPJPD Kota Denpasar. RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-4
C. Hubungan Antar Dokumen	I-5
D. Maksud dan Tujuan	I-5
E. Sistematika RKPD	I-6
Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-4
2.1.1.1 Geografi	II-4
2.1.1.2 Demografi	II-7
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-8
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-8
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-18
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya	II-19
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-20
2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan	II-20
2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan	II-66
2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-100
2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan	II-103
2.1.4. Aspek daya Saing	II-105
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-105
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-107
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-108
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-109
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-110
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-111
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-111



Bab	III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	III-2
		3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	III-6
		3.1.1.2. Inflasi	III-7
		3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN)	III-7
	3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017	III-11
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
	3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-14
		3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
		3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-17
		3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-20
Bab	IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
	4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-2
	4.3	Prioritas Pembangunan	IV-3
Bab	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V - 1
Bab	VI	PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN I		REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2017 KOTA DENPASAR	



DAFTAR TABEL

No.		Halaman
2.1	Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan 2014	II - 1
2.2	Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan	II - 4
2.3	Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya	II - 4
2.4	Nama Sungai, Bendungan dan Perkiraan Luas Areal yang Diairi di Kota Denpasar Tahun 2014	II - 5
2.5	Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah (hektar) Tahun 2010 – 2015	II - 7
2.6	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015	II - 8
2.7	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar	II - 9
2.8	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 s.d 2014 Kota Denpasar	II – 10
2.9	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar	II - 11
2.10	Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2014	II – 12
2.11	Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Tahun 2010-2014	II - 13
2.12	Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp) Tahun 2010-2014	II - 13
2.13	PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Per Kecamatan (Rp) Tahun 2009 -2013	II - 14
2.14	PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2000 Per Kecamatan (Rp) Tahun 2009 -2013	II - 14
2.15	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar	II - 15



Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2015

2.16	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011 – 2015	II - 16
2.17	Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2010-2014	II - 17
2.18	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s/d 2015 Kota Denpasar	II - 18
2.19	Angka Melek Huruf dari tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 18
2.20	Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2014	II - 19
2.21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011-2015 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar	II - 21
2.22	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 22
2.23	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II – 22
2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 – 2015	II – 23
2.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 - 2015	II - 24
2.26	Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015	II - 27
2.27	Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2015	II - 28
2.28	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan	II - 29
2.29	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012-2015	II - 30
2.30	Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2015	II - 31
2.31	Perbandingan Angka Kematian Bayi Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010- 2015	II - 33
2.32	Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010 – 2015	II - 34
2.33	Demam berdarah dangué	II - 37



2.34	Gizi Buruk	II - 38
2.35	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010 - 2014	II - 39
2.36	Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien	II - 41
2.37	Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2010 s/d 2015 Kota Denpasar	II - 44
2.38	Sistem Drainase Kota Denpasar	II - 45
2.39	Perkembangannya Jalan Lingkungan	II - 49
2.40	Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2011 s/d 2015	II - 51
2.41	Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2010 s/d 2015	II - 52
2.42	Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2015	II - 53
2.43	Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya	II - 53
2.44	Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar Tahun 2015	II - 57
2.45	Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar	II - 58
2.46	Kegiatan Penyandang Kesejahteraan Sosial	II - 63
2.47	Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2011 s.d. 2015	II - 64
2.48	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2011 s.d. 2015	II - 65
2.49	Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2011 s/d 2015	II - 74
2.50	Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2015	II - 74
2.51	Distribusi Penduduk tahun 2015	II – 79
2.52	Komposisi Penduduk berdasarkan Umur di Kota Denpasar Tahun 2015	II - 79
2.53	Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2010-2015	II - 81
2.54	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2015	II - 82



2.55	Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2008 s/d 2015	II - 83
2.56	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Benoa Tahun 2008 s/d 2015	II - 83
2.57	Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) s/d Bulan Juni Tahun 2015	II - 84
2.58	Rincian keragaan koperasi dari tahun 2011-2015	II – 87
2.59	Perkembangan UMKM dari Tahun 2011 – 2015	II - 88
2.60	Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2015	II - 89
2.61	Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2015	II - 90
2.62	Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015	II - 91
2.63	Jumlah Seniman yang Dapat Penghargaan di Kota Denpasar sampai Tahun 2015	II - 91
2.64	Dialog Budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar sampai Th 2015	II - 92
2.65	Jumlah Subak yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015	II - 92
2.66	Jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015	II - 92
2.67	Jumlah Cagar Budaya per Kecamatan di Kota Denpasar sampai tahun 2015	II - 93
2.68	Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015	II - 94
2.69	Jumlah Seniman yang Dapat Penghargaan di Kota Denpasar sampai Tahun 2015	II - 94
2.70	Dialog Budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar sampai Th 2015	II - 95
2.71	Jumlah Subak yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015	II - 95



2.72	Jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015	II - 95
2.73	Jumlah Cagar Budaya per Kecamatan di Kota Denpasar sampai tahun 2015	II - 96
2.74	Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan	II - 97
2.75	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2011 s/d 2014	II - 98
2.76	Judul Buku dan Koleksi Buku	II - 98
2.77	Pengelolaan arsip in aktif dan Monitoring evaluasi kearsipan dari Tahun 2011-2015	II - 99
2.78	Perkembangan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara Tahun 2010 s/d 2015	II - 101
2.79	Angka Konsumsi RT perkapita Menurut Kecamatan Kota Denpasar Tahun 2014	II - 106
2.80	Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar Tahun 2014	II - 106
2.81	Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar Tahun 2014	II - 107
2.82	Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2014 Kota Denpasar	II - 107
2.83	Angka Kriminalitas Kota Denpasar	II - 109
2.84	Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2015	II - 109
2.85	Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2014 Kota Denpasar	III - 110
3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Harga Berlaku (Juta) Menurut Lapangan Usaha	III - 3
3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	III - 4
3.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	III - 5
3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	III - 6
3.5	Inflasi di Kota Denpasar (Dalam Persen)	III - 7



3.6	Investasi PMDN	III- 10
3.7	Jumlah Perusahaan Dan Pekerja	III- 11
3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2014 s.d tahun 2018	III- 14
3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018	III- 18
3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018	III- 21
4.1	Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar	IV - 3
4.2	Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas	IV - 4
5.1	Rumusan rencana program dan pagu dana tahun 2017	V – 2



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Denpasar	I - 3
2.1	Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	II - 3
2.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar	II - 10
2.3	Distribusi PDRB Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2014	II - 17
2.4	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar	II - 18
2.5	Kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2015	II - 27
2.6	Tren kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015	II - 27
2.7	Persentase Desa Siaga Aktif Berdasarkan Strata Di Kota Denpasar Tahun 2015	II - 31
2.8	Angka Kematian Ibu Maternal Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015	II - 34
2.9	Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015	II - 36
2.10	Incidence Rate Penyakit Demam berdarah dengue Tahun 2011 s/d 2015	II - 37
2.11	Prevalensi gizi buruk tahun 2011 s/d 2015	II - 38
2.12	Grafik Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien	II - 41
2.13	Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2011 s/d 2015	II - 52
2.14	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 s/d 2015	II - 52
2.15	Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya	II - 54
2.16	Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar	II - 65
2.17	Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar	II - 65
2.18	Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah	II - 75



2.19	Jumlah Penumpang dan Barang Keluar Masuk di Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015	II - 81
2.20	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2015	II - 82
2.21	Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar	II - 83
2.22	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Benoa Tahun 2008 s/d 2015	II – 84
2.23	Perkembangan UKM 2011-2015	II – 88
2.24	Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2015 Kota Denpasar	II – 108





WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DENPASAR TAHUN 2017

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa telah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Denpasar Tahun 2016 pada tanggal 29 – 31 Maret 2016 yang membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DENPASAR TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MATERI MUATAN RKPD

Pasal 3

Materi muatan RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dan seluruh Perangkat Daerah serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2017

BAB III

SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 4

RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Mei 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 20 MEI 2016

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA
DENPASAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DENPASAR TAHUN 2017

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Denpasar dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme penyusunan RKPD dilakukan melalui koordinasi antara Perangkat Daerah dan seluruh komponen masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang RKPD Kota Denpasar termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang tercermin pada program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun 2017.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2017 merupakan *Out put* dari proses perencanaan di atas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengalokasian sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2017 ini, telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari a)Proses Teknokratik, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana, b) Proses Partisipatif, Perencanaan yang melibatkan masyarakat (*stake holders*), antara lain melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Forum PD) dan Konsultasi Publik serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), c) Proses *Bottom-Up* dan *Top-Dow*, Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.



Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program Perangkat Daerah (PD) yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Denpasar.

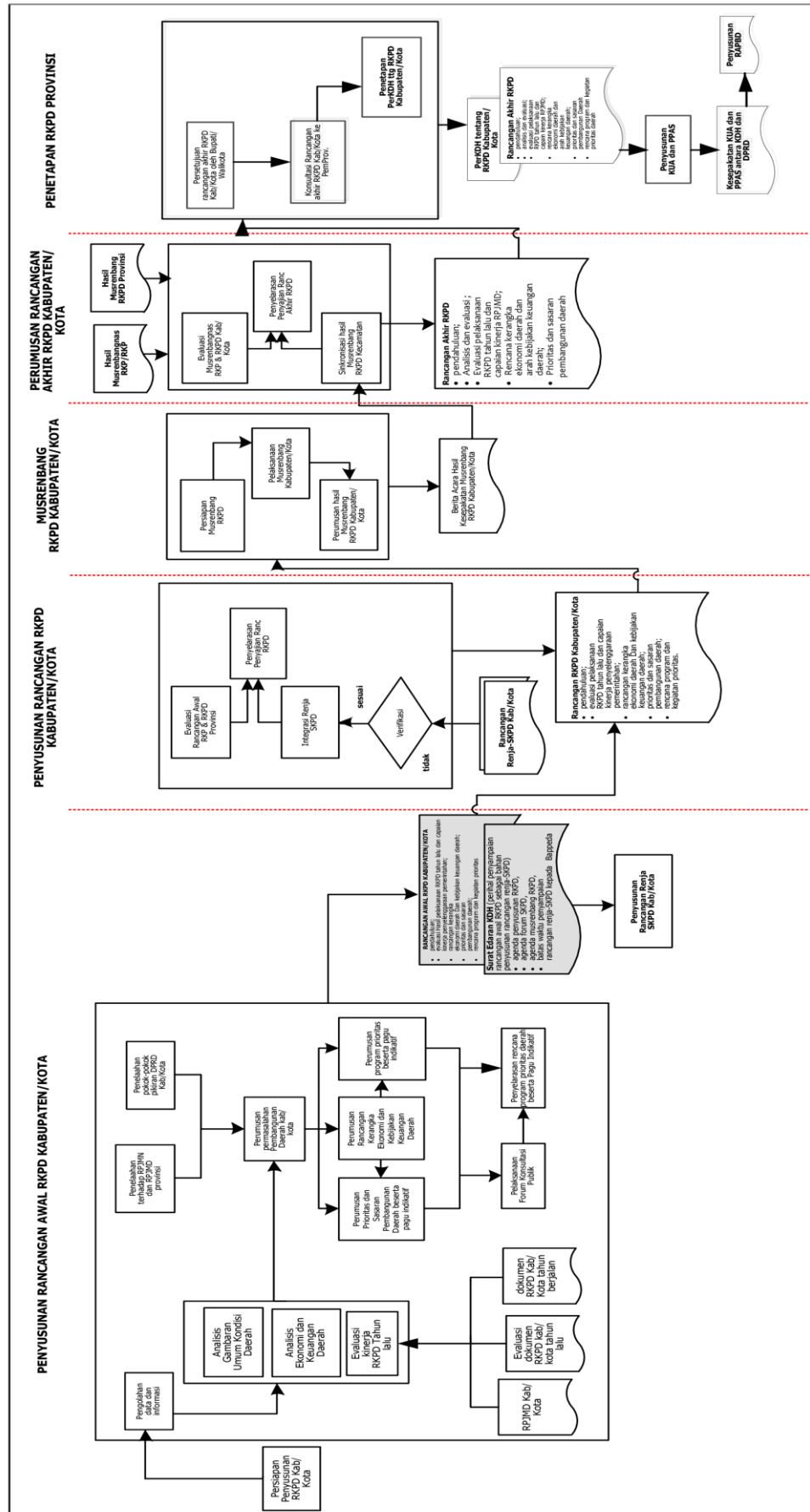
Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



Gambar . I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Denpasar



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



C. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan, RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 tetap menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan namun selaras dan sinergis satu sama lain. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran terutama RPJPD Kota Denpasar 2005-2025, RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, Hubungan tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut :

- **RPJPD dengan RPJMD** : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi misi kepala daerah selama periode 5 tahun.
- **RPJMD dengan RKPD** : RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunannya.
- **Rencana Strategis Perangkat Daerah (renstra-PD)** merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD
- **RKPD dengan Renja-Perangkat Daerah (renja PD)** : RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (renja) PD.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kota Denpasar



2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

E. Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2017 dengan dokumen dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Propinsi maupun Kota Denpasar.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2017.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun 2016.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2016 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Denpasar

2.3. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016.



BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan kebijakan ekonomi dalam RPJMD Kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan hubungan visi misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2015 serta kondisi daerah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2017, instansi pelaksana/Perangkat Daerah, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara Perangkat Daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas Perangkat Daerah;
- b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD
- d. Penegasan tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12,778 Ha atau sebesar 2,27 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km² (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km² (18,88 persen). Adapun kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km² (17,64 persen). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1.

Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan 2014

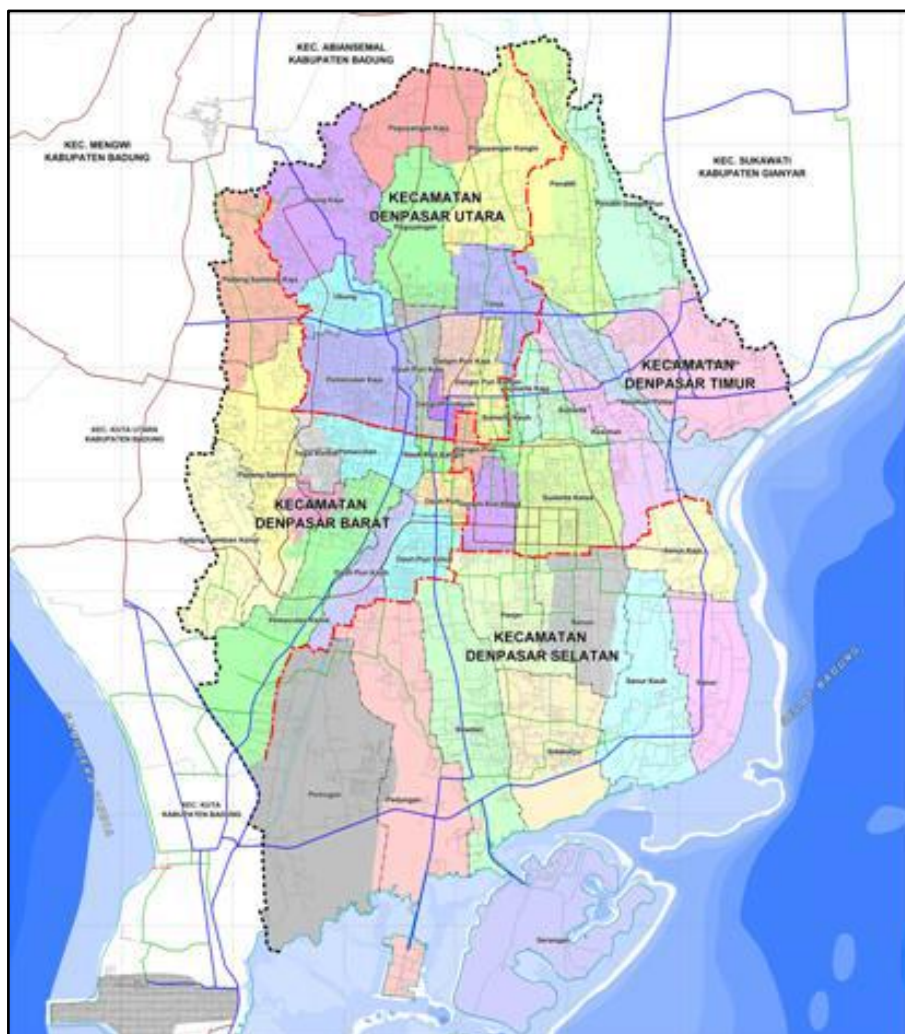
No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Denpasar Utara		3.112,00	24,35
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142,00	1,11
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75,00	0,59
	1.3	Kelurahan Tonja	230,00	1,80
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72,00	0,56
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385,00	3,01
	1.6	Desa Ubung	103,00	0,81
	1.7	Desa Ubung Kaja	400,00	3,13
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109,00	0,85
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644,00	5,04
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536,00	4,19
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416,00	3,26
2	Kecamatan Denpasar Barat		2.413,00	18,88
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412,00	3,22
	2.2	Desa Pemecutan Klod	450,00	3,52
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	190,00	1,49
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188,00	1,47
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60,00	0,47
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59,00	0,46
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186,00	1,46



No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
	2.8	Desa Tegal Harum	50,00	0,39
	2.9	Desa Tegal Kertha	35,00	0,27
	2.10	Kelurahan Padang Sambian	374,00	2,93
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409,00	3,20
3	Kecamatan Denpasar Timur		2.254,00	17,64
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	142,00	1,11
	3.2	Desa Sumerta Klod	271,00	2,12
	3.3	Kelurahan Kesiman	266,00	2,08
	3.4	Desa Kesiman Petilan	290,00	2,27
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	405,00	3,17
	3.6	Kelurahan Sumerta	52,00	0,41
	3.7	Desa Sumerta Kaja	73,00	0,57
	3.8	Desa Sumerta Kauh	89,00	0,70
	3.9	Kelurahahn Dangin Puri	65,00	0,51
	3.10	Kelurahan Penatih	281,00	2,20
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	320,00	2,50
4	Kecamatan Denpasar Selatan		4.999,00	39,12
	4.1	Desa Pemogan	971,00	7,60
	4.2	Kelurahan Pedungan	749,00	5,86
	4.3	Kelurahan Sesetan	739,00	5,78
	4.4	Kelurahan Serangan	481,00	3,76
	4.5	Desa Sidakarya	389,00	3,04
	4.6	Kelurahan Panjer	359,00	2,81
	4.7	Kelurahan Renon	254,00	1,99
	4.8	Desa Sanur Kauh	386,00	3,02
	4.9	Kelurahan Sanur	402,00	3,15
	3.10	Desa Sanur Kaja	269,00	2,11
	Kota Denpasar		12.778,00	100

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015





Gambar. 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah utara, barat dan selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)



2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 GEOGRAFI

B. Letak dan Kondisi Geografis

Menurut letak Geografis Kota Denpasar berada di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur seperti tampak pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2.
Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Denpasar Selatan	08040'00"-08044'49"	115011'23"-115015'54"
2	Denpasar Timur	08035'31"-08040'36"	115012'29"-115016'27"
3	Denpasar Barat	08036'24"-08041'59"	115010'23"-115014'14"
4	Denpasar Utara	08035'31"-08044'49"	115012'09"-115014'39"

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015

C. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.

Tabel. 2.3.
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian
Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (Meter)	Luas Wilayah	
	Km ²	(%)
0 - 12	49,99	39,12
00 - 75	22,31	17,46
	24,06	18,83
	31,42	24,59
Jumlah	127,78	100

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015



D. Kondisi Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuarter, kwarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batumannya adalah sebagai berikut : Batuan vulkanik kuarter menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

E. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kota Denpasar, terdapat potensi sumber daya air dapat disebutkan lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut, seperti Tabel 2.4.

Tabel. 2.4.
Nama Sungai, Bendungan dan Perkiraan Luas Areal yang Diairi
di Kota Denpasar Tahun 2014

	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/ Dam		Total Bendungan/ Dam (km)	Luas yg Diairi (hektar)
1.	Tukad Ayung	6,50	1	Kedewatan	1	720
			2	Mambal	1	645
			3	Peraupan	1	10
			4	Oongan	1	536
2.	Tukad Badung	17,15	5	Mertagangga	1	5
			6	Batan Nyuh	1	215
			7	Mergaya	1	100
			8	Gerak Tk. Badung	1	21
			9	Penyaring Sampah	1	0
			10	Waduk Muara	1	0
3.	Tukad Teba	8,75	11	Semila II	1	15
			12	Tegallinjung	1	0
4.	Tukad Mati	5,65	13	Free I. Tegallinjung	1	0
			14	Srogsogan	1	0
			15	Lange	1	25
			16	Dadas	1	15



	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/ Dam		Total Bendungan/ Dam (km)	Luas yg Diairi (hektar)
			17	Umeduwi	1	25
5.	Tukad Abianbase	4,15		-	-	-
6.	Tukad Loloan (Dl. Oongan)	3,75	18	Emp Bantang	1	15
			19	Emp Bantang	1	8
			20	Emp Pengabean	1	21
			21	Emp Agel	1	36
			22	Emp Pengayasan	1	23
			23	Penyaring Sampah	1	-
7.	Tukad Ngenjung	2,15		-	-	-
8.	Tukad Penggawa (Dl. Oongan)	6,55	25	Emp. S. Sidakarya	1	97
9.	Tukad Rangda/ Buaji (Dl. Oongan)	4,25			-	-
10.	Tukad Pekaseh (Dl. Oongan)	5,50	26	Emp. S. Sesetan	1	10
			28	Emp. S. Sesetan	1	15
	Jumlah				25	2.557

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2014

F. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan curah hujan berkisar antara 0 – 406 mm, dan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 406 mm. Pada tahun 2014 rata-rata suhu Kota Denpasar sebesar 27,0°C. Kota Denpasar juga memiliki kelembaban udara rata-rata sebesar 81% dengan curah hujan sebesar 2.026,2 mm dan kecepatan angin berembus sebesar 7 knot.

G. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 tahun (2010 -2014) berkurang seluas 134 Ha atau rata-rata berkurang per tahun seluas 26,8 Ha (0,85% per tahun). Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah mencapai sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman, dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2010 - 2014 disajikan pada Tabel 2.5 berikut.



Tabel. 2.5.
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah (hektar)
Tahun 2010 - 2015

No.	Penggunaan Lahan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Lahan Pertanian	3.148	3.113	3.035	3.022	3.014	3.014
1.1	Lahan Sawah Irigasi	2.632	2.597	2.519	2 506	2.509	2.509
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	516	516	516	516	505	505
	a Tegalan	396	396	396	396	385	385
	b Perkebunan	35	35	35	35	35	35
	c Hutan Rakyat	75	75	75	75	75	75
	d Lainnya	10	10	10	10	10	10
2	Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	9.630	9.665	9.743	9.756	9.764	9.764
	Jumlah	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015

2.1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk di kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar sebanyak 793.000 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kota Denpasar menurut proyeksi BPS Provinsi Bali tahun 2015 sebanyak 880.860 jiwa yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan dengan jumlah penduduk 255.160 jiwa, yang mana jumlah penduduk perempuan sebanyak 124.760 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 130.400 jiwa, dengan rasio penduduk sebesar 1,046 (28,97%). Penduduk dengan jumlah terendah terdapat di Kecamatan Denpasar Timur yaitu berjumlah 151.200 jiwa terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 75.350 jiwa, perempuan 76.860 jiwa dengan rasio 1,020 (17,17%).

Penduduk Kota Denpasar tahun 2015 menurut umur didominasi oleh penduduk usia produktif (25-54 tahun) sebanyak 427.060 jiwa dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 136.220 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 70.990 jiwa, penduduk perempuan 65.230 jiwa. Penduduk usia sekolah (usia 5-24 tahun) sebanyak 305.700 jiwa yang mana jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan. Jumlah penduduk Kota Denpasar menurut usia yang berjumlah paling sedikit yaitu usia manula (55 tahun keatas) berjumlah 72.300 jiwa, jumlah terbanyak terdapat di kecamatan Denpasar Barat sebanyak 20.000 jiwa, terendah 14.400 jiwa terdapat di Kecamatan Denpasar Timur. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.6



Tabel. 2.6.
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin
per Kecamatan Tahun 2015

Penduduk	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Kota Denpasar
Laki laki	142.910	76.860	130.400	99.530	449.700
Perempuan	136.730	74.340	124.760	95.070	430.900
Jumlah	279.640	151.200	255.160	194.600	880.600

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015 (Hasil Proyeksi)

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain IPM, pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Pada tahun 2015 IPM Kota Denpasar telah mencapai 81,65 tidak ada peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 81,65. IPM Kota Denpasar tidak pernah menurun / selalu meningkat dan konsisten di peringkat pertama antar kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan Kota Denpasar merupakan daerah sentra ekonomi yang didukung oleh berbagai infrastruktur yang relatif maju.

Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2014 IPM Kota Denpasar sebesar 81,65. Indek tersebut adalah yang tertinggi di Propinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di Propinsi Bali.



B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada industri pariwisata yang menyebabkan kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) disusul sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor sekunder). Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 40,02% terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 kontribusi sektor ini diperkirakan mencapai 40,03% dan tahun 2014 mencapai 40,41. Kondisi yang berlawanan terjadi di sektor pertanian, dimana kontribusi ini selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 6,16% namun pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian diperkirakan menurun menjadi 6,09% dan tahun 2014 menurun menjadi 5,99%.

Tabel. 2.7.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2013 s.d 2014 Kota Denpasar

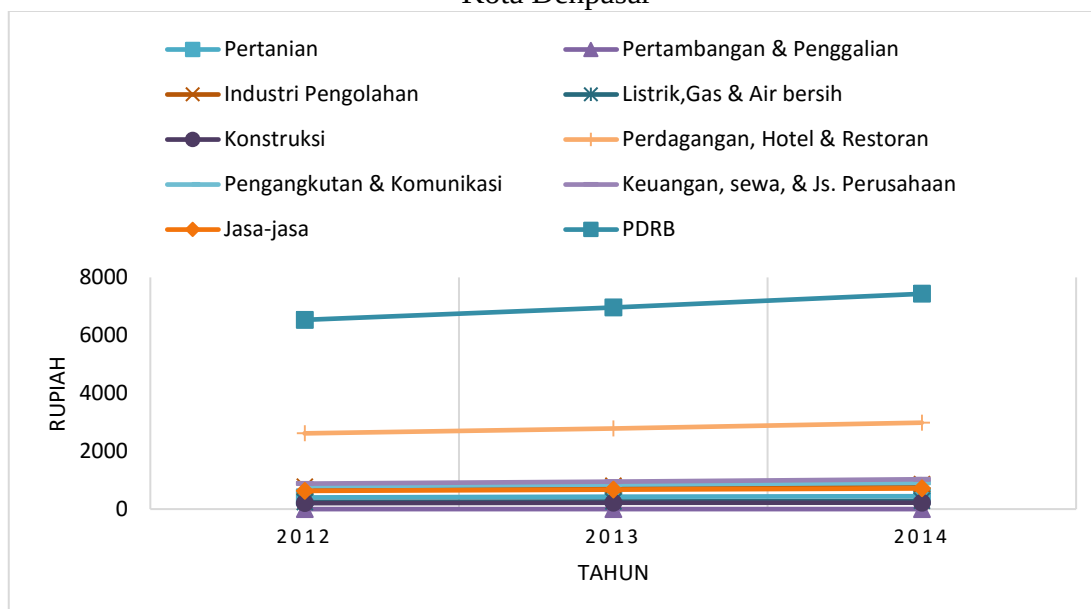
NO	Sektor	REALISASI			
		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	424,35	6,09	445,38	5,99
2	Pertambangan & Penggalian	0,25	0,00	0,25	11,52
3	Industri Pengolahan	807,61	11,60	856,13	3,76



NO	Sektor	REALISASI			
		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%
4	Listrik,Gas & Air bersih	259,49	3,73	279,49	2,97
5	Konstruksi	219,75	3,16	221,05	40,14
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.787,16	40,03	2.983,71	40,41
7	Pengangkutan & Komunikasi	844,35	12,13	904,91	12,17
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	950,08	13,65	1.029,92	13,85
9	Jasa-jasa	669,56	9,62	713,34	9,60
	PDRB	6.962,61	100	7.434,17	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar. 2.2
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2015
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014
 Kota Denpasar



Tabel. 2.8.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
 Tahun 2013 s.d 2014 Kota Denpasar

NO	Sektor	2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	1.131,19	6,61	1.270,98	6,61
2	Pertambangan & Penggalian	0,72	0,00	0,70	0,00
3	Industri Pengolahan	1.791,56	10,46	2.025	10,21



NO	Sektor	2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%
4	Listrik,Gas, & Air bersih	721,03	4,21	781,96	4,55
5	Konstruksi	658,67	3,85	707,75	3,85
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	6.780,90	39,60	7.430,41	39,60
7	Pengangkutan & Komunikasi angkutan & Komunikasi	2.021,02	11,80	2.256,68	11,80
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	2.492,09	14,56	2609,54	14,94
9	Jasa-jasa	1.524,33	8,90	1.736,34	8,87
	PDRB	17.121,52	100	18.816,56	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Tabel. 2.9.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kota Denpasar

NO	Sektor	2013		2014	
		Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%
1	Pertanian	5,23	6,35	6,74	6159
2	Pertambangan& Penggalian	0	0	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	14,08	12,49	10,76	12,10
4	Listrik,Gas&Air bersih	4,14	3,66	4,16	3,11
5	Konstruksi	4,46	3,16	3,76	3,19
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	32,79	38,20	39,49	40,41
7	Pengangkutan & Komunikasi	13,20	12,89	11,00	12,43
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	15,20	12,69	13,87	12,74
9	Jasa-jasa	10,90	10,56	9,23	9,88
	PDRB	100	100	100	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan



penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat produktivitas perekonomian suatu daerah/wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Denpasar tahun 2014 sebesar 34.208.828.94 milyar rupiah dan jumlah penduduk proyeksi tahun 2014 sebanyak 863.600 jiwa, diperoleh PDRB per kapita Kota Denpasar tahun 2014 sebesar 39.611.890.85 rupiah per tahun. Bila dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan, PDRB perkapita Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah sebesar 31.006.810.86 rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 dimana PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kota Denpasar adalah sebesar 29.575.016.85 rupiah. Ini berarti bahwa peningkatan PDRB perkapita yang terjadi pada tahun 2014 tidak hanya terjadi secara nominal tapi juga disertai dengan peningkatan pendapatan secara riil. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.10.

Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2010-2014

Perincian	2010	2011	2012	2013	2014
NILAI ABSOLUT					
PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	20.309.166.28	22.664.477.19	25.819.231.08	29.389.254.94	34.208.828.94
PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	20.309.166.28	21.763.406.25	23.397.173.90	25.026.379.26	26.777.481.86
Jumlah Penduduk Proyeksi	793.000	810.900	828.900	846.200	863.600
PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rupiah)	25.753.803.66	27.949.780.72	31.148.788.85	34.730.861.43	39.611.890.85
PDRB Per Kapita Harga Konstan (Rupiah)	25.753.803.66	26.838.582.13	28.226.775.12	29.575.016.85	31.006.810.86
Index Implisit (%)	100,00	104,14	110,35	117,43	127,75
Laju Implisit (%)	0,00	4,14	5,96	6,42	8,79

Sumber: BPS Kota Denpasar 2015



Bila dibandingkan secara regional, PDRB per kapita Kota Denpasar atas dasar harga berlaku tahun 2010-2014 merupakan terbesar kedua, setelah Kabupaten Badung. Bila dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Bali atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun (2010-2014) masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.11.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Tahun 2010-2014

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Jembrana	21,65	23,81	26,19	28,99	33,43
Tabanan	22,16	24,36	26,81	30,10	34,76
Badung	38,37	41,91	47,31	53,97	61,49
Gianyar	23,21	25,48	28,27	31,63	36,52
Klungkung	20,99	23,06	25,44	28,18	32,47
Bangli	12,76	14,02	15,38	17,18	19,80
Karangasem	17,02	18,61	20,47	22,99	26,53
Buleleng	21,82	24,10	26,69	29,99	34,78
Denpasar	25,75	27,95	31,15	34,73	39,61
Provinsi Bali	24,10	26,43	29,44	33,13	38,11

Sumber: BPS Kota Denpasar 2015

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Denpasar secara regional Provinsi Bali lebih tinggi dari Provinsi Bali dan menempati urutan kedua setelah Kabupaten Badung seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.12.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp)
Tahun 2010-2014

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Jembrana	21,65	22,69	23,91	25,10	26,44
Tabanan	22,16	23,28	24,55	25,95	27,47
Badung	38,37	39,80	41,79	43,58	45,56
Gianyar	23,21	24,52	25,99	27,50	29,10
Klungkung	20,99	22,07	23,35	24,61	25,95
Bangli	12,76	13,41	14,16	24,91	15,69
Karangasem	17,02	17,79	18,74	19,79	20,86
Buleleng	21,82	23,00	24,41	25,99	27,62
Denpasar	25,75	26,84	28,23	29,58	31,01
Provinsi Bali	24,10	25,27	26,69	28,13	29,67

Sumber: BPS Kota Denpasar 2015

PDRB per Kapita Kota Denpasar per kecamatan, diperoleh data yang bersifat sangat sementara yang telah dikeluarkan oleh BPS Kota Denpasar yang dimuat dalam buku Statistik



Daerah Per Kecamatan, menunjukkan bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2009 hingga 2011 adalah paling tinggi, sedangkan di tahun 2012 dan 2013, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku paling tinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 paling tinggi adalah Kecamatan Denpasar Utara seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel. 2.13.
PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku
Per Kecamatan (Rp) Tahun 2009 -2013

Kecamatan	2009*	2010**	2011**	2012**	2013**
Denpasar Barat	14.178.385,36	15.613.554,55	16.508.638,10	18.241.883,93	19.941.554,19
Denpasar Selatan	13.294.948,41	15.278.276,54	16.384.503,19	17.208.079,66	18.345.933,96
Denpasar Timur	14.218.462,42	15.519.479,88	16.408.887,95	17.920.651,79	19.364.076,43
Denpasar Utara	14.346.584,07	15.847.268,94	16.776.786,12	18.087.817,73	19.616.411,67

Catatan: *) Angka Sementara; ***) Angka Sangat Sangat Sementara
Sumber BPS Kota Denpasar 2014

Tabel. 2.14.
PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2000
Per Kecamatan (Rp) Tahun 2009 -2013

Kecamatan	2009*	2010**	2011**	2012**	2013**
Denpasar Barat	6.910.686,84	7.039.723,73	7.353.701,86	7.740.647,45	8.095.869,26
Denpasar Selatan	6.720.530,26	6.945.023,12	7.285.901,40	7.464.997,15	7.751.815,23
Denpasar Timur	7.353.416,85	7.427.439,54	7.747.875,65	8.142.487,60	8.543.319,32
Denpasar Utara	7.407.939,64	7.501.445,35	7.836.657,18	8.227.972,81	8.622.704,92

Catatan: *) Angka Sementara; ***) Angka Sangat Sangat Sementara
Sumber BPS Kota Denpasar 2014

Secara umum PDRB per kapita per kecamatan tidak menunjukkan ketimpangan yang berarti dan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antar kecamatan sudah berjalan secara seimbang.

D. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.



Selama tahun 2011–2014, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Di tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Denpasar meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,51 persen namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar melambat hanya menjadi 6,96 persen dan selanjutnya pada tahun 2014 dapat sedikit meningkat menjadi 7 persen. Lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2014 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan sebesar 11,86 persen. Selanjutnya diikuti oleh administrasi pemerintahan 10,21 persen dan jasa pendidikan sebesar 10,08 persen. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011-2014, kategori yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 9,34 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial selain memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2014 juga memiliki rata – rata pertumbuhan yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi diduduki oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,31 persen dan diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,04 persen. Penyediaan akomodasi makanan dan Minum sebagai kategori yang menopang industri pariwisata di Kota Denpasar memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,29 persen sedangkan kategori pertanian hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Dari 17 kategori pembentuk PDRB Kota Denpasar hanya kategori pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi di tahun 2014. Kota Denpasar tidak memiliki lokasi galian C namun masih dapat ditemui hasil produksi pertambangan dan penggalian lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah semakin ketat dalam megawasi kegiatan penggalian terutama untuk kegiatan yang illegal atau tidak berijin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.15.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,36	2,72	2,43	8,54	-0,37
B	Pertambangan dan Penggalian	10,73	16,91	6,45	-0,84	-4,83
C	Industri Pengolahan	1,49	5,72	7,29	8,06	3,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,23	12,08	7,22	2,09	-0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,48	4,2	4,63	6,61	6,04
F	Konstruksi	6,88	20,5	5,05	1,12	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,78	6,97	8,12	6,64	9,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,65	6,37	5,91	8,52	6,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,19	9,01	7,45	5,5	3,90
J	Informasi dan Komunikasi	9,09	9,15	4,85	6,45	8,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,68	9,62	11,9	8,96	7,22
L	Real Estat	4,64	7,4	6,03	8,27	9,44
M,N	Jasa Perusahaan	3,45	3,03	8,27	6,97	7,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25,98	2,01	-0,96	10,21	6,57



No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015
P	Jasa Pendidikan	11,15	1,24	12,77	10,08	8.07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	7,03	11,81	11,86	12.67
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,32	5,92	3,24	7,18	9.38
Produk Domestik Regional Bruto		7,16	7,51	6,96	7	6,18

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2015

Tabel. 2.16.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011 - 2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.36	2.72	2.43	8.54	-0,37
2.	Pertambangan dan Penggalan	10.73	16.91	6.45	-0.84	-4.83
3.	Industri Pengolahan	1.49	5.72	7.29	8.06	3.48
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.23	12.08	7.22	2.09	-0.51
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.48	4.2	4.63	6.61	6.04
6.	Konstruksi	6.88	20.5	5.05	1.12	7.61
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.78	6.97	8.12	6.64	9.59
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.65	6.37	5.91	8.52	6.06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.19	9.01	7.45	5.5	3.90
10.	Informasi dan Komunikasi	9.09	9.15	4.85	6.45	8.72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.68	9.62	11.9	8.96	7.22
12.	Real Estat	4.64	7.4	6.03	8.27	9.44
13.	Jasa Perusahaan	3.45	3.03	8.27	6.97	7.43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25.98	2.01	-0.96	10.21	6.57
15.	Jasa Pendidikan	11.15	1.24	12.77	10.08	8.07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.66	7.03	11.81	11.86	12.67
R.S. T.U	Jasa lainnya	7.32	5.92	3.24	7.18	9.38
Produk Domestik Regional Bruto		7.16	7.51	6.96	7	6,18

* Angka sementara

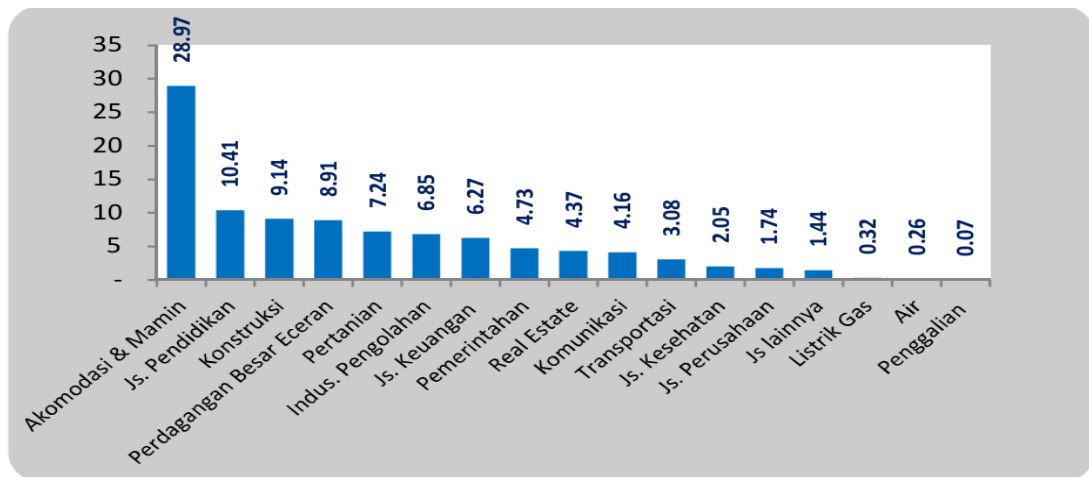
** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2015

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Pada tahun 2014, lapangan usaha yang memiliki distribusi tertinggi yaitu di bidang akomodasi makanan dan minuman sebesar 29,97%, di bidang pendidikan distribusinya sebesar 10,41%, distribusi terendah yaitu ada pada lapangan usaha air dan penggalan yaitu hanya sebesar 0,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.





Gambar. 2.3 Distribusi PDRB Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2014

E. Laju Inflasi Harga

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau.

Di Kota Denpasar, inflasi tahun 2014 banyak disumbangkan oleh inflasi kelompok bahan makanan sebanyak 11,23% serta kelompok kesehatan sebanyak 9,99%. Secara keseluruhan, laju inflasi di Kota Denpasar sebesar 8,03%. Selengkapnya disajikan pada tabel 2.19

Tabel. 2.17.

Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2010-2014

No	Kelompok	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Laju Inflasi	8,10	3,75	4,71	7,35	8,03
2.	Inflasi Menurut Kelompok					
2.1	Bahan Makanan	18,32	3,49	6,06	10,36	11,23
2.2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	10,20	5,92	8,67	5,19	6,29
2.3	Perumahan	7,31	4,13	3,97	5,64	7,20
2.4	Sandang	2,92	6,23	0,92	-1,42	3,60
2.5	Kesehatan	1,13	2,41	2,13	1,49	9,99
2.6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	4,57	1,06	6,44	4,22	4,34
2.7	Transpor dan komunikasi	0,25	2,39	1,26	12,62	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Tabel. 2.18.

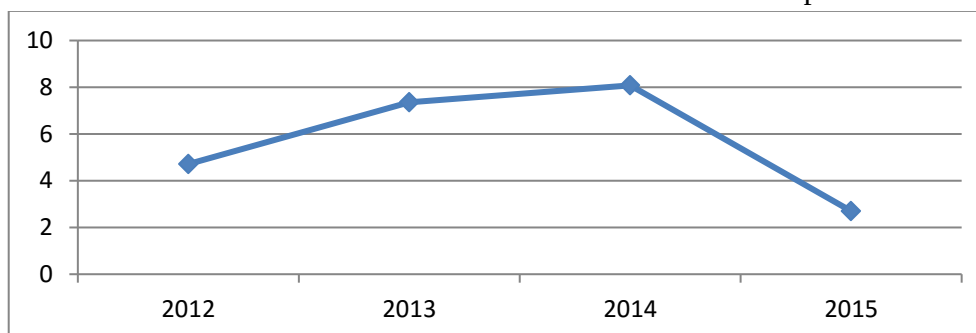
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s/d 2015 Kota Denpasar

Uraian	2012	2013	2014	2015
Inflasi	4,71	7,35	8,03	2,7

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar. 2.4

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar



2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk:

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Tabel. 2.19.

Angka Melek Huruf dari tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	153.097	157985	157.998	158.125	158.155
2	Kecamatan Denpasar Selatan	186.488	191815	196.500	196.650	196.690
3	Kecamatan Denpasar Barat	187.596	192895	192.950	192.990	193.020
4	Kecamatan Denpasar Timur	122.877	126215	126.750	126.850	126.900
	Jumlah	650,485	668,910	668,910	674.198	674.765



NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	157.556	158.100	158.150	158.225	158.255
2	Kecamatan Denpasar Selatan	191.919	196.800	196.850	196.900	196.930
3	Kecamatan Denpasar Barat	193.472	193.100	193.125	193.140	193.180
4	Kecamatan Denpasar Timur	126.546	127.100	127.220	127.225	127.275
	Jumlah	669403	675100	675.345	675.49	675.640

NO	Kecamatan	Angka melek huruf				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	99,90	99.92	99.93	99.94	99.94
2	Kecamatan Denpasar Selatan	99,90	99.94	99.82	99.87	99.88
3	Kecamatan Denpasar Barat	99,80	99.70	99.90	99.92	99.92
4	Kecamatan Denpasar Timur	99,75	99.73	99.63	99.70	99.71
	Jumlah	99,83	99.82	99.82	99.86	99.86

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Banyaknya organisasi kesenian di Kota Denpasar tahun 2010 sebanyak 653 berkurang menjadi 644 organisasi di tahun 2014, seperti disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 2.20.

Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2014

Tahun	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
2015					
2014	155	217	151	123	644
2013	181	238	155	193	767
2012	171	229	149	123	672
2011	154	218	154	127	653
2010	154	218	154	127	653

Sumber : BPS Kota Denpasar 2015



Pembangunan di bidang olahraga di Kota Denpasar dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti ketersediaan lapangan olahraga. Tahun 2010 jumlah lapangan olahraga Sepak bola 45 buah, Bola Voli 51 buah, Badminton 36 buah, Bola Basket 21 buah, Pingpong 135 buah, Tennis Lapangan 26 buah, dan Atletik 19 buah. Untuk tahun 2013 jumlah lapangan hampir tidak ada yang bertambah kecuali lapangan atletik meningkat menjadi 27 buah.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan 4 urusan: Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan.

2.1.3.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Denpasar berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Kemajuan suatu bangsa dengan mudah dapat diteropong lewat keberhasilan penyelenggaraan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagai mana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang pembangunan nasional, karena mendidik dan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga



menjadi media inovasi untuk menghasilkan berbagai temuan, teknologi, eksplorasi yang mampu mempermudah manusia menjalankan kehidupannya.

Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat.

1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi sekolah merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain angka melek huruf dan buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun)

Tabel. 2.21.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011-2015
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Kota Denpasar

NO	Kecamatan	SD/MI									
		jumlah murid usia 7-12 thn					jumlah penduduk usia 7-12 th				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	21,525	21.767	18.748	18.695	19.501	18.038	18.218	18.253	19.605	19.955
2	Kecamatan Denpasar Selatan	21,586	21.883	18.957	19.571	19.952	23.144	23.375	23.975	25.812	26.432
3	Kecamatan Denpasar Barat	26,401	26.394	22.967	22.826	22.396	22.563	22.788	22.988	24.628	25.093
4	Kecamatan Denpasar Timur	17,665	17.890	15.953	15.587	15.643	13.771	13.908	14.025	14.805	15.044
	Jumlah	87,177	87.934	77.989	76.79	77.492	77.516	78.289	79.241	84.850	86.524

NO	Kecamatan	SMP/MTs									
		jumlah murid usia 13-15 thn					jumlah penduduk usia 13-15 th				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	12,595	12.945	9.555	15.398	11.011	8.063	8.143	8.263	8.764	8.921
2	Kecamatan Denpasar Selatan	9,078	9.505	7.471	7.477	7.849	9.494	9.588	9.594	10.589	10.843
3	Kecamatan Denpasar Barat	6,506	6.472	4.487	5.097	5.190	9.463	9.557	9.600	10.329	10.444
4	Kecamatan Denpasar Timur	5,489	5.676	4.153	3.717	4.823	5.998	6.057	7.157	6.452	6.553
	Jumlah	22,447	33,668	34.598	25.671	28.873	25.602	33.018	33.345	34.614	36.840

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Rendahnya taraf pendidikan penduduk di suatu daerah, kemungkinan terjadi karena rendahnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain penilaian orangtua terhadap nilai pendidikan anak. Di lain pihak, rendahnya penilaian itu kemungkinan berkaitan dengan tipologi daerah dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.



Kalau dilihat berdasarkan data pokok pendidikan maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Denpasar cukup memadai. Kategori ini bisa dijelaskan dengan melihat kemajuan atau perkembangan indikator-indikator dasar seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, kelulusan, ruang kelas, guru dan fasilitas sekolah.

Secara umum baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA keadaan komponen-komponen tersebut relatif baik. Jumlah sekolah cukup banyak, siswa baru juga semakin meningkat, kelulusan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, kondisi kelas cukup baik, sebagian besar guru berpendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung pendidikan tersedia di seluruh tingkatan. Pendidikan merupakan usaha yang tidak hanya tergantung dari keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana namun lebih merupakan usaha sadar yang lebih banyak tergantung dari kemauan, kesungguhan dan usaha dari manusia sebagai faktor utama.

Tabel. 2.22.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015
Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kota Denpasar	SD/MI								
		Jumlah gedung sekolah					jumlah penduduk usia 7-12 th			
(1)	(2)	(3)					(4)			
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	56	55	54	54	57	18.218	18.253	19.605	19.955
2	Kecamatan Denpasar Selatan	63	64	63	63	66	23.375	23.975	25.812	26.432
3	Kecamatan Denpasar Barat	56	55	55	55	55	22.788	22.988	24.628	25.093
4	Kecamatan Denpasra Timur	51	53	53	53	52	13.908	14.025	14.805	15.035
	Jumlah	226	227	225	225	230	78.289	79.241	84.850	86.515

NO	Kota Denpasar	SMP/MTs								
		Jumlah gedung sekolah					jumlah penduduk usia 13-15 th			
(1)	(2)	(3)					(4)			
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	20	20	20	20	20	8.143	8.263	8.764	8.921
2	Kecamatan Denpasar Selatan	18	18	19	19	21	9.588	9.594	10.589	10.843
3	Kecamatan Denpasar Barat	12	12	12	12	13	9.557	9.600	10.329	10.444
4	Kecamatan Denpasra Timur	11	12	12	12	12	6.057	7.157	6.452	6.553
	Jumlah	61	62	63	63	66	33345	34.614	36.134	36.761

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Tabel. 2.23.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kecamatan	SD/MI									
		Jumlah Guru					Jumlah Murid				
		(3)					(4)				
(1)	(2)	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	759	803	2.060	978	1.066	21.767	21.472	21.257	22.260	23.483
2	Kecamatan Denpasar Selatan	822	819	1.252	1077	1.081	21.883	22.018	22.367	22.713	22.597
3	Kecamatan Denpasar Timur	991	1.025	1.870	928	892	17.890	17.922	18.328	18.180	17.062
4	Kecamatan Denpasar Barat	946	943	2.250	1.118	1.131	26.394	26.225	25.745	25.457	25.310
	Jumlah	3.518	3.590	7.432	4.101	4.170	87.934	87.637	87.697	88.610	88.452



NO	Kecamatan	SMP/MTs									
		Jumlah Guru					Jumlah Murid				
(1)	(2)	(3)					(4)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	822	837	752	775	809	12.945	12.595	15590	14.603	14.742
2	Kecamatan Denpasar Selatan	667	631	490	692	680	9.505	9.078	10239	10.706	10.996
3	Kecamatan Denpasar Timur	403	385	246	338	356	5.676	5.489	4825	6.454	6.540
4	Kecamatan Denpasar Barat	470	468	337	403	451	6.472	6.506	7028	7.233	7.390
	Jumlah	2.362	2.321	1.825	2.208	2.296	34.598	33.668	37682	38.996	39.668

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

1.2. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijazah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata rata Lama Sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 10,65 tahun 2010, menjadi 10,70 tahun 2011, tahun 2012 menjadi 10,94 tahun dan tahun 2013 menjadi 11,05

Selama tiga tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 mencapai 10,96 (lebih tinggi dari Provinsi Bali yang sebesar 8,11. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Hal ini juga didukung meningkatnya angka partisipasi pada semua kelompok usia sekolah, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang usianya pada tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2014.

1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 2.24.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2012 - 2015

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI				
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	74.347	76.625	76.679	77.492
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	78.289	79.241	84.850	86.515
1.3	APM SD/MI	94,96	96,70	90,47	89,57
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	24.626	25.560	31.689	28.873
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	33.345	34.614	36.134	36.840
2.3	APM SMP/MTs	73,85	73,84	87,69	78,37
3	SMA/MA/SMK				
3.1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	25.755	14.726	28.010	27.170
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	35.315	38.184	38.660	39.417
3.3	APM SMA/MA/SMK	72,93	38,57	72,45	68,93

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar.

Tabel. 2.25.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2012 - 2015

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI				
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	87.150	87.209	92.379	88.610
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	78.289	79.241	84.850	86.515
1.3	APK SD/MI	111,32	110,06	108,873	102,42
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	34.601	36.185	37.682	38.688
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	33345	34.614	36.134	36.840
2.3	APK SMP/MTs	103,77	104,54	104,28	105,02
3	SMA/MA/SMK				
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	36.635	38.014	39.962	39.714
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	35.315	38.184	38.660	39.417
3.3	APK SMA/MA/SMK	103,74	99,55	103,36	100,75

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar



B. URUSAN KESEHATAN

1. DINAS KESEHATAN

Pada urusan kesehatan, pemerintah Kota Denpasar memiliki target pembangunan yang mengarah pada pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), Morbiditas dan Gizi Buruk. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator, antara lain Indikator Indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Indikator Indonesia sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam : (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi (2) Indikator hasil yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas pelayanan minimal kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri atas 26 indikator pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik dalam segi pemberdayaan masyarakat, desentralisasi upaya kesehatan maupun lingkungan strategis termasuk globalisasi.



Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Akses terhadap sarana Kesehatan

a) Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1 : 1,3. Target kunjungan rawat jalan sebanyak 15 % dari kunjungan penduduk baru rawat jalan, kunjungan tersebut sudah mencapai 46 %.

Dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar, 2 Puskesmas sudah dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat inap yaitu Puskesmas I Denpasar Timur dengan 10 tempat tidur dan Puskesmas IV Denpasar Selatan dengan 10 tempat tidur.

Sejak tahun 2009 di Kota Denpasar sudah mengembangkan Puskesmas ISO (ISO 9001 : 2008) Sistem Manajemen Mutu Puskesmas. Sampai dengan tahun 2014. Kegiatan ISO di Puskesmas di Kota Denpasar sudah terlaksana pada 4 (empat) Puskesmas diantaranya :

- Puskesmas II Denpasar Selatan tahun 2009
- Puskesmas III Denpasar Selatan tahun 2011
- Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2013
- Puskesmas II Denpasar Barat tahun 2014

Puskesmas dengan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED) merupakan salah satu upaya pengembangan puskesmas. Upaya kesehatan poned dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar. Akses masyarakat yang semakin mudah terhadap pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan AKI dan AKB (kemenkes,2014). Di Kota Denpasar terdapat tiga puskesmas poned yaitu Puskesmas I Denpasar Timur, Puskesmas IV Denpasar Selatan dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Jumlah kunjungan rawat jalan selama tahun 2015 di puskesmas sekota Denpasar sebanyak 408.862 orang, sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 474.878 orang. Bila dilihat berdasarkan puskesmas, selama tahun 2015 Puskesmas dengan kunjungan tertinggi adalah Puskesmas I Denpasar timur (56.990),



Hal ini disebabkan karena Puskesmas I Denpasar Timur merupakan puskesmas rawat inap dan membuka pelayanan selama 24 jam.

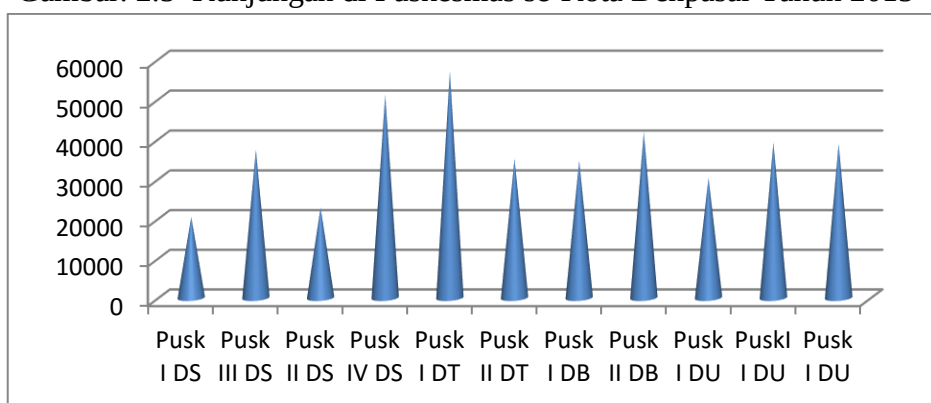
Tabel. 2.26.

Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

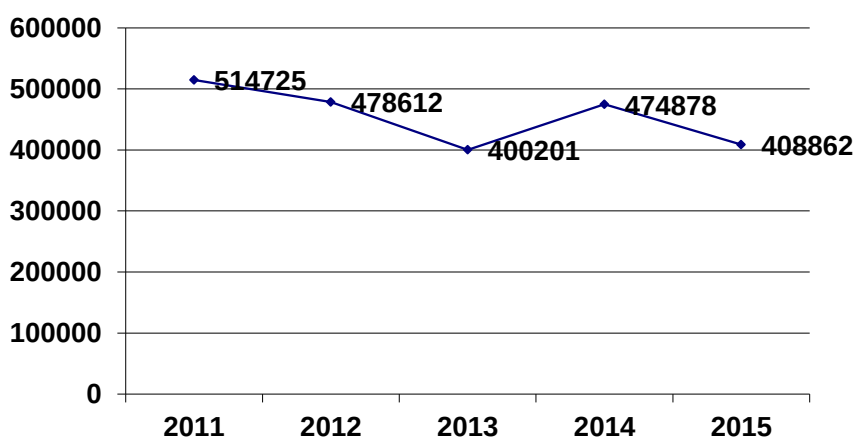
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pusk I Denpasar Selatan	35.918	35.999	30.468	28.051	20.425
Pusk II Denpasar Selatan	56.934	46.107	3.5880	38.528	37.407
Pusk III Denpasar Selatan	28.518	22.091	10.039	21.240	22.827
Pusk IV Denpasar Selatan	48.424	92.108	93.654	65.300	51.201
Pusk I Denpasar Timur	47.807	38.428	35.685	43.287	56.990
Pusk II Denpasar Timur	39.839	35.221	34.825	30.713	35.123
Pusk I Denpasar Barat	36.192	37.485	39.697	37.712	34.609
Pusk II Denpasar Barat	84.409	57.970	36.373	51.567	41.852
Pusk I Denpasar Utara	38.700	35.364	29.742	36.559	30.349
Pusk II Denpasar Utara	47.101	38.250	38.658	40.199	39.219
Pusk III Denpasar Utara	50.342	39.589	41.780	39.412	38.860

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar. 2.5 Kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2015



Gambar. 2.6 Tren kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015



b) Rumah sakit

Selain upaya promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kuratif dan rehabilitative dapat diperoleh di rumah sakit.

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Tabel. 2.27.

Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2015

No	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Kapasitas (TT x 365)	BOR (%)
1	RSUD Wangaya	200	73.000	79,44
2	RSUP Sanglah	765	279.225	90,22
3	RS Trijata/Bhayangkara	58	21.170	34,44
4	RS Udayana	120	43.800	56,63
5	RS Puri Raharja	102	37.330	69,31
6	RS Harapan Bunda	25	9.125	36,41
7	RS Puri Bunda	71	25.915	74,13
8	RS Dharma Yadnya	50	18.250	43,98
9	RS Surya Husadha	100	9.070	84,9
10	RS Prima Medika	114	8.181	81,1
11	RS Manuaba	45	2680	58,2
12	RS Kasih Ibu	92	33.580	56,61
13	RS Indera	10	261	13,5
14	RS Balimed	135	49.275	61,38
15	RS Bali Royal	102	37.230	78,93
16	RS Surya Husada Ubung	48	17.520	38,90
17	RS Bakti Rahayu	81	29.565	78,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 11 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat.



Tabel. 2.28.

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Puskesmas I Denpasar Utara	14.157	16.192	30.349			0			0
2	Puskesmas II Denpasar Utara	18.184	21.035	39.219			0			0
3	Puskesmas III Denpasar Utara	18.275	20.585	38.860			0			0
4	Puskesmas I Denpasar Timur	27.227	29.763	56.990	122	97	219			0
5	Puskesmas II Denpasar Timur	15.973	19.150	35.123			0			0
6	Puskesmas I Denpasar selatan	10.337	10.088	20.425			0			0
7	Puskesmas II Denpasar selatan	15.648	21.759	37.407			0			0
8	Puskesmas III Denpasar selatan	10.990	11.837	22.827			0			0
9	Puskesmas IV Denpasar selatan	23.416	27.785	51.201	116	563	679			0
10	Puskesmas I Denpasar Barat	16.504	18.105	34.609			0			0
11	Puskesmas II Denpasar Barat	17.468	24.384	41.852			0			0
				0			0			0
SUB JUMLAH I		188.179	220.683	408.862	238	660	898	0	0	0
II	RS PEMERINTAH			0			0			0
1	RSUD Wangaya	71.900	60.868	132.768	5.898	6.924	12.822	2	5	7
2	RS Tk. II Udayana	20.322	16.860	37.182	3.181	4.602	7.783	110	206	316
3	RS Polda Bali	1.470	1.087	2.557	681	872	1.553	91	42	133
4	RSUP Sanglah			323.482			57.969			2.889
5	RS Indera Prov. Bali			0			0			0
				0			0			0
III	RS SWASTA			0			0			0
1	RS Manuaba			0			0			0
2	RS Surya Husada			0			0			0
3	RS Puri Raharja	7.218	9.012	16.230	3.289	3.337	6.626	0	0	0
4	RS Darma Yadnya	16.244	12.139	28.383	1.385	1.000	2.385	0	0	0
5	RS Kasih Ibu Denpasar	53.043	68.688	121.731	2.639	3.255	5.894	0	0	0
6	RS Bhakti Rahayu	36.459	33.958	70.417	2.514	3.748	6.262	0	0	0
7	RSB Harapan Bunda	6.192	10.187	16.379	164	796	960			0
8	RS Prima Medika			0			0			0
10	RS Bali Med			69.239			10.034			0
11	RS Surya Husada Ubung	19.771	39.542	59.313	1.230	990	2.220	112	150	262
12	RS BROS	43.621	38.194	81.815	4.316	3.028	7.344	10	7	17
13	Rs Puri Bunda			40.886	1.096	3.739	4.835			0
				0			0			0



SUB JUMLAH II		276.240	290.535	1.000.382	26.393	32.291	126.687	325	410	3.624
JUMLAH (KAB/KOTA)		464.419	511.218	1.409.244	26.631	32.951	127.585	325	410	3.624
JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA		449.700	430.900	880.600	449.700	430.900	880.600			
CAKUPAN KUNJUNGAN (%)		103,3	118,6	160,0	5,9	7,6	14,5			

2. Sarana Kesehatan lainnya

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu, pos kesehatan desa /Poskesdes) dan desa siaga aktif.

Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Keberadaan posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita. Posyandu memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota Denpasar adalah 1 posyandu melayani 100 balita.

Tabel. 2.29.
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Posyandu	459	485	461	460
2.	Jumlah Balita	18.706	18.321	30.792	29.566

Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015

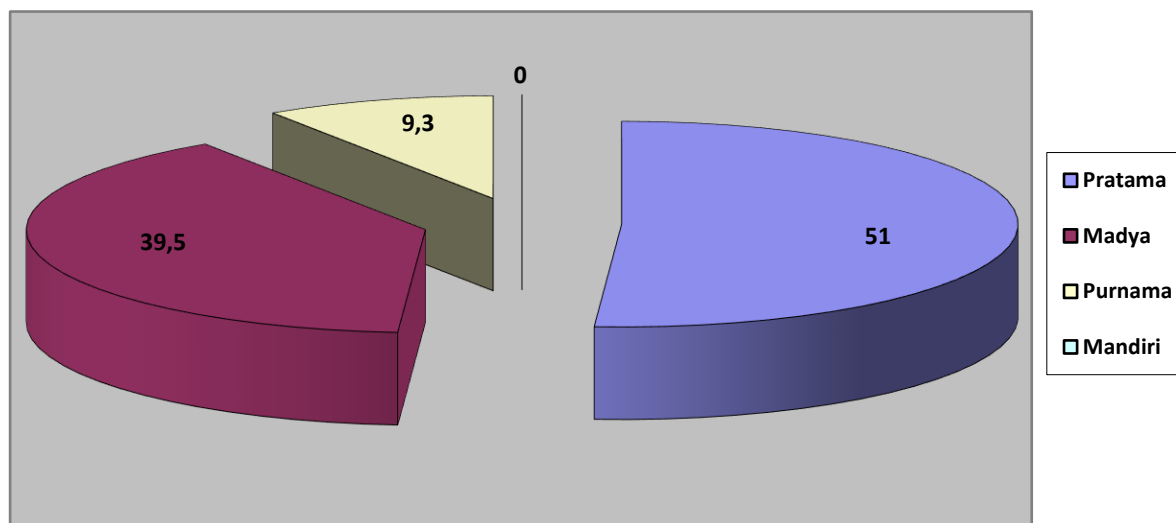
No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1.	Denpasar Selatan	108	8.843	12,2
2.	Denpasar Timur	103	5.426	18,9
3.	Denpasar Barat	132	7.280	18,1
4.	Denpasar Utara	117	8.017	14,5
	JUMLAH	460	29.566	15,5

Desa/kelurahan siaga aktif adalah Desa/kelurahan yang memiliki poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveylans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), Penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes RI, 2015).

Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar seluruhnya sudah merupakan desa siaga aktif. Lima puluh satu (51%) desa siaga tergolong pratama, 39,5% madya, 9,3 purnama dan belum ada desa siaga yang mandiri.



Gambar. 2.7
Persentase Desa Siaga Aktif Berdasarkan Strata
Di Kota Denpasar Tahun 2015



Tabel. 2.30.
Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2015

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Ijin Dokter umum praktek swasta	161
2	Ijin Dokter spesialis praktek swasta	195
3	Ijin Dokter gigi praktek swasta	95

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

3. Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain :

a) Angka Kematian Netto (*Net Death Rate/NDR*)

Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2015 :

- 1) RSUP Sanglah : 62,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 2) RSUD Wangaya : 26,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 3) RSUD Puri Raharja : 15,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 4) RS Kasih ibu denpasar : 9,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 5) RS Bros : 9,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

b) Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate/GDR*)

Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar



Angka GDR tertinggi di beberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada tahun 2015 adalah :

1) RSUP Sanglah	: 76,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
2) RSUD Wangaya	: 43,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
3) RSUD Puri Raharja	: 31,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
4) RS Kasih ibu Denpasar	: 19,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
5) RS Bros	: 14,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

c) Angka Penggunaan Tempat Tidur (*Bed Occupation Rate/BOR*)

BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada tahun 2015 adalah :

1) RSUP Sanglah	: 90,22 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
2) RSUD Wangaya	: 79,44 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
3) RS Bros	: 78,93 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
4) RSUD Bakti rahayu	: 78,78 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
5) RS Puri Bunda	: 74,13 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

d) Rata-rata Lama Dirawat (*Length Of Stay/LOS*)

Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2015 adalah 3 hari.

4. Indikator Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi , balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian (*mortality rate*) dalam suatu kelompok populasi dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakatnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya dapat diukur melalui tingkat kematian yang terjadi, antara lain melalui angka kematian bayi dan balita serta angka kematian ibu maternal.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berumur tepat satu tahun, sedangkan angka kematian balita menggambarkan kejadian kematian pada fase antara kelahiran sampai sebelum umur 5 tahun. Di Kota Denpasar angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2010-2013



mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 mencapai 3,90%, ditahun 2011 menurun menjadi 1,9% dan ditahun 2012 mencapai 0,71% , target MDGs Nasional untuk angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup adalah 32 per 1000 kelahiran hidup sedangkan target Provinsi Bali sebesar 30 per 1000 kelahiran hidup. Jadi target MDGs Nasional tercapai, dan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup juga mengalami penurunan dari 11,01 di tahun 2008 menjadi 10,81 ditahun 2009 dan tahun 2010 menjadi 3,8 dan di tahun 2011 menjadi 1,8 dan tahun 2012 menjadi 0,7. Angka ini sudah mencapai target MDGs Nasional yaitu 23, dan juga telah melampoi target Provinsi Bali (32). Selengkapnnya disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel. 2.31.
Perbandingan Angka Kematian Bayi Kota Denpasar
dan Provinsi Bali Tahun 2010- 2015

Tahun	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	
	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2010	3,80	12,30
2011	1,80	7,21
2012	0,70	5,09
2013	0,49	5,50
2014	0,50	6,00
2015	0,62	5,7

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali 2015.

AKB di Provinsi Bali dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun dan sudah lebih rendah dari angka kematian bayi secara nasional. Tapi tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 6,0 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dari tahun 2010 sampai tahun 2015 cenderung menurun. AKB di tahun 2010 mencapai 3,80 sedangkan di tahun 2015 mencapai 0,6 per 1.000 kelahiran bayi.

b) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu Angka kematian Ibu Maternal.



Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir.

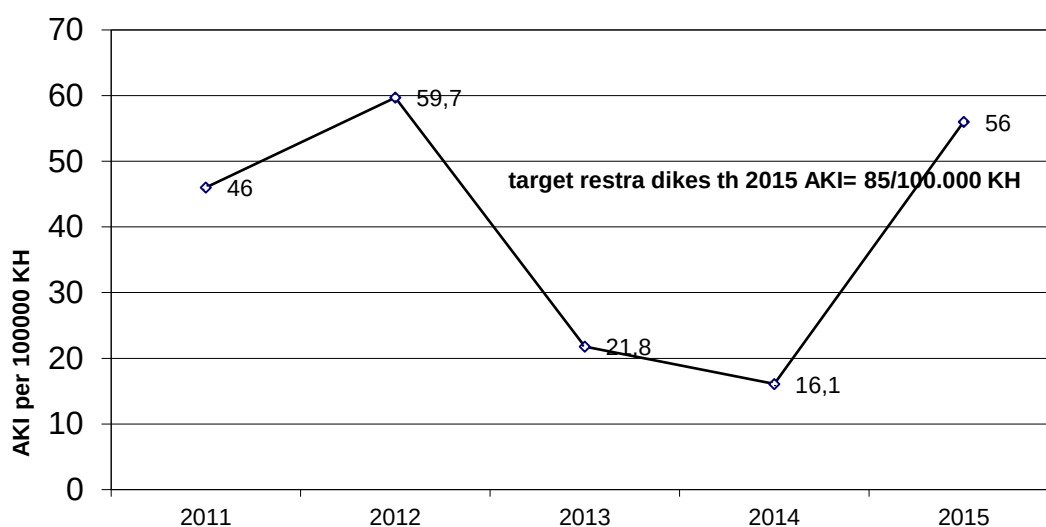
Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel. 2.32.
Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Denpasar
dan Provinsi Bali Tahun 2010 – 2015

Tahun	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2010	24,91	58,10
2011	46,03	84,25
2012	59,73	89,67
2013	21,76	72,1
2014	16,1	70,5
2015	56	83,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar. 2.8
Angka Kematian Ibu Maternal Di Kota Denpasar
Tahun 2011 s/d 2015



Pada grafik diatas terlihat Angka kematian ibu di Kota Denpasar berfluktuasi secara cukup signifikan, Sampai dengan tahun 2014 AKI sudah dapat ditekan sampai 16,1 per 100.000 KH namun meningkat kembali pada tahun 2015. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2015 (56 per 100.000 KH) masih lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2015 (85 per 100.000 KH). AKI di Kota Denpasar juga lebih rendah bila dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 KH, namun demikian untuk kedepannya perlu terus digalakkan upaya-upaya untuk menekan kematian ibu di Kota Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

Selama tahun 2015 di Kota Denpasar terjadi 9 kematian ibu yang terdiri dari 4 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu bersalin dan 3 orang ibu nifas. Delapan Ibu meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sedangkan 1 orang meninggal di perjalanan menuju RS. Enam kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri yaitu 3 orang karena kelainan jantung, 2 orang dengan pneumonia dan 1 orang tidak jelas diagnosisnya karena sudah meninggal diperjalanan. Tiga kematian ibu disebabkan oleh kelainan Obstertri yaitu 1 orang karena perdarahan, 1 orang karena eklamsi dan 1 orang karena infeksi.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.

5. Angka Kesakitan

a) HIV/AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

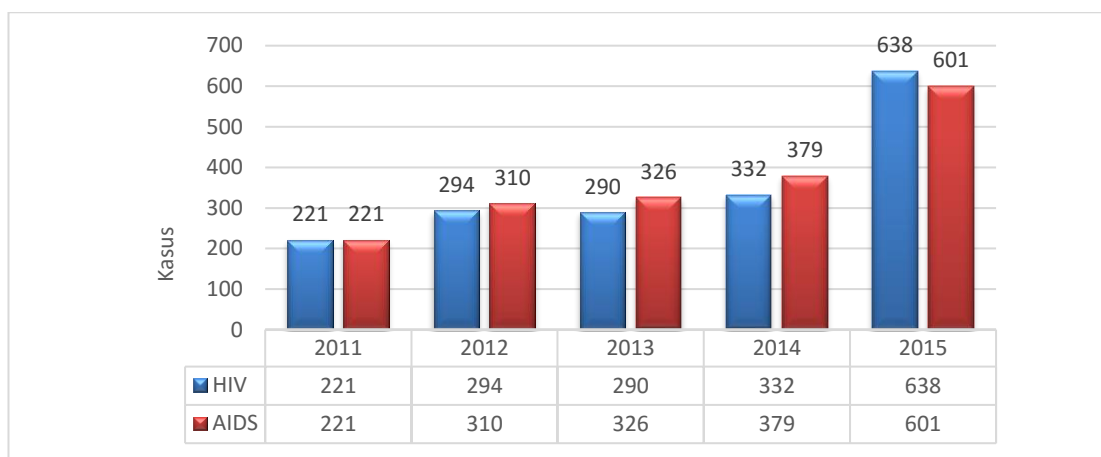
HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Gambar. 2.9
Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar
Tahun 2011 s/d 2015



Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 ditemukan 221 kasus HIV baru. Pada tahun 2012 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 294 orang (119 penderita laki-laki dan 175 perempuan) dan AIDS sebanyak 310 orang (208 penderita laki-laki dan 102 penderita perempuan). Sedangkan pada tahun 2013 dengan penambahan 1 puskesmas yang mampu melakukan VCT jumlah kasus HIV sedikit menurun menjadi 290 kasus (144 laki-laki dan 146 perempuan), sedangkan AIDS ditemukan 326 orang (228 laki-laki dan 98 perempuan). Sedangkan pada tahun 2014 ditemukan 332 penderita HIV positif (161 laki-laki dan 171 perempuan) dan AIDS ditemukan 379 orang (239 laki-laki dan 140 perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS (10 laki-laki dan 3 perempuan). Tahun 2015 terjadi 638 kasus HIV dan 601 kasus AIDS, dengan 10 kematian akibat AIDS.

Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV-AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heterosex (73,38%) kemudian disusul IDU (9,84%), Homo/Biseksual (11,63%), tidak diketahui (2,62%) dan perinatal (2,5%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2015 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.800 pendonor darah (2.947 laki-laki dan 853 perempuan). Dari jumlah tersebut sebanyak 15 sampel darah (0,39%) positif terinfeksi HIV-AIDS.

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.



b) Demam Berdarah Dangu (DBD)

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk *aedes aegypty*. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk *Aedes aegypti* tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya.

Jumlah kasus DBD pada tahun 2015 adalah 1.574 kasus, terdiri dari 869 penderita laki-laki dan 705 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun 2015 adalah sebesar 178,7 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD tahun 2014 adalah sebesar 211,7 per 100.000 penduduk maka terjadi penurunan IR DBD yang cukup bermakna. Kematian akibat DBD pada tahun 2015 sebanyak 14 orang (CFR=0,9%).

Tabel. 2.33.

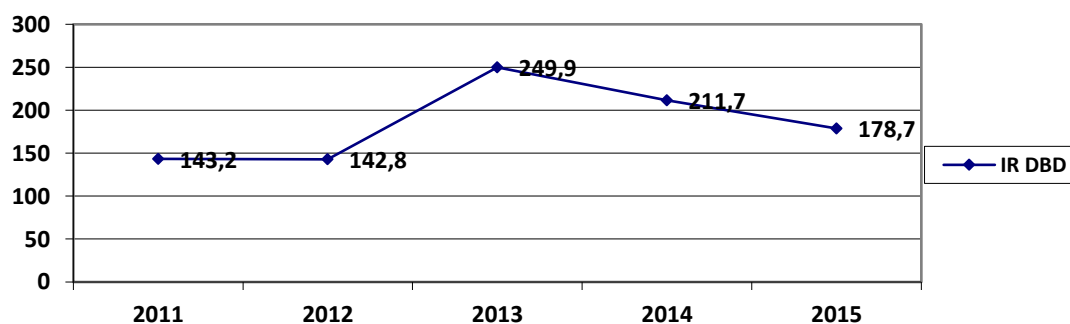
Demam berdarah dangu

No	Tahun	Demam berdarah dangu
1	2011	981
2	2012	1006
3	2013	1.765
4	2014	1.837
5	2015	1.574

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar. 2.10

Incidence Rate Penyakit Demam berdarah dangu Tahun 2011 s/d 2015



Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, menutup dan mengubur) plus menabur



larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah angka bebas jentik (ABJ).

6. Status Gizi

Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis (pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya). Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalensi bagi Indonesia sebesar >15% persen dan pencapaian Indonesia sebesar 0,48 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi.

Pada tahun 2015 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0,1 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs.

Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV AIDS dan lain sebagainya.

Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

Tabel. 2.34.

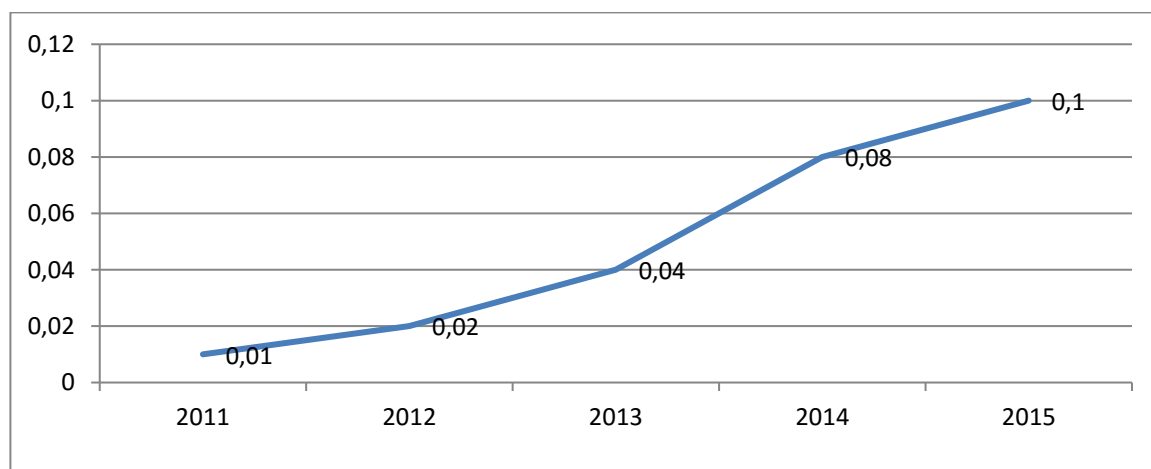
Gizi Buruk

No	Tahun	Gizi Buruk
1	2011	0,01%
2	2012	0,02% (4/18.888)
3	2013	8/18.321 (0.04)
4	2014	0,08%
5	2015	0,1%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar. 2.11

Prevalensi gizi buruk tahun 2011 s/d 2015



Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Mulai tahun 2014 diterapkan system Kesehatan nasional (JKN) dengan penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Tahun 2015 Data Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari: Penerima Bantuan Iuran (PBI)/APBN sebanyak 69.584 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 287.973 jiwa, Peserta Mandiri 115.744 Jiwa, bukan pekerja 26.380 jiwa dan jamkesda/JKBM 380.919 jiwa

Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.584 jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan sebagai pennerima bantuan iuran dengan dana dari APBN. Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

7. Umur Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH), sebagai salah satu indikator penting bidang kesehatan yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan, angka harapan hidup digolongkan mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk.

Usia harapan hidup di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012 yaitu pada tahun 2010 mencapai 73,24 dan pada tahun 2011 mencapai 73,34 tahun dan ditahun 2013 mencapai 73,56. Target RPJMD 2010-2015 adalah 73-75 tahun. Angka harapan hidup di tahun 2014 mencapai 73,71. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Upaya yang diperlukan adalah perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat dan pengobatan dengan cara medik secara langsung untuk memperpanjang usia hidup masyarakat. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel. 2.35.
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar
dan Provinsi Bali Tahun 2010 - 2014

Tahun	Angka Harapan Hidup	
	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2010	73,24	70,61
2011	73,34	70,78
2012	73,44	70,94
2013	73,56	71,11
2014	73,71	71,20

Sumber: BPS Provinsi Bali 2015



2. RUMAH SAKIT UMUM WANGAYA

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang sehari - hari melakukan kontak dengan pasien. Oleh karena itu sebuah rumah sakit harus mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pasien sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi - tingginya. Karena kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang, maka sarana pelayanan kesehatan adalah fasilitas yang wajib dimiliki setiap daerah. Jumlah penyedia jasa kesehatan disuatu daerah harus sebanding dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Melihat adanya kebutuhan ini, maka banyak penyedia pelayanan jasa kesehatan muncul. Mulai dari rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, puskesmas, bahkan berbagai jenis pengobatan tradisional (alternatif).

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang beralamat di Jalan Kartini No 133 Denpasar merupakan rumah sakit daerah milik Pemerintah Kota Denpasar. RSUD Wangaya berdiri sejak tahun 1921, dengan luas tanah 23,271 m², luas bangunan 12.063,372 m² dengan 200 tempat tidur. Mulai tahun 2003 menjadi rumah sakit swadana dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003. Sebagai satu - satunya rumah sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan, baik manajemen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001 RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan serta memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012 dengan lulus tingkat paripurna serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538/Menkes/SK/2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum (BLU). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK-BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan motifasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan utama, inovatif, unggul dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis budaya kerja. Hal ini di harapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasien.

Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan



pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat - alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Tabel. 2.36.

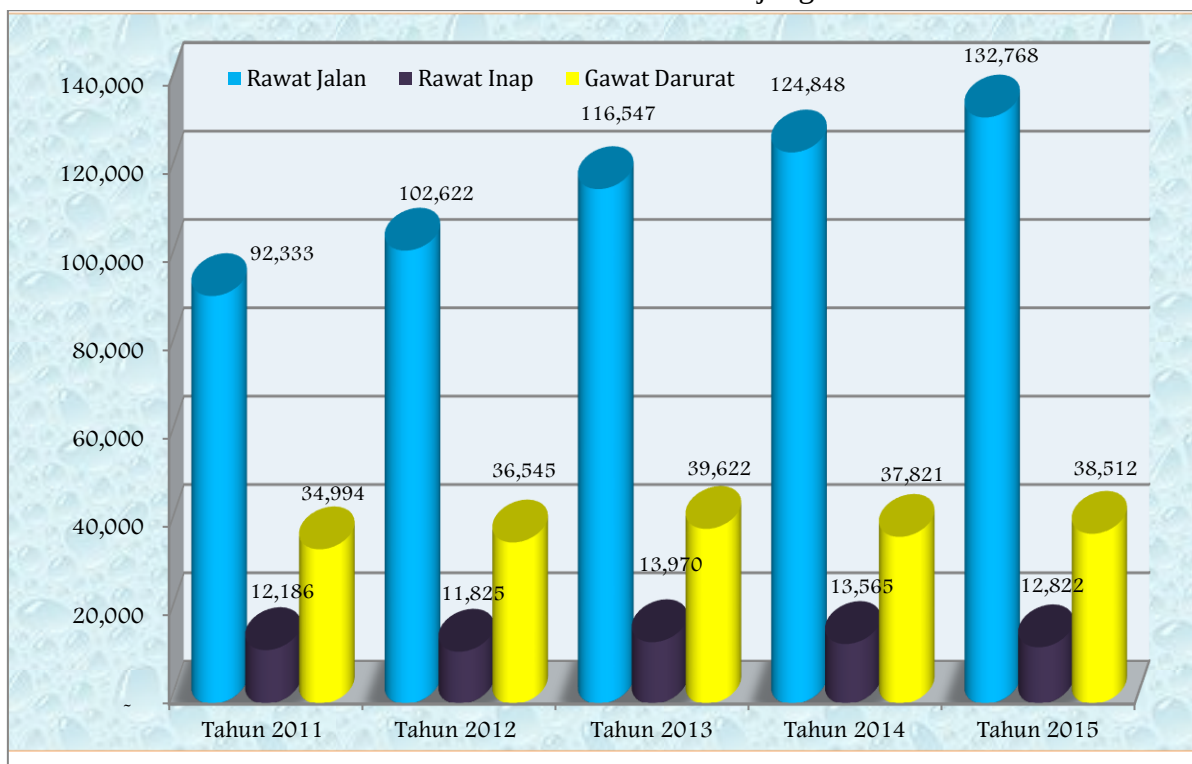
Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rawat Jalan	92.333	102.622	116.547	124.848	132.768
2.	Rawat Inap	12.186	11.825	13.970	13.565	12.822
3.	Gawat Darurat	34.994	36.545	39.622	37.821	38.512
4.	BOR	78,50 %	77,41 %	78,91 %	80,70 %	79,44 %

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Gambar. 2.12

Grafik Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien



Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Untuk pasien rawat inap pada Tahun 2015 mengalami penurunan karena adanya pengurangan tempat tidur dan sehubungan dengan adanya pembangunan gedung C serta pemanfaatan ruangan rawat inap untuk poliklinik.



Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar, adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
3. Terbatasnya dana/anggaran yang tersedia

Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah :

1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan
2. Mutu pelayanan
3. Tingkat efisiensi pelayanan

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2015

I. Peningkatan sarana dan prasarana

1. Pembangunan Gedung C Tahap II

Pembangunan Gedung C Tahap meliputi pembangunan di lantai II yang diperuntukkan untuk ICU, PICU, NICU dan ICCU dan di lantai III untuk Instalasi Bedah Sentral (OK)

2. Pembangunan RAMP Gedung C

Untuk melengkapi sarana keselamatan pasien pada gedung C, maka dibuat tangga tanggap darurat. Tangga ini berfungsi pada saat keadaan darurat seperti terjadi gempa, listrik mati dan lain sebagainya.

3. Penyusunan DED Gedung Blok B

Untuk perhitungan biaya dan pembuatan gambar gedung blok B yang terdiri dari : Basement, lantai I untuk poliklinik, lantai II, III dan IV untuk rawat inap kelas I dan VIP.

4. Renovasi WC Kamar Pasien Praja Amerta Lantai I,II dan III

Untuk melengkapi sarana dan prasarana serta kenyamanan pasien dilakukan renovasi WC kamar pasien praja amerta lantai I, II, III.

5. Pemasangan Tol Gate

Untuk mengatur masalah perparkiran di rumah sakit, maka parkir berbasis IT.

6. Pembuatan Ruang Jenasah

7. Renovasi Selasar

8. Pemasangan Instalasi Gas Medik

9. Pemasangan Paving Blok depan Gedung C

10. Pembuatan Ruang Kerja Ruang Jenasah

11. Pembuatan *reallling* balkon gedung C

II. Peningkatan mutu pelayanan

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 adalah 78,15 % Katagori baik ;
2. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap triwulan.

III. Prestasi RSUD Wangaya Tahun 2015 adalah :



1. Juara II Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Pemerintah Tingkat Provinsi Tahun 2015.
2. Juara III Lomba Pengelolaan Kearsipan Kategori Teladan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Denpasar dari tanggal 8 Januari 2015 s/d 11 Pebruari 2015 dalam rangka HUT KE-227 Kota Denpasar.

Sertifikat dari BPJS atas keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. DINAS PEKERJAAN UMUM

Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor - sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu minimalis terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1) Drainase dan Irigasi

Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang penampung utama air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai (tukad) yang mengalir di Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad yang ada dapat dipilah 3 (tiga) buah sungai yang benar – benar berfungsi sebagai sungai, yaitu : Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya sebagian berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa – rawa.

Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar adalah :

SISTEM	WILAYAH	PEMBUANG UTAMA	LUASAN DAS	PANJANG SUNGAI
Tukad Ayung	- Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Bangli	- Pantai Padanggalak	109.30 km ²	62.50 km
Tukad	- Kabupaten Badung	- Hutan Mangrove	22.55m ²	17,15km



Badung	- Kota Denpasar	Denpasar Selatan		
Tukad Mati	- Kabupaten Badung - Kota Denpasar	- Hutan Mangrove sebelah barat Tukad Badung	25.40 km ²	12,25 km

Sedangkan sungai – sungai yang berasal dari saluran irigasi dan drainase berubah menjadi sungai (tukad) antara lain :

- Sistem I (Sistem Tukad Badung) mengalir sekitar wilayah Sumerta Kaja, Sumerta, Tonja pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Oongan, Tukad Badung, Tukad Guming.
- Sistem II (Sistem Tukad Ayung) mengalir sekitar wilayah Penatih, Kesiman, Sebagian Sanur pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Abianbase, Tukad Ayung, Tukad Medih.
- Sistem III (Sistem Tukad Mati) mengalir sekitar wilayah Padangsembian, Ubung, Pemecutan, Wilayah Barat Tukad Badung, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Mati, Tukad Teba, Pangkung Muding.
- Sistem IV (Sistem Niti Mandala Suwung) mengalir sekitar wilayah Niti Mandala, Panjer, Sidakarya, Suwung, Sanur, Sesetan, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, Tukad Pekaseh.
- Sistem V (Sistem Pemogan) mengalir sekitar wilayah Sanglah, Pedungan, Pemogan pembuangan utama Saluran Juwet Sari, Saluran Pembuang Seksi I, II dan III.

Seperti telah diuraikan bahwa sungai-sungai tersebut diatas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai saluran drainase dari saluran irigasi, dan bahkan ada yang berfungsi sebagai sumber air baku, obyek wisata dan lain-lain.

Sampai saat ini, sistem drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya pemukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase dikiri-kanan jalan masih belum menyatu dalam sistem yang terpadu.

Tabel. 2.37.

Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2010 s/d 2015 Kota Denpasar

No	Jaringan irigasi	Panjang jaringan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jaringan primer	13.439 m	13.439 m	13.439 m	13.439 m	11.850 m
2	Jaringan sekunder	13.626 m	13.626 m	13.626 m	13.626 m	4.039 m
3	Jaringan tersier	93.656 m	93.656 m	93.656 m	79.607 m	38.412 m
4	Luas lahan budidaya	3.687 ha	3.687 ha	2.967,37 ha	2.509 ha	539 ha

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar



Tabel. 2.38.
SISTEM DRAINASE KOTA DENPASAR

SISTEM	WILAYAH	PEMBUANG UTAMA
SISTEM I (Sistem Tk.Badung)	- Sumerta Kaja - Sumerta - Tonja	- Tk.Oongan - Tk.Badung - Tk.Guming
SISTEM II (Sistem Tk.Ayung)	- Penatih - Kesiman - Sebagian Sanur	- Tk.Abianbase - Tk.Ayung - Tk.Medih
SISTEM III (Sistem Tk.Mati)	- Padangsambian - Ubung - Pemecutan - Wil.Barat Tk.Badung	- Tk.Mati - Tk.Teba - Pangkung Muding
SISTEM IV (Sistem Niti Mandala Suwung)	- Niti Mandala - Panjer - Sidakarya - Suwung - Sanur - Sesetan	- Tk.Rangda - Tk.Punggawa - Tk.Loloan - Tk.Pekaseh
SISTEM V (Sistem Pemogan)	- Sanglah - Pedungan - Pemogan	- Sal.Juwet Sari - Sal.Pembuang Seksi I, II dan III

PERMASALAHAN SISTEM DRAINASE DI KOTA DENPASAR

1. Meningkatnya limpasan permukaan akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian / kebun menjadi lahan non pertanian.
2. Sistem Saluran Drainase di Denpasar sebagian besar berkembang dari sistem saluran irigasi. Perbedaan sifat saluran drainase dan irigasi berpengaruh kepada penampang saluran drainase.
3. Penampang sungai / pembuang yang tidak mampu menampung debit sesuai dengan debit banjir rencana yang ada.
4. Kemiringan daerah pada beberapa titik sangat kecil sehingga menyulitkan pembuangan menuju pembuangan utama.
5. Pembuangan air dibagian selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga tidak setiap saat pembuangan pada bagian hilir dapat lancar dilakukan.
6. Adanya bangunan melintang sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai.
7. Berkembangnya kawasan permukiman baru sering tidak memperhatikan sistem drainase alami yang sudah ada.
8. Kapasitas saluran berkurang akibat dari sedimen dan sampah.
9. Alur saluran tidak jelas akibat gangguan alur yang sebelumnya pernah ada.
10. Kemiringan saluran yang kecil berakibat pada kecilnya kecepatan air yang mendorong peningkatan jumlah sedimen dan sampah yang mengurangi kapasitas saluran.



KONDISI EXISTING

1. Kondisi Drainase

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
I	Bidang Pengairan			
	1. Pembangunan Sal. Drainase / Gorong-gorong	8.830,65 m'	12.208,65 m'	138,25
	2. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.598,50 m'	7.598,50 m'	100
	3. Pengendalian Banjir	6 daerah titik genangan	6 daerah titik genangan	100
	4. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	32.203,00 m' 1 Lap	32.203,00 m' 1 Lap	100 100

Analisis & Kondisi genangan (Terlampir)

Tahun 2010 terdeteksi 26 titik rawan genangan dan banjir. Secara bertahap daerah - daerah rawan genangan dan banjir ini dituntaskan dengan jalan : Normalisasi alur sungai, perkuatan dinding, sodetan dan pengerukan sedimentasi. Pembangunan 4 jaring pengaman sampah automatic (Trash track) dan jaring manual. Secara bertahap daerah rawan genangan Kawasan Pura Demak, Kawasan sepanjang Tukad Teba, Kawasan Gunung Talang (Pangkung Muding), Kawasan Perum Monang Maning, Kawasan Renon Gang IX, Kawasan Jalan Tukad Pakerisan, Dewata dan Bedugul, Kawasan Jalan Waturenggong Panjer, Jalan Nagasari Laplap Penatih Dangin Puri, Warung Mina Peguyangan, Jalan Kenyeri, Lingkungan Jl.Batanghari, Lingkungan Kerta Dalem dan Lingkungan Kerta Bedulu, Lingkungan Jl. Pucuk Kesiman Kertalangu, Jalan Gunung Soputan, Lingkungan Jalan Subak Dalem, Lingkungan Jalan Pertulaka Penatih dapat diatasi.

Untuk meningkatkan jaringan irigasi dilakukan perbaikan terhadap bangunan air seperti bendung, bangunan pembagi perkutatan dan pengerukan saluran irigasi dari sedimentasi dan waledan.

Pengerjaan ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas PU Prov, dan Pemerintah Pusat melalui Balai SDA dan PLP.

Sampai dengan 2014 masih terdeteksi 12 daerah rawan banjir khususnya Kawasan Bumi Ayu Sanur, Pemogan Mitra 10, Jl. Danau Tempe, Jl. Teuku Umar, Jl. Gunung Payung, Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Gunung Atena, Perum Pondok Purnawira, Jl. Sulatri, Jl. Kembang Matahari, Jl. A. Yani Utara dan Simpang Gatsu – Gatsu I - Gatsu II.

Program 2016 akan menyasar perbaikan saluran drainase sepanjang 2.735,70 m, perbaikan saluran irigasi sepanjang 345 m dan pengendalian banjir di 3 lokasi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi genangan dan lancarnya saluran irigasi. Disamping itu pemeliharaan dan pembersihan saluran tetap dilaksanakan melalui program Kali Bersih dan Pengerukan Sedimentasi.



PEMECAHAN MASALAH

1. Pengaturan tata guna lahan secara selektif dan menjaga kawasan hijau terbuka secara konsisten
2. Penataan / normalisasi saluran yang sebelumnya berfungsi sebagai saluran irigasi namun kini berfungsi ganda sebagai saluran irigasi dan saluran drainase
3. Normalisasi pembuang utama agar kapasitasnya bisa menampung debit banjir rencana
4. Pembangunan kawasan penampung banjir sementara / retarding basin sebagai usaha mereduksi banjir di daerah hilir
5. Penataan bangunan yang melintang di pembuang utama yang berpotensi menghambat aliran air
6. Penataan kawasan pengembangan permukiman sehingga sistem drainase yang ada tidak mengganggu sistem drainase yang sudah ada
7. Pembersihan saluran drainase dari sedimen dan sampah secara berkala
8. Penataan alur saluran pada beberapa kawasan
9. Pembuatan sumur resapan pada masing – masing rumah untuk mengurangi / menekan besarnya limpasan permukaan.

2) Air Limbah dan Sanitasi

Sesuai data tahun 2012 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih ada yang dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar Barat sekitar 85 persen, Denpasar Utara 87 persen, Denpasar Timur sekitar 93 persen dan Denpasar Selatan sekitar 90 persen. Sedangkan sisanya masih menggunakan dan memanfaatkan sungai atau saluran umum untuk kegiatan bersama (BBAS = Buang Air Besar Sembarangan).

Limbah cair yang berasal dari rumah tangga (limbah domestic) masih dianggap tidak sebagai penyebab tercemarnya lingkungan padahal limbah domestik ternyata cukup potensial menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Denpasar. Hal ini diindikasikan dari tercemarnya sungai di Kota Denpasar (Tukad Badung dan Tukad Mati) dan sumur – sumur penduduk oleh minyak dan lemak.

Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kota Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP (Denpasar Sewerage Development Program). Melalui sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan, di Kota Denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas (Sanitasi Oleh Masyarakat).

Sanitasi merupakan gerakan pembangunan yang mengkoordinasikan pembangunan secara terintegrasi antara sektor air bersih, air limbah, sampah dan drainase. Sampai saat ini pembangunan sektor sanitasi masih bersifat sektoral dan belum adanya integrasi dan koordinasi sehingga terkesan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal sanitasi merupakan indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Denpasar sebagai sebuah kota metropolitan dihadapkan pada masalah sanitasi yang cukup pelik, oleh karenanya penanganan sanitasi kota perlu lebih diintensifkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satu program sanitasi yang diperkenalkan oleh pusat



adalah program ISSDP (Indonesia Sanitation Sector Development Program). Melalui program ini kondisi sanitasi kota dipetakan, kebijakan sanitasi dirumuskan, yang akhirnya strategi implementasi sanitasi kota disusun untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Sampai saat ini pemerintah Kota Denpasar sedang berproses dalam upaya implementasi strategi sanitasi kota, melalui keikutsertaan dalam program ISSDP 2.

Secara garis besar program Sanitasi di Kota Denpasar dilakukan melalui 2 (dua) sistem antara lain :

Sistem IPAL terpusat melalui program DSDP, kegiatan yang dilakukan dengan membangun Sambungan Rumah (SR) :

- a. Tahun 2011 sebesar : 230 SR
- b. Tahun 2012 sebesar : 701 SR
- c. Tahun 2013 sebesar : 700 SR
- d. Tahun 2014 sebesar : 609 SR

Sistem IPAL Komunal melalui program Sanimas, dengan menyasar kawasan Padat dan Komunal yang tidak terjangkau program DSDP, Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Tahun 2010

IPAL Komunal Rabic Pro di Desa Pemecutan Kaja dengan jumlah SR 81 buah

2. Tahun 2011

IPAL Komunal Pasar Desa : Tembau, Sidakarya, Tegal Harum, Panjer dan Anggabaya

3. Tahun 2012

IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (WASAP-D)

Tahap I : 3 buah IPAL dengan jumlah : 108 SR

Tahap II : 1 buah IPAL dengan jumlah : 28 SR

IPAL Komunal Pasar Desa : Ubung dan Binoh

IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 2 (dua) IPAL dengan jumlah : 107 SR

4. Tahun 2013

IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah 68 SR. IPAL Komunal Pasar Desa : Pemogan, Padangsambian, Penatih.

5. Tahun 2014

IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah 55 SR. IPAL Komunal Pasar Desa : Batan Kendal, Penatih Dangri, Tonja.

Untuk Tahun 2015 Program Sanitasi sedang membangun Saluran Utama (Primer dan Sekunder) dikawasan Pedungan dan Pemogan melalui Dana APBN dan mulai Tahun 2016 Pemkot memprogramkan Pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 478 unit dengan sumber dana DAK 2016. Sesuai dengan kesepakatan (MOU) terhadap Pembangunan / Penanganan Air Limbah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas membangun Sambungan Rumah mulai sumber buangan sampai dengan HI (House In Let).



3) Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pengelolaan Pembangunan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan difokuskan pada penataan jalan lingkungan, drainase lingkungan dan penataan lingkungan permukiman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layak huni yang sehat, bersih dan indah. Perkembangan jalan lingkungan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk, perkembangan tawaran yang memerlukan untuk tempat tinggal.

Tabel. 2.39.
Perkembangannya Jalan Lingkungan

JALAN LINGKUNGAN	2012	2013	2014	2015
Aspal	393.424	393.424	393.424	393.424
Paving	210.591	230.291	258.711	287.815
Tanah / Kapur	146.430	126.730	98.310	83.147
Beton	123.405	123.405	123.405	109.464

Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Jalan Lingkungan dengan perbaikan perkerasan, pemeliharaan dengan perbaikan terhadap Kawasan dengan Penataan secara terpadu dalam 1 kawasan mulai dari jalan dan saluran drainase sepanjang 1000 m'. Program 2016 difokuskan untuk meningkatkan jalan lingkungan sepanjang 8727 m', pemeliharaan jalan sepanjang 8804,5 m' yang tersebar diseluruh wilayah Kota Denpasar.

Untuk Pengembangan wilayah baru diprogramkan Peningkatan Jalan Lingkungan LC sepanjang 2.416 meter. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan diprogramkan Aspal Swadaya, hal ini untuk menggugah masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk berswadaya

URAIAN	2012	2013	2014	2015
JUMLAH ASPAL(DRUM)	1.222	1.440	1000	1500
KELOMPOK MASYARAKAT	41	44	30	31
PANJANG (KM)	15,386	18,208	14,095	30,149



Program 2016 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan Pengadaan Aspal untuk jalan Swadaya sebanyak 1.000 (seribu) drum dan paving sebanyak 22,557 m².
Data Penanganan Jalan di Kota Denpasar

Luas Wilayah Kota Denpasar : 127,78 Km² atau 12.778 Ha terdiri dari 4 Kecamatan, 16 Kelurahan, 27 Desa Jumlah Penduduk Kota Denpasar 863.600 Jiwa.

Perencanaan jalan di Kota Denpasar

Perencanaan jalan disesuaikan dengan status Kota Denpasar sebagai kota inti Metrosarbagita. Dengan fungsi : Kota pusat pemerintahan, Perdagangan jasa, Pendidikan dan pelayanan dasar.

Denpasar sebagai kota yang tumbuh dari Desa menjadi Kota dikembangkan dengan konsep :

Catur Patha sebagai pusat kawasan, pusat-pusat pengembangan, Jalan lingkaran (Ring Road Kota). Pembukaan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, Perencanaan sinergitas dengan pengembangan Kota Metro Sarbagita dan jaringan drainase, Kota berwawasan budaya.

Permasalahan :

Pertumbuhan ekonomi penduduk dan pusat-pusat kegiatan, Harga lahan yang tinggi. Pelebaran jalan terbentur tempat-tempat ibadah RT yang memerlukan biaya tinggi untuk pemindahannya.

Solusi :

Pengembangan jalan baru memakai sistem Land Consolidation (LC). Peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai fungsi, status, dan luas jalan. Program disesuaikan dengan kondisi dan perencanaan makro.

Data jaringan jalan di Kota Denpasar Tahun 2015

Total Panjang jalan di Kota Denpasar adalah 588,760 Km yang terdiri dari :

- Jalan Nasional sepanjang 46,570 Km
- Jalan Propinsi sepanjang 52,100 Km
- Jalan Kota sepanjang 486, 084 Km

Penanganan Jalan di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan status jalan :

Jalan dengan status Jalan Nasional ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui dana APBN. Jalan dengan status Jalan Propinsi ditangani Dinas PU Prop. Bali melalui dana APBD I. Jalan dengan status Jalan Kota untuk pembangunan dan pemeliharaan ditangani Pemda melalui APBD Kota Denpasar.

Berdasarkan jenis perkerasannya Jalan Kota Tahun 2015 sepanjang 486,084 Km terdiri dari : Aspal Beton sepanjang 283,864 Km, Lapis Penetrasi sepanjang 168,773 Km, Limestone/ tanah 30,750 Km, Paving Blok sepanjang 2,697 Km



Kondisi Jalan Kota di Kota Denpasar Tahun 2015 adalah :

Kondisi baik sepanjang 268,789 KM', Kondisi Sedang sepanjang 144,177 KM', Kondisi Rusak sepanjang 73,119 KM'

Kerusakan jalan di Kota Denpasar ditangani melalui beberapa tahapan :

- Pemeliharaan Rutin dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas .Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan dengan biaya relatif rendah dan cara memperbaikinya relatif mudah/ringan.
- Pemeliharaan Berkala (untuk penanganan jalan dengan kondisi ruas jalan rusak sedang dengan melakukan peremajaan bahan perkerasan maupun bahan lainnya serta melakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan)
- Peningkatan dan Pembangunan (untuk penanganan jalan yang kondisi rusak berat, dan perlu segera ditingkatkan kondisinya).

Pada tahun 2015 alokasi dana Bidang Bina Marga untuk penanganan jalan adalah sebesar 27,10 % dari alokasi Dana yang dikelola Dinas PU Kota Denpasar.

4) Sarana dan Prasarana Jalan

Permasalahan transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan kota terkonsentrasi pada koridor timur-selatan-barat dan koridor utara-timur belum tersedia aksesibilitas yang seimbang, ketidakseimbangan utara-timur dan utara-selatan mengakibatkan volume lalu lintas menjadi tinggi di kawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota.

Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan daerah antara khususnya melalui darat.

Tabel. 2.40.

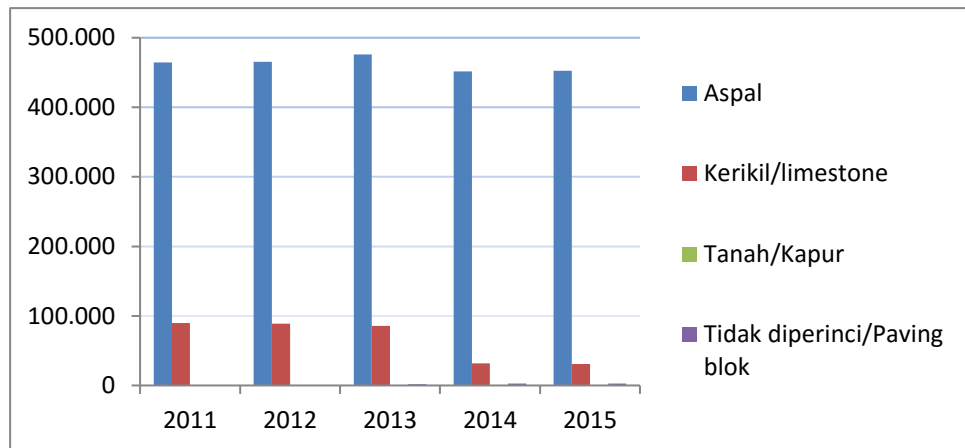
Panjang Jalan Kota Denpasar
Keadaan Tahun 2011 s/d 2015

Keadaan	Panjang Jalan (km)				
	2011	2012	2013	2014	2015
JENIS PERMUKAAN					
Aspal	464,400	465,239	475,828	451,676	452,637
Kerikil/limestone	89,740	88,901	85,607	31,711	30,750
Tanah/Kapur	-	-	-	-	-
Tidak diperinci/Paving blok	0,936	0,936	1,666	2,697	2,697
Jumlah	555,076	555,076	563,101	486,084	486,084

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar



Gambar. 2.13
Panjang Jalan Kota Denpasar
Keadaan Tahun 2011 s/d 2015

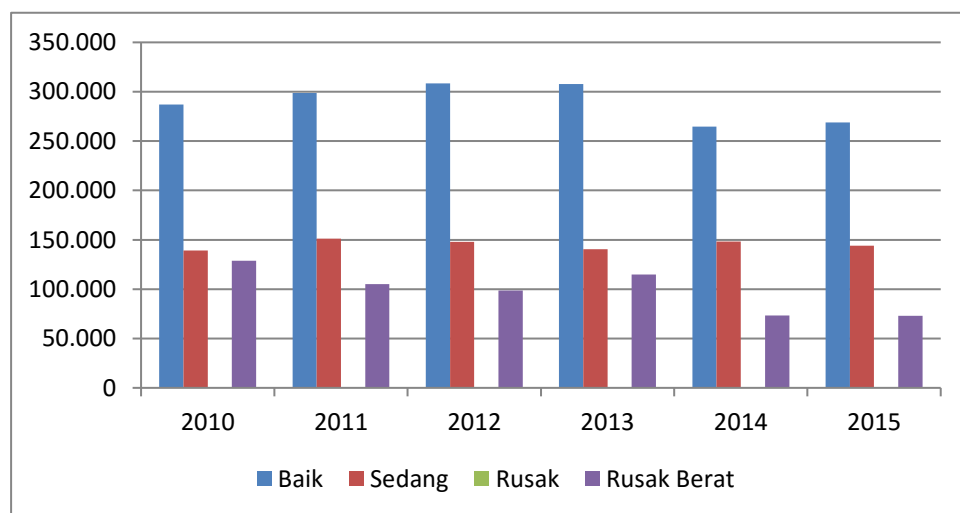


Tabel. 2.41.
Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2010 s/d 2015

Kondisi Jalan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Baik	286,977	298,562	308,587	307,693	264,672	268,789
Sedang	139,310	151,294	147,901	140,448	148,107	144,177
Rusak	-	-	-	-	-	-
Rusak Berat	128,789	105,220	98,588	114,960	73,306	73,119
Jumlah	555,076	555,076	555,076	563,101	486,084	486,084

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

Gambar. 2.14
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2010 s/d 2015



Tabel. 2.42.

Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2015

No	Status Jembatan	Satuan	Kondisi				
			Panjang	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Jembatan Negara	M'	549,70	549,70	-	-	-
2	Jembatan Provinsi	M'	230,20	230,20	-	-	-
3	Jembatan Kab/Kota	M'	1.089,84	1.000,10	4,70	85,04	-

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

Air Bersih

Pesatnya perkembangan penduduk dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar dan sekitarnya sehingga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun non domestik. Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yang memiliki keterbatasan terhadap fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya dari tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 2.21

Tabel. 2.43.

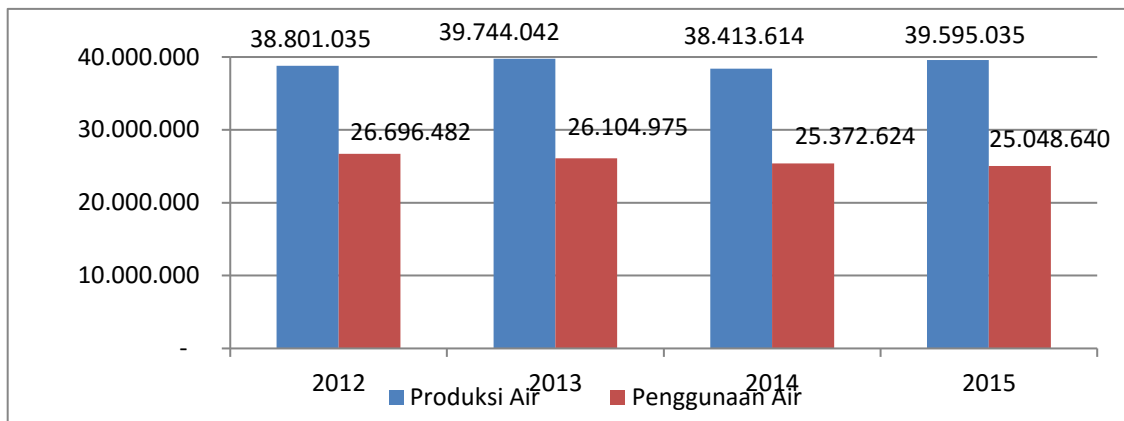
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya

No	Uraian	Tahun							
		2012		2013		2014		2015	
1	Jumlah Pelanggan	71.664 sambungan		73.572 sambungan		77.052 sambungan		80.356 sambungan	
2	Produksi Air	38.801.035 m ³	1.247,46 l/dt	39.744.042 m ³	1.277,78 l/dt	38.413.614 m ³	1.235,00 l/dt	39.595.035	1.272 lt/dt
3	Penggunaan Air	26.696.482 m ³	858,30 l/dt	26.104.975 m ³	839,28 l/dt	25.372.624 m ³	816,00 l/dt	25.048.640	805 lt/dt
	-Domestik	24.299.251 m ³	-	23.836.720 m ³	-	23.552.653 m ³	-	22.901.245	736 lt/dt
	-Non Domestik	2.397.231 m ³	-	2.268.255 m ³	-	129.887 m ³	-	2.147.395	69 lt/dt

Sumber : PDAM Kota Denpasar



Gambar. 2.15
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya



Kendala yang dihadapi selama ini adalah :

1. Keterbatasan sumber air baku, pelayanan tidak optimal
2. Cakupan pelayanan masih rendah, target MDG tidak tercapai
3. Daftar tunggu masih banyak
4. Potensi penurunan pendapatan, masyarakat masih banyak memanfaatkan air bawah tanah yang berdampak pada lingkungan
5. Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan di atas 20%
6. Suplai dari pembelian air melalui kerjasama regional SARBAGITA (IPA PETANU DAN IPA PENET) belum optimal

2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip dasar manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Bencana yang terjadi selama ini datangnya tidak dapat kita prediksi sehingga memerlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila terjadi dengan berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu personil/petugas maupun sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, sesuai dengan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Amanat dari undang-undang tersebut diatas, pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dengan tanggungjawab dan kewenangannya antara lain mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan dari dampak bencana, menetapkan kebijakan dan merumuskan



kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.

Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Jumlah penduduk yang padat dalam dimensi positif dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pembangunan, disisi lain dapat menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri. Bencana dapat timbul dimana saja kapan saja dan dapat menimpa siapa saja, sebagaimana diketahui bencana itu bersumber dari alam, manusia atau kombinasi keduanya dan bencana dapat juga timbul sebagai dampak social. Bencana yang selama ini sering kalau diklasifikasikan berdasarkan data antara lain : kebakaran gedung dan pemukiman, banjir sebagai akibat curah hujan yang tinggi, angin putting beliung yang berdampak pada pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi dan bencana social lainnya.

Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tercatat bencana alam dan non bencana alam beserta kerugiannya sebagai berikut : 164 kejadian di tahun 2011 dengan kerugian Rp.24.017.311.000,- sebanyak 216 kejadian tahun 2012 dengan kerugian Rp. 16.151.436.000,- dan 156 kejadian tahun 2013 dengan total kerugian Rp. 11.541.500.000,- sebanyak 168 kejadian tahun 2014 dengan total kerugian Rp. 24.253.417.000,- dan 164 kejadian tahun 2015 dengan total kerugian Rp. 5.508.435.500,-

Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bencana
2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana
3. Belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana di tingkat instansi terkait, Kecamatan maupun desa/kelurahan
4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana
5. Masih dominannya peranan pemerintah dalam penanganan darurat bencana

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

1. Melaksanakan program kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana
3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari tingkat instansi terkait, tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan
4. Merumuskan program-program pembangunan melalui kegiatan pencegahan pengurangan resiko bencana
5. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui program kegiatan pelatihan, sosialisasi penanggulangan bencana.



3. DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN

Dinas Tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar merupakan dinas daerah yang melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang penataan ruang dan perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangun-bangunan. Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman di Kota Denpasar meliputi luasan 5.904 ha atau 46,21.% dari luas wilayah Kota Denpasar. Dari 43 wilayah Desa/Kelurahan, permukiman semuanya berawal dari kelompok-kelompok perumahan tradisional. Pada kawasan pusat Kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukiman kelihatan lebih padat, namun di beberapa tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan permukiman yang agak rendah terlihat pada kawasan-kawasan yang masih memiliki persawahan yaitu : pada koridor kawasan Peguyangan Kaja – Penatih, Kawasan Kesiman Kertalangu dan Petilan, Kawasan Renon – Sanur Kauh, Kawasan Pemogan – Pedungan, dan Kawasan Pemecutan Kelod, dan sekitar Padang Sambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi.

Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga bervariasi yaitu:

- a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah ke besar, Kawasan LC, atau permukiman tradisional yang masih asli)
- b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah, dan permukiman tradisional kapling kecil)
- c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling kecil, dan permukiman tradisional kapling kecil)
- d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman kumuh).
- e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang perumahan seperti warung sampai minimarket, sekolah dasar maupun jasa-sasa penunjang lainnya.

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota, tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan permukiman kumuh. Permasalahan perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) atau Peraturan Zonasi (PZ) Kota Denpasar diprioritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi-fungsi bangunan yang diwadahnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan pola ruang dan struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi,



pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia.

Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

1. Pemanfaatan Ruang Daratan

Tabel. 2.44.

Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar Tahun 2015

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				DENPASAR (Ha)	% LUAS
		Dps Utara	Dps Timur	Dps Barat	Dps Selatan		
I	KAWASAN LINDUNG						
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588.99	588.99	4.61
2	Sempadan Pantai	-	16.00	-	152.50	168.50	1.32
3	Sempadan Sungai	46.11	64.21	45.87	52.34	208.53	1.63
4	RTHK Hutan Kota	2.47	9.51	7.13	25.96	45.08	0.35
	SUB TOTAL I	48.57	89.72	53.00	819.79	1,011.09	7.91
II	KAWASAN BUDIDAYA						
1	Permukiman	1,872.10	850.19	1,456.12	1,726.29	5,904.69	46.21
2	Perdagangan dan Jasa	355.68	208.90	525.86	615.88	1,706.32	13.35
3	Perkantoran Pemerintahan	40.85	92.02	19.38	17.82	170.07	1.33
4	Kawasan Efektif Pariwisata	-	47.16	-	683.70	730.86	5.72
5	Perindustrian dan Pergudangan	-	-	-	32.50	32.50	0.25
6	Fasilitas Pendidikan	18.28	20.26	15.42	23.61	77.57	0.61
7	Fasilitas Kesehatan	8.03	3.30	28.30	10.20	49.83	0.39
8	Pertahanan dan Keamanan	2.65	7.30	4.70	29.82	44.47	0.35
9	Fasilitas Peribadatan	11.10	17.90	9.90	12.19	51.09	0.40
10	Fas.Rekreasi dan Olah Raga	54.05	66.45	40.26	112.71	273.47	2.14
11	Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)	473.72	610.28	24.28	455.24	1,563.52	12.24
12	Kuburan dan Setra	3.80	6.40	11.00	14.20	35.40	0.28
13	TPA Suwung	-	-	-	10.00	10.00	0.08
14	IPAL Suwung	-	-	-	19.57	19.57	0.15
15	Estuary Dam	-	-	-	33.03	33.03	0.26
16	Jaringan Jalan	218.61	234.12	222.26	328.87	1,003.86	7.86
17	Pelabuhan	-	-	-	52.00	52.00	0.41
18	Terminal	4.55	-	2.52	1.58	8.66	0.07
	SUB TOTAL II	3,063.42	2,164.28	2,360.00	4,179.21	11,766.91	92.09
III	TOTAL I + II	3,112.00	2,254.00	2,413.00	4,999.00	12,778.00	100.00
IV	RUANG TERBUKA (%)	6.29	7.88	2.77	14.30	31.23	
V	RUANG TERBANGUN (%)	93.71	92.12	97.23	85.70	68.77	

Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota yang tidak sama, merupakan suatu ancaman sebab perkembangan fisik di daerah hinterland tersebut



sering tidak sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Ancaman lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat dengan sumber daya lahan yang terbatas, yang sudah barang tentu memerlukan ruang untuk bermukim. Hal ini mendorong timbulnya kawasan pemukiman padat dan juga percepatan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi penggunaan lahan di Kota Denpasar.

Tabel. 2.45.
Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private
Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				DENPASAR (Ha)	% LUAS
		Den-Ut	Den-Tim	Den-Bar	Den-Sel		
I	RTHK PUBLIK						
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61
2	Sempadan Pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK Hutan Kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
5	Fas. rekreasi dan Olah Raga (90%)	48,65	59,81	36,23	101,44	246,12	1,93
6	Kuburan dan Setra	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
7	RTHK Pertanian (sawah Ekowisata)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
8	Perkantoran Pemerintahan (20%)	8,17	18,40	3,88	3,56	34,01	0,27
9	Fasilitas Pendidikan (10%)	1,83	2,03	1,54	2,36	7,76	0,06
10	Fasilitas Kesehatan (10%)	0,80	0,33	2,83	1,02	4,98	0,04
11	Fasilitas Peribadatan (20%)	2,22	3,58	1,98	2,44	10,22	0,08
12	Estuary Dam (10%)	-	-	-	3,30	3,30	0,03
13	Jaringan Jalan (20%)	43,72	46,82	44,45	65,77	200,77	1,57
14	Pelabuhan (10%)	-	-	-	5,20	5,20	0,04
15	Terminal (10%)	0,45	-	0,25	0,16	0,87	0,01
	TOTAL RTHK PUBLIK	395,08	532,23	167,31	1.246,87	2.341,48	18,32
II	RTHK PRIVATE						
1	RTHK Pertanian (sawah murni)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
2	Pemukiman (20%)	374,42	170,04	291,22	345,26	1.180,94	9,24
3	Perdagangan dan Jasa (10%)	35,57	20,89	52,59	61,59	170,63	1,34
4	Kawasan Efektif Pariwisata (10%)	-	9,43	-	136,74	146,17	1,14
5	Perindustrian dan Pergudangan (10%)	-	-	-	3,25	3,25	0,03
6	Pertahanan dan Keamanan (20%)	0,53	1,46	0,94	5,96	8,89	0,07
7	TPA Suwung (10%)	-	-	-	1,00	1,00	0,01
8	IPAL Suwung (10%)	-	-	-	1,96	1,96	0,02
	TOTAL RTHK PRIVATE	647,38	506,96	356,89	783,38	2.294,60	17,96
III	TOTAL RTHK	1.042,45	1.039,19	524,20	2.030,25	4.636,09	
IV	LUAS WILAYAH (HA)	3.112,00	2.254,00	2.413,00	4.999,00	12.778,00	
V	% RTHK	33,50	46,10	21,72	40,61	36,28	



2. Pemanfaatan Ruang Kelautan

Secara umum ruang lautan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi, aktivitas pariwisata, sektor perikanan dan penggunaan lainnya seperti habitat/konservasi flora dan fauna, pertahanan dan keamanan serta penelitian.

Penggunaan ruang lautan Kota Denpasar untuk kepentingan transportasi dibedakan atas prasarana pelabuhan dan penggunaan bagi jalur-jalur lintasan perhubungan laut, baik jalur angkutan laut tradisional maupun jalur angkutan kapal laut. Kota Denpasar memiliki satu prasarana pelabuhan laut yang beroperasi secara aktif dan permanen, yaitu Pelabuhan Benoa. Sedangkan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, sementara ini masyarakat pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut memanfaatkan Pantai Sanur sebagai dermaga yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil.

Pesatnya pembangunan dan berbagai aktifitas di sepanjang pesisir dan lautan telah menimbulkan berbagai tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan menjadi isu masalah lingkungan yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar antara lain kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan kerusakan fisik pantai oleh abrasi.

Hutan mangrove yang sebagian besar terletak di kawasan Pulau Serangan, Teluk Benoa dan Sekitarnya mengalami kerusakan akibat reklamasi Pulau Serangan. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengendapan pasir/ lumpur yang tinggi dengan adanya perubahan pola aliran air seperti di sebelah barat jalan Pelabuhan Benoa dan muara Tukad Tegeh.

3. Pemanfaatan Ruang Udara

Pemanfaatan ruang udara saat ini di Kota Denpasar antara lain untuk: penerbangan, layang-layang, para sailing, cerobong asap industri, tower dan frekwensi komunikasi, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk jaringan listrik, dan ruang untuk bangunan tinggi. Untuk manuver pengudaraan dan pendaratan penerbangan daerah bagian selatan Kota Denpasar terkena batas ketinggian bangunan dan ketinggian aktivitas lainnya sesuai dengan sudut pendaratan dan pengudaraan. Tower komunikasi baik untuk hubungan telepon, televisi cenderung bertambah semarak sehingga menimbulkan “kekumuhan” ruang udara, oleh karena itu perlu dibatasi jumlah dan lokasi pembangunannya dikendalikan supaya tidak membahayakan jiwa dan barang.

Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang udara di wilayah Kota yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara berupa pengaturan ruang udara untuk kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di wilayah kota sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara diantaranya :

- 1) Struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan untuk mengikuti aturan yang berlaku.
- 2) Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter.
- 3) Lokasi bangunan menara telekomunikasi dan atau pemancar radio televisi dan antena harus dibangun pada kawasan budi daya memberi rasa aman dan keselamatan lingkungan.



- 4) Pembuangan hasil proses kegiatan ke ruang udara harus dijamin tidak menimbulkan pencemaran udara
- 5) Pengaturan kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan, serta jalur penerbangan helikopter wisata lainnya.

4. Perumahan dan Fasilitas Umum

Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang berdampak akan kebutuhan perumahan penduduk beserta infrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat pula. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada. Disamping hal tersebut diatas persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat .

Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Berdasarkan hasil survey pendapatan perumahan kumuh yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar pada TA 2011, diperoleh data keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar di 4 Kecamatan sebanyak 70 titik kumuh. Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program perbaikan/pemertan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan APBD kota ataupun diusulkan kepada APBD Propinsi dan APBN setiap tahun agar dapat dituntaskan segera.

Untuk rumah tidak layak bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar mulai tahun 2011 sudah melakukan / memberikan bantuan perbaikan RTM dengan rincian sebagai berikut:

1. TA 2011 induk jumlah bantuan RTM	= 80 unit
2. TA 2011 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 26 unit
3. TA 2012 Induk jumlah bantuan RTM	= 28 unit
4. TA 2012 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 28 unit
5. TA 2013 Induk jumlah bantuan RTM	= 80 unit
6. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 27 unit
7. TA 2014 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 39 unit
8. TA 2015 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 83 unit

Bantuan perbaikan rumah RTM tetap diusulkan dapat berlanjut sampai tuntas, fasilitas umum perumahan sejak Tahun 2008 penyelenggaraanya di koordinir oleh Dinas Perijinan Fasilitas umum dikelola bersama fasilitas sosial sekarang dinamakan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Dinas Tata Ruang dan perumahan, Kota Denpasar turut dalam unsur dalam Tim PSU tersebut.

Peruntukan PSU antara lainnya untuk jalan beserta utilitasnya, taman, tempat bermain, Balai Banjar dan Pos jaga. Diharapkan pengarahannya dan pemanfaatan fasilitas umum perumahan dapat diselenggarakan secara optimal sesuai peruntukannya pada masing-masing



kawasan sehingga manfaat PSU tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat terutama warga di kawasan tersebut.

D. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kehidupan pariwisata Kota Denpasar di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan Denpasar sebagai daerah yang terbuka dari berbagai interaksi, baik individu, kelompok, budaya kepentingan dan berbagai organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosbud serta keamanan dan ketertiban. Kondisi diatas menjadi tingkat heterogenitas yang pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan dapat menjadi potensi pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan terarah akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah kepada konflik sosial di masyarakat.

Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan yang bersih (*good governance*), berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan persyaratan terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan KesbangPol yang perlu mendapat prioritas adalah :

- a) Peningkatan jumlah aparatur pelaksana tugas deteksi dini menyangkut ketertiban dan ketenteraman di wilayah Kota Denpasar
- b) Sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas operasional untuk operasi deteksi dini
- c) Pembinaan dan pengawasan lebih lanjut organisasi politik, organisasi masyarakat/LSM, dan organisasi lainnya untuk tetap teguh dalam kerangka NKRI dan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kemasyarakatan, tokoh masyarakat, generasi muda untuk tetap memahami nilai-nilai kebangsaan

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketenteraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah.

Sedangkan di bidang penanganan konflik, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar merupakan tugas dari Badan KesbangPol Kota Denpasar sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, tentram dan damai untuk menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.



2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak Kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan Pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator prosentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat umum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator prosentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Jumlah pelanggaran dan penindakan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada tahun 2011 terdapat 1744 obyek pelanggaran, pada tahun 2012 berjumlah 2394 obyek pelanggaran, meningkat 650 kasus dari tahun 2011, pelanggaran ketentraman dan ketertiban tahun 2012 berjumlah 2394 obyek pelanggaran, pelanggaran ketentraman dan ketertiban pada tahun 2013 berjumlah 2552 kasus, meningkat 158 kasus dari tahun 2012, pelanggaran ketentraman dan ketertiban tahun 2013 berjumlah 2552 obyek pelanggaran, pelanggaran ketentraman dan ketertiban pada tahun 2014 berjumlah 2903 kasus, meningkat 351 kasus dari tahun 2013, dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban pada tahun 2015 berjumlah 3628 kasus, meningkat 725 kasus dari tahun 2014.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat anatar lain:

1. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi di segala bidang;
2. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan disegala bidang;
3. Pengendalian keamanan lingkungan kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat dibidang penanganan strategis;
4. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di bidang linmas;
5. Publikasi peraturan perundang-undangan;
6. Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah yang diwujudkan dalam evaluasi produk hukum;

Fasilitasi sosial peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui sosialisasi produk hukum.

Kondisi ketertiban dan kewananan selalu merupakan hal penting yang harus tetap dijaga di setiap daerah untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih timbulnya dampak dari pemilihan langsung kepala daerah maupun situasi kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini diberbagai daerah.



Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Denpasar.

Upaya untuk menjaga ketertiban dan kemandirian di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata.

Sebagai ibu Kota Provinsi Bali yang merupakan daerah tujuan wisata, keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan perlu dijaga oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta masyarakat. Beberapa masalah terkait dengan menciptakan keamanan Kota Denpasar adalah:

1. Meningkatnya jumlah pendatang dengan pekerjaan informal yang memungkinkan timbulnya banyak permasalahan dibidang keamanan dan kemandirian umum.
2. Adanya peluang munculnya konflik- konflik yang dipicu masalah adat, budaya, dan agama.
3. Meningkatnya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat

E. URUSAN SOSIAL

1. DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel. 2.46.

Kegiatan Penyandang Kesejahteraan Sosial

DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT:						
NO	KEGIATAN	2011	2012	2013	2014	2015
PMKS						
1	Peringatan HAN, HALUN	400	330	330	- 450 - 500	-450 -500
2	Penyandang cacat yang mendapat pelayanan dan bantuan sosial	904 org	294 org	96 org	591 org	173 orang
3	Penyandang cacat yang diberikan pelatihan	30 org	40 org	4 org	52 org	20 orang
4	Gepeng yang dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya	216 org	160 org	201 org	97 org	117 orang
5	Keluarga miskin yang memperoleh bimbingan dan	40 kk	40 kk	30 kk	50 KK	40 KK



	binaan sosial melalui KUBE					
6	Masyarakat yang memperoleh bimbingan penanggulangan bencana	30 org	40 org	40 org	125 org	200 orang
7	Korban bencana yang mendapat bantuan sosial	320 kk	330 kk	360 kk	433 KK	3 orang
8	Jumlah anak nakal yang mendapat bimbingan sosial pelatihan keterampilan & tirtayatra	10 org	7 org	5 org	50 org	-
PSKS						
1	PSM yang dibina	5	5	5	5	5
2	PSM yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)	5	5	5	5	5
3	Organisasi sosial yang mendapat bantuan (PWS, PWRI, LVRI, KKKS)	4	4	4	4	4
4	Karang taruna yang dibina dalam rangka lomba & yang diberikan motivasi	5	5	5	9	9
5	Karang taruna yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)	5	5	5	5	5
6	Panti yang dibina	15	15	15	15	16

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Tabel. 2.47.

Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2011 s.d. 2015

NO	Uraian	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pekerja	439.150	418.839	438.687	461.135	468.515
2.	Jumlah Pencari Kerja	4.850	5.405	3.301	1.846	1.386
3.	Jumlah Angkatan Kerja	455.990	429.184	450.579	472.103	472.103
4.	Prosentase Pekerja dengan Penduduk	69.75	61.60	61.92	53.40	53.20

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar



Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha/ lapangan kerja.

Pembangunan dan pengembangan sektor tenaga kerja antara lain mempunyai tujuan untuk terciptanya pembinaan dan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja, perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja, menciptakan ketenagakerjaan berusaha melalui pembinaan dan pembentukan sarana dan Hubungan Industrial serta Pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha dalam mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Tabel. 2.48.

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2011 s.d. 2015

NO	Uraian	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan	446	420	550	547	553
2.	Upah Minimum Kabupaten / Kota	1.191.500	1.259.000	1.358.000	1.656.900	1.800.000

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar

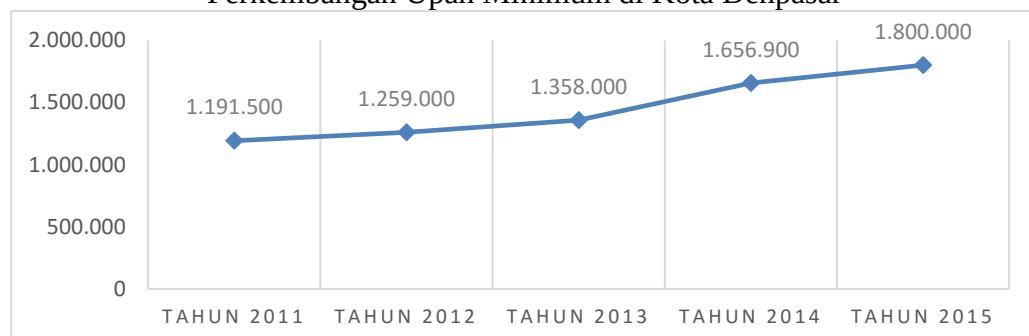
Gambar. 2.16

Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar



Gambar. 2.17

Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar



Data jumlah perusahaan di Kota Denpasar yang tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar bersumber dari wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya peningkatan data perusahaan yang tercatat, mengidentifikasi adanya kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya, walaupun diakui data tersebut masih sangat minim dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data jumlah perusahaan yang lebih akurat dapat juga dilakukan penyanding dengan Dinas / Instansi lain seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Statistik Kota Denpasar.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya. UMK merupakan upah minimum (gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UMK Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.

2.1.3.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

1. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan masih tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8 goal dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi :

1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim
2. Mencapai pendidikan dasar secara universal
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan
8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan

Dari ke 8 tujuan tersebut di atas, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi goal ke tiga sehingga hal ini cukup menjadi isu prioritas. Ini berarti bahwa setiap Negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus mampu menanggulangi isu tersebut di tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pendeklarasian kesepakatan tersebut berarti juga dituntut untuk mampu menangani 8 goal



yang salah satunya adalah mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam untuk bisa mencapai target ini.

Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat hal ini berkaitan erat dengan konstruksi social budaya yang sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan konfrehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait.

Secara historis, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementrian Negara Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti walaupun ia telah tiada, cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupadengan Kartini seperti R.A Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain.

Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Pada dekade berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Jogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga kementerian yang sudah terbentuk di tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in development/WID karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan.

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (gender and development/GAD). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses



pembangunan (Nugroho,2008;140). Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata.

Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti tersebut diatas, nampaknya juga masih belum efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000 bersamaan dengan dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dilegitimit melalui inpres No. 9/2000 tentang pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/gender mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam setiap perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada dasarnya ditujukan kepada para penyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka dapat dan mampu menyusun program/kegiatan yang responsive gender.

Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun program adalah memahami teknik analisa gender (TAG). Analisa gender merupakan perangkat analisa yang dapat membantu para perencana dalam menganalisa suatu kebijakan/program apakah sudah responsive gender atau belum. Dengan menggunakan analisa gender bisa diidentifikasi dalam hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam akses, partisipasi, control atau manfaat. Juga kesenjangan itu sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran.

Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknis analisis gender adalah eksistensi data terpilih menurut jenis kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan yang responsive gender. Oleh karena itu, penyusunan propil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting.

B. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk: melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,



menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Permasalahan di bidang lingkungan Kota Denpasar, diantaranya adalah :

- Masih terjadinya ancaman banjir, timbunan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah domestik, minyak jelantah, abrasi pantai, interusi air laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, sungai tercemar berat, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, semakin punahnya jenis-jenis flora dan fauna asli Kota Denpasar, semakin langkanya penyu hijau, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau , semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim. Berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Denpasar Tahun 2015 beberapa isu prioritas lingkungan Kota Denpasar kondisi, tekanan dan respon pengelolaannya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas Air :

Kegiatan manusia meliputi pertanian, peternakan, industri dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair. Sebagian besar kegiatan manusia tersebut tanpa disadari telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan khususnya badan air yang menerima air limbah dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas manusia telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan laut di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar bersama Laboratorium Analitik Universitas Udayana diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa sungai yang telah melampaui baku mutu air untuk kelas II meliputi beberapa parameter kualitas air yaitu DO, BOD, COD, NO₂, NO₃, NH₃, Total Phospat serta Total Coliform.

Hasil pemantauan kualitas air laut tahun 2015 untuk kegiatan pelabuhan di pelabuhan Benoa juga telah menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD dan Nitrat (NO₃) telah melampaui baku mutu air untuk pelabuhan sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 tahun 2007. Selain itu beberapa pantai untuk kegiatan wisata bahari telah menunjukkan bahwa parameter oksigen terlarut (pantai Matahari Terbit dan Pantai Sanur), BOD (Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu dan Pantai bagian Selatan Pulau Serangan), Amonia pada seluruh pantai , No₃ (Pantai Mertasari,Pantai Bagian Utara, Timur dan Selatan Pulau Serangan Serta Parameter PO₄ (Pantai Bagian dan Selatan Pulau Serangan) telah melampaui baku mutu air untuk wisata bahari sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai dan air laut di kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan dana lingkungan untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Laut. Selain itu bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah telah dilakukan pemantauan dan pengawasan rutin oleh Badan Lingkungan Hidup kota Denpasar dan secara yuridis kegiatan usaha yang memiliki



dampak telah disyaratkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL serta melaksanakan proses perijinan terkait limbah yang dihasilkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar oleh Walikota Denpasar.

2. Sampah :

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersiernya. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Perkiraan produksi sampah Kota Denpasar dengan asumsi 1 orang per hari menghasilkan 4 liter sampah dengan jumlah penduduk 846.310 jiwa dan prediksi peningkatan volume sampah pada saat hari besar seperti galungan, kuningan nyepi kurang lebih 60% serta 10% peningkatan sampah seremonial/kegiatan lainnya sehingga produksi sampah Kota Denpasar per tahun sebesar $= 1.280.299,55 \text{ m}^3 = 320.074,89 \text{ ton/tahun}$ yang diangkut ke TPA sebesar $= 1.247.769 \text{ m}^3$ per tahun atau mencapai 97,46% dari perkiraan sampah Kota Denpasar, dan sisa sampah sebesar $89,12 \text{ m}^3/\text{hari}$ telah didaur ulang dan diolah untuk dijadikan kompos sebesar $71,30 \text{ m}^3/\text{hari}$ (80%) dan $17,82 \text{ m}^3/\text{hari}$ (20%) dari sisa sampah masih dibuang ke tanah kosong atau (tegalan).

Selain itu kegiatan pengurangan volume sampah dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

- Pembentukan Bank Sampah melalui Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/195/HK/2015 tentang Penetapan Bank Sampah di Kota Denpasar Tahun 2015. Jumlah Bank Sampah yang telah terbentuk berjumlah 47 Bank Sampah. Pembentukan Bank Sampah ini dimaksudkan meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan di Kota Denpasar.
- Pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengelola sampah secara 3R. Selain itu, terdapat 2 TPST yang telah mengelola sampah menjadi bio gas, yakni TPST 3R Desa Kesiman Kertalangu dan TPST Dauh Puri.

3. Alih Fungsi Lahan:

Kebutuhan lahan di kota Denpasar untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian daerah. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika pada suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan disekitarnya juga beralih fungsi secara progresif.



Hal tersebut terjadi karena dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain disekitarnya untuk menjual lahan, selain itu, pelaku pembeli tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura memberikan perhatian terhadap alih fungsi lahan pada sektor pertanian. Hasil inventarisasi terhadap lahan –lahan pertanian di Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah di Kota Denpasar mencapai 198 Ha. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor di Kota Denpasar, tidak terlepas dari kebutuhan lahan. Sedangkan jumlah lahan yang tersedia terbatas. Dengan kondisi ini diperlukan peran serta semua pihak untuk mempertahankan lahan pertanian perkotaan. Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan telah melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Selain itu secara yuridis Pemerintah Kota Denpasar telah mengatur alokasi ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

4. Variabilitas Iklim

Variabilitas iklim adalah fluktuasi unsur iklim yang terjadi secara tiba-tiba namun tidak berlangsung lama. Variabilitas iklim yang terjadi di Kota Denpasar ditandai dengan meningkatnya temperatur udara di berbagai wilayah serta tidak menentunya kejadian hujan. Terjadinya Variabilitas iklim telah menyebabkan masalah sumber daya air. Kegiatan manusia seperti pembukaan lahan yang mengurangi jumlah tutupan vegetasi serta aktivitas yang menghasilkan berbagai gas-gas rumah kaca seperti pertanian, peternakan, industri dan sektor transportasi telah memicu Variabilitas iklim di daerah. Selain itu dinamika cuaca atau iklim yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia disebabkan adanya aktivitas El Nino di perairan Samudera Pasifik di bagian timur Indonesia telah memicu kejadian kemarau panjang.

Kemarau panjang dengan suhu udara yang cukup tinggi telah mengganggu kenyamanan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah yang selanjutnya mengakibatkan menurunnya produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di luar bangunan. Selain itu, fenomena iklim di Kota Denpasar telah memicu beberapa permasalahan penurunan debit air sungai. Kondisi tersebut telah mengganggu jumlah produksi air baku oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar. Penurunan debit air berdampak pada penurunan distribusi air ke pelanggan. Kondisi tersebut juga telah membuat sejumlah pelanggan yang berada di daerah elevasi yang lebih tinggi seperti kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat mengalami permasalahan pasokan air baku. Sebagai upaya meminimalisasi tingkat kerentanan terhadap kondisi iklim, maka Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya antara lain.



- Sebagai langkah nyata dalam meminimalisir permasalahan penurunan produksi jumlah air baku kepada masyarakat, maka PDAM Kota Denpasar telah memberikan pasokan air bersih dengan menyiapkan mobil tangki untuk daerah-daerah yang mengalami permasalahan pasokan air bersih.
- Pelaksanaan konservasi melalui metode vegetatif yaitu melalui penanaman pohon, dimana bibit tersebut ditanam pada lahan-lahan kosong yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah kota Denpasar, kegiatan penghijauan bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika, fungsi resapan air dan menciptakan keserasian serta keseimbangan dengan fisik kota. Hijaunya kota tidak hanya menjadikan kota itu indah dan sejuk namun aspek kelestarian, keserasian, keselarasan dan keseimbangan sumber daya alam, yang pada gilirannya akan memberikan kenyamanan, Kesegaran, terbebasnya kota dari polusi dan kebisingan serta sehat dan cerdasnya warga kota.

2. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga dalam penanganan lebih lanjut memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antar seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat memang sudah mulai nampak namun baru sebatas skala kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti rumah memang bersih dan bahkan bebas dari sampah ternyata di luar rumah sampah belum dikelola dengan baik sehingga sering ditemukan lahan kosong, selokan, sungai dan tempat lainnya menjadi sasaran TPS liar. Dapat disimpulkan bahwa pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah.

Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana.

Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana dan sarana pada tahun 2015 meliputi :

1. Dump truck : 78 unit termasuk - unit pengadaan 2015 untuk di operasikan tahun 2016
2. Truk armroll : 20 unit
3. Kontainer / Kontainer terpilah : 117 unit termasuk 97 unit kondisi baik, 20 unit rusak, - unit container pengadaan 2015 untuk di operasikan tahun 2016
4. Transfer depo : 13 unit
5. Convektor truk : 11 unit
6. Sweeper truk : 1 unit
7. Street Sweeper : 2 unit



Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2015 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1.517 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi serta komponen lainnya.

Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. TPA (Tempat pemrosesan Akhir) overload/penyempitan lahan pembuangan serta sulitnya/terbatasnya mendapatkan lahan untuk pembuatan TPS/Depo

Pada tahun 2015 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah di badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 70% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP

Kota Denpasar mencapai 79.73% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 17.79% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 12-13% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 3% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan).

Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu :

- Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu,
- Rendahnya peranserta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R (reduce, reuse, recycle)
- Kurangnya partisipasi masyarakat swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah.



Program pengelolaan kebersihan kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah mengurangi volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA.

Tabel. 2.49.

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2011 s/d 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah TPS/Kontainer	83	84	100	110	117
2	Jumlah daya tampung TPS	1,682	1,688	1,784	1,844	1,961
3	Jumlah penduduk	804,905	830,662	833,900	863,600	880,600
4	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	0.002	0.002	0.002	0.002	0,002

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

rasio pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 belum ada perubahan, sehingga rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk hanya bisa menampung 2 liter per orang dengan perkiraan produksi sampah per orang 4 liter perhari.

perkiraan laju pertumbuhan penduduk 3,2% sehingga diperkirakan jumlah penduduk meningkat dan rasio daya tampung TPS hanya bisa menampung 50% dari produksi sampah penduduk.

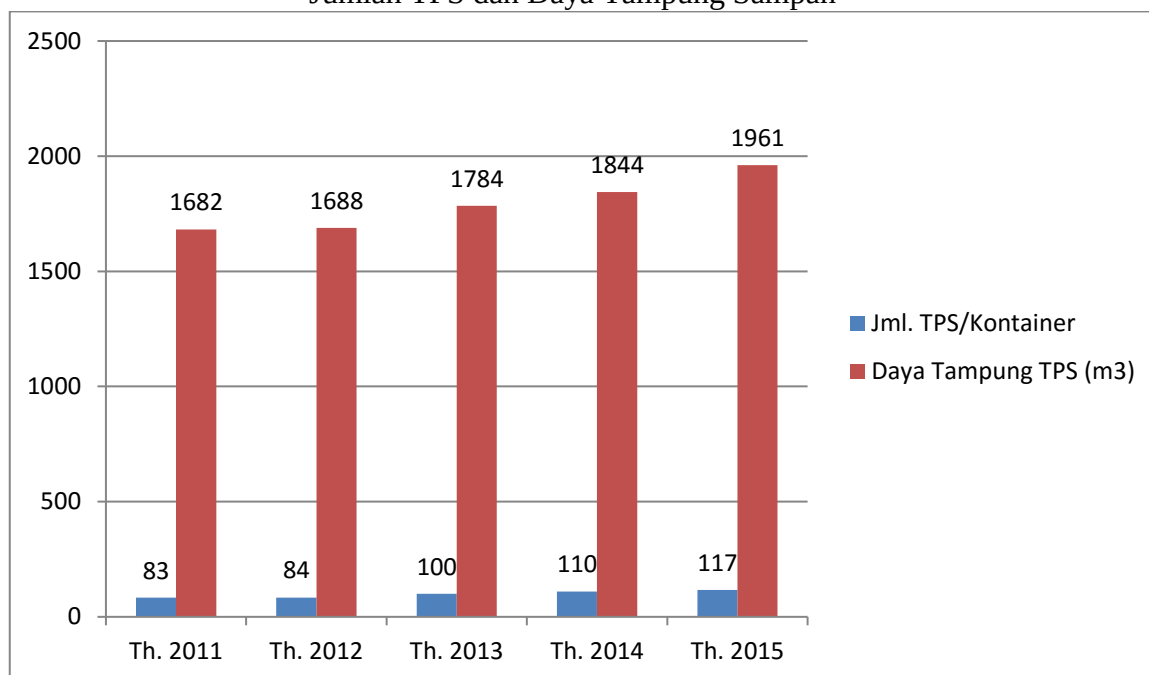
Tabel. 2.50.

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah daya tampung (M ³)	
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Kecamatan Denpasar Timur	150,590	31	357	0.002
2	Kecamatan Denpasar Barat	256,415	33	571	0.002
3	Kecamatan Denpasar Selatan	279,680	31	568	0.002
4	Kecamatan Denpasar Utara	193,680	22	465	0.002



Gambar. 2.18
Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah



Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari.

Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Propinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 880.600 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.522 m³ per hari atau setara dengan 880,6 ton sampah.

Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah.

Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan persimpangan jalan serta perindungan kota.

Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan perindungan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang.



Permasalahan yang dihadapi dibidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut :

- Pada penataan taman, lahan untuk taman kota terbatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2015 sekitar 166.873 m² yang terdiri dari 53.353 m² Taman Median, 69.970 m² Taman Lapangan dan 43.550 m² Taman Telajakan.
- Pada bidang penghijauan dan perindungan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai 58.240 pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon dan adanya pohon tumbang akibat bencana alam.
- Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu di prioritaskan pemenuhannya.

C. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke-pendudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk.

Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan catatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

1) Penduduk ber-KTP

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP.

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	629.588	679.979	708.488	729.028	755.419
Penduduk yang wajib ber KTP	562.671	496.579	512.995	544.532	568.633
Penduduk ber KTP	89.009	183.402	303.220	364.319	551.247
Persentase b/c	15,82%	36,93%	59,11%	66,90%	96,94%



2) Penduduk ber-KK

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga pada tahun 2015 sebanyak 183.286 KK.

3) Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran per Tahun

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah yang memiliki akte kelahiran sebanyak 25.236 lembar pada Tahun 2012, 17.706 lembar penerbitan kelahiran pada tahun 2013, 13.212 lembar penerbitan Akta kelahiran pada tahun 2014 dan 11.296 lembar penerbitan Akta Kelahiran pada Tahun 2015

4) Penerbitan Akta Kematian per Tahun

Dengan diberikannya uang santunan duka dari Walikota Denpasar dengan menggunakan Akta Kematian, jumlah penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat dan dapat dilihat tahun 2013 sebanyak 2.772 lembar Akta Kematian, di tahun 2014 sebanyak 2.933 lembar Akta Kematian, sedangkan ditahun 2015 sebanyak 4.120 lembar Akta Kematian

5) Penerbitan Akta Perkawinan per Tahun

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Perkawinan, terlihat dengan adanya peningkatan jumlah permohonan akta perkawinan di tahun 2013 sebanyak 2.479 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 3.014 lembar, sedangkan di tahun 2015 sebanyak 3.297 lembar.

6) Penerbitan Akta Perceraian per Tahun

Data penerbitan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2013 sebanyak 393 lembar, di tahun 2014 sebanyak 316 lembar akta perceraian dan di tahun 2015 sebanyak 333 lembar

b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penerapan KTP-el yang mulai diberlakukan sejak tahun 2014 mengalami perubahan tentang masa berlakunya KTP-el yang selama 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1a. Disebutkan waktu penyelesaian KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari.



2. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Dalam hal ini terjadi perubahan penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk, perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta – akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus didomisili saja.

3. Pengurusan dan penebitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis)
Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis) semula hanya untuk penerbitan KTP- el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain – lain.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD OA) tinggal terbatas dan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN), SKPD OA tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) OA Terbatas, SKPLN WNI, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Permohonan Menjadi Penduduk (SPMP);
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil meliputi pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan akte perkawinan;
3. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan;

Kota Denpasar sebagai Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga penduduk berduyun-duyun datang dengan berbagai motivasi, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan untuk berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahterannya. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang besar sebagai sumbangan dari migrasi penduduk yang ndiakibatkan oleh arus urbanisasi.

Pengendalian penduduk ini mutlak perlu dilakukan guna menghindari eksese-eksese negatif yang dapat menghambat upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi Kearifan lokal perlu diberdayakan guna membantu pengendalian pertumbuhan dengan sistem dan pola yang benar.

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan

Berdasarkan angka statistik bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan terus mengalami peningkatan . Laju perkembangan penduduk yang diakibatkan migrasi penduduk perlu ditekan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sehingga mereka yang memenuhi kelengkapan administrasi dan mempunyai tujuan, ketrampilan dan keahlian tertentu yang direkomendasikan menetap di Kota Denpasar.



Tabel. 2.51.

Distribusi Penduduk tahun 2015

No	Uraian	Distribusi Penduduk tahun 2015	Persentase
1	Denpasar Barat	217.917	28,84%
2	Denpasar Selatan	205.798	27,24%
3	Denpasar Utara	189.066	25,03%
4	Denpasar timur	142.638	18,89%
	JUMLAH	755.419	100%

2. Kepadatan

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2015 telah mencapai 25.551 jiwa /km², sedangkan kalau dilihat di masing – masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Denpasar Barat sebesar 9.031 jiwa/km²
- Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.328 jiwa/km²
- Kecamatan Denpasar Utara sebesar 6.075 jiwa/km²
- Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 4.117 jiwa/km²

3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Denpasar tahun 2015 dimana penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun berjumlah 160.472 orang atau 21,24%, penduduk yang tergolong dalam kelompok umur 15 – 49 tahun berjumlah 442.345 orang atau 58,56%, sedangkan penduduk Kota Denpasar yang tergolong kelompok umur 50 tahun keatas berjumlah 152.602 orang atau 20,20%. Bentuk piramida penduduk Kota Denpasar juga menandakan telah terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar dan didominasi oleh mereka yang tergolong dalam usia produktif.

Tabel. 2.52.

Komposisi Penduduk berdasarkan Umur di Kota Denpasar Tahun 2015

Umur (Tahun)	Penduduk (orang)	Persentase
0 – 14	160.472	21,24%
15 – 49	442.345	58,56%
50 ke atas	152.602	20,20%
Jumlah	755.419	100%



D. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa / Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.

E. URUSAN PERHUBUNGAN

1. DINAS PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2015 pelayanan system transportasi kawasan sarbagita akan dilaksanakan diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transport yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan



dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana didalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mengingat dalam kegiatan perekonomian Kota Denpasar, masih bertumpu pada potensi pariwisata dan pertanian dalam arti luas, maka pembangunan transportasi diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke daerah konsumen. Namun demikian, oleh karena keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan merupakan aspek yang sangat rentan terhadap perkembangan pariwisata, maka untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial di masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan memperhatikan posisi penting bandar udara yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung tata ruang wilayah.

Rincian data penumpang dan barang keluar-masuk Kota Denpasar, terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.53.

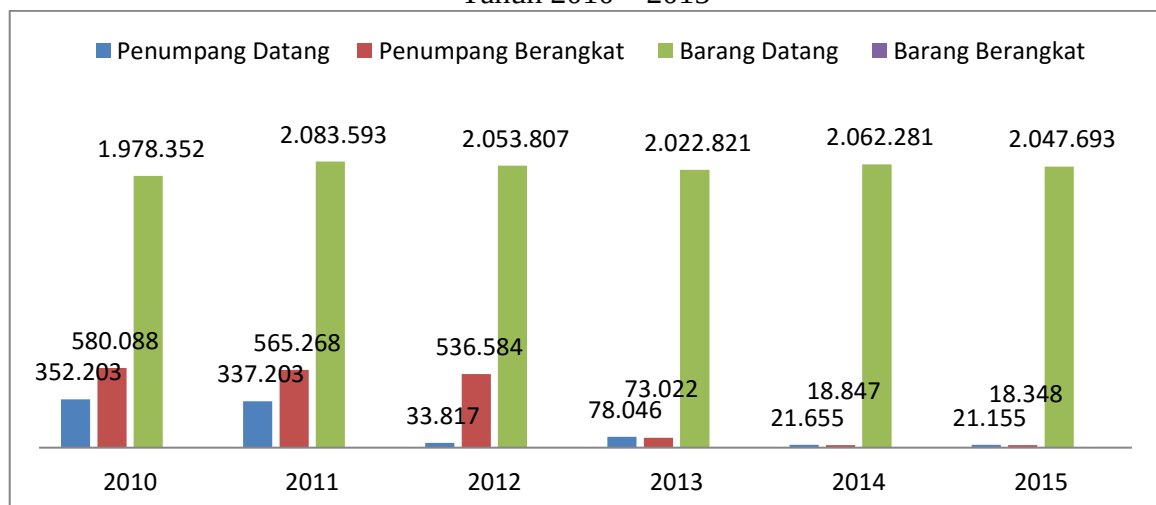
Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2010-2015

No	Muatan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penumpang Datang	352.203	337.203	338.170	78.046	21.655	21.155
	Penumpang Berangkat	580.088	565.268	536.584	73.022	18.847	18.348
	Jumlah	934.301	904.482	876.766	153.081	42.516	41.518
2	Barang Datang	1.978.352	2.083.593	2.053.807	2.022.821	2.062.281	2.047.693
3	Barang Berangkat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.844.944	3.890.546	3.805.327	2.326.970	2.145.299	2.128.714

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Gambar. 2.19

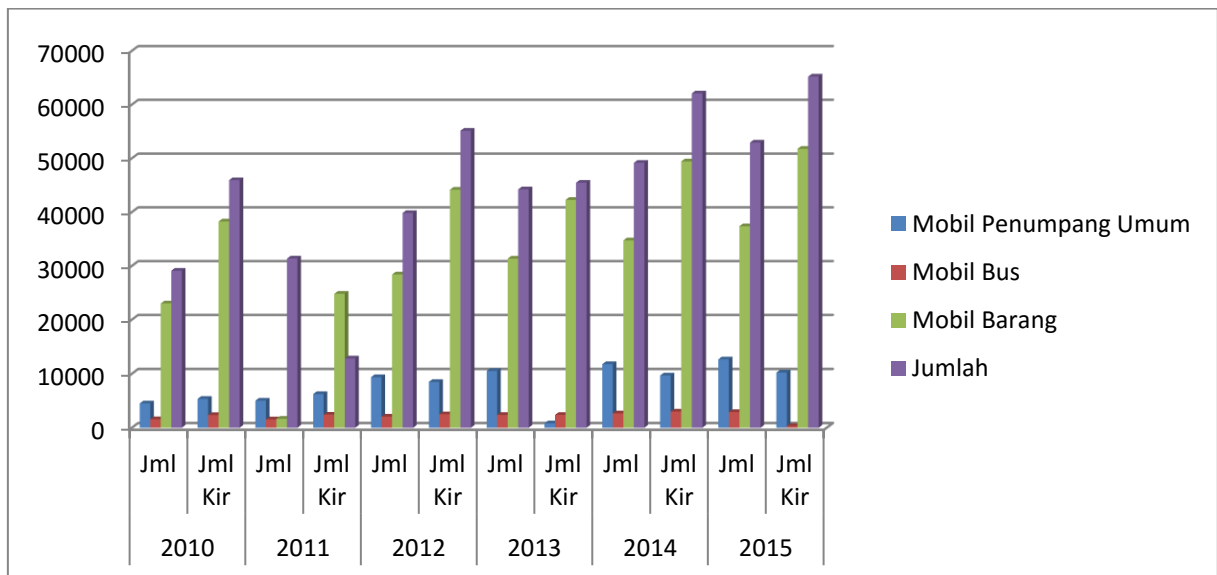
Jumlah Penumpang dan Barang Keluar Masuk di Kota Denpasar
Tahun 2010 – 2015



Tabel. 2.54.
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2015

Tahun		Mobil Penumpang Umum	Mobil Bus	Mobil Barang	Jumlah
2010	Jumlah	4.508	1.576	23.013	29.097
	Jumlah KIR	5.335	2.342	38.256	45.933
	%	1.183	1.486	1.662	4.331
2011	Jumlah	5.011	1.548	1.661	31.363
	Jumlah KIR	6.233	2.423	24.804	12.817
	%	1.243	1.565	4.161	4.486
2012	Jumlah	9.359	2.065	28.403	39.827
	Jumlah KIR	8.477	2.492	44.158	55.127
	%	905	1.206	1.554	3.665
2013	Jumlah	10.512	2.367	31.346	44.225
	Jumlah KIR	811	2.379	42.274	45.464
	%	7.715	10.013	13.486	31.214
2014	Jumlah	11.781	2.656	34.732	49.169
	Jumlah KIR	9.668	2.987	49.423	62.078
	%				
2015	Jumlah	12.651	2.903	37.369	52.923
	Jumlah KIR	10.214	3.230	51.759	65.203
	%	80,74	111.26	138,51	123,20

Gambar. 2.20
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2015

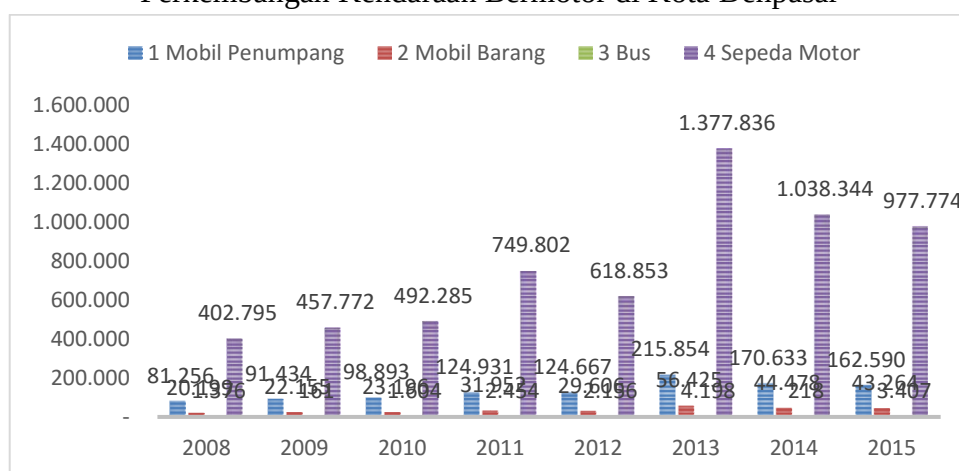


Tabel. 2.55.
Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar
Tahun 2008 s/d 2015

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Mobil Penumpang	81.256	91.434	98.893	124.931	124.667	215.854	170.633	162.590
2	Mobil Barang	20.199	22.155	23.196	31.952	29.606	56.425	44.478	43.264
3	Bus	1.376	161	1.604	2.454	2.156	4.198	218	3.407
4	Sepeda Motor	402.795	457.772	492.285	749.802	618.853	1.377.836	1.038.344	977.774

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Bali

Gambar. 2.21
Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar



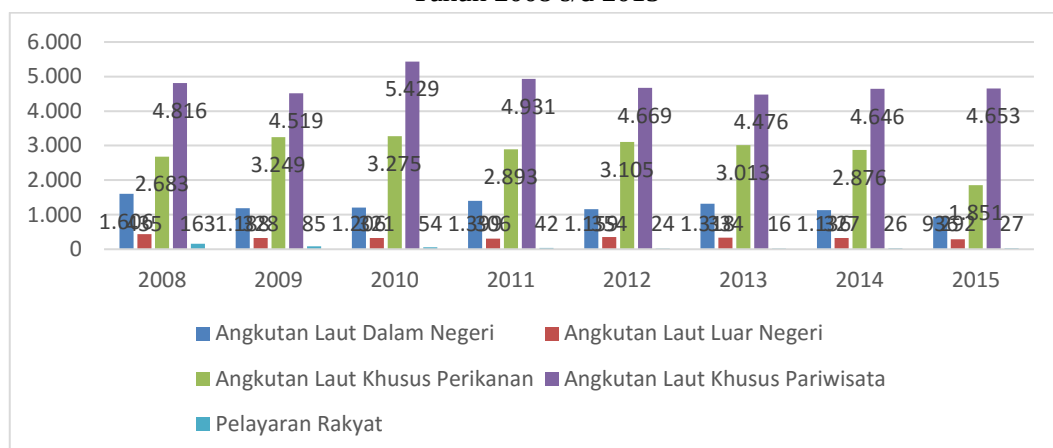
Tabel. 2.56.
Kunjungan Kapal di Pelabuhan Benoa
Tahun 2008 s/d 2015

No	Tahun	Angkutan Laut Dalam Negeri	Angkutan Laut Luar Negeri	Angkutan Laut Khusus		Pelayaran Rakyat
				Perikanan	Pariwisata	
1	2008	1.606	435	2.683	4.816	163
2	2009	1.188	328	3.249	4.519	85
3	2010	1.206	321	3.275	5.429	54
4	2011	1.399	306	2.893	4.931	42
5	2012	1.159	354	3.105	4.669	24
6	2013	1.318	334	3.013	4.476	16
7	2014	1.136	327	2.876	4.646	26
8	2015	936	292	1.851	4.653	27

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar



Gambar. 2.22
Kunjungan Kapal di Pelabuhan Benoa
Tahun 2008 s/d 2015



Tabel. 2.57.
Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)
s/d Bulan Juni Tahun 2015

No	Simpang/Ruas	Terpasang	
		Baik	Rusak
1	Simpang 4/Lebih	52	-
2	Simpang 3	15	-
3	Jumlah titik di ruas & simpang untuk Pelican Cross	4	0
4	Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning Light	24	2
Jumlah		95	2

Rambu-rambu yang sudah terpasang s/d Bulan Juni Tahun 2015

- Jumlah Rambu yang terpasang : 2.935 Unit
- Traffic Light : 67 Unit
- Warning Light : 23 Unit
- Marka Jalan : 25.220 Meter
- Halte : 13 Unit

Type Terminal di Kota Denpasar

1. Terminal Penumpang :
 - Terminal UBUNG, Terminal Penumpang Type B
 - Terminal KRENENG, Terminal Penumpang Type C
 - Terminal TEGAL, Terminal Penumpang Type C
2. Terminal Barang : 1



F. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu suplay dan dimen. Suplay berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan dimen terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur ini di Kota Denpasar menghadapi kendala berupa sulitnya menemukan lahan representatif untuk pembangunan infrastruktur dimaksud. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan sehingga pelayanan infrastruktur ini dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika adalah:

1. terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien yaitu, yang mampu mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial,
2. meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika,
3. meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.

Sesuai karakteristik penyelenggaraan setiap sub server dilakukan dengan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan laju perkembangan pembangunan infrastruktur informasi pos telekomunikasi teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah dunia usaha dan pengguna usaha dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator.

Untuk mendukung sasaran yang dimaksud maka arah kebijakan yang ditempuh adalah

1. peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika,
2. peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi.

G. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada prinsipnya koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktifitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan biasa berjalan dengan berkesinambungan dari, oleh dan untuk anggota.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat disekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Munculnya koperasi banjar disejumlah tempat di Denpasar, merupakan sebuah terobosan dari pada pengelola koperasi bersangkutan. Keistimewaan koperasi banjar ini, basis anggotanya tentunya saja merupakan warga setempat. Demikian pula program yang bisa diluncurkan juga sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi koperasi dimana mereka berada. Mewujudkan koperasi berkelanjutan yang berbasis banjar dengan bermodal budaya dan modal social tersebut secara langsung maupun tak langsung mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan ekonomi berbasis budaya bali. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka factor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan dilapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:

1. Potensi Ekonomi masyarakat
2. Pengusaha
3. Lembaga perkreditan/Keuangan
4. Instansi terkait
5. Koperasi sebagai badan usaha



Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai Kota budaya, telah menjadi Visi dinas koperasi dalam mencapai tujuan pembangunan koperasi. Visi ini dijabarkan melalui misi menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga memberikan nilai tambah usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Tabel. 2.58.
Rincian keragaan koperasi dari tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah Koperasi	Unit	936	976	1.016	1.056	1.090
2	Jumlah Anggota	Orang	121.662	125.570	330.575	333.400	334.279
	Laki - laki	Orang	83.114	79.313	252.362	254.587	255.087
	Perempuan	Orang	38.548	46.257	78.213	78.813	79.192
3	Pelaksanaan RAT	Unit	557	749	883	886	887
4	Koperasi Aktif	Unit	835	870	913	953	1.004
5	Koperasi Tidak Aktif	Unit	101	103	103	103	86
6	Koperasi Sehat	unit	57	22	25	39	48
7	Koperasi Cukup Sehat	unit	69	101	99	105	96
8	Koperasi Kurang sehat	unit	25	107	18	24	14
9	Koperasi tidak sehat	unit	6	0	4	1	1
10	Koperasi sangat tidak sehat	Unit	0	0	0	1	-
11	Permodalan						
	Modal Sendiri	Rp.	220.312.962.500	230.975.975.543	232.581.179.783	233.009.179.783	313.269.292.025
	Modal Luar	Rp.	718.024.775.000	718.024.775.000	753.926.013.750	829.318.615.125	912.250.476.000
12	Total Asset	Rp.	938.337.737.500	955.000.750.543	986.507.193.533	1.062.327.794.908	1.225.519.768.025
13	Volume Usaha	Rp.	1.727.630.367.775	1.734.187.367.775	1.994.315.472.941	2.233.633.329.694	2.244.801.496.342
14	SHU	Rp.	63.517.136.953	63.517.136.953	73.044.707.496	81.810.072.395	89.991.109.634
15	Jumlah Karyawan	Orang	3.225	3.339	3.367	3.446	4.207
16	Manager	Orang	247	247	266	384	384

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Dari hasil pembinaan kepada koperasi yang selama ini dilakukan terlihat perkembangan yang baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 1.056 unit di tahun 2014 menjadi 1.090 unit di tahun 2015 dan diikuti dengan jumlah modal sendiri per desember 2014 sebesar Rp. 233.009.179.783,- menjadi Rp. 313.269.292.025,- di tahun 2015. Modal luar per desember 2014 Rp. 829.318.615.125,- menjadi Rp. 912.250.476.000,- Di tahun 2015. Total asset tahun 2015 sebesar Rp. 1.225.519.768.025,- bila dilihat dari jumlah anggota



koperasi, jumlahnya meningkat yaitu 333.400 orang di tahun 2014 menjadi 334.279 orang di tahun 2015.

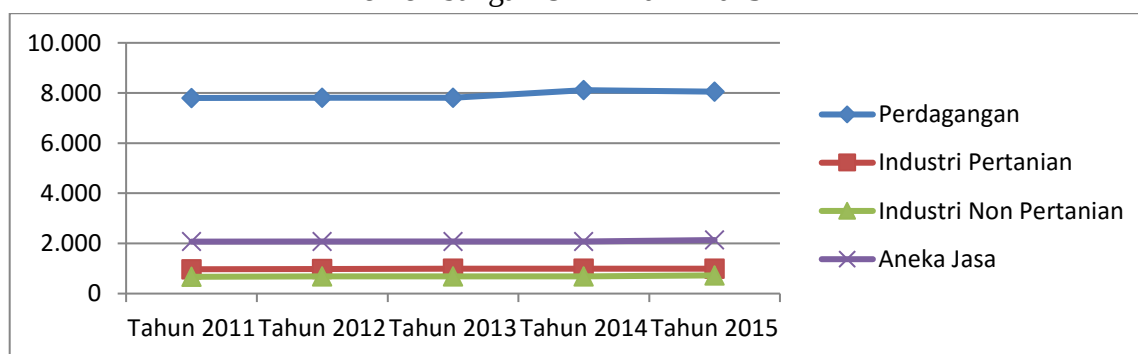
Mengacu pada manfaat koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang di kelola.

Tabel. 2.59.
Perkembangan UMKM dari Tahun 2011 – 2015

No	Klasifikasi	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Perdagangan	7.801	7.805	7.811	8.113	8.050
2	Industri Pertanian	971	984	991	991	993
3	Industri Non Pertanian	670	682	690	690	726
4	Aneka Jasa	2.073	2.074	2.083	2.083	2.136
	JUMLAH	11.515	11.545	11.575	11.877	11.905

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Gambar. 2.23
Perkembangan UKM 2011-2015



Dimana di Tahun 2015 dilakukan pendataan ulang terhadap UKM di Kota Denpasar, yang mana hanya baru mampu mendata di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur, sehingga terjadinya penurunan jumlah UKM di Kota Denpasar di Tahun 2015 yang mana hasil dari pendataan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi pelaku UKM, serta akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal pengambilan keputusan. Dalam tahun 2016 akan dilanjutkan kembali pendataan di 2 kecamatan yang belum terdata yaitu di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan sehingga akan diperoleh data pelaku UKM yang *valid by name* dan *by address*, yang mana akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan langkah pembinaan yang harus dilakukan.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Selain sulitnya memperoleh bahan baku yang murah dan belum terjalinnya kemitraan dengan perusahaan / BUMN dalam pengembangan pasar. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi.



H. URUSAN KEBUDAYAAN

1. DINAS KEBUDAYAAN

Pembangunan bidang kebudayaan terus diupayakan melalui pengembangan, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keragaman budaya. Kinerja Pembangunan dibidang budaya meliputi indikator kajian budaya, fasilitas budaya, gelar budaya dan misi kesenian. Untuk kegiatan yang mencakup kajian seni dilaksanakan melalui 12 kegiatan seperti sarasehan, workshop, revitalisasi, konservasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk cakupan fasilitas seni dilaksanakan melalui 10 kegiatan seperti; pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi serta penerbitan dan pendokumentasian. Sebagai hasil dari pembinaan dan usaha melanjutkan pelestarian dituangkan dalam kegiatan gelar seni dengan mencakup kegiatan seperti; pagelaran, festival dan lomba. Dan untuk memperkenalkan budaya daerah ke daerah lain dilaksanakan promosi seni melalui kegiatan misi kesenian ke luar daerah. Selanjutnya upaya pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Kesemuanya itu dilakukan dalam upayamengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah.

Dibawah ini tersaji data jumlah organisasi kesenian di Kota Denpasar dari tahun 2010 sampai tahun 2015 seperti disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 2.60.
Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2015

Tahun	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
2015	165	227	150	106	648
2014	155	217	151	123	644
2013	181	238	155	193	767
2012	171	229	149	123	672
2011	154	218	154	127	653
2010	154	218	154	127	653

Sumber: BPS Kota Denpasar 2015

Jenis organisasi kesenian yang ada di Kota Denpasar sebanyak 30 jenis organisasi, paling banyak adalah gong kebyar yang mencapai 186 buah. Gong kebyar ini hampir terdapat pada setiap banjar, sedangkan beberapa kesenian langka saron, gambuh, seni keroncong hanya terdapat masing-masing 1 buah. Selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.



Tabel. 2.61.

Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2015

No.	Organisasi Kesenian	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
1.	Gong Gede	3	-	2	1	6
2.	Gong Kebyar	47	66	48	25	186
3.	Semar Pegulingan	3	11	-	-	14
4.	Angklung	24	30	20	17	91
5.	Gambang	2	4	3	-	9
6.	Selonding	-	5	1	1	7
7.	Saron	-	1	-	-	1
8.	Gong Suling	-	3	2	5	10
9.	Gambuh	1	-	-	-	1
10.	Barong	17	14	18	18	67
11.	Topeng	7	2	4	3	16
12.	Calon Arang	-	10	-	-	10
13.	Arja	-	1	-	-	1
14.	Sanghyang	-	2	-	-	2
15.	Wayang Wong	4	-	-	-	4
16.	Joged Bumbung	4	3	2	-	9
17.	Legong Dedari	-	4	-	-	4
18.	Wayang Kulit	9	11	7	3	30
19.	Gandrung	-	2	3	-	5
20.	Baris Upacara	2	-	-	3	5
21.	Janger	1	1	1	-	3
22.	MB. Keroncong	-	1	-	-	1
23.	Sastra daerah	-	-	-	4	4
24.	Drama Gong	-	-	-	-	0
25.	Tekok Jago	6	1	-	-	7
26.	Sanggar Seni Tari	30	40	30	20	120
27.	Gong Beri	-	-	-	-	0
28.	Gender Wayang	5	11	5	6	27
29.	Gdr. Pelegongan	-	4	4	-	8
	Jumlah	165	227	150	106	648

Sumber : BPS Kota Denpasar 2015

Sedangkan untuk jumlah event yang diselenggarakan dapat dilihat dalam Tabel berikut:



Tabel. 2.62.

Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015

No.	Jenis Event	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pesta Kesenian Bali (PKB)	1	1	1	1	1
2.	Pengembangan Kreativitas Seni Budaya HUT Kota Denpasar	1	1	1	1	1
3.	Misi Kesenian Keluar Daerah	2	2	2	2	2
4.	Pementasan & Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya	1	1	1	1	1
5.	Maha Bandana Prasada	1	1	1	1	1
6.	Festival Raja Raja Nusantara	1	1	1	1	1
7.	Pesona Pulau Serangan	1	1	1	1	1
8.	Sanur Festival	-	-	1	1	1
	Jumlah	8	8	9	9	9

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Sebagai apresiasi atas jasa, prestasi dan karya seni ilmuwan, budayawan dan seniman, dalam upaya penggalian, pengembangan, pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai budaya daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, diberikan penghargaan kepada seniman secara berkelanjutan. Jumlah Seniman yang menerima penghargaan dapat dilihat dalam Tabel 2.54. sebagai berikut:

Tabel. 2.63.

Jumlah Seniman yang Dapat Penghargaan di Kota Denpasar sampai Tahun 2015

No.	Jenis Seni	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1.	Seni Tari	3	2	1	7	6	19
2.	Seni karawaitan	4	1	1	2	2	10
3.	Seni Lukis	2	1	-	1	2	6
4.	Seni Drama	2	-	1	-	-	2
5.	Seni Musik	-	-	-	1	1	3
6.	Sanggar/lembaga	-	-	-	5	5	10
	Jumlah	11	4	3	16	16	50

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Pembangunan kebudayaan dengan menggali ketersediaan potensi kearifan lokal membutuhkan pengelolaan melalui dialog budaya sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber yang berdaya guna bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Jumlah Dialog Budaya yang telah diselenggarakan dapat dilihat dalam Tabel berikut:



Tabel. 2.64.

Dialog Budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar sampai Th 2015

No.	Jenis Dialog Budaya	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Purnama Badrawada	-	-	-	12	13
2.	Grebeg Aksara	-	-	-	1	1
3.	Parum Param	-	-	-	1	1
4.	Tilem Dipa Bhawana	-	-	-	-	12
	Jumlah	-	-	-	14	27

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Selanjutnya peranan subak sebagai salah satu kearifan lokal yang dapat menjaga sistem irigasi perairan dan menjadi inti dari usaha pemberdayaan alam dan masyarakat juga pengembangannya dilaksanakan secara terus menerus. Kegiatan pembinaanya dari tahun ke tahun dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel. 2.65.

Jumlah Subak yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015

No.	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kec. Denpasar Utara	-	1	1	2	1
2.	Kec. Denpasar Timur	-	1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	-	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat	1	1	1	1	1
	Jumlah	1	4	4	5	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Peranan desa pakraman dalam melestarikan dan mempertahankan budaya dan adat istiadat serta memelihara stabilitas pemerintahan daerah memegang peranan penting. Berbagai pembinaan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga adat seperti desa pekraman terus dilakukan. Tabel berikut menunjukkan jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel. 2.66.

Jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015

No.	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kec. Denpasar Utara	1	1	1	1	1
2.	Kec. Denpasar Timur		1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	1	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat		1	1	1	1
	Jumlah	2	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Upaya untuk mendukung program pusat tentang pelestarian dan penyelamatan Cagar Budaya terus diupayakan pemerintah Kota Denpasar. Usaha tersebut berupa pencatatan data dan upaya untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang berada di Kota Denpasar, karena untuk wewenang kepemilikan dan pemeliharaan masih berada pada pemerintahan pusat. Berikut ini disajikan data Cagar Budaya di Kota Denpasar sampai tahun 2015 seperti disajikan pada Tabel 2.58 berikut:

Tabel. 2.67.

Jumlah Cagar Budaya per Kecamatan di Kota Denpasar sampai tahun 2015

NO	SITUS	lokasi			Jumlah Cagar Budaya			
		Br/Dsn	Desa	Kecamatan	Benda Cagar Budaya	Bangunan Cagar Budaya	Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya
1	Pr Maospahit	Gerenceng	Pemecutan Kaja	Denpasar Barat		2	1	
2	Pr Susunan Wadon	Br Dukuh	Serangan	Denpasar Selatan	2	1		
3	Pr Dalem Cemara	Br Pojok	Serangan	Denpasar Selatan	2	2		
4	Masjid Asyuhada	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan	2	1		
5	Makam Bugis/Rmh Adat	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan			18	
6	Rumah Adat Bugis	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan		1		
7	Pr Puseh Sesetan	Sesetan	Sesetan	Denpasar Selatan	23			
8	Pr Dalem Sakenan	Banjar Dukuh	Serangan	Denpasar Timur	13	2		
9	Puri Agung Kesiman		Kesiman	Denpasar Timur		4	2	
10	Pr Blanjong	Blanjong	Sanur Kauh	Denpasar Timur	1			
11	Pr Rambut Siwi	Tatasan Kaja	Tonja	Denpasar Utara	12	1		
12	Pr Moas Pahit Tonja	Tatasan Kelod	Tonja	Denpasar Utara	3	3	1	
13	Pr Puseh Tonja	Jln. Seroja	Tonja	Denpasar Utara	26	1		
14	Pr Dalem Bengkunang	Jln. Ratna	Tonja	Denpasar Utara	9			
	JUMLAH				93	18	22	

Sumber : BPCB Gianyar



Sedangkan untuk jumlah event yang diselenggarakan dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel. 2.68.

Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015

No.	Jenis Event	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pesta Kesenian Bali (PKB)	1	1	1	1	1
2.	Pengembangan Kreativitas Seni Budaya HUT Kota Denpasar	1	1	1	1	1
3.	Misi Kesenian Keluar Daerah	2	2	2	2	2
4.	Pementasan & Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya	1	1	1	1	1
5.	Maha Bandana Prasada	1	1	1	1	1
6.	Festival Raja Raja Nusantara	1	1	1	1	1
7.	Pesona Pulau Serangan	1	1	1	1	1
8.	Sanur Festival	-	-	1	1	1
	Jumlah	8	8	9	9	9

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Sebagai apresiasi atas jasa, prestasi dan karya seni ilmuwan, budayawan dan seniman, dalam upaya penggalian, pengembangan, pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai budaya daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, diberikan penghargaan kepada seniman secara berkelanjutan. Jumlah Seniman yang menerima penghargaan dapat dilihat dalam Tabel 2.54. sebagai berikut:

Tabel. 2.69.

Jumlah Seniman yang Dapat Penghargaan di Kota Denpasar sampai Tahun 2015

No.	Jenis Seni	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1.	Seni Tari	3	2	1	7	6	19
2.	Seni karawaitan	4	1	1	2	2	10
3.	Seni Lukis	2	1	-	1	2	6
4.	Seni Drama	2	-	1	-	-	2
5.	Seni Musik	-	-	-	1	1	3
6.	Sanggar/lembaga	-	-	-	5	5	10
	Jumlah	11	4	3	16	16	50

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Pembangunan kebudayaan dengan menggali ketersediaan potensi kearifan lokal membutuhkan pengelolaan melalui dialog budaya sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber yang berdaya guna bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Jumlah Dialog Budaya yang telah diselenggarakan dapat dilihat dalam Tabel berikut:



Tabel. 2.70.

Dialog Budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar sampai Th 2015

No.	Jenis Dialog Budaya	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Purnama Badrawada	-	-	-	12	13
2.	Grebeg Aksara	-	-	-	1	1
3.	Parum Param	-	-	-	1	1
4.	Tilem Dipa Bhawana	-	-	-	-	12
	Jumlah	-	-	-	14	27

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Selanjutnya peranan subak sebagai salah satu kearifan lokal yang dapat menjaga sistem irigasi perairan dan menjadi inti dari usaha pemberdayaan alam dan masyarakat juga pengembangannya dilaksanakan secara terus menerus. Kegiatan pembinaanya dari tahun ke tahun dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel. 2.71.

Jumlah Subak yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015

No.	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kec. Denpasar Utara	-	1	1	2	1
2.	Kec. Denpasar Timur	-	1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	-	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat	1	1	1	1	1
	Jumlah	1	4	4	5	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015

Peranan desa pakraman dalam melestarikan dan mempertahankan budaya dan adat istiadat serta memelihara stabilitas pemerintahan daerah memegang peranan penting. Berbagai pembinaan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga adat seperti desa pakraman terus dilakukan. Tabel berikut menunjukkan jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel. 2.72.

Jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2010- 2015

No.	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kec. Denpasar Utara	1	1	1	1	1
2.	Kec. Denpasar Timur		1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	1	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat		1	1	1	1
	Jumlah	2	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2015



Upaya untuk mendukung program pusat tentang pelestarian dan penyelamatan Cagar Budaya terus diupayakan pemerintah Kota Denpasar. Usaha tersebut berupa pencatatan data dan upaya untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang berada di Kota Denpasar, karena untuk wewenang kepemilikan dan pemeliharaan masih berada pada pemerintahan pusat. Berikut ini disajikan data Cagar Budaya di Kota Denpasar sampai tahun 2015 seperti disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 2.73.
Jumlah Cagar Budaya per Kecamatan di Kota Denpasar sampai tahun 2015

NO	SITUS	lokasi			Jumlah Cagar Budaya			
		Br/Dsn	Desa	Kecamatan	Benda Cagar Budaya	Bangunan Cagar Budaya	Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya
1	Pr Maospahit	Gerenceng	Pemecutan Kaja	Denpasar Barat		2	1	
2	Pr Susunan Wadon	Br Dukuh	Serangan	Denpasar Selatan	2	1		
3	Pr Dalem Cemara	Br Pojok	Serangan	Denpasar Selatan	2	2		
4	Masjid Asyuhada	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan	2	1		
5	Makam Bugis/Rmh Adat	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan			18	
6	Rumah Adat Bugis	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan		1		
7	Pr Puseh Sesetan	Sesetan	Sesetan	Denpasar Selatan	23			
8	Pr Dalem Sakenan	Banjar Dukuh	Serangan	Denpasar Timur	13	2		
9	Puri Agung Kesiman		Kesiman	Denpasar Timur		4	2	
10	Pr Blanjong	Blanjong	Sanur Kauh	Denpasar Timur	1			
11	Pr Rambut Siwi	Tatasan Kaja	Tonja	Denpasar Utara	12	1		
12	Pr Moas Pahit Tonja	Tatasan Kelod	Tonja	Denpasar Utara	3	3	1	
13	Pr Puseh Tonja	Jln. Seroja	Tonja	Denpasar Utara	26	1		
14	Pr Dalem Bengkungan	Jln. Ratna	Tonja	Denpasar Utara	9			
	JUMLAH				93	18	22	

Sumber : BPCB Gianyar



URUSAN KEARSIPAN

1. BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, keberadaan dan fungsi perpustakaan, arsip serta dokumentasi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu : meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan.

Kedua, meningkatnya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur : (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif.

Hasil pencapaian kinerja sasaran pembangunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Perpustakaan :

Tabel. 2.74.

Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan

No	Tahun	Jumlah Anggota		Total
		Laki	Perempuan	
1	2009	36	26	62
2	2010	91	97	188
3	2011	596	688	1284
4	2012	600	707	1307
5	2013	432	580	1012
6	2014	1111	1516	2627
7	2015	1085	1718	2803
Total		3951	5332	9283

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi



Tabel. 2.75.
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2011 s/d 2014

No	Tahun	Perpustakaan									Total
		Perpus. Umum			Perpus. Jagatnatha			Pusling			
		L	P	Jml.	L	P	Jml.	L	P	Jml.	
1	2011	715	1692	2407				2323	3063	5386	7793
2	2012	1420	2035	3455	92	77	169	3367	7323	10690	14314
3	2013	2415	3519	5934	316	297	613	3179	4022	7201	13748
4	2014	2564	4982	7546	566	598	1164	1066	764	1830	10540
5	2015	2814	3857	6671	676	734	1410	1155	1238	2393	10474

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tabel. 2.76.
Judul Buku dan Koleksi Buku

Kode	Klasifikasi	Jumlah Koleksi Per Tahun													
		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.
000-099	Karya Umum	81	132	125	227	46	61	116	261	75	132	54	116	281	530
100-199	Filsafat	238	450	129	190	27	71	46	106			164	269	139	271
200-299	Agama	437	854	284	370	24	109	140	281	29	50	488	1122	362	842
300-399	Ilmu Sosial	168	273	1521	2395	164	390	195	397	93	124	403	750	422	816
400-499	Bahasa	19	35	80	104	3	5	18	42	19	29	99	136	193	355
500-599	Ilmu Murni	54	81	180	302	2	9	79	172	26	26	109	142	220	409
600-699	Ilmu Terapan	241	355	1325	2349	94	209	295	611	7	7	334	581	702	1336
700-799	Kesenian & Olahraga	54	81	166	310	30	106	68	140	15	27	124	199	305	634
800-899	Kesusastaan	273	346	494	900	26	76	103	183	4	10	407	853	574	1149
900-999	Geografi dan Sejarah	56	82	248	427	17	52	44	84	17	29	300	424	295	531
Total		1621	2689	4552	7574	433	1088	1104	2277	285	434	2482	4592	3493	6873
Akhir tahun 2010				6173	10263										
Akhir tahun 2011						6606	11351								
Akhir tahun 2012								7710	13628						
Akhir tahun 2013										7995	14062				
Akhir tahun 2014												10477	18654		
Total Akhir Koleksi Tahun 2015										13970	Judul	25527	EXPL		

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Dari tabel di atas, tampak bahwa kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, urusan perpustakaan



memang dapat dikatakan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 terjadi trend positif, progress atau kemajuan terhadap jumlah koleksi buku dan judul buku yang dimiliki, sementara itu untuk jumlah anggota perpustakaan dan kunjungan perpustakaan terjadi fluktuasi.

2. Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar yang berawal dari penciptaan arsip sebagai informasi manajemen. Kemudian diikuti dengan pemeliharaan dan penyediaan layanan siap akses kepada pengguna internal dan publik. Pada saat negara mengkampanyekan akses yang lebih besar terhadap informasi publik melalui penyusunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka pada saat yang sama pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar juga harus mengkampanyekan pengelolaan arsip yang lebih baik, dan secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah arsip perangkat daerah yang telah dikelola dengan baik di depo arsip BPAD Kota Denpasar, khususnya arsip in aktif sesuai dengan kaidah kearsipan mengalami peningkatan sebanyak 50% yaitu dari 8 perangkat daerah pada tahun 2011 menjadi 12 perangkat daerah pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 16 perangkat daerah. Sementara itu pada tahun 2014 menjadi 20 perangkat daerah, dan pada tahun 2015 menjadi 24, sebagaimana disajikan pada tabel 2.118 di bawah ini :

Tabel. 2.77.

Pengelolaan arsip in aktif dan Monitoring evaluasi kearsipan dari Tahun 2011-2015

Pengelolaan arsip in aktif	2011	2012	2013	2014	2015
Jmlh Perangkat Daerah yg dikelola arsipnya	8	12	16	20	24
Jmlh Perangkat Daerah Seluruhnya	34	34	34	34	34
% arsip in aktif yang tersimpan dengan baik	23,53%	35,29%	47,06%	58,82%	70,59%
MONEV kearsipan					
% Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip dengan baik	100% 34 PD	100% 34 PD	100% 34 PD	100% 34 PD	100% 34 PD



Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berjumlah 34 Perangkat Daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa sampai dengan tahun 2015 prosentase arsip in aktif yang telah tersimpan dengan baik di depo arsip BPAD Kota Denpasar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku sebesar 70,59%, sedangkan prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip dengan baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kearsipan yang dilakukan ke perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebesar 100%.

Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan.

Pencapaian sasaran yang selama ini telah diraih tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah :

1. Prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan
2. Masih minimnya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan.

2.1.3.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan peternakan, hal-hal yang menjadi perhatian adalah tetap terjaganya kualitas daging yang beredar dan penanggulangan penyakit ternak yang dapat menular ke manusia. Kota Denpasar memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih tujuh kilometer, potensi perikanan dan kelautan cukup memadai sebagai lahan untuk mengais rejeki bagi para nelayan.

Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan sektor peternakan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kesehatan produksi hasil ternak
- b) Kurangnya keterampilan SDM peternak, pembudaya ikan dan nelayan, dalam rangka peningkatan produksi dan pengelolaan usaha yang berwawasan agribisnis
- c) Alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman mengakibatkan berkurangnya lahan untuk usaha peternakan
- d) Menurunnya kesempatan berusaha di bidang peternakan akibat meningkatnya potensi pencemaran lingkungan
- e) Kurangnya sarana perikanan tangkap kelompok nelayan



B. URUSAN PARIWISATA

1. DINAS PARIWISATA

Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dan juga mengakibatkan fluktuasi tingkat hunian kamar di Kota Denpasar. Perkembangan kunjungan wisatawan sepuluh tahun terakhir merupakan cerminan membaiknya kondisi kepariwisataan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama-sama dengan seluruh komponen/pelaku pariwisata untuk memulihkan kondisi kepariwisataan.

Tabel. 2.78.
Perkembangan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara
Tahun 2010 s/d 2015

No	Tahun	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Jiwa)	Kunjungan Wisatawan Nusantara (jiwa)
1	2010	253.609 orang	162.448 orang
2	2011	276.163 orang	163.836 orang
3	2012	256.372 orang	167.167 orang
4	2013	210.286 orang	154.054 orang
5	2014	370.588 orang	133.542 orang
6	2015	495.414 orang	85.036 orang

Data menunjukkan bahwa tahun 2015 merupakan pencapaian kuantitas jumlah kunjungan wisatawan menginap di Kota Denpasar terbanyak bagi Kota Denpasar, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disikapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan pelaku pariwisata seperti membangun pencitraan dengan inovasi (pembuatan event pariwisata), pelaksanaan promosi terpadu melalui media cetak maupun elektronik, menyebarluaskan materi promosi dalam bentuk brosur-brosur (Denpasar info, Pesona Denpasar, Discover Denpasar, Denpasar To Day, Map of Denpasar, Booklet City Tour, Buku Calendar of Event, dan lain-lain), VCD, mengikuti promosi dan roadshow, pemanfaatan teknologi melalui website.

Kebudayaan dengan latar belakang agama hindhu adalah sebagai daya tarik utama kepariwisataan di Kota Denpasar. Eksistensinya harus dapat dipertahankan sebagai modal pembangunan dan untuk pengembangan kepariwisataan ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- Keterbatasan komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah baik intern maupun ekstern
- Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT



C. URUSAN PERTANIAN

1. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB

Dalam hal ini peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumberdaya di sektor pertanian yang ada di Kota Denpasar. Kunci keberhasilan pengembangan usaha pada sektor pertanian terletak pada aspek perencanaan. Adanya perencanaan yang matang dan sistematis sangat diperlukan karena agribisnis secara modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dalam kebijakan pengembangan sektor, pengembangan pertanian kota Denpasar diharapkan untuk menuju pada pengembangan *urban farming* dan menjaga ekosistem perkotaan.

Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar, mengingat semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian. Masalah-masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Tingginya alih fungsi lahan karena nilai lahan pertanian di Kota Denpasar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Alih fungsi lahan
- b) Kesuburan tanah dan kesediaan air yang menurun
- c) Belum optimalnya kelembagaan petani, kualitas SDM petani, penyuluh dan koordinasi dengan instansi terkait

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung capaian indikator jumlah produktivitas hasil pertanian antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan SDA dan SDM Pertanian;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna dengan menerapkan teknologi budidaya pertanian.
3. Penyediaan sarana produksi pertanian;
4. Pengembangan bibit unggul pertanian;
5. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;

Monitoring, pengumpulan, analisa dan evaluasi data produksi tanaman pangan dan hortikultura.



D. URUSAN PERDAGANGAN

1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan di Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ketidakpuasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b) Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen ekspor bagi pengusaha diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk dari Kota Denpasar melewati batas negara.
- c) Masih terbatasnya akses pasar untuk meningkatkan perdagangan terutama produk dagangan yang dihasilkan oleh industri kecil menengah.

2.1.3.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN

A. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.

Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (Perangkat Daerah) menyiapkan rancangan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah pelibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).

Perencanaan menentukan arah yang hendak ditempuh di masa depan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas atau mutu dari perencanaan. Kualitas suatu perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangatlah bergantung pada keakuratan data masukan yang akan diolah. Kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data disebabkan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas yang berimplikasi pada kualitas perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*inpact*).

2. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat



menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesimbangan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya.

Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin deras arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat.

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2010–2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan di atasnya.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

2.1.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah (pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani).

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Kota Denpasar.



Tabel. 2.79.
Angka Konsumsi RT perkapita Menurut Kecamatan Kota Denpasar
Tahun 2014

NO	Kecamatan	Total Pengeluaran RT		Jumlah RT		RASIO	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		2013*	2014	2013*	2014	2013*	2014
1.	Kecamatan Denpasar Utara	5.285.312	5.813.843	52.973	58.270	99.77	99.77
2.	Kecamatan Denpasar Selatan	4.331.276	4.764.403	81.112	89.223	53.40	53.40
3.	Kecamatan Denpasar Timur	3.911.994	4.303.193	39.055	42.960	100.17	100.17
4.	Kecamatan Denpasar Barat	3.679.265	4.047.191	70.447	77.491	52.23	52.23
	Jumlah	4.240.784	18.930.644	243.587	269.958	17.41	70.12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Catatan *) : angka sementara

Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dikatakan cukup baik.

Tabel. 2.80.
Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar
Tahun 2014

NO	Kecamatan	Total Pengeluaran RT Non Pangan		Total Pengeluaran		Rasio	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5=3/4)	
		2013*	2014	2013*	2014	2013*	2014
1.	Kecamatan Denpasar Utara	3.488.306	3,837,136	5.285.312	5,813,843	0.66	0.66
2.	Kecamatan Denpasar Selatan	2.720.016	2,992,017	4.331.276	4,764,403	0.64	0.63
3.	Kecamatan Denpasar Timur	2.542.769	2,797,045	3.911.994	4,303,193	0.65	0.65
4.	Kecamatan Denpasar Barat	2.244.352	2,468,787	3.679.265	4,047,191	0.61	0.61
	Jumlah	2.714.101	12,096,999	4.240.784	18,930,644	0.64	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Catatan *) : angka sementara

1. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untukantisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).



Tabel. 2.81.
Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2014
Kota Denpasar

No	Uraian	2010	2011	2012*	2013*	2014
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	214.852	221.958	224.530	209.400	212.300
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	24.885	28.712	30.174	24.100	24,300
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	239.737	250.670	254.704	233.500	236.600
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	553.780	554.230	579.205	612.700	609.900
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0.43	0.45	0.44	0,38	0,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.

2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

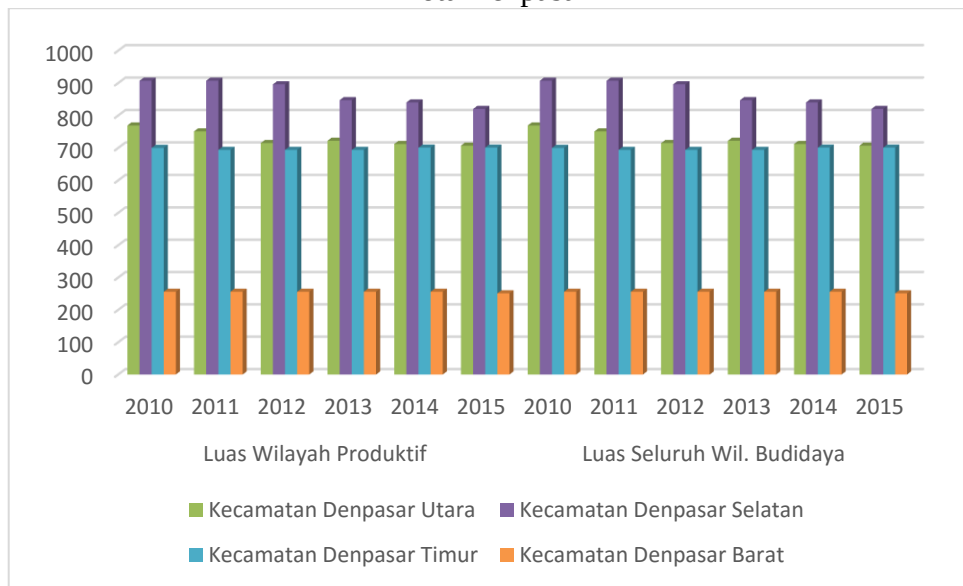
Tabel. 2.82.
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2014
Kota Denpasar

NO (1)	Kecamatan (2)	Luas Wilayah Produktif (3)						Luas Seluruh Wil. Budidaya (4)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Denpasar Utara	769	751	715	722	712	707	769	751	715	722	712	707
2	Kecamatan Denpasar Selatan	907	907	896	847	840	820	907	907	896	847	840	820
3	Kecamatan Denpasar Timur	700	694	694	694	701	701	700	694	694	694	701	701
4	Kecamatan Denpasar Barat	256	256	256	256	256	251	256	256	256	256	256	251
	Jumlah	2.632	2.608	2.561	2.519	2.509	2.479	2.632	2.608	2.561	2.519	2.509	2.479

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar



Gambar. 2.24
 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2015
 Kota Denpasar



Tahun 2014 terjadi penyusutan lahan sawah di kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 5 ha yang terdiri dari Subak Sanur 1 ha, Subak Intaran Barat 2 ha dan Subak Cuculan 2 ha. Di Kecamatan Dentim terjadi penyusutan lahan sawah di Subak Taman 3 ha, di Subak Umadesa terjadi penambahan lahan sawah (pelimpahan dari Kabupaten Badung sebanyak 11 ha)

Tahun 2015 terjadi penyusutan lahan sawah di kecamatan Denpasar Barat sebanyak 5 ha yang terdiri dari Subak Semila 2 ha, Subak Lange 2 ha dan subak Tegalbuah 2 ha. Di Kecamatan Denpasar Utara terjadi penyusutan lahan sawah sebanyak 5 ha di Subak Petangan. Di Kecamatan Densel terjadi penyusutan lahan sawah sebanyak 20 ha yang terdiri dari Subak Kapaon 2 ha, subak Cuculan 5 ha, subak Renon 2 ha, subak Panjer 6 ha dan subak Kerdung 5 ha.

2.1.4.3 Fokus Iklim berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran angka kriminalitas yang tertangani oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan).



Tabel. 2.83.
Angka Kriminalitas Kota Denpasar

Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013
Jumlah kasus Narkoba	128	163	171	170
Jumlah kasus Pembunuhan	8	4	6	6
Jumlah Kejahatan Seksual	9	5	3	3
Jumlah kasus Penganiayaan	155	16	157	198
Jumlah kasus Pencurian	1187	960	857	919
Jumlah kasus Penipuan	111	183	117	147
Jumlah kasus Penadiah	1	2	13	4
Jumlah kasus penggelapan	133	247	206	174
Jumlah kriminalitas selama 1 tahun	1732	2.379	2.743	3.052

Sumber : Poltabes Kota Denpasar

2.1.4.4 Fokus sumber daya manusia

Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai.

Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur per Desember 2015, terbanyak adalah lulusan S-1 sebanyak 3.489 orang atau 46,96% diikuti lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 1.754 orang atau sebesar 23,61%.

Tabel. 2.84.
Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Kota Denpasar Tahun 2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SEKOLAH DASAR	135	1,82%
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	172	2,31%
3	SEKOLAH MENENGAH UMUM	1754	23,61%
4	DIPLOMA 1 (D1)	70	0,94%
5	DIPLOMA 2 (D2)	892	12,01%
6	DIPLOMA 3 (D3)	532	7,16%
7	DIPLOMA 4 (D4)	28	0,38%
8	STRATA SATU (S1)	3489	46,96%
9	STRATA DUA (S2)	358	4,82%
10	STRATA TIGA (S3)	-	-
Total		7430	100%

Sumber : BKPP Kota Denpasar (Data 31 Desember 2015)

Jumlah aparatur yang memadai akan lebih optimal perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM Aparatur ini pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya.



2. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untukantisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tabel. 2.85.
Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2014
Kota Denpasar

No	Uraian	2009	2010	2011	2012*	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	152.422	214.852	221.958	224.530	209.400	212.300
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	20.610	24.885	28.712	30.174	24.100	24,300
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	173.032	239.737	250.670	254.704	233.500	236.600
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	476.730	553.780	554.230	579.205	612.700	609.900
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,36	0.43	0.45	0.44	0,38	0,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang dan tahun 2012 yaitu sebanyak 254.704 orang. Untuk usai produktif tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010, untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang dan tahun 2013 sebanyak 612.700 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44 sedangkan di tahun 2013 sebesar 0,38.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai jika ada keterkaitan antara perencanaan di masa datang dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui suatu evaluasi terhadap capaian kinerja yang didasarkan kepada inform;asi yang obyektif. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang secara sekaligus menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Namun dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 ini kami belum bisa sepenuhnya menyajikan data-data hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di Dokumen RKPD Tahun 2016 dengan RPJMD Termasuk pula evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2016) dengan realisasi Renstra Perangkat Daerah karena Dokumen seperti Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini masih dalam proses penyusunan.



2.3.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Permasalahan pembangunan reformasi birokrasi di Kota Denpasar adalah:

- a. Pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik.
- b. Selain itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistematis terhadap pemerintah daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima.
- c. Permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

2. Pendidikan

Indikator kesejahteraan sosial masyarakat Kota Denpasar dapat dilihat dari beberapa indikator tingkat pendidikan masyarakat seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi sekolah. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Denpasar terkait dengan tingkat pendidikan masyarakatnya adalah:

- a. Belum terpenuhinya mutu, akses dan relevansi pendidikan antara lain:
 - (1) Masih kurangnya pendidikan anak usia dini seperti: PAUD berbasis budaya Bali dan Agama Hindu, penyediaan guru PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - (2) Belum terpenuhinya wajib belajar 12 tahun.
 - (3) Masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah, olahraga dan ekstra kurikuler untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendidikan menengah.
 - (4) Masih kurangnya pemberian subsidi buku pelajaran bagi siswa.
- b. Belum terpenuhinya jumlah guru Agama Hindu bagi semua jenjang pendidikan.
- c. Masih terjadi ketimpangan tingkat partisipasi sekolah di masing-masing kecamatan pada masing masing jenjang pendidikan.

3. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti: angka harapan hidup, angka kematian bayi, kematian balita, angka kematian ibu dan lainnya



Berdasarkan atas hal di atas, maka permasalahan tingkat kesehatan masyarakat Kota Denpasar adalah:

- a. Capaian angka harapan hidup Kota Denpasar masih di bawah 74,50
- b. Masih terjadinya kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kematian balita dan adanya gizi buruk walaupun sudah di bawah target nasional.
- c. Capaian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 masih di bawah 100 %.
- d. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani masih di bawah 100 %.
- e. Cakupan pelayanan Ibu Nifas masih di bawah 100 %.
- f. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani masih di bawah 100 %.
- g. Cakupan kunjungan bayi masih di bawah 100 %.
- h. Cakupan pelayanan anak balita masih di bawah 100 %.
- i. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat masih di bawah 100 %.
- j. Cakupan peserta KB Aktif masih di bawah 100 %.
- k. Masih tingginya kasus HIV AIDS.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan dan masih terus dicari solusinya oleh hampir seluruh wilayah termasuk oleh Denpasar. Permasalahan terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar adalah:

- a. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan pendapatan.
- b. Tingginya arus urbanisasi yang terjadi termasuk banyaknya kaum urban yang belum memiliki pekerjaan tetap.

5. Infrastruktur

Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar meliputi pembangunan jalan dan umur pakai jalan mendapatkan perhatian khusus, mengingat semakin panjang umur jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit. Semakin panjang umur pakai jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan pertahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya.

Kegiatan penataan ruang dan perumahan dilaksanakan dalam rangka menata fungsi – fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di wadahnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang berupa interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Permasalahan yang terkait dengan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Denpasar adalah:

- a. Kondisi jaringan utilitas infrastruktur wilayah belum terpadu.
- b. Kondisi jaringan jalan maupun jalan lingkungan beserta utilitasnya serta fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan termasuk jalan menuju pura masih ada yang belum tertata dengan baik.



- c. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak.
- d. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang.
- e. Kawasan/lingkungan Pura/tempat suci dan fasilitas lainnya masih ada yang belum tertaa dengan baik.
- f. Keterbatasan luasan dan sebaran ruang publik.
- g. Masih terdapatnya beberapa kawasan kumuh dan rasio bangunan ber-IMB belum maksimal.
- h. Penataan hunian permukiman yang layak (rumah sehat) dengan akses sanitasi pemukimam yang belum memadai dan terbangun secara optimal.
- i. Kondisi drainase dan prasarana lainnya masih ada yang belum selaras dengan tata ruang sehingga menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir.
- j. Kondisi jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang belum optimal.
- k. Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
- l. Adanya tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
- m. Kurang optimalnya penyusunan perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh seperti kawasan perkotaan.
- n. Belum tersedianya kawasan terpadu antara dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan adanya aliran informasi yang lebih cepat dan efisien.

6. Kebudayaan

Denpasar merupakan salah satu kota kreatif terkait dengan perkembangan seni pertunjukan, arsitektur, pasar seni, kuliner dan lain-lain. Tradisi kreatif tersebut terevitalisasi dan terakselerasi oleh perkembangan industri kerajinan dan pariwisata serta ditopang oleh seniman. Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil inisiatif dan merespon secara holistik, untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan mewujudkan Denpasar Kota Kreatif berbasis budaya unggulan. Secara institusional formal, Kota Denpasar telah tercakup ke dalam salah satu dari sepuluh kelompok Kota Kreatif di Indonesia. Secara aktual empirik, industri kreatif dan aneka kegiatan Denpasar Kreatif telah tumbuh dan hidup di masyarakat akar rumput, seperti : banjar, subak dan Desa Pakraman, STT, Sanggar, PKK dan komunitas kreatif.

Adanya permasalahan pembangunan ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali antara lain:

- a. Belum optimalnya peranan subak dalam menangani pasca panen hasil pertanian.
- b. Masih perlunya upaya pelestarian subak/subak lestari.
- c. Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang secara dinamik melalui penguatan Desa Pekraman/ Desa Adat meliputi: pemberian bantuan peningkatan peran bagi prajuru Desa Pekraman/Adat, peningkatan kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan adat, memperhatikan kesejahteraan prajuru, bantuan peningkatan peran pecalang,



- bantuan kepada Desa Pekraman/Desa Adat, revitalisasi adat dan budaya, memperkuat hukum adat, dan upaya perlindungan aset Desa Pekraman
- d. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, terutama perlindungan Pura Sad Khayangan, Dang Khayangan, Khayangan Jagat dan Khayangan Desa yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.
 - e. Perlunya peningkatan pengelolaan budaya, Pura, simbol-simbol sakral sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri bangsa.
 - f. Perlunya peningkatan pelestarian budaya Bali melalui hari Berbasa Bali, Busana Bali, dan mempergunakan huruf Bali dalam penamaan fasilitas publik.
 - g. Perlu peningkatan pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya (Listibiya) untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia dan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.
 - h. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa guna mewujudkan hak paten seni.
 - i. Masih adanya warisan budaya yang masih belum di dokumentasikan dengan baik.
 - j. Hampir punahnya beberapa kesenian langka yang masih ada dan perlunya upaya peningkatan pementasan seni budaya Bali pada pentas di hotel dan restoran.
 - k. Masih perlunya pembinaan srada bakti dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal dan peningkatan kesejahteraan Pemangku Pura serta peningkatan kerjasama dengan Lembaga Umat Hindu.
 - l. Perlu adanya sarana gedung budaya yang memadai dalam rangka pengembangan seni dan budaya.
 - m. Perlu adanya penghargaan kepada pelaku seni budaya.
 - n. Perlu adanya pelestarian naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno.

7. Kreativitas dan inovasi

Untuk mendukung kinerja pembangunan Kota Denpasar, diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, nasional, regional, dan global. Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, dan teknik rekayasa. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu. Permasalahan terkait dengan penguatan inovasi daerah di Kota Denpasar adalah:

- a. Belum adanya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara sistemik dan sistematis yang merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan,



jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik).

- b. Inovasi daerah dan kreativitas daerah belum optimal dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah.

8. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum. Adapun permasalahan ketahanan pangan di Kota Denpasar. Adapun permasalahan ketahanan pangan di Kota Denpasar adalah:

- a. Masih kurangnya kajian penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b. Masih kurangnya pemetaan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk ketahanan pangan.
- c. Perlindungan terhadap sawah, sumberdaya air, kesuburan tanah, akses terhadap sarana produksi dan bantuan kepada petani dalam rangka peningkatan ketahanan pangan belum optimal.
- d. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- e. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat.
- f. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.

9. Perekonomian

Permasalahan yang dihadapi Kota Denpasar berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Ketimpangan peningkatan pertumbuhan antar sektor ekonomi pembentuk PDRB.
- b. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang belum merata
- c. Penurunan peranan sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta sektor industri pengolahan.
- d. Pertumbuhan sektor pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum belum mampu mendorong sektor pertanian, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Adapun permasalahan koperasi dan UKM di Kota Denpasar antara lain:

- a. Adanya koperasi yang tidak aktif.
- b. Belum berkembangnya koperasi berbasis pertanian, pariwisata dan UMKM di Kota Denpasar.
- c. UMKM belum mampu untuk mengakses pasar secara luas.
- d. Aspek permodalan, pengolahan, pemasaran dan daya saing UMKM masih lemah.



10. Iklim infestasi dan iklim usaha

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi di Kota Denpasar. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Denpasar dalam peningkatan iklim investasi adalah:

- a. Belum optimalnya kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung.
- b. Investasi yang dikelola belum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat secara adil dan merata
- c. Belum adanya kajian mendalam pada investasi yang telah dan akan dilakukan, baik investasi yang bersifat fisik maupun non fisik.

11. Lingkungan hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk: melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Permasalahan di bidang lingkungan Kota Denpasar, diantaranya adalah :

- a. Masih terjadinya ancaman banjir, timbunan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah medis, limbah domestik, minyak jelantah, abrasi pantai, interusi air laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, sungai tercemar berat, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, semakin punahnya jenis-jenis flora dan fauna asli Kota Denpasar, semakin langkanya penyu hijau, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau, semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim.

12. Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

Adapun permasalahan yang masih dihadapi Kota Denpasar dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan politik anatar lain:

- a. Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
- b. Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi: peningkatan kesadaran bela negara, peningkatan koordinasi forum pembauran kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa,
- c. Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) meliputi: Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan



Narkoba, Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi, Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak dibawah Umur,

- d. Masih perlunya pendidikan politik masyarakat, meliputi: verifikasi bantuan keuangan parpol, pendidikan politik pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol, koordinasi forum-forum diskusi politik, pendidikan politik kepada organisasi massa.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Denpasar merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Adapun permasalahan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Denpasar meliputi:

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah terutama berkaitan dengan keberadaan penduduk pendatang, (Krama Tamui dan tamiu), dan yang berkaitan dengan ketertiban umum lainnya terutama di lingkungan Desa Pekraman.
- b. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung Penertiban Pelanggaran.
- c. Koordinasi yang dilakukan antara Sat.Pol.PP Kota Denpasar dengan instansi terkait baik dengan PD yang lain maupun dengan Aparat Desa Adat/Pecalang masih perlu ditingkatkan.
- d. Adanya Kepentingan-kepentingan lain dalam masyarakat sehingga cenderung menimbulkan gangguan ketertiban umum.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah adalah gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah tersebut untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2017 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2017 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan Pemerintah Kota Denpasar akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan



ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada beberapa faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter maupun sektor riil. Pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing serta kondisi ekonomi dunia secara umum sangat berdampak pada perekonomian di daerah.

Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.



Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Denpasar Harga Berlaku (Juta) Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.170.980,2	2.475.899,4	2.748.028,1
B	Pertambangan/Penggalian	22.890,0	25.071,3	25.331,0
C	Industri Pengolahan	2.058.868,3	2.342.479,7	2.595.381,5
D	Listrik, Gas	84.997,1	110.422,4	145.849,8
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	80.390,4	87.636,9	101.116,1
F	Konstruksi	2.951.641,2	3.126.126,5	3.555.518,0
H	Transportasi dan Pergudangan	902.921,2	1.052.803,7	1.171.372,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	7.870.764,7	9.908.704,4	10.924.363,3
J	Informasi dan Komunikasi	1.302.543,3	1.424.722,2	1.635.008,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.876.978,1	2.146.320,0	2.360.242,8
L	Real Estate	1.319.135,6	1.495.441,7	1.676.201,7
M,N	Jasa Perusahaan	524.618,3	596.164,2	689.930,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.427.889,9	1.617.884,1	1.785.016,6
P	Jasa Pendidikan	3.105.984,0	3.561.373,5	4.141.638,8
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	610.845,4	699.700,8	823.650,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	432.701,8	491.543,8	572.252,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.389.254,9	34.209.865,6	38.463.726,3

Sumber : BPS Kota Denpasar

*) : Angka sementara

**) : Angka sangat sementara



Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Denpasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.827.499,2	1.983.619,7	1.976.247,5
B	Pertambangan/Penggalian	20.139,7	19.969,7	19.006,2
C	Industri Pengolahan	1.802.751,6	1.948.014,8	2.105.854,0
D	Listrik, Gas	121.804,1	125.621,7	124.978,6
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	79.944,9	85.230,3	90.373,9
F	Konstruksi	2.498.338,9	2.526.388,3	2.718.743,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.358.611,5	2.515.109,7	2.756.326,1
H	Transportasi dan Pergudangan	789.100,7	856.361,7	908.224,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	5.989.052,1	6.318.390,2	6.564.846,5
J	Informasi dan Komunikasi	1.302.991,7	1.386.996,9	1.507.982,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.557.298,7	1.696.853,4	1.819.415,3
L	Real Estate	1.194.073,9	1.292.791,0	1.414.793,6
M,N	Jasa Perusahaan	476.363,1	509.545,9	547.390,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.123,4	1.516.580,5	1.616.264,4
P	Jasa Pendidikan	2.722.354,0	2.996.744,5	3.238.726,1
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	540.153,0	604.239,3	680.789,0
R,S,T,U	Jasa Lainnya	369.608,1	396.127,7	433.279,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	25.026.208,7	26.778.585,1	28.433.247,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

*) : Angka sementara

**) : Angka sangat sementara



Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	7,39	7,24	7,14
B	Pertambangan/Penggalian	0,08	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	7,01	6,85	6,75
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,29	0,32	0,38
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,27	0,26	0,26
F	Konstruksi	10,04	9,14	9,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,00	8,91	9,13
H	Transportasi dan Pergudangan	3,07	3,08	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	26,78	28,96	28,40
J	Informasi dan Komunikasi	4,43	4,16	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,39	6,27	6,14
L	Real Estate	4,49	4,37	4,36
M,N	Jasa Perusahaan	1,79	1,74	1,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	4,73	4,64
P	Jasa Pendidikan	10,57	10,41	10,77
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	2,08	2,05	2,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,47	1,44	1,49
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

*) :Angka sementara

*) :Angka sangat sementara



3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,43	8,54	-0,37
B	Pertambangan/Penggalian	6,45	-0,84	-4,83
C	Industri Pengolahan	7,29	8,06	3,48
D	Pengadaan Listrik, Gas	7,07	3,13	-0,51
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	4,63	6,61	6,04
F	Konstruksi	5,05	1,12	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	6,64	9,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,91	8,52	6,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	7,45	5,50	3,90
J	Informasi dan Komunikasi	4,85	6,45	8,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,90	8,96	7,22
L	Real Estate	6,03	8,27	9,44
M,N	Jasa Perusahaan	8,27	6,97	7,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,96	10,21	6,57
P	Jasa Pendidikan	12,77	10,08	8,07
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	11,81	11,86	12,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	7,18	9,38
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,96	7,00	6,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

*) : Angka sementara

**) : Angka sangat sementara



3.1.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi ikut naik. Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan mengadakan inventasi.

Tabel 3.5
Inflasi di Kota Denpasar
(Dalam Persen)

Tahun	Inflasi (%)
2011	6,77
2012	4,75
2013	6,85
2014	6,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya laju inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam konteks Kota Denpasar, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2011 mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 3,75 persen. Begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mencapai 7,18 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 4,75 persen.

3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN)

Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena *multiplier effect* dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu juga sebagai tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di propinsi bali. Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan



peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini.

Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disamping itu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah.

Kecendrungan yang terjadi dengan pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah/kota berlomba-lomba untuk dapat menarik investasi ke daerahnya, yang secara ekonomi dapat dikatakan terjadinya persaingan untuk dapat merebut investasidan ini merupakan babak baru yang harus dihadapi pemerintah daerah/kota. Potensi daerah/kota dan adanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, sehingga Kota Denpasar yang memiliki infrastruktur yang memadai sering diincar oleh para investor untuk berinvestasi.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh BKPM RI merupakan Penanaman Modal dengan Fasilitas. Penanaman Modal baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan Penanam Modal Dalam Negeri non fasilitas dan dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, penanam modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, karena tumbuhnya penanaman modal secara sehat akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari peningkatan penerimaan nasional, perluasan kegiatan usaha, peningkatan peluang ekspor, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.

Sebagaimana proses manajemen maka investasi juga dimulai dari adanya rencana investasi. Rencana investasi dengan fasilitas yang pendaftarannya di BKPM RI persetujuannya dalam bentuk Surat Pendaftaran Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya setelah adanya surat pendaftaran yang juga disebut Ijin Prinsip Penanaman Modal maka penanam modal tersebut harus menindaklanjuti dengan perijinan-perijinan daerah yang diperlukan sesuai dengan usaha yang dibangun. Setelah perijinan daerah dilengkapi maka penanam modal dapat memohon Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUT). Dengan adanya IUT maka sudah terjadi realisasi investasi.



Dalam kegiatan penanaman modal peran dari aparat pemerintah adalah sebagai fasilitator/mediator yang selalu dituntut untuk mengembangkan pemahaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penanaman modal, terutama bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bersikap proaktif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan. Kegiatan pembinaan ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Tentunya para penanam modal yang memerlukan perijinan di daerah hendaknya menindaklanjuti perijinan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang dituju. Dalam hal ini perlu dilaksanakan Pengendalian Penanaman Modal secara efektif dan terus menerus untuk menuntun setiap rencana investasi dapat di realisasikan dengan meminimalkan hambatan, pelanggaran maupun penyimpangan sehingga secara nyata mendatangkan manfaat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modal tersebut wawasan pengetahuan serta kemampuan profesionalisme aparat pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat pengendalian mempunyai implikasi yang besar terhadap kelancaran dan terlaksananya suatu investasi. Aparatur pengendalian tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dan berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah.

Mengingat pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam usaha menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Denpasar. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menjaga keamanan, menyederhanakan proses perijinan, dan mengembangkan potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi riil terhadap pelaksanaan investasi di Kota Denpasar maka dapat dipahami permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan investasi di Kota Denpasar.





Tabel. 3.6
INVESTASI PMDN

Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016 (triwulan 1)	
	Jumlah	Investasi	Jumlah	Investasi	Jumlah	Investasi	Jumlah	Investasi	Jumlah	Investasi	Jumlah	Investasi
Perdagangan dan Industri	1770	2.606.196.364.807	1912	3.035.075.277.522	1991	2.943.074.362.051	1549	1.117.702.341.539	719	13.283.022.646.391	290	2.972.950.094.848
Kesehatan	372	44.001.941.145	110	63.385.570.922	256	33.961.837.932	266	9.223.042.550	152	7.051.880.894	22	33.104.000.000
Pariwisata	1269	12.902.000.000.000	206	311.346.000.000	211	286.310.000.000	178	242.084.000.000	123	133.168.000.000	47	138.726.420.359
Total	3.411	15.552.198.305.952	2.228	3.409.806.848.444	2.458	3.263.346.199.983	1.993	1.369.009.384.089	994	13.423.242.527.285	359	3.144.780.515.207

Sumber: BPPTSP dan Penanaman Modal Kota Denpasar

Tabel 3.7
JUMLAH PERUSAHAAN DAN PEKERJA

No	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Perusahaan	151	161	206	1.132
Pekerja	3.061	2.593	1.532	1.481

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor dan saling berkaitan satu sama lain, dengan semakin menurunnya investasi asing maka kita harus membangkitkan kembali ekonomi lokal melalui gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar.

Begitu pentingnya investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu upaya yang lebih koordinatif dalam penanganannya. Nilai investasi akan meningkat apabila terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi investor melalui transparansi regulasi investasi.

3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan tahun 2017

Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi, tetapi untuk merealisasikannya tidak mudah. Pengalaman dari negara lain bahwa membangun basis industri yang kokoh dan mengakar serta mampu mentransformasikan gagasan, yang akan menyentuh benak konsumen sebagai pasarnya merupakan tahapan yang cukup unik. Mulai dari proses seleksi, penguatan kapasitas, pematangan di inkubator, mempertemukan dengan distributor, sampai kepada pemberi modal, dan membangun pasar, semestinya peran ini diambil pemerintah agar berlangsung kesinambungan. Terutama, industri yang berbasis budaya. Sebab, sektor ini yang banyak digeluti UKM dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, keunggulan lain industri berbasis budaya adalah dari kekuatan pasar, yang masih bisa diandalkan untuk bertahan hidup dan tidak melakukan PHK.

Beberapa tantangan Pengembangan Ekonomi : *Pertama*, pengaruh harga minyak global yang semakin tak terkendali dan tidak stabil. Kenaikan ini akan mempengaruhi kinerja industri kreatif, terutama pada meningkatnya harga bahan baku dan ongkos produksi. *Ke-dua*, masih sulitnya pengembangan investasi karena keterbatasan dari pengembangan kota, sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas. *Ke-tiga*, daya saing produk-produk kita yang masih rendah, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini bisa mempengaruhi volume produksi dari industri kreatif. Dan *ke-empat*, terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berdaya saing.

Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka pengembangan ekonomi diantaranya yaitu:

1. Mengupayakan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri kreatif, kalangan akademisi dalam sebuah blueprint rencana pengembangan ekonomi kreatif.
2. Sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku.



3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dengan pola pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship.
4. Memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun nonperbankan.
5. Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan ekonomi global pada era industri kreatif, Kota Denpasar memolakan pembangunan dengan empat strategi pokok yang saling mendukung dan saling menguatkan yaitu (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya, dan pemahaman agama, (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) keamanan lingkungan yang kondusif.
6. Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif merupakan salah satu tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat Pusat maupun Daerah dan juga ketersediaan SDM di daerah yang bisa merespon dengan cepat peluang-peluang yang menarik investor. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan SDM.
7. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (*sektor riil*) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain: (1) pengelolaan sistem perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) penciptaan paket investasi kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; dan (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat.

Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk



meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (3) meningkatkan pengaliran sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (trust fund) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat serta perlunya sinkronisasi kebijakan, isu-isu strategis, dan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga APBD diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. pendapatan
2. belanja dan
3. pembiayaan.

Upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan Perusahaan Daerah dan Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah perlu ditingkatkan dengan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Daerah.

Disisi lain, menciptakan iklim investasi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan antara lain yang berasal dari dana bagi hasil bersumber pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Sumber-sumber penerimaan lain yang efektif adalah badan usaha milik daerah memiliki nilai strategis mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga



berfungsi untuk pemerataan dan pengendalian atas sumber-sumber daya yang memiliki daerah kota terhadap warganya, serta bernilai ekonomis karena produk pelayanan yang dihasilkan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan perkotaan saat ini. Jadi optimalisasi perusahaan daerah perlu dilakukan mengingat memberikan penerimaan daerah yang berkelanjutan juga pengelolaan sumber-sumber daya daerah dapat optimal, khususnya Perusahaan Daerah Parkir dan Perusahaan Daerah Pasar.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang bernilai strategis dan ekonomis perlu didorong seperti pembangunan terminal cargo dan fasilitasnya sebagai bentuk investasi baik dikelola sendiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar
Tahun 2014 s.d tahun 2018

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Target	Proyeksi	Proyeksi
		2014	2015	pada Tahun 2016	pada Tahun 2017	pada Tahun 2018
1	2	4	5	6	7	7
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	698.739.758.265,29	776.214.148.513,50	715.452.847.611,03	783.728.505.639,56	820.132.879.550,56
1.1.1	Pajak daerah	510.582.655.887,08	549.362.947.314,67	533.177.647.760,28	573.909.173.000,00	600.934.916.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	54.764.869.960,00	59.243.426.854,00	46.231.038.000,00	46.519.000.000,00	47.074.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang	24.953.437.777,60	35.341.143.333,08	25.758.161.850,75	28.074.220.639,56	27.934.740.350,56



	dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	108.438.794.640,61	132.266.631.011,75	110.286.000.000,00	135.226.112.000,00	144.189.223.200,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	693.247.533.041,00	681.684.333.083,00	1.087.392.416.353	676.120.732.833	676.506.662.800
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	69.892.793.041,00	50.479.636.083	85.655.993.353	50.142.225.833	50.528.155.800
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	69.316.158.278	49.270.421.050	84.373.347.000	48.933.010.800	48.933.010.800
1.2.1.1.1	Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.973.719.084,00	7.816.392.250,00	7.478.982.000	7.478.982.000	7.478.982.000
1.2.1.1.2	Bagi Hasil dari Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	62.342.439.194,00	41.454.028.800,00	76.894.365.000	41.454.028.800	41.454.028.800
1.2.1.1.3	Bagi Hasil dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
1.2.2.1	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	576.634.763	1.209.215.033	1.282.646.353	1.209.215.033	1.595.145.000
1.2.2.1.1	Bagi Hasil dari pungutan Hasil Perikanan	383.182.410	703.264.033	1.089.194.000	703.264.033	1.089.194.000
1.2.2.1.1	Bagi hasil cukai Tembakau	193.452.353	505.951.000	193.452.353	505.951.000	505.951.000
1.2.2	Dana alokasi umum	615.961.906.000,00	625.978.507.000,00	661.794.756.000,00	625.978.507.000	625.978.507.000
1.2.4	Dana Alokasi khusus	7.392.834.000,00	5.226.190.000,00	339.941.667.000,00	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	335.981.421.494,04	327.674.600.474,26	211.301.804.870,02	225.506.648.285	225.506.648.285
1.3.1	Hibah	4.110.072.000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah					
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan	126.747.131.494,04	170.161.549.474,26	184.188.799.870,02	203.643.643.284,57	203.643.643.284,57



	dari Pemerintah Daerah lainnya					
1.3.3.1	Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi	126.747.131.494,04	170.161.549.474,26	184.188.799.870,02	203.643.643.284,57	203.643.643.284,57
1.3.3.1.1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	32.928.698.902,36	45.826.914.084,22	52.943.654.123,43	57.888.178.173	57.888.178.173
1.3.3.1.2	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	34.255.549.493,87	51.121.277.766,06	44.286.666.666,67	50.124.700.696	50.124.700.696
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	47.535.136.332,56	51.481.674.817,14	64.095.010.415,13	69.416.735.667	69.416.735.667
	Bagi hasil pajak Air Bawah Tanah					
1.3.3.1.3	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	104.836.549,97	134.756.438,61	112.391.023,42	173.128.589,38	173.128.589,38
1.3.3.1.4	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.922.910.215,28	21.596.926.368,23	22.751.077.641,37	26.040.900.159	26.040.900.159
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	204.874.218.000	157.263.051.000	26.863.005.000	21.863.005.000	21.863.005.000
1.3.4.1.2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD					
	Tunjangan Profesi Guru	182.110.933.000,00	122.716.746.000,00	-	0	0
	Dana Desa	-	9.723.248.000,00	21.863.005.000,00	21.863.005.000	21.863.005.000
	Dana Insentif Daerah	22.763.285.000,00	24.823.057.000,00	5.000.000.000,00	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi pemerintah daerah lainnya)	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0	0
1.3.5.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0
1.3.5.1.1	Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobolitas penduduk pendatang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0
1.3.5.1.2	Tunjangan penghasilan Bendesa adat					



1.3.5.1.4	Bantuan Kepada Sekaa/ sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0
1.3.5.1.9	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Puskesmas)					
1.3.5.1.10	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilukada)					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.727.968.712.800,33	1.785.573.082.070,76	2.014.147.068.834,05	1.685.355.886.757,13	1.722.146.190.635,13

Sumber : Bagian Keuangan

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja pegawai, pemenuhan belanja Rutin perkantoran, Belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun.



Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target
		2014	2015	pada Tahun 2016	pada Tahun 2017	pada Tahun 2018
1	2	4	5	6	7	7
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	903.436.800.667,23	1.034.937.555.844,17			
2.1.1	Belanja Pegawai	755.951.061.961,52	769.525.773.707,34			
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	46.883.417.000	87.123.626.156,00			
2.1.5	Belanja bantuan sosial	162.500.000	2.723.500.000,00			
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*	29.044.000.000	29.044.000.000,00			
2.1.6.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa					
2.1.7	Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ kota Pemerintah Desa dan partai Politik	71,371,171,830.71	146.440.462.889,83			
2.1.7.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	43,941,443,049.71				
2.1.7.1.1	Bantuan Keuangan Untuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)					
2.1.7.1.2	Belanja Bantuan Keuangan					



	PHR kepada Provinsi					
	Bantuan kepada BPKS					
2.1.7.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan	26,598,300,000.00				
2.1.7.2.1	Bantuan Kepada Kelurahan	-				
2.1.7.2.2	Bantuan Kepada Desa Pakraman					
2.1.7.2.3	Bantuan Kepada Banjar adat					
2.1.7.2.4	Bantuan Kepada Banjar Dinas					
2.1.7.2.5	Bantuan Nafkah Bendesa					
2.1.7.2.6	Tunjangan Penghasilan Kelian Adat					
2.1.7.2.7	Bantuan Keuangan Kepada desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan					
2.1.7.2.8	Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa / Kelurahan					
2.1.7.2.9	Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan					
2.1.7.2.10	Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM					
	Bantuan Kepada Desa					
2.1.7.2.11	Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Kelurahan Penatih					
	Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah (BLUPAL)					



2.1.7.2.12	Bantuan Kepada Desa (Bantuan Kepada Sekaa Teruna Se Kota Denpasar)					
	Alokasi Dana Desa					
2.1.7.5	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	831,428,781.00				
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	24.649.875,00				
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	903,436,800,667.23				
2.2	BELANJA LANGSUNG	744.941.967.959,00				
2.2.1	Belanja Pegawai	14.758.938.250,00				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	496.137.153.803,00				
2.2.3	Belanja Modal	234.045.875.906,00				
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	744.941.967.959,00				
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.648.378.768.626,23				

Sumber : Bagian Keuangan

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. kebijakana pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.



Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target
		2014	2015	2016	pada Tahun 2017	pada Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	222.364.871.218,51				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	222.364.871.218,51				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberi pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	222.364.871.218,51				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.020.343.837,00				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan pokok utang	-				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
3.2.5	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19,999,306,437.00				
	PDAM					
	BPD					
	Pembayaran Pokok Hutang	21,037,400.00				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20,020,343,837.00				
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	202,344,527,381.31				

Sumber : Bagian Keuangan



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda, perbedaan masalah ini menjadikan daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda pula. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui Rencana Program Pembangunan Daerah Tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas permasalahan daerah yang menjadi prioritas untuk diatasi. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program- program unggulan Perangkat Daerah dalam rangka tercapainya target/sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah, suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya sebagai suatu strategik pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional seperti terhadap MDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah;
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.



4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dalam RPJMD. Berdasarkan pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah ada 5 (lima) prinsip pendekatan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik; (2) pendekatan perencanaan politik; (3) pendekatan perencanaan partisipatif; (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*;) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*). Dengan memperhatikan proses pembangunan di Kota Denpasar agar tetap berjalan serta prinsip-prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan maka prioritas dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2017 dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pembangunan yang ada.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, namun masih belum mencapai capaian yang telah ditargetkan karena adanya kendala baik secara teknis maupun kendala non teknis sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Denpasar, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2017 yang ditetapkan adalah

**“ PEMANTAPAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN SINERGITAS
PEMBANGUNAN GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK MENUJU DENPASAR KOTA CERDAS ”**

Mengacu pada Agenda Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 9 agenda prioritas yang lebih dikenal dengan NAWACITA antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial



4.3. Prioritas Pembangunan.

Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 13 prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Infrastruktur
6. Kebudayaan
7. Kreativitas dan inovasi
8. Ketahanan Pangan
9. Perekonomian
10. Iklim investasi dan iklim usaha
11. Kesejahteraan rakyat
12. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
13. Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

Tabel 4.1
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Kota Denpasar	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara	1	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban
2	Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	2	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	3	- Infrastruktur - Lingkungan Hidup
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	4	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	5	- Pendidikan - Kesehatan - Kesejahteraan rakyat - Kreativitas dan inovasi



6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	6	- Perekonomian - Iklim investasi dan iklim usaha
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	7	- Iklim investasi dan iklim usaha
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	8	
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik	9	Kebudayaan

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan dalam bentuk program-program prioritas, yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun keterkaitan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta program prioritas yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.2.
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja
				2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja
				3 Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja



				4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesbangpol
				5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
				6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
				7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kesbangpol
				8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbangpol
			Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda			
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja
				2	Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
			Kesehatan	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Denut
				2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Denut
				3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Denut
				4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Densel



				5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Densel
				6	Program pengembangan Lingkungan Sehat	Kec. Densel
				7	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Densel
				8	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kec. Densel
				9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Dentim
				10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Dentim
				11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Denbar
				12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Denbar
				13	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Denbar
				14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kec. Denbar
				15	Program pengembangan Lingkungan Sehat	Kec. Denbar
				16	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	BPM
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Sekretariat (Bag. Pemerintahan)
				18	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Kec. Denut



				19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Denut
				20	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Densel
				21	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Densel
				22	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Kec. Dentim
				23	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Dentim
				24	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Denbar
				25	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Denbar
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		26	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kec. Densel
				27	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kec. Denbar
				28	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Bappeda
		Pendidikan		29	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kec. Densel
				30	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kec. Dentim
				31	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kec. Denbar



			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	32	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Denut
				33	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Densel
				34	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Dentim
				35	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Denbar
			Sosial	36	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Denut
				37	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Densel
				38	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Dentim
				39	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Denbar
			Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar			
			Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kec. Densel
				2	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kec. Denbar



			Kearsipan	3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				4	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				5	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Kebudayaan	7	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Denut
				8	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Densel
				9	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Dentim
				10	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Denbar
			Kepemudaan Dan Olahraga	11	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Denut
				12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Densel
				13	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Dentim
				14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Denbar
			Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Denut
				16	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Densel



				17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Dentim
				18	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Denbar
		Komunikasi Dan Informatika		19	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Sekretariat (Bag.Humas)
				20	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sekretariat (Bag.Humas)
				21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
				22	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				23	Program kerjasama informasi dan media massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Lingkungan Hidup		24	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Densel
				25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Dentim
				26	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Denbar
		Pangan		27	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Sekretariat (Bag.Aset)
				28	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
				29	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)



				30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	BPM
		Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		31	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Denut
				32	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Denut
				33	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Densel
				34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Densel
				35	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kec. Densel
				36	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Densel
				37	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Kec. Dentim
				38	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Dentim
				39	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kec. Denbar
				40	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Kec. Denbar
				41	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Denbar



			42	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	BPM
			43	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	BPM
			44	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	BPM
			45	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	BPM
			46	Program penanggulangan Kemiskinan	BPM
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kec. Denut
			48	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kec. Denut
			49	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kec. Densel
			50	Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Kec. Dentim
			51	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kec. Denbar
		Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	52	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kec. Denut
			53	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kec. Denut



				54	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kec. Densel
				55	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Kec. Densel
				56	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kec. Dentim
				57	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kec. Dentim
				58	Program Keluarga Berencana	Kec. Denbar
				59	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kec. Denbar
				60	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kec. Denbar
			Perpustakaan	61	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Persandian	62	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat



				63	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sekretariat (Bag.Probang)
				64	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sekretariat (Bag.Keuangan)
			Statistik	65	Program Pengembangan Data/Informasi	Bappeda
			Urusan Pemerintahan Pilihan			
			Pariwisata	1	Program Pengembangan Kemitraan	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
				2	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
			Perdagangan	3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Denut
				4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Densel
				5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Dentim
				6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Denbar
			Pertanian	7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	BPM



			Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda		
			Bidang Keuangan	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat (Bag.Aset)
				2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat (Bag Organisasi)
				3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Sekretariat (Bag.Keuangan)
				4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat (Bag.Keuangan)
				5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Set DPRD
				6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Dentim
			Bidang Perencanaan Pembangunan	7 Program Kerjasama Pembangunan	Sekretariat (Bag.Pemerintah n)
				8 Program kerjasama pembangunan	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
				9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Denut
				10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Densel



				11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Dentim
				12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Denbar
				13	Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
				14	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Bappeda
				15	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
				16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
				17	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
				18	Program Perencanaan Sosial Budaya	Bappeda
				19	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Bappeda
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		20	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat
				21	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Inspektorat
				22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat (Bag.Aset)



			23	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat (Bag. Pemerintahan)
			24	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Sekretariat (Bag. Pemerintahan)
			25	Program Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan	Sekretariat (Bag. Pemerintahan)
			26	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Sekretariat (Bag. Kerjasama)
			27	Program peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat (Bag. Humas)
			28	Program peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat (Bag. Humas)
			29	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat (Bag. Humas)
			30	Program Penerapan Kepemerintahan yang baik	Sekretariat (Bag Organisasi)
			31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat (Bag Organisasi)
			32	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sekretariat (Bag Organisasi)
			33	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat (Bag Organisasi)
			34	Program koordinasi pembangunan daerah	Sekretariat (Bag. Probang)
			35	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Set DPRD
			36	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Denut



				37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Densel
				38	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Densel
				39	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Dentim
				40	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Dentim
				41	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Denbar
				42	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Denbar
			Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	43	Program Pendidikan Kedinasan	BKPP
				44	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPP
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah	Infrastruktur	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas PU
				3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PU
				4	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Dinas PU



				5	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PU
				6	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dinas PU
				7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dinas PU
				8	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PU
				9	Program Pengendalian Banjir	Dinas PU
				10	Program Perencanaan Tata Ruang	DTRP
				11	Program Pemanfaatan Ruang	DTRP
				12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DTRP
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		13	Program Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Dan Pemukiman	Dinas PU
				14	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dinas PU
				15	Program Pengembangan Perumahan	DTRP
				16	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	BPBD
				17	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD



			Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar			
			Perhubungan	1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
				2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
				3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan
				4	Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
				5	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
				6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor	Dinas Perhubungan
			Lingkungan Hidup	7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DKP
				8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DKP
				9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKP
				10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	DKP
		Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	BPBD	



		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Lingkungan Hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLH
				2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	BLH
				3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	BLH
				4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	BLH
				5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	BLH
				6 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	BLH
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda		
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat (Bagian Hukum)
5	1. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Pendidikan	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
			Pendidikan	1 Program Pendidikan anak Usia Dini	Dinas Pendidikan



				2	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
				3	Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
				4	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
				5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
				6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				7	Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Dinas Pendidikan
			Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar			
			Perpustakaan	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Pendidikan
			Kebudayaan	2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan
			Kepemudaan Dan Olahraga	3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Dinas Pendidikan
				4	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Dinas Pendidikan
		Kesehatan	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
			Kesehatan	1	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan



				2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
				3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
				5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
				6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				7	Program Pengawasan Obat dan makanan	Dinas Kesehatan
				8	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Dinas Kesehatan
				9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				10	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Dinas Kesehatan
				11	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
				12	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Dinas Kesehatan
				14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan
				15	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Dinas Kesehatan



				16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Dinas Kesehatan
				17	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	RSU.Wangaya
			Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda			
			Bidang Keuangan	1	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kesehatan
		Kesejahteraan Rakyat	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
			Sosial	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsonaker
				2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinsonaker
				3	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Dinsonaker
				4	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinsonaker
				5	Program Keluarga Harapan	Dinsonaker
			Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar			



			Tenaga Kerja	1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Dinsonaker
				2	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Dinsonaker
				3	Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinsonaker
			Kearsipan	4	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dinsonaker
			Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				7	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				8	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				9	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	10	Program Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				11	Program Pelayanan kontrasepsi	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				12	Program Kesehatan reproduksi remaja	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB



				13	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				14	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				15	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				16	Program Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU, PAUD	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
				17	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda			
				1	Program Peningkatan Solidaritas Aparat di dalam Rangka Hut Kota	Dinsonaker
				2	Program Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dinsonaker
			Kreatifitas dan Inovasi			
			Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar			
			Komunikasi Dan Informatika	1	Program kerjasama informasi dan media massa	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal



			Penanaman Modal	2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
				3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
			Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda		
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
6	1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Perekonomian	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Tenaga Kerja	1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Dinsonaker
				2 Program Peningkatan Kesempatan kerja	Dinsonaker
				3 Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinsonaker
		Kreatifitas dan inovasi	Urusan Pemerintahan Pilihan		
			Pariwisata	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
				2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
				3 Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata



		Iklim investasi dan iklim usaha	Urusan Pemerintahan Pilihan		
			Industri	1 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Dinas Perindustrian
				2 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian
				3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Dinas Perindustrian
				4 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian
			Perdagangan	5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian
				6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian
				7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Iklim infestasi dan iklim usaha	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Dinas Koperasi
				2 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Dinas Koperasi
				3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi



				4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi
				5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bagian Ekonomi
				6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bagian Ekonomi
				7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bagian Ekonomi
			Pangan	8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
				9	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	Dinas Peternakan
				10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi
				11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi
				12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi
				13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi



			Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bagian Ekonomi
				15	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bagian Ekonomi
			Penanaman Modal	16	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Bagian Ekonomi
				17	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Bagian Ekonomi
			Urusan Pemerintahan Pilihan			
			Pertanian	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian
				2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
				3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
				4	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Dinas Pertanian
				5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Dinas Peternakan
				6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Dinas Peternakan
				7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan



				8	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Peternakan
				9	Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Dinas Peternakan
			Kelautan Dan Perikanan	10	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Peternakan
				11	Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Peternakan
				12	Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Peternakan
				13	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Peternakan
			Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda			
			Bidang Keuangan	1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dispenda
				2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Dinas Koperasi
			Bidang Perencanaan Pembangunan	3	Program Kerjasama Pembangunan	Bagian Ekonomi
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dispenda
				5	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Bagian Ekonomi



9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial	Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Sekretariat (Bag.Kesra)
			Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Kebudayaan	1 Program Pengembangan nilai budaya	Sekretariat (Bag.Kesra)
				2 Program Pengelolaan keragaman budaya	Dinas Kebudayaan
				3 Program Pengembangan nilai budaya	Dinas Kebudayaan
				4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan
			Kepemudaan Dan Olahraga	5 Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Sekretariat (Bag.Kesra)
			Persandian	6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sekretariat (Bag.Kesra)



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Untuk menetapkan rencana program dan prioritas daerah maka dilakukan sebuah proses panjang mulai dari pelaksanaan musyawarah tingkat desa/kelurahan yang kemudian hasilnya dibawa dalam bentuk usulan prioritas desa/kelurahan ke musyawarah tingkat kecamatan. Dalam upaya mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhatikan lingkungan strategis.

Rencana program dan kegiatan tahun 2017 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat. Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu daerah yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Dalam suatu daerah, termasuk Pemerintah Kota Denpasar penentuan prioritas pembangunan daerah ini merupakan suatu yang penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi kegiatan dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya perumusan rencana program dan pagu dana tahun 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 5.1
Rumusan rencana program dan pagu dana tahun 2017

Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Pagu Dana	Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
Pendidikan	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,172,488,436	Dinas Pendidikan
		10,000,000	Kec. Dentim
		37,610,000	Kec. Denbar
		9,520,500	Kec. Densel
	2 Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	138,103,580,781	Dinas Pendidikan
	3 Program Pendidikan Menengah	2,060,652,620	Dinas Pendidikan
	4 Program Pendidikan Non Formal	1,345,189,756	Dinas Pendidikan
	5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	2,603,017,100	Dinas Pendidikan
	6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7,754,814,220	Dinas Pendidikan
Kesehatan	7 Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar	4,005,486,500	Dinas Pendidikan
	1 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	4,613,074,400	Dinas Kesehatan
	2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3,686,119,200	Dinas Kesehatan
	3 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	17,600,000	Dinas Kesehatan
	4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	405,000,000	Kec. Dentim
		175,229,780	Kec. Denut
		160,000,000	Kec. Denbar
		225,167,250	Kec. Densel
	5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	22,420,030,672	Dinas Kesehatan



6	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	418,186,400	Dinas Kesehatan
7	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	310,500,000	Dinas Kesehatan
8	Program Pengawasan Obat dan makanan	27,410,000	Dinas Kesehatan
9	Program pengembangan Lingkungan Sehat	523,462,800	Dinas Kesehatan
		13,179,320	Kec. Denbar
		10,675,500	Kec. Densel
10	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	173,901,300	Dinas Kesehatan
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	266,494,050	Dinas Kesehatan
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	144,747,600	Dinas Kesehatan
13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	12,000,000	Kec. Denbar
		633,308,500	Kec. Densel
		999,662,000	Dinas Kesehatan
14	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	115,893,463,000.00	RSUD Wangaya
15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	432,104,000	BPM
		555,105,900	Dinas Kesehatan
16	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	35,563,000	Kec. Denut
		20,242,000	Kec. Denbar
		49,841,000	Kec. Densel
		1,068,174,000	Dinas Kesehatan
17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,443,442,900	Dinas Kesehatan
18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	33,668,690	Kec. Denut
		210,129,000	Kec. Denbar
		27,885,000	Kec. Densel
		6,758,762,000	Dinas Kesehatan



		196,000,000	Kec. Dentim	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Program Pemanfaatan Ruang	464,369,994,300	DTRP
	2	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	63,395,099,400	Dinas PU
			641,710,512,254	Dinas PU
	3	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	214,305,000	Kec. Denbar
			278,399,440	Kec. Densel
			19,431,691,314	Dinas PU
	4	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	507,798,000	Dinas PU
	5	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	4,823,724,222	Dinas PU
	6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	18,259,487,000	Dinas PU
	7	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1,475,656,000	Bappeda
	8	Program Pengendalian Banjir	2,000,000,000	Dinas PU
	9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	15,444,377,400	DTRP
	10	Program Perencanaan Tata Ruang	668,684,000	DTRP
	11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6,934,133,900	Dinas PU
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	146,000,000	Kec. Dentim
			841,578,965	Kec. Denut
			203,400,000	Kec. Denbar
			850,016,085	Kec. Densel
			27,855,920,000	Dinas PU
	2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	117,000,000	BPBD
			4,114,927,500	Dinas PU
	3	Program Pengembangan Perumahan	3,550,848,000	DTRP



	4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	6,624,250,000	BPBD
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	277,174,500	Kesbangpol
	2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	509,764,839	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,482,000,000	BPBD
	4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	395,000,000	Kesbangpol
	5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,269,669,800	Kesbangpol
			26,000,000	Kec. Dentim
			23,685,750	Kec. Denut
			1,112,995,000	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
			1,959,350,250	Sekretariat (Bag.Kesra)
			28,261,000	Dinas Pendidikan
			54,132,000	Kec. Denbar
			40,191,250	Kec. Densel
	6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3,204,156,000	Kesbangpol
			30,000,000	Kec. Dentim
			195,000,000	Kec. Denut
			352,217,350	Satuan Polisi Pamong Praja
			155,098,000	Kec. Denbar
			30,987,000	Kec. Densel
	7	Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban	117,948,600	Satuan Polisi Pamong Praja
	8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	240,000,000	Kesbangpol
Sosial	1	Program Keluarga Harapan	133,910,000	Dinsonaker
	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	784,935,700	Dinsonaker



	3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	330,470,200	Dinsonaker
	4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	299,000,000	Kec. Dentim
			263,878,480	Kec. Denut
			289,736,000	Kec. Denbar
			340,549,000	Kec. Densel
			1,720,009,850	Dinsonaker
	5	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	812,091,200	Dinsonaker
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja	1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	670,483,200	Dinsonaker
	2	Program Peningkatan Kesempatan kerja	685,032,450	Dinsonaker
	3	Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	540,094,400	Dinsonaker
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	143,760,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	2	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1,218,238,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			7,363,950	Kec. Denut
			52,000,000	Kec. Dentim
	3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	16,467,000	Kec. Denut
			295,580,200	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			8,900,000	Kec. Denbar
			8,030,000	Kec. Densel
	4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	114,875,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB



Pangan	1	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	158,725,000	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
			376,643,800	Sekretariat (Bag.Aset)
	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	130,867,500	BPM
			1,655,258,750	Dinas Pertanian
			1,139,100,000	Bagian Ekonomi
			155,023,000	Bagian Ekonomi
	3	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	737,325,500	Dinas Peternakan
	4	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	93,390,000	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
Lingkungan Hidup	1	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	106,645,000	BLH
	2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,152,289,000	DKP
	3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	28,520,858,108	DKP
	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	120,000,000	Kec. Dentim
			59,119,501,030	DKP
			166,386,000	Kec. Denbar
			31,185,000	Kec. Densel
	5	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,090,185,380	BLH
	6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	351,033,400	BLH
	7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	452,157,200	BLH
	8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	336,994,500	DKP
			1,169,421,450	BLH



	9	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	358,988,440	BLH
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	200,000,000	Kec. Dentim
			279,520,335	Kec. Denut
			2,576,603,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			148,310,000	Kec. Denbar
			470,783,500	Kec. Densel
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	Program penanggulangan Kemiskinan	187,128,500	BPM
	2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	455,425,750	BPM
			74,897,000	Kec. Denbar
				Bagian Ekonomi
			165,500,000	Bagian Ekonomi
	3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2,138,387,000	BPM
			9,443,500	Kec. Densel
	4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	190,000,000	Kec. Dentim
			96,905,580	Kec. Denut
			1,097,845,670	BPM
			243,015,000	Kec. Denbar
			387,640,000	Kec. Densel
	5	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	102,000,000	Kec. Dentim
			327,923,200	Kec. Denut
			3,932,965,000	BPM
			55,715,000	Kec. Densel
			335,216,750	Kec. Densel
	6	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	279,512,000	Kec. Denbar
	7	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	1,000,000,000	BPBD
Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1	Program Keluarga Berencana	449,755,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			30,000,000	Kec. Denbar



	2	Program Kesehatan reproduksi remaja	166,300,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	3	Program Pelayanan kontrasepsi	205,510,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	4	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	679,919,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	5	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	396,370,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	6	Program Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU, PAUD	168,900,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	7	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	269,875,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	8	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	77,000,000	Kec. Dentim
			70,463,800	Kec. Denut
				Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			50,235,000	Kec. Denbar
			72,113,800	Kec. Densel
	9	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	236,765,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	10	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	135,000,000	Kec. Dentim
			150,196,750	Kec. Denut
			165,149,000	Kec. Denbar
			208,279,500	Kec. Densel
Perhubungan	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	8,593,414,890	Dinas Perhubungan
	2	Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	1,550,000,000	Dinas Perhubungan
	3	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor	1,699,358,930	Dinas Perhubungan



	4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	20,761,810,103	Dinas Perhubungan
	5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor	375,000,000	Dinas Perhubungan
	6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	10,393,000,000	Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika	1	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	665,000,000	Sekretariat (Bag.Humas)
	2	Program kerjasama informasi dan media massa	568,450,000	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
			473,075,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	16,827,760,260	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4,776,563,000	Sekretariat (Bag.Humas)
	4	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	90,670,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	960,640,000	Dinas Koperasi
	2	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	30,000,000	Kec. Denbar
			91,228,610	Kec. Densel
			2,882,392,800	Dinas Koperasi
	3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1,912,775,000	Bagian Ekonomi
			374,500,000	Bagian Ekonomi
				Bagian Ekonomi
			806,174,300	Dinas Koperasi
	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2,532,253,000	Dinas Koperasi
Penanaman Modal	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	835,290,000	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
			165,850,000	Bagian Ekonomi



	2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	682,580,000	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
			466,900,000	Bagian Ekonomi
Kepemudaan Dan Olahraga	1	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	560,000,000	Kec. Dentim
			525,739,720	Kec. Denut
			381,477,000	Kec. Denbar
			1,298,943,250	Kec. Densel
			847,617,000	Sekretariat (Bag.Kesra)
			9,841,634,800	Dinas Pendidikan
	2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,802,450,500	Dinas Pendidikan
Statistik	1	Program Pengembangan Data/Informasi	831,630,000	Bappeda
Persandian	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,198,443,125	Inspektorat
			705,714,050	Sekretariat (Bag.Probang)
			195,927,800	Sekretariat (Bag.Kesra)
			11,169,000	Sekretariat (Bag.Keuangan)
Kebudayaan	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	6,782,813,050	Dinas Kebudayaan
	2	Program Pengelolaan keragaman budaya	3,758,101,450	Dinas Kebudayaan
			458,659,000	Dinas Pendidikan
	3	Program Pengembangan Nilai Budaya	927,000,000	Kec. Dentim
			398,424,600	Kec. Denut
			327,198,000	Kec. Denbar
			930,253,500	Kec. Densel
			12,522,834,950	Dinas Kebudayaan
			11,426,565,250	Sekretariat (Bag.Kesra)
Perpustakaan	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,980,717,300	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
			49,966,925	Dinas Pendidikan
Kearsipan	1	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	91,005,800	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	665,607,850	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah



	3	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	774,134,800	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
			49,402,000	Dinsonaker
	4	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	543,531,400	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan				
Kelautan Dan Perikanan	1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	453,952,300	Dinas Peternakan
	2	Program pengembangan budidaya perikanan	368,993,000	Dinas Peternakan
	3	Program pengembangan perikanan tangkap	297,258,000	Dinas Peternakan
	4	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	241,377,200	Dinas Peternakan
Pariwisata	1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3,521,579,050	Dinas Pariwisata
	2	Program Pengembangan Kemitraan	130,190,000	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
			1,050,403,400	Dinas Pariwisata
	3	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,665,847,500	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
			4,000,532,800	Dinas Pariwisata
Pertanian	1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	154,915,000	Dinas Pertanian
			179,686,000	Dinas Peternakan
	2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	482,049,000	Dinas Peternakan
	3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	28,894,750	Dinas Pertanian
	4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	479,702,000	BPM
			381,152,500	Dinas Pertanian
	5	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	254,380,000	Dinas Peternakan



	6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	319,042,000	Dinas Pertanian
	7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,287,160,000	Dinas Peternakan
	8	Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan	216,837,300	Dinas Peternakan
Perdagangan	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	656,375,000	Dinas Perindustrian
	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	120,000,000	Kec. Dentim
			113,690,000	Kec. Denbar
			124,597,000	Kec. Densel
			251,573,916,000	Dinas Perindustrian
			66,731,500	Kec. Denut
	3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	197,000,000	Dinas Perindustrian
Industri	1	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	846,694,000	Dinas Perindustrian
	2	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	645,903,000	Dinas Perindustrian
	3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	628,318,550	Dinas Perindustrian
	4	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	247,361,000	Dinas Perindustrian
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda				
Bidang Perencanaan Pembangunan	1	Program Kerjasama Pembangunan	1,635,050,000	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
			182,700,000	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
				Bagian Ekonomi
			784,650,000	Bappeda
	2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	186,970,000	Bappeda
	3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	75,000,000	Kec. Dentim



		32,550,700	Kec. Denut
		887,277,500	Bappeda
		58,684,000	Kec. Denbar
		55,591,250	Kec. Densel
	4 Program Perencanaan pembangunan ekonomi	703,191,000	Bappeda
	5 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	286,173,000	Bappeda
	6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1,512,148,000	Bappeda
	7 Program Perencanaan Sosial Budaya	1,793,336,800	Bappeda
Bidang Keuangan	1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	304,768,400	Sekretariat (Bag.Aset)
		6,066,460,500	Dispenda
		2,354,781,200	Sekretariat (Bag.Keuangan)
	2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,000,000	Kec. Dentim
		140,000,000	Sekretariat (Bag Organisasi)
		34,778,500	Dinas Koperasi
		30,235,000	Sekretariat (Bag.Keuangan)
		20,429,000	Set DPRD
		125,000,000	Dinas Kesehatan
Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	1 Program Pendidikan Kedinasan	1,751,180,000	BKPP
	2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,099,831,550	BKPP
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program koordinasi pembangunan daerah	87,155,000	Sekretariat (Bag.Probang)
	2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,302,565,050	Kesbangpol
		355,681,310	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
		1,175,316,600	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah



	452,048,200	Sekretariat (Bag Organisasi)
	4,026,253,683	Kec. Denut
	1,157,614,237	Inspektorat
	508,237,950	Sekretariat (Bag.Probang)
	6,074,000,000	BPBD
	1,193,242,520	BPM
	37,119,322,053	DKP
	97,339,000	Sekretariat (Bagian Hukum)
	3,068,744,450	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
	1,574,506,000	BKPP
	1,077,897,000	BLH
	1,996,706,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1,960,150,343	Satuan Polisi Pamong Praja
	1,543,100,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	1,394,420,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5,631,183,595	Sekretariat (Bag.Humas)
	4,004,113,000	Kec. Denbar
	6,433,822,275	Kec. Densel
	492,168,500	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
	3,560,805,000	Set DPRD
	5,456,194,345.00	Sekretariat (Bag. Umum)
	5,847,523,275	Sekretariat (Bag.Aset)
	2,045,382,300	Dinas Kebudayaan
	1,865,259,250	Dinas Pariwisata
	8,815,689,600	Dinas PU
	1,635,288,000	Dinas Pertanian
	287,428,600	Bagian Ekonomi
	1,857,615,250	Dinas Perindustrian
	564,758,500	Sekretariat (Bag.Kesra)
	1,276,507,500	Dinas Peternakan
	6,958,885,000	Dinas Kesehatan
	1,093,873,000	Dinas Koperasi
	2,520,825,200	DTRP
	18,840,000,000	Dinas Perhubungan
	2,188,077,830	Bappeda
	957,674,500	Sekretariat



			(Bag.Keuangan)
		112,563,372,151	Dinas Pendidikan
		4,823,000,000	Kec. Dentim
		3,939,137,600	Dispenda
		1,534,831,500	Dinsonaker
3	Program Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan	82,430,000	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
4	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	271,572,500	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	106,760,000	Inspektorat
6	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	113,600,000	Sekretariat (Bag Organisasi)
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,375,249,000	Sekretariat (Bagian Hukum)
		60,000,000	Kec. Dentim
		17,821,650	Kec. Denut
		38,153,000	Kec. Denbar
		69,102,000	Kec. Densel
8	Program Penerapan Kepemerintahan yang baik	169,845,000	Sekretariat (Bag Organisasi)
9	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	550,000,000	Bagian Ekonomi
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33,400,000	Sekretariat (Bag Organisasi)
		576,983,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		49,300,000	Sekretariat (Bag.Humas)
		78,240,000	Sekretariat (Bag.Humas)
		6,211,540,840	Sekretariat (Bag.Aset)
		30,450,000	Dispenda
11	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	30,795,197,000	Set DPRD
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120,000,000	Kesbangpol
		18,000,000	Sekretariat (Bag.Kerjasama)



		110,000,000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		460,000,000	Kec. Dentim
		23,000,000	Sekretariat (Bag Organisasi)
		85,475,280	Kec. Denut
		163,580,000	Inspektorat
		150,000,000	BPBD
		80,000,000	BPM
		25,000,000	DKP
		67,545,000	Sekretariat (Bagian Hukum)
		1,163,722,300	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
		1,032,796,100	BKPP
		135,000,000	BLH
		70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		324,096,550	Satuan Polisi Pamong Praja
		150,000,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		33,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		68,327,000	Kec. Denbar
		175,538,000	Kec. Densel
		26,000,000	Sekretariat (Bag. Pemerintahan)
		133,000,000	Set DPRD
		39,600,000.00	Sekretariat (Bag. Umum)
		89,000,000	Sekretariat (Bag. Aset)
		94,500,000	Dinas Kebudayaan
		77,500,000	Dinas Pariwisata
		150,000,000	Dinas PU
		75,000,000	Dispenda
		100,000,000	Dinas Pertanian
		100,000,000	Dinas Perindustrian
		20,700,000	Sekretariat (Bag. Kesra)
		22,500,000	Dinas Peternakan
		250,000,000	Dinas Kesehatan
		50,000,000	Dinas Koperasi
		200,000,000	DTRP
		250,000,000	Dinas Perhubungan
		162,000,000	Bappeda
		100,000,000	Dinsonaker



		238,193,000	Dinas Pendidikan
13	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	418,872,500	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	25,000,000	Kec. Dentim
		7,115,000	Sekretariat (Bag Organisasi)
		1,297,172,000	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
		23,331,000	Kec. Denbar
		23,331,000	Kec. Densel
15	Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur	66,039,325	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	2,500,000,000	Sekretariat (Bag.Humas)
		95,890,000	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
17	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	76,420,000	Inspektorat
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	746,490,000	Kesbangpol
		658,655,000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		1,353,525,350	Kec. Denut
		673,000,000	Inspektorat
		738,897,500	Sekretariat (Bag.Probang)
		3,600,000,000	BPBD
		606,440,000	BPM
		852,887,344	DKP
		2,134,521,750	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
		381,030,000	BKPP
		552,080,000	BLH
		946,950,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1,030,685,700	Satuan Polisi Pamong Praja



		775,742,000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		1,109,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1,784,180,000	Kec. Denbar
		2,351,771,250	Kec. Densel
		1,815,269,000	Set DPRD
		2,734,160,000	Sekretariat (Bag.Aset)
		891,890,000	Dinas Kebudayaan
		2,885,155,500	Dinas Pariwisata
		9,929,770,680	Dinas PU
		2,852,042,000	Dispenda
		881,600,000	Dinas Pertanian
		953,193,250	Dinas Perindustrian
		1,000,211,000	Dinas Peternakan
		7,255,872,240	Dinas Kesehatan
		572,500,000	Dinas Koperasi
		1,258,217,352	DTRP
		4,500,000,000	Dinas Perhubungan
		1,022,500,000	Bappeda
		656,686,000	Dinsonaker
		5,718,766,800	Dinas Pendidikan
		1,404,000,000	Kec. Dentim
		7,369,084,800.00	Sekretariat (Bag. Umum)
	19 Program Peningkatan Solidaritas Aparat di dalam Rangka Hut Kota	73,708,000	Dinsonaker
	20 Program Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	59,433,000	Dinsonaker

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Sedangkan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang implementasi dari program prioritas pembangunan daerah dapat diketahui pada **lampiran I : Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2017 Kota Denpasar.**



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2017. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan, maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 mengambil tema “ **Pemantapan Akuntabilitas Kinerja Dan Sinergitas Pembangunan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menuju Denpasar Kota Cerdas** ”

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017, Perangkat Daerah Kota Denpasar dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Denpasar wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis.
2. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan pembangunan.
3. RKPD Kota Denpasar Tahun 2017, disusun berdasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi penerapan rencana program dan kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib menjabarkan RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 ini ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah selanjutnya dipakai dasar atau pedoman dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan arahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2017 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita – cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1.302.565.050	1.432.821.555
	1.19.1.19.01.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar			Prosentase Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	1.302.565.050	1.432.821.555
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Prosentase Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					746.490.000	821.139.000
	1.19.1.19.01.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Denpasar			Prosentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100%	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	746.490.000	821.139.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Prosentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					120.000.000	132.000.000
	1.19.1.19.01.05.05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Denpasar			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 orang	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur	100%	120.000.000	132.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%					3.204.156.000	3.524.571.600
	1.19.1.19.01.15.05		Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA	Kota Denpasar			Jumlah Frekuensi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA	30 kali	Penyedia Data Informasi Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan bagi WNA	100%	493.600.000	542.960.000
	1.19.1.19.01.15.06		Monitoring/Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Jumlah Tim Monitoring/Pemantauan n Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar	25 orang	Terselenggaranya Monitoring/Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar	100%	39.550.000	43.505.000

	1.19.1.19.01.15.07		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Jumlah Frekuensi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA	20 kali	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan di Kota Denpasar	100%	250.000.000	275.000.000
	1.19.1.19.01.15.09		Pengamanan Kawasan Sanur	Kawasan Sanur			Frekuensi Pengamanan Kawasan Sanur	12 bulan	Jumlah Laporan Pertriwulan Kegiatan Keamanan Kawasan Sanur	4 laporan	147.000.000	161.700.000
	1.19.1.19.01.15.10		Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar	Kota Denpasar			Frekuensi Kegiatan Pengamanan, Frekuensi Kegiatan Pembinaan, Frekuensi Koordinasi	12 kali	Jumlah Laporan Pertriwulan Keamanan Situasi dan Kondisi Kota Denpasar	4 laporan	247.500.000	272.250.000
	1.19.1.19.01.15.12		Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini	50 orang	Tersedianya Jaringan Informasi dari Masyarakat dalam rangka Keamanan Kota Denpasar	100%	75.000.000	82.500.000
	1.19.1.19.01.15.13		Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM	50 orang	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM	100%	85.000.000	93.500.000
	1.19.1.19.01.15.14		Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar	Kota Denpasar			Frekuensi Kegiatan Kominda Kota Denpasar	12 kali	Jumlah Laporan Pertriwulan Kominda Kota Denpasar	4 laporan	736.500.000	810.150.000
	1.19.1.19.01.15.15		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kota Denpasar			Frekuensi FKDM	12 bulan	Jumlah Laporan Pertriwulan FKDM Kota Denpasar	4 laporan	240.500.000	264.550.000
	1.19.1.19.01.15.18		Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan bagi Pecalang di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Ormas (Pecalang) di Kota Denpasar	70 orang	Terselenggaranya Pelatihan Pecalang untuk Memahami Ketentuan Mengenai Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	100%	175.000.000	192.500.000
	1.19.1.19.01.15.27		Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Kota Denpasar			Frekuensi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 bulan	Jumlah Laporan Pertriwulan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	4 laporan	568.506.000	625.356.600
	1.19.1.19.01.15.29		Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Denpasar			Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	75 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	100%	146.000.000	160.600.000

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Prosentase Pencapaian Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%					1.269.669.800	1.396.636.780
	1.19.1.19.01.17.01		Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Kota Denpasar			Terciptanya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	100%	Terciptanya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	100%	429.966.000	472.962.600
	1.19.1.19.01.17.06		Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	50 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100%	30.068.500	33.075.350
	1.19.1.19.01.17.08		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Upacara Bendera HUT Kota Denpasar	Kota Denpasar			Jumlah Frekuensi Pelaksanaan HUT Pemerintah Kota Denpasar ke-229	1 kali	Terselenggaranya Pelaksanaan Peringatan HUT Kota Denpasar	100%	325.768.500	358.345.350
	1.19.1.19.01.17.15		Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	70 orang	Terselenggaranya Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	100%	53.964.600	59.361.060
	1.19.1.19.01.17.16		Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Kesadaran Bela Negara	60 orang	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesadaran Bela Negara	100%	80.000.000	88.000.000
	1.19.1.19.01.17.18		Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	75 orang	Terselenggaranya Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100%	61.174.000	67.291.400
	1.19.1.19.01.17.19		Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Denpasar			Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Koordinasi Forum di Desa/Lurah se-Kota Denpasar	2 kali	Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Denpasar	100%	230.520.500	253.572.550
	1.19.1.19.01.17.20		Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	60 orang	Terlaksananya Bintek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	100%	58.207.700	64.028.470
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Prosentase Pencapaian Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%					277.174.500	304.891.950

	1.19.1.19.01.18.03		Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kota Denpasar			Terselenggaranya Lomba Paskibra	100%	Laporan Hasil Kegiatan	1 laporan	114.724.500	126.196.950
	1.19.1.19.01.18.06		Fasilitasi Terhadap Pelestarian Ketahanan Kreasi Seni dan Budaya	Kota Denpasar			Jumlah Peserta BinteK Fasilitasi Terhadap Pelestarian Ketahanan Kreasi Seni dan Budaya	50 orang	Terselenggaranya BinteK Fasilitasi Terhadap Pelestarian Ketahanan Kreasi Seni dan Budaya	100%	85.000.000	93.500.000
	1.19.1.19.01.18.07		Seminar Peningkatan Ketahanan Kebangsaan bagi Penganut Aliran Kepercayaan	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Seminar Peningkatan Ketahanan Kebangsaan bagi Penganut Aliran Kepercayaan	50 orang	Terlaksananya Pemahaman Masyarakat akan Peningkatan Ketahanan Kebangsaan bagi Penganut Aliran Kepercayaan	100%	77.450.000	85.195.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%					240.000.000	264.000.000
	1.19.1.19.01.20.01		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	50 orang	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Dampak Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	100%	80.000.000	88.000.000
	1.19.1.19.01.20.02		Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi	50 orang	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Dampak Perkembangan Praktek Prostitusi	100%	80.000.000	88.000.000
	1.19.1.19.01.20.07		Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur	50 orang	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pencegahan Eksploitasi Anak Dibawah Umur	100%	80.000.000	88.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Program Pendidikan Politik Masyarakat			Prosentase Pencapaian Program Pendidikan Politik Masyarakat	100%					395.000.000	434.500.000
	1.19.1.19.01.21.01		Pendidikan Politik kepada Organisasi Massa	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar	100 orang	Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi untuk Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar	100%	75.000.000	82.500.000

	1.19.1.19.01.21.03		Koordinasi Forum- Forum Diskusi Politik	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Koordinasi Forum- Forum Diskusi Politik	50 orang	Pemenuhan Pengetahuan Pendidikan Politik untuk Forum Komunikasi Konsultasi Partai Politik di Kota Denpasar	100%	45.000.000	49.500.000
	1.19.1.19.01.21.06		Verifikasi Bantuan Parpol	Kota Denpasar			Jumlah Verifikasi Bantuan Parpol	7 partai politik	Pemenuhan Kebutuhan Data Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Denpasar	100%	95.000.000	104.500.000
	1.19.1.19.01.21.07		Pendidikan Politik Pemilih Pemula	Kota Denpasar			Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	200 orang	Pemenuhan Pengetahuan Pendidikan Politik Masyarakat bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	100%	55.000.000	60.500.000
	1.19.1.19.01.21.12		Pemberdayaan Kelembagaan Parpol Tahun 2017	Kota Denpasar			Jumlah Parpol Pemenang Pemilu 2014- 2019 yang Mengikuti Pemberdayaan Kelembagaan	7 partai politik	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Parpol Pemenang Pemilu 2014- 2019	100%	125.000.000	137.500.000
	TOTAL										7.555.055.350	8.310.560.885

BAGIAN KERJASAMA

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.12.25	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah		Denpasar	Jumlah koordinasi dan sosialisasi kerjasama antar daerah	100%	-	-	-	-	418.872.500	460.800.000
	1.20.1.20.03.12.25.05.01		Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Denpasar		-	Jumlah potensi daerah yg tersedia antar kota	3 Kab/kota	Jumlah daerah yg menjadi partner kerjasama /penjajakan	3 Kab/kota	418.872.500	460.800.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata	2.04.1.20.03.12.17	Program Pengembangan Kemitraan		Denpasar	mewujudkan kemitraan	100%	-	-	-	-	130.190.000	145.000.000
	2.04.1.20.03.12.17.10		Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of world heritage cities (OWHC)	Denpasar		-	prosentase partisipasi dlm keanggotaan OWHC	100%	terjalinnnya hubungan antar anggota dlm pembangunan	100%	130.190.000	145.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.20..03.12.16	Program kerjasama pembangunan		Denpasar	Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar kab/kota/ lembaga dan dunia usaha	100%	-	-	-	-	1.635.050.000	1.860.000.000
	1.06.1.20..03.12.16.02		Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Denpasar		-	jumlah informasi pembangunan yg diperoleh	100%	terjalinnnya hubungan antar anggota dlm pembangunan	100%	158.705.000	175.000.000
	1.06.1.20..03.12.16.03		Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dalam Corporate social responsibility (CSR)	Denpasar		-	Terlaksananya sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam CSR	100%	Peran serta dunia usaha/lembaga dan masyarakat terhadap tujuan pembangunan di Kota Denpasar	100%	1.084.255.000	1.250.000.000
	1.06.1.20..03.12.16.05		Monitoring dan Evaluasi kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	Denpasar		-	evaluasi kerjasama	100 buku	laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama	100 buku	392.090.000	435.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata	2.04.1.20.03.12.15.	Program pengembangan pemasaran pariwisata		Denpasar	Pengembangan kerjasama promosi pariwisata	100%	-	-	-	-	1.665.847.500	1.832.400.000
	2.04.1.20.03.12.15.09.		Pengembangan jaringan kerjasama Luar negeri	Denpasar		-	Jumlah pengenalan potensi masing-masing kota	3 kota	Jumlah kerjasama luar negeri/penjajakan	3 kota	1.665.847.500	1.832.400.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.12.05.01	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan kualitas SDM	100%	-	-	-	-	18.000.000	36.000.000
			Biaya Pendidikan dan pelatihan formal	Denpasar		-	jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	2 orang	jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dalam melaksanakan tugas	2 orang	18.000.000	36.000.000

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.12.01.07.	Program pelayanan administrasi perkantoran		Denpasar	memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran	100%	-	-	-	-	355.681.310	391.200.000
	1.20.1.20.03.12.01.07.07		Pelayanan administrasi perkantoran	Denpasar		-	tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	355.681.310	391.200.000
	TOTAL										4.223.641.310	4.725.400.000

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan	1.24.1.24.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Denpasar	Jumlah arsip yang baik						543.531.400	297.660.000
					Ratarata temu balik arsip							
					Jumlah perangkat daerah dengan aplikasi smart arsip yang beroperasi dengan baik							
					Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan informasi kearsipan							
	1.24.1.24.01.15.08		Monitoring dan evaluasi kearsipan	Denpasar	Jumlah arsip yang baik	100%	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonev	1 Laporan	Jumlah arsip yang baik	27 Unit Kerja	244.115.400	228.815.400
					Ratarata temu balik arsip							
	1.24.1.24.01.15.		Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Kec.Denbar, Kec.Dentim, Kec.Densel, Kec.Denut	Jumlah perangkat daerah dengan aplikasi smart arsip yang beroperasi dengan baik	100%	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Perangkat daerah dan Desa/Kelurahan yang memakai sistem informasi kearsipan	1 Laporan	Prosentase terjaminya operasional sistem informasi kearsipan	100%	62.586.000	68.844.600
					Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan informasi kearsipan		100%		Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan informasi kearsipan		1 Laporan	Prosentase terjaminya operasional sistem informasi kearsipan
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan	1.24.1.24.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Denpasar	Jumlah pengadaan sarana dokumentasi						774.134.800	800.128.190
					Jumlah Arsip/dokumen yang diselamatkan							
					Jumlah Arsip/dokumen yang disusutkan							
					Jumlah Arsip/dokumen yang ditemukan							
					Jumlah arsip in aktif yang terkelola dengan baik							
							Pengadaan sarana dokumentasi dalam pengembangan dan penerbitan naskah sumber arsip	Kec.Denbar, Kec.Dentim, Kec.Densel, Kec.Denut	Jumlah pengadaan sarana dokumentasi	100%	Jumlah sarana dokumentas yang diadakan	2 unit

	1.24.1.24.01.16.		Pest Controll	Denpasar	Jumlah Arsip/dokumen yang diselamatkan	100%	Luas area yang dipest controll	1.390 M	terpeliharanya arsip / dokumen Kota Denpasar	100%	138.666.800	145.000.000
	1.24.1.24.01.16.13		Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	Denpasar	Jumlah Arsip/dokumen yang disusutkan	100%	Jumlah arsip yang dinilai dan disusutkan	250 Box arsip	Tercapainya pemusnahan arsip dan efisiensi ruangan kaitannya dengan capaian kinerja	250 Box arsip	249.784.200	249.784.200
	1.24.1.24.01.16.11		Penelusuran arsip/dokumen Kota Denpasar	Denpasar	Jumlah Arsip/dokumen yang ditemukan	100%	Jumlah arsip/dokumen yang ditelusuri	10 Doc	Terkumpulnya dokumen arsip Kota Denpasar	10 Doc	133.102.000	138.000.000
	1.24.1.24.01.16.01		Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Kec Denut,Kec Denbar,Kec,Densel, kec,Dentim	Jumlah arsip in aktif yang terkelola dengan baik	4 Unit Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya diolah	4 Unit Kerja	Terkelolanya arsip in aktif di lingkungan Pemkot Denpasar	4 Unit Kerja	209.919.800	220.415.790
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan	1.24.1.24.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik						91.005.800	94.000.000
	1.24.1.24.01.17.02		Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah	Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	100%	Jumlah arsip dalam box yang dipelihara	3.197 Box	terpeliharanya arsip / dokumen Kota Denpasar	100%	91.005.800	94.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan	1.24.1.24.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Denpasar	Jumlah naskah sumber arsip yang diproduksi						665.607.850	711.393.955
					Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya dalam pengelolaan arsip							
					Prosentase kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang didokumentasikan							
					Jumlah arsip statis yang dipublikasikan							
					Prosentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK							
			Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Kec,Denbar,Kec Dentim,Kec Densel,Kec,Denut	Jumlah naskah sumber arsip yang diproduksi	100%	Jumlah naskah sumber arsip yang dapat diproduksi	1 Buku	Terpublikasinya keberadaan arsip	100%	74.593.400	82.052.740
	1.24.1.24.01.18.		Bimtek tenaga kearsipan dan dokumentasi	Kec,Denbar,Kec Dentim,Kec Densel,Kec,Denut	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya dalam pengelolaan arsip	100%	Jumlah SDM yang diberikan Bimtek	43 orang /18 SKPD	Jumlah peserta bimtek yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sistem kearsipan	43 orang /18 SKPD	124.078.500	136.486.350
	1.24.1.24.01.18.07		Pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar	Kec,Denbar,Kec Dentim,Kec Densel,Kec,Denut	Prosentase kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang didokumentasikan	100%	Jumlah kegiatan Pemkot Denpasar yg dapat didokumentasikan	57 DVD	Prosentase pendokumentasian kegiatan pemerintah kota Denpasar	70%	169.296.150	186.225.765
	1.24.1.24.01.18.05		Pelaksanaan publikasi arsip statis	Denpasar	Jumlah arsip statis yang dipublikasikan	1 kali 100%	Jumlah arsip statis yang dipublikasikan	1 Kali	Terpublikasinya foto-foto arsip Kota Denpasar	1 kali 120 Foto	124.246.800	115.896.800

	82		Pengelolaan ruang studio dan Museum Visual	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kota Denpasar	Prosentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK	100%	Jumlah kunjungan ke ruang studio dan museum visual / diorama	1000 orang	Prosentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK	1000 orang	173.393.000	190.732.300
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan	1.24.1.24.01.19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Denpasar	ah pemustaka ke perpustakaan						1.980.717.300	2.263.196.775
					Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan							
					Jumlah pengelola perpustakaan yang semakin meningkat pengetahuan dan kemampuannya							
					Jumlah Publikasi dan sosialisasi pelestarian bahan pustaka							
					Jumlah koleksi bahan pustaka							
					Jumlah pustaka langka yang direproduksi							
					Jumlah koran dan majalah yang dijilid							
	1.24.1.24.01.19.09		Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Denpasar	Jumlah pemustaka ke perpustakaan	4 Kec	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	10.000	Jumlah pemustaka ke perpustakaan	10.000 orang	450.179.800	472.688.790
							Jumlah anggota perpustakaan	1000 Orang				
							Jumlah silang layanan	416 Kali				
							Jumlah layanan perpustakaan keliling	156 kali				
	1.24.1.24.01.19.10		Pengembangan minat dan budaya baca	Kec, Dentim, kec, Den sel ,Kec, Denbar, Kec, Densel	Jumlah pemustaka ke perpustakaan	120 Orang	Jumlah pelaksanaan lomba peningkatan minat baca	2 kali	Jumlah keikutsertaan peserta lomba	100%	364.295.500	550.882.920
	1.24.1.24.01.19.11		Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat	Kec, Dentim, kec, Den sel ,Kec, Denbar, Kec, Densel	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	5%	Jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat yang disupervisi	50 unit	Jumlah perpustakaan yg tertib administrasi / manajemen perpustakaan dan serta prosentase bertambahnya koleksi perpustakaan pada sekolah sasaran	100%	330.400.000	363.440.000
							Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan	15 Set buku, 15 unit sarana, 5 TBM				

	1.24.1.24.01.19.15		Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan Sekolah	Denpasar	Jumlah pengelola perpustakaan yang semakin meningkat pengetahuan dan kemampuannya	100	Jumlah peserta Bimtek Perpustakaan	100	Bertambahnya pengelola perpustakaan yang profesional	100 sekolah	94.822.700	99.563.835
	1.24.1.24.01.19.17		Publikasi dan sosialisasi pelestarian bahan pustaka dan peningkatan budaya baca	Kec,Dentim,kec,Densel ,Kec, Denbar,Kec,Densel	Jumlah Publikasi dan sosialisasi pelestarian bahan pustaka	12 Kali	Jumlah Publikasi dan sosialisasi pelestarian bahan pustaka	12 Kali	Terpublikasinya pelestarian bahan pustaka	100%	198.795.600	180.175.160
	1.24.1.24.01.19.12		Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Kec,Dentim,kec,Densel ,Kec, Denbar,Kec,Densel	Jumlah koleksi bahan pustaka	100%	Jumlah pengadaan buku	2 500 Buku	Prosentase bertambahnya koleksi bahan pustaka	10%	165.000.000	181.500.000
	1.24.1.24.01.21		Perencanaan dan pelaksanaan reproduksi pustaka langka	Kec,Dentim,kec,Densel ,Kec, Denbar,Kec,Densel	Jumlah pustaka langka yang direproduksi	75 buah buku	Jumlah pustaka langka yang direproduksi	75 buah buku	Tercetaknya 75 bahan pustaka langka	100%	258.426.600	284.269.260
	1.24.1.24.01.21		Penyelenggaraan Koordinasi Konservasi/Pelestarian Bahan Pustaka	Kec,Dentim,kec,Densel ,Kec, Denbar,Kec,Densel	Jumlah koran dan majalah yang dijilid	60 Buah	Jumlah koran dan majalah yang dijilid	60 Buah	Bertambahnya usia pakai koran dan majalah	100%	118.797.100	130.676.810
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.24.1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Denpasar	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran						1.175.316.600	1.234.082.430
	1.24.1.24.01.01.07		Pelayanan administrasi perkantoran	Denpasar	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 kali 100%	Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 kali 100%	Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 kali 100%	1.175.316.600	1.234.082.430
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.24.1.24.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur		Denpasar	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur						658.655.000	691.587.750
	1.24.1.24.01.02.12		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Denpasar	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	1 kali 100%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	1 kali 100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	1 kali 100%	658.655.000	691.587.750
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.24.1.24.01.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Denpasar	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						110.000.000	110.000.000
	1.24.1.24.01.05.05		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Denpasar	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 kali 100%	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/kursus	1 kali 11 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 kali 11 orang	110.000.000	110.000.000
	Total										5.998.968.750	6.202.049.100

KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.10:'01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	91%					4.823.000.000	5.305.000.000
	1.20.1.20.10:'01.07		Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Tertibnya Administrasi Perkantoran	91%	4.823.000.000	5.305.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.10:'02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Pelayanan Aparatur	91%					1.404.000.000	1.544.000.000
	1.20.1.20.10:'02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarpras Aparatur	100%	Terpenuhinya sarpras dalam pelayanan Aparatur	91%	1.404.000.000	1.544.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Kapasitas bagi Aparatur Kecamatan dan Kaling/Kadus	86%					460.000.000	506.000.000
	1.20.1.20.10.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal				Terlaksananya kegiatan Bimtek bagi aparatur Kecamatan	100%	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Kecamatan	86%	60.000.000	80.000.000
	1.20.1.20.10.05.05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Terlaksananya kegiatan Bimtek bagi Kaling/Kadus Kecamatan dentim	100%	Meningkatnya Pengetahuan Kaling/Kadus	86%	400.000.000	426.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.20.1.20.10:'06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Kecamatan Denpasar Timur	% Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					7.000.000	8.000.000
	1.20.1.20.10:'06.01		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terlaksananya pembuatan laporan kinerja dan keuangan Kecamatan	100%	Tertibnya sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Denpasar Timur	100%	7.000.000	8.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	1.01.1.20.10.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Kecamatan Denpasar Timur	% Tingkat Pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD	90%					10.000.000	11.000.000
	1.01.1.20.10.15.65		Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (Melalui BUNDA PAUD)				Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi PAUD	100%	Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya PAUD	90%	10.000.000	11.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.10.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	80%					196.000.000	216.000.000

	1.02.1.20.10.16.27		Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKS)				Terlaksananya Kegiatan UKS	100%	Meningkatnya Pengetahuan Siswa terhadap UKS	80%	76.000.000	79.000.000
	1.02.1.20.10.16.28		Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)				Terlaksananya Kegiatan PKTP	100%	Meningkatnya Pengetahuan Siswa tentang PKTP	80%	38.000.000	52.000.000
	1.02.1.20.10.16.31		Peningkatan Kesehatan Masyarakat (POKJANAL DBD)				Terlaksananya Kegiatan POKJANAL DBD	100%	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang POKJANAL DBD	80%	47.000.000	48.000.000
	1.02.1.20.10.16....		Peningkatan Kesehatan Masyarakat (POKJA KOTA SEHAT)				Terlaksananya Kegiatan POKJA KOTA SEHAT	100%	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang kesehatan melalui Pokja Kota Sehat	80%	35.000.000	37.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.10.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	85%					405.000.000	410.000.000
	1.02.1.20.10.22.01		Penyemprotan / Foging Sarang nyamuk				Terlaksananya kegiatan Foging di Kelurahan	100%	Terciptanya Lingkungan yang bersih bebasNyamuk DBD	85%	300.000.000	300.000.000
	1.02.1.20.10.22.14		Pembrantasan sarang nyamuk dan Lomba PSN				Terlaksananya kegiatan PSN dan Lomba PSN	100%	Terciptanya Lingkungan yang bersih bebas Jentik	85%	105.000.000	110.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.03.1.20.10.33	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman		Kecamatan Denpasar Timur	% Terpeliharanya Lingkungan dan Pemukiman	85%					146.000.000	150.000.000
	1.03.1.20.10.33.08		Pemeliharaan Jalan Lingkungan				Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Gang dan Jalan Lingkungan	100%	Meningkatnya Kondisi Gang dan Jalan Lingkungan	85%	146.000.000	150.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.20.10.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	75%					75.000.000	83.000.000
	1.06.1.20.10.21.15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100%	Terakomodirnya Usulan Masyarakat dalam Berita Acara Musrenbang	75%	75.000.000	83.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.20.10.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	75%					120.000.000	132.000.000
	1.08.1.20.10.15.11		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				Terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan persampahan	100%	terbinanya masyarakat dalam pengelolaan persampahan	75%	120.000.000	132.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.10.1.20.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Kecamatan Denpasar Timur	% Tertibnya administrasi Kependudukan	80%					200.000.000	220.000.000
	1.10.1.20.10.15.22		Pengendalian mobilitas Penduduk Pendetang				Terlaksananya kegiatan penertiban penduduk pendatang	100%	meningkatnya ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan	80%	200.000.000	220.000.000

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.20.10.16	Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya pengarusutamaan gender dan anak	82%					52.000.000	55.000.000
	1.11.1.20.10.16.05		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender	100%	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak	82%	52.000.000	55.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.10.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Kesehatan Ibu, bayi dan anak	76%					135.000.000	142.000.000
	1.12.1.20.10.19.02		Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI)				Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan melalui Gerakan Sayang Ibu (GSI)	100%	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Bayi melalui Gerakan Sayang Ibu	76%	13.000.000	15.000.000
	1.12.1.20.10.19.03		Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan POSYANDU				Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan melalui POSYANDU	100%	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Bayi melalui POSYANDU	76%	87.000.000	90.000.000
	1.12.1.20.10.19.07		Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Lomba Balita Indonesia/LBI)				Terlaksananya Kegiatan pembinaan melalui LBI	100%	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Bayi melalui L B I	76%	35.000.000	37.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.10.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	85%					77.000.000	85.000.000
	1.12.1.20.10.21.01		Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS	100%	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	85%	77.000.000	85.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	1.13.1.20.10.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	80%					299.000.000	318.000.000
	1.13.1.20.10.21.04		Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial (PSM)				Terlaksananya Kegiatan PSM Kecamatan	100%	Berfungsinya Lembaga Sosial (PSM) Kec dengan Baik	80%	10.000.000	11.000.000
	1.13.1.20.10.21.05		Pembinaan Karang Taruna				Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna	100%	Meningkatnya Peran masyarakat dalam kegiatan Karangtaruna	80%	137.000.000	145.000.000
	1.13.1.20.10.21.17		Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting				Terlaksananya Kegiatan Jambore Pramuka	100%	Meningkatnya Peran aktif Generasi muda dalam Kepramukaan	80%	102.000.000	110.000.000

	1.13.1.20.10.21.08		Pembinaan HALUN				Terlaksananya Kegiatan HALUN	100%	Meningkatnya Peran serta Lansia	76%	50.000.000	52.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.1.20.10.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan nilai-nilai budaya Lokal	82%					927.000.000	1.020.000.000
	1.17.1.20.10.15.08		Pembinaan Sekaa Teruna				Terlaksananya Pembinaan Sekaa Teruna	100%	Meningkatnya Pemahaman Sekaa Teruna dalam berorganisasi	82%	110.000.000	130.000.000
	1.17.1.20.10.15.65		Dharma Santi				Terlaksananya Kegiatan Dharma Santhi	100%	Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang beragama	82%	58.000.000	79.000.000
	1.17.1.20.10.15.66		Pembinaan Desa Pekraman				Terlaksananya Pembinaan Desa Pekraman	100%	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Desa Pekraman	82%	115.000.000	135.000.000
	1.17.1.20.10.15.67		Lomba UDG dan Pentas Budaya				Terlaksananya Lomba UDG dan Pentas Budaya	100%	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelstarian budaya lokal	82%	614.000.000	644.000.000
	1.17.1.20.10.15....		Sabha Upadeça Kecamatan				Terlaksananya Sabha Upadeça Kecamatan	100%	Meningkatnya Koordinasi antara lembaga adat dan dinas	82%	30.000.000	32.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga	1.18.1.20.10.20	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Kesehatan masyarakat melalui Olah raga	80%					560.000.000	600.000.000
	1.18.1.20.10.20.26		Kompetisi Olah Raga (Porkel dan Porkot)				Terlaksananya Kegiatan PORKEL dan PORKOT	100%	Meningkatnya pemahaman dan pemasyarakatan Olah raga di Kelurahan	80%	560.000.000	600.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masvarakat	1.19.1.20..10.15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Kecamatan Denpasar Timur	% Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	95%					30.000.000	32.000.000
	1.19.1.20.10.15.05		Pengendalian Keamanan Lingkungan				Terlaksananya pengamanan lingkungan dalam perayaan Nyepi dan Tahun Baru	100%	Meningkatnya kualitas perayaan Nyepi dan Tahun Baru	95%	30.000.000	32.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.10.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan	75%					26.000.000	26.000.000
	1.19.1.20.10.17.03		Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa				Terlaksananya kegiatan Apel Hari Kemerdekaan	100%	Meningkatnya wawasan masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan	75%	26.000.000	26.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.10.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Perundangundangan	85%					60.000.000	70.000.000

	1.20.1.20.10.26.12		Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) antara Kec. Se- Kota Denpasar				Terlaksananya kegiatan pembinaan Kadarkum di Desa/Kelurahan	100%	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Kadarkum tentang Peraturan perundang-undangan	85%	60.000.000	70.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.10.29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Kecamatan Denpasar Timur	% Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	97%					25.000.000	70.000.000
			Peningkatan Penilaian Masyarakat terhadap transparansi Informasi PelayananKecamatan				Terlaksananya pelayanan publik secara prima	100%	Meningkatnya fungsi pelayanan di Kecamatan	97%	25.000.000	70.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.11.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	76%					190.000.000	199.000.000
	1.22.1.20.11.17.12		Pembinaan Perkembangan Desa/Kelurahan dan Profil Kecamatan / Kelurahan				Terlaksananya Pembinaan Perkembangan Desa/Kelurahan, Profil Kecamatan dan Kelurahan	100%	Meningkatnya Partisipasi masyarakat yg tercatat dlm Profil Kec dan Kel	76%	110.000.000	115.000.000
	1.22.1.20.11.17.10		Bulan Bakti Gotong Royong LPM				Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong LPM	100%	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bakti Gotong royong LPM	76%	80.000.000	84.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.10.19	Program Peningkatan Peran perempuan di Perdesaan		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Pembangunan						102.000.000	104.000.000
	1.22.1.20.10.19.03		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)				Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan	100%	Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	76%	85.000.000	86.000.000
	1.22.1.20.10.19.07		P2 WKSS dan UP2K				Terlaksananya Kegiatan P2WKSS dan UP2K	100%	Meningkatnya Peran Wanita dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	76%	17.000.000	18.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	2.06.1.20.10.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Kecamatan Denpasar Timur	% Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi perdagangan	80%					120.000.000	125.000.000
	2.06.1.20.10.18.08		Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan menengah				Terlaksananya Kegiatan Pasar Rakyat	100%	Terakomodirnya Para Pedagang Melalui Pasar Rakyat	80%	120.000.000	125.000.000
JUMLAH											10.449.000.000	11.431.000.000

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%					452.048.200	497.253.020
	1.20.1.20.03.05.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Denpasar			Persentase Belanja Pegawai dan Belanja Pakai Habis untuk Menunjang Kelancaran Kegiatan	100%	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	452.048.200	497.253.020
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar yang meningkat kualitasnya	100%					23.000.000	25.300.000
	1.20.1.20.03.05.05.01		Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Denpasar			Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi yang ikut diklat dan bimtek	2 orang	Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi yang meningkat kemampuan dalam pelaksanaan tugas	2 orang	23.000.000	25.300.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.05.28	Program Penerapan Kepemerintahan yang baik			Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	100%					169.845.000	186.829.500
	1.20.03.05.28.01		Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar	Denpasar			Laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar	1 laporan	Persentase Perangkat Daerah/Unit yang melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi	100%	169.845.000	186.829.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.20.1.20.03.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintah	100%					140.000.000	154.000.000
	1.20.1.20.03.05.06.11		Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	Denpasar			Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	1 Dok	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	B	140.000.000	154.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.05.29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayan Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik	100%					7.115.000	7.826.500

	1.20.1.20.03.05.29.11		Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Denpasar			Jumlah Perangkat Daerah/Unit yang dibina	16 Perangkat Daerah/Unit Pelayanan	Jumlah Perangkat Daerah/Unit yang mendapat peringkat kepatuhan terhadap UU No 25 Tahun 2009	16 Perangkat Daerah/Unit Pelayanan	7.115.000	7.826.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.05.28	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%					113.600.000	124.960.000
	1.20.1.20.03.05.28.16		Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Denpasar			Perda dan Perwali Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perda, 1 Perwali	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	113.600.000	124.960.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Persentase Aparatur Perangkat Daerah / Unit yang Disiplin	100%					33.400.000	36.740.000
	1.20.03.05.03.13		Penyelenggaraan Inspeksi Mendadak dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional (GDN) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Denpasar			Jumlah Perangkat Daerah/Unit yang diinspeksi mendadak	10 Perangkat Daerah/Unit	Jumlah pegawai perangkat daerah / unit yang disiplin dalam melaksanakan tugas	10 PD/Unit	33.400.000	36.740.000
	TOTAL										939.008.200	1.032.909.020

KECAMATAN DENPASAR UTARA

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasiperkantoran						4.026.253.683	4.428.879.051
	1.20.1.20.12.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Denut		100%	Terpenuhinya penyiapan sarana dan prasarana kantor yang memadai	100%	Tercapainya pelayanan yang berkualitas	100%	4.026.253.683	4.428.879.051
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						1.353.525.350	1.488.877.885
	1.20.1.20.12.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Denut		100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100%	Tercapainya pelayanan yang berkualitas	100%	1.353.525.350	1.488.877.885
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.10.1.20.12.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			Penataan Administrasi Kependudukan						279.520.335	307.472.369
	1.10.1.20.12.15		Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendaatang	Kec. Denut		8 Desa/Kelurahan	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendaatang	100%	Tercapainya administrasi kependudukan yang baik	100%	279.520.335	307.472.369
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.1.20.12.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			Pelestrarian Kebudayaan Daerah						398.424.600	438.267.060
	1.17.1.20.12.15.01		Pelestrarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Kec. Denut		1 kali/kegiatan	Pembinaan desa Pekraman,Sekaa Teruna,Dharma santhi, parade ogoh-ogoh,kreatifitasseni, lomba utsawa dharma gita dan pentasbudaya	100%	Tercapainya pelestarian kebudayaan daerah	100%	398.424.600	438.267.060
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.11.15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan			Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan						195.000.000	214.500.000
	1.19.1.20.11.15.05		Penunjang dan Pelatihan Kegiatan Satlinmas	Kec.Denut		100%	penunjang dan pelatihan kegiatan satlinmas	100%	tercapainya pelatihan kegiatan satlinmas	100%	195.000.000	214.500.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.20.12.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak						7.363.950	8.100.345
	1.11.1.20.12.16.05		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak	Kec. Denut		100%	Sosialisasi pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	Tercapainya penguatan pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	7.363.950	8.100.345

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.20.1.20.12.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Peningkatan Kesehatan Masyarakat						33.668.690	37.035.559
	1.20.1.20.12.16.28		Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)	Kec. Denut		1 kali/kegiatan	Penanggulangan Kanker terpadu ParipurnaPKTP	100%	Tercapainya Kesehatan Masyarakat	100%	20.489.370	22.538.307
	1.20.1.20.12.16.29		Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba Kota Sehat)	Kec. Denut		100%	Lomba Kota Sehat	100%	Tercapainya Kesehatan Masyarakat	100%	13.179.320	14.497.252
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.21.1.20.12.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			Peningkatan kualitas SDA						85.475.280	94.022.808
	1.21.1.20.12.16.04		Pendidikan dan pelatihan fungsional/Bintek/Work shop bagi PNS DaerahPNS Daerah	Kec. Denut		100%	Pemenuhan Kualitas PNS	100%	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan teknis PNS Daerah	100%	60.500.000	66.550.000
	1.21.1.20.12.16.07		Bimtek Perangkat Kelurahan	Kec. Denut		41 Kaling	Pelatihan SDA Kelurahan	100%	tercapainya SDA yang berkualitas	100%	24.975.280	27.472.808
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.20.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			Meningkatnya peran pempuan dalam masyarakat						16.467.000	18.113.700
	1.11.1.20.11.17.13		Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui KelompokKegiatan di Masyarakat (GSI)	Kec. Denut		100%	Kegiatan GSI pada Kecamatan Denpasar Utara	100%	Tercapainya hasil lomba kegiatan GSI	100%	16.467.000	18.113.700
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.12.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Peningkatan rasa nasionalisme kebangsaan						23.685.750	26.054.325
	1.19.1.20.12.17.03		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai LuhurBudaya Bangsa	Kec. Denut		100%	Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa	100%	tercapainya rasa nasionalisme kebangsaan	100%	23.685.750	26.054.325
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.12.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			Partisipasi masyarakat dalam membangun desa						96.905.580	106.596.138
	1.22.1.20.12.17.05		Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kec. Denut		8 desa/3 kelurahan	Penyusunan Profil kecamatan dan kelurahan	100%	tersusunnya profil kecamatan dan kelurahandengan baik	100%	44.861.280	49.347.408
	1.22.1.20.12.17.11		Monitoring dan Pembinaan Evaluasi Kelurahan	Kec. Denut		100%	Lomba Kelurahan	100%	tercapainya peningkatan partisipasi masyarakatmembangun desa	100%	52.044.300	57.248.730
Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	2.06.1.20.12.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			pemerdayaan pedagang kecil dan menengah						66.731.500	73.404.650
	2.06.1.20.12.18		Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Kec. Denut		40 pedagang	peningkatan kemampuan pedagang kecil danmenengah	100%	terlaksananya pasar rakyat	100%	66.731.500	73.404.650

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.12.1.20.11.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			Meningkatnya Kesehatan Anak Sekolah						35.563.000	39.119.300
	1.12.1.20.11.19.01		Pembinaan UKS	Kec.Denut		100%	Terbinanya UKS yang ada di denpasar utara	100%		100%	35.563.000	39.119.300
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.12.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat			Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompokkegiatan di masyarakat						150.196.750	165.216.425
	1.12.1.20.12.19.01		Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Kec. Denut		100%	Lomba Kota Layak Anak	100%	tercapainya kota layak anak yang berkualitas	100%	14.014.000	15.415.400
	1.12.1.10.12.19.05		Lomba Balita Indonesia	Kec.Denut		100%	Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat kecamatan	100%	tercapainya kesehatan balita	100%	16.733.750	18.407.125
	1.12.1.20.12.19.06		Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	Kec. Denut		100%	Penyuluhan Posyandu Tingkat Kecamatan	100%	tercapainya posyandu yang berkualitas	100%	119.449.000	131.393.900
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.12.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			Pemerdayaan peran perempuan di pedesaan						327.923.200	360.715.520
	1.22.1.20.12.19.07		Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),(P2WKSS) (UP2K)	Kec.Denut		100%	Pemerdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (P2WKSS) dan (UP2K)	100%	peningkatan peran perempuan di pedesaan	100%	327.923.200	360.715.520
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga	1.18.1.20.12.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			Pembinaan dan pemasarakatan olahraga						525.739.720	578.313.692
	1.18.1.20.12.20.06		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kec. Denut		100%	Kompetisi Olahraga (Porkel dan Porkot)	100%	Tercapainya pembinaan dan pemasarakatan olahraga	100%	525.739.720	578.313.692
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.20.12.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Perencanaan pembangunan daerah						32.550.700	35.805.770
	1.06.1.20.12.21.21		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec.Denut		100%	Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	100%	terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	100%	32.550.700	35.805.770

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.12.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			Penanggulangan narkoba, penyakit sosial masyarakat (PSM) termasuk HIV/AIDS						70.463.800	77.510.180
	1.12.1.20.12.21.01		Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Kec.Denut		100%	Penyuluhan narkoba, penyakit sosial masyarakat (PSM) termasuk HIV/AIDS	100%	Tertanggulangnya Narkoba, Penyakit Sosial Masyarakat (PSM) termasuk HIV/AIDS	100%	70.463.800	77.510.180
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	1.13.1.20.12.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Pemberdayaan Kelembagaan Sosial						263.878.480	290.266.328
	1.13.1.20.12.21.20		Pembinaan PSM	Kec. Denut		100%	Pembinaan pekerja sosial masyarakat	100%	tercapainya pembinaan PSM	100%	34.746.250	38.220.875
	1.13.1.20.12.21.34		Pembinaan Karang Taruna	Kec.Denut		100%	Pembinaan dan Evaluasi Karang Taruna	100%	terbinanya karang taruna	100%	127.022.530	139.724.783
	1.13.1.20.12.21.17		Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting	Kec.Denut		100%	Jambore Kwartir Ranting Pramuka Tingkat	100%	tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan disiplin	100%	102.109.700	112.320.670
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.12.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Penanggulangan penyakit menular		Kecamatan				175.229.780	192.752.758
	1.02.1.20.12.22.07		Pemusnahan/karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular (Lomba PSN)	Kec. Denut		100%	Pemusnahan/karantina sumber penyakit menular	100%	tercapainya penanggulangan penyakit menular	100%	175.229.780	192.752.758
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.12.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			Penataan Peraturan Perundang-Undangan						17.821.650	19.603.815
	1.20.1.20.12.26.15		Pembinaan/publikasi dalam rangka lomba kelompok keluarga sadar hukum	Kec.Denut		100%	Pembinaan Kadarkum	100%	tercapainya lomba kadarkum	100%	17.821.650	19.603.815
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.03.1.20.12.33	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman			Pemeliharaan lingkungan dan pemukiman						841.578.965	925.736.862
	1.03.1.20.12.33.08		Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Kec.Denut		100%	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	100%	tercapainya pemeliharaan lingkungan yang berkualitas	100%	841.578.965	925.736.862
TOTAL											9.023.967.763	9.926.364.540

INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun					1.157.614.237	1.215.494.948,85
	1.20.1.20.07.01.07		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Denpasar			Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan ATK dan administrasi perkantoran	100%	1.157.614.237	1.215.494.948,85
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 tahun					673.000.000	706.650.000
	1.20.1.20.07.02.12		Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Denpasar			Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran perkantoran	1 Lap	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	673.000.000	706.650.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Terpenuhinya SDM yang berkompeten dan berkualitas	1 tahun					163.580.000	171.770.000
	1.20.1.20.07.05.05		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Denpasar			Jumlah SDA yang telah mengikuti diklat	25 orang	SDA yang kompeten dan profesional	100%	163.580.000	171.770.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian	1.20.1.20.07.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang undangan	100%					1.198.443.125	1.258.377.281,25
	1.20.1.20.07.20.01		1. Pengawasan Internal Secara Berkala	Denpasar			Laporan Hasil Pemeriksaan reguler	24 LHP	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang - undangan	100%	376.330.000	395.150.000
	1.20.1.20.07.20.02		2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Denpasar			Laporan Hasil Penanganan Kasus Pengaduan	12 LHP	Tuntasnya Kasus Pengaduan Masyarakat	100%	193.700.000	203.390.000
	1.20.1.20.07.20.03		3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kdh	Denpasar			Laporan hasil Reviu LKPD dan Laporan Hasil Reviu LKj SKPD	2 Lap	Tercapainya opini WTP dan Meningkatnya Nilai Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Denpasar	100%	206.930.000	217.280.000

	1.20.1.20.07.20.06		4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Denpasar			Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan	36 LHP	Tuntasnya tindak lanjut temuan hasil pengawasan	100%	373.044.000	391.696.200
	1.20.1.20.07.20.07		5. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Denpasar			Terbitnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Lap	Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Negara	100%	48.439.125	50.861.081,25
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Meningkatnya Nilai Evaluasi Laporan Kinerja SKPD	100%					76.420.000	80.240.000
	1.20.1.20.07.21.02		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Denpasar			Laporan hasil pelatihan dan laporan hasil penilaian LKj SKPD	2 Lap	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparaturnya terhadap akuntabilitas kinerja	100%	76.420.000	80.240.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.07.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			Terinventarisasinya informasi hasil pengawasan	100%					106.760.000	112.100.000
	1.20.1.20.07.22.02		Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Denpasar		100%	Laporan informasi hasil pengawasan	1 Lap	Terinventarisasinya informasi hasil pengawasan	1 Lap	106.760.000	112.100.000
TOTAL											3.375.817.362	3.544.632.230

BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Denpasar Barat	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Penerbitan laporan hasil kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pemenuhan kebutuhan pelayanan alat tulis kantor	100%	508.237.950	550.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana e-procurement	Kec. Denpasar Barat	Manfaat teknologi informasi yang cepat guna	100%	Sistem e-procurement yang optimal	100%	Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan berdaya saing	100%	738.897.500	800.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Kec. Denpasar Barat	Pemenuhan Buku laporan Kegiatan pemantauan pembangunan		Terlaksananya pemantauan pembangunan	12 kali	Teralokasinya dana yang rasional dan terinformasi hasil pembangunan pemerintah kota denpasar	100%	76.868.900	88.399.235
			Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Kec. Denpasar Barat	Kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	100%	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan	44 kali	Kegiatan yang tepat waktu dan tepat muutu	100%	32.000.000	40.000.000
			Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Kec. Denpasar Barat	Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	100%	Laporan hasil kegiatan pembangunan secara triwulan	1 kali	Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan daerah	100%	431.175.150	450.000.000
			Rapat Kerja Pemerintah Daerah	Kec. Denpasar Barat	Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah	100%	Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah	1 kali	Pelaksanaan rapat kerja pemerintah daerah	100%	165.670.000	180.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	Program koordinasi pembangunan daerah	Pembinaan Jasa Konstruksi	Kec. Denpasar Barat	Pemenuhan koordinasi pembangunan daerah	100%	Laporan hasil kegiatan	1 kali	Program pembinaan jasa konstruksi	100%	87.155.000	95.000.000
	TOTAL										2.040.004.500	2.203.399.235

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.03.1.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase ketersediaan Administrasi Perkantoran						6.074.000.000	6.500.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	di kec.Denbar		1	Jumlah administrasi perkantoran BPBD yang tersedia	1	Tersedianya administrasi perkantoran BPBD yang dibutuhkan.	1	6.074.000.000	6.500.000.000
	1.03.1.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.						3.600.000.000	4.470.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			1. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	di kec.Denbar		1	Jumlah sarana dan prasarana aparatur BPBD yang tersedia	1	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur BPBD yang dapat mendukung tupoksi.	1	3.600.000.000	4.470.000.000
	1.03.1.03.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase SDM Aparatur yang memiliki standar kualifikasi.						150.000.000	200.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	di kec.Denbar		57 Orang	Jumlah Pejabat dan staf BPBD yang mendapatkan bintek penanganan bencana	27 Orang	Meningkatnya kemampuan aparatur BPBD dalam penanggulangan bencana	27 Orang	150.000.000	200.000.000
	1.04.1.03.02.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			Persentase korban bencana yang dibantu dan sarpras yang direhabilitasi						117.000.000	120.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	di 4 kec.		60 Lokasi	Persentase bencana yang dimonitor	30 Lokasi	Tersedianya data hasil monitoring untuk pelaporan pasca bencana	1 dokumen	117.000.000	120.000.000
	1.04.1.03.02.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			Jumlah Desa /Kel yang tanggap dan tangguh bencana dan jumlah kelompok masayakat dan aparatur yang meningkat pemahamannya dalam penanggulangan bencana						6.624.250.000	5.636.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran (Sertifikasi ISO 9001 : 2015)	di Kec.Denbar		100%	Jumlah dokumen standar pengukuran kinerja pelayanan penanggulangan bencana	1dokumen	Tersedianya dokumen pengukuran kinerja pelayanan penanggulangan bencana.	1 dokumen	105.000.000	110.000.000

			2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	di 4 kec.		40 Orang	Jumlah tenaga oprasional BPBD yang mendapat pendidikan pelatihan	40 Orang	Meningkatnya kemampuan tenaga operasional BPBD yang disiagakan untuk menangani bencana	40 Orang	256.000.000	256.000.000
			3. Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana	di 4 kec.		83 Orang	Jumlah masyarakat yg terlatih yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana alam	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan relawan bencana yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana	40 Orang	275.000.000	300.000.000
			4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran	di Kec.Denbar		100%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana bahaya kebakaran	100%	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	100%	2.438.250.000	1.200.000.000
			5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran	di Kec.Denbar		100%	Persentase terpeliharanya kendaraan operasional penanggulangan bencana kebakaran	100%	terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	2.500.000.000	3.000.000.000
			6. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya kebakaran	di 4 Kec.		80 Orang	Jumlah BALANA yang mendapat pelatihan kebencanaan dari masing-masing Aparatur SKPD	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan BALANA yang disiagakan dari masing-masing SKPD	40 Orang	250.000.000	300.000.000
			7. Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	di 4 Kec.		300 Orang	Jumlah masyarakat yang terlatih dalam pencegahan bahaya kebakaran	300 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam dalam penangulan bencana	300 Orang	300.000.000	350.000.000
			8. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	di 4 Kec.		172 orang	Jumlah masyarakat yg mengikuti lomba penanganan darurat bencana	86 Orang	Meningkatnya pemahaman dunia usaha dalam penanggulangan bencana .	86 Orang	100.000.000	120.000.000
			9.Kegiatan Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat	di 4 kec.		250 Orang	Jumlah personil yang terlatih yang disiagakan untuk penanganan darurat bencana	250 Orang	Meningkatnya kemampuan personil dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	250 Orang	400.000.000	-
	1.04.1.03.02.21	Program Tanggap Darurat Kebencanaan			Persentase kejadian bencana yang tertangani pelayanan tanggap darurart dan logistik						1.000.000.000	1.500.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			1. Penanganan Tanggap Darurat	di 4 kec.		100%	Persentase tersedianya bantuan penanganan tanggap darurat bencana alam	100%	Terbantunya masyarakat Kota Denpasar yang kena dampak bencana	100%	1.000.000.000	1.500.000.000
	1.04.1.03.02.22	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			Persentase terbentuknya Desa / kelurahaan tangguh bencana, Persentase terbentuknya sekolah aman bencana dan persentase masyarakat yang mengetahui informasi kebencanaan						1.482.000.000	1.582.000.000

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			1.Pengembangan Pusdalops Bencana (Crisis Centre)	di Kec. Denpasar Selatan		100%	Persentase informasi pengaduan yang diterima dan ditindak lanjuti	100%	Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan pengaduan kedaruratan bencana untuk masyarakat	100%	500.000.000	600.000.000
			2.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan desa/kelurahan tangguh guna kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	di 4 kec.		2 Desa / Kelurahan	Jumlah masyarakat Desa / Kel yang dibina	2 Desa / Kelurahan	Terbentuknya Desa / Kel. Yang tanggap dan tangguh bencana	2 Desa / Kelurahan	352.000.000	352.000.000
			3.Kegiatan :Fasilitasi Pembentukan Sekolah aman Bencana	di 4 kec.		2 Sekolah	Jumlah siswa yang disiapsiagakan dan tanggap menghadapi bencana	2 Sekolah	Terbentuknya sekolah yang siswanya siaga dan tanggap bencana	2 Sekolah	352.000.000	352.000.000
			4.Kegiatan Pengembangan budaya sadar bencana	di 4 kec.		4000 Leaflet,2.000 poster,43 baliho	Jumlah Brosur,Leaflet dan poster yang di sebarakan	4000 leaflet,2000 poster, 43 baliho	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan	4000 leaflet,2000 poster, 43 baliho	278.000.000	278.000.000
	TOTAL										19.047.250.000	20.008.000.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.22.1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1.193.242.520	1.312.566.772
	1.22.1.22.01.01.07		Pelayan Administrasi Perkantoran	Denpasar			Prosentase Belanja Pegawai dan Belanja Pakai Habis	100%	Pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.193.242.520	1.312.566.772
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.22.1.22..01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Prsentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					606.440.000	667.084.000
	1.22.1.22.01.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Denpsar			Prosentase Belanja Barang/Jasa untuk peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aperatur	100%	606.440.000	667.084.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.22.1.22.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					80.000.000	88.000.000
	1.22.1.22.01.05.05		Peningkatan kapasitas sumber daya aperatur	Denpasar			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop, Teknis / Fungsional	8 orang	Jumlah PNS yang memiliki Kompetensi Teknis	8 orang	80.000.000	88.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.22.01.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			Presentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	100%					455.425.750	500.968.325
	1.22.1.22.01.16.06		Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Denpasar			Jumlah Pasar Tradisioanal yang dibina dan dilombakan	40 pasar	Jumlah Pasar Tradisional yang masuk dalam kategori juara		406.228.250	446.851.075
	1.22.1.22.01.16.08		Monitoring, evaluasi dan pelaporan UED, PDM-DKE dan Pasar Desa	Denpasar			Jumlah Desa/ Kel yang mengelola dana PDM-DKE dan UED	43 Desa/Kel	Tersedianya Data inventarisasi pasar dan data perkembangan dana bergulir PDM-DKE -UED	43 Laporan	49.197.500	54.117.250
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	2.01.1.22.01.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			Prsentase Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan	100%					130.867.500	143.954.250

	2.01.1.22.01.16.03		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Penyusunan NBM dan PPH Bidang Ketahanan Pangan)	Denpasar			Inventarisasi Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar	43 Desa	Tersusunnya Buku Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar	50 buku	92.407.500	101.648.250
	2.01.1.22.01.16.33		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dewan ketahanan pangan	Denpasar			Tercapainya Koordinasi ketahanan pangan kota denpasar	data dan solusi	Meningkatnya produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri	data dan solusi	38.460.000	42.306.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.1.22.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			Presentase Peningkatan Promosi Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	100%					479.702.000	527.672.200
	2.01.1.22.01.17.07		Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan Daerah	Jakarta			Terlaksananya Pameran HPS dan Agrinex Expo 2017	2 event	Promosi hasil produksi unggulan pertanian/perkebunan	2 event	479.702.000	527.672.200
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.22.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	100%					1.097.845.670	1.207.630.237
	1.22.1.22.01.17.05		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (pembinaan Profil Desa/Kelurahan)	Denpasar			Presentase Desa/Kel yang di movev dalam penyusunan profil	100%	Terealisasinya buku profil desa/kel	43 buku	116.540.000	128.194.000
	1.22.1.22.01.17.06		Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	Denpasar			Jumlah Desa/Kel yang dibina untuk lomba	4 desa dan 4 kel	meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Desa/Kel	4 desa dan 4 kel	590.399.850	649.439.835
	1.22.1.22.01.17.10		Bulan Bhakti gotong-royong	Denpasar			Presentase desa/kelurahan dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong	43 Desa/Kel	prsentase tercapainya pembangunan masyarakat dalam melaksanakan bulan bhakti gotong royong	100%	42.343.500	46.577.850
	1.22.1.22.01.17.11		Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Denpasar			jumlah Kelompok Pengrajin yang dibina	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Pengrajin yang Memahami Prinsip-Prinsip dan Inovasi TTG	12 Kelompok	126.454.720	139.100.192
	1.22.1.22.01.17.		Pembinaan desa/kelurahan berkembang	Denpasar			Jumlah Desa Lurah yang dibina	11 desa/ kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang perkembangannya meningkat	11 desa/ kelurahan	222.107.600	244.318.360
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.22.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Prsentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	100%					2.138.387.000	2.352.225.700
	1.22.1.22.01.18.08		Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang	Denpasar			Cakupan Pencatatan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang Bantuan Pemerintah	100%	Mengetahui Perkembangan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang dalam pembangunan	43 Desa/Kel	90.620.000	99.682.000

	1.22.1.22.01.18.19		Monitoring Pelaksanaan APBDes	Denpasar			Cakupan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bagi Hail Pajak dan Retribusi Bantuan kelurahan	100%	Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan	43 Desa/Kel	14.259.000	15.684.900
	1.22.1.22.01.18.21		Verifikasi Ranperdes APBDes	Denpasar			Cakupan Pelaksanaan verifikasi Ranperdes APBDes	100%	Terbitnya APBDes Tepat waktu	27 APBDes	29.108.000	32.018.800
	1.22.1.22.01.18.24		Bimbingan Teknis bagi LPM dan BPD Desa/Kelurahan se-Kota Denpasar	Denpasar			Jumlah Peserta BinteK	43 desa/kel	peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa	43 Desa/Kel	474.805.000	522.285.500
	1.22.1.22.01.18.25		Penilaian Inovasi desa/kelurahan (IGA)	Denpasar			Prsentase Pelaksanaan Penilaian Inovasi Desa/Kel (IGA)	100%	tertibnya pengelolaan pemerintah desa / kelurahan	43 Desa/Kel	1.529.595.000	1.682.554.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.22.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	100%					3.932.965.000	4.326.261.500
	1.22.1.22.01.19.02		Pelatihan/ Pembinaan Perempuan/ Kader dalam upaya kesehatan bersumberdaya manusia	Denpasar			Terlaksananya pokjanal Posyandu	43 Desa/Kel	Meningkatkan Perkembangan Posyandu	43 Desa/Kel	138.249.200	152.074.120
	1.22.1.22.01.19.03		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Denpasar			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	100%	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	100%	3.794.715.800	4.174.187.380
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.22.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			Presentase perbaikan gizi masyarakat	100%					432.104.000	475.314.400
	1.02.1.22.01.20.02		- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS)	Denpasar			Jumlah siswa yang mendapat pemberian tambahan makanan dan vitamin	500 siswa	Meningkatnya Ketahanan Fisik Siswa SD/MI Negeri dan Swasta melalui pemberian tambahan makanan dan vitamin	500 siswa	432.104.000	475.314.400
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.22.01.20.	Program penanggulangan Kemiskinan			presentase terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin secara bertahap	100%					187.128.500	205.841.350
	1.22.1.22.01.20.01		Pendataan, Monitoring dan Evaluasi kemiskinan	Denpasar			Jumlah laporan pendataan movev kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan RTM	1 laporan	Tersedianya Laporan Data Base RTM	1 laporan	121.993.000	134.192.300
	1.22.1.22.01.20.05		Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar	Denpasar			Jumlah RTM yang dilatih	80 orang	Peningkatan potensi diri RTM	80 orang	65.135.500	71.649.050
	TOTAL										10.734.107.940	11.807.518.734

DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.08.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									37.119.322.053	40.831.254.258
	1.08.02.01.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar	Pemenuhan peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	40%	Tersedianya sarana sarana dalam menjalankan administrasi kantor, Terbayarnya upah dan pemenuhan upah dan kesejahteraan tenaga lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan	100%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan	100%	37.119.322.053	40.831.254.258
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.08.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									852.887.344	938.176.078
	1.08.02.01.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Denpasar	Peningkatan kinerja aparatur melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai	40%	Tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran kerja aparat DKP	100%	Peningkatan kinerja aparatur	100%	852.887.344	938.176.078
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.08.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									25.000.000	27.500.000
	1.08.02.01.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Denpasar	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	10 orang	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparat DKP	5 orang	Peningkatan kualitas aparatur	5 orang	25.000.000	27.500.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.02.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									59.119.501.030	65.031.451.133
	1.08.02.01.15.02		Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan persampahan	Kota Denpasar	Terpenuhinya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	40%	Tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam mengelola persampahan	100%	Pemenuhan kelancaran pengelolaan persampahan	100%	15.291.595.000	16.820.754.500
	1.08.02.01.15.04		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kota Denpasar	Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan	40%	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan (tersedianya berupa BBM, alat kerja dll)	100%	Pemenuhan kebutuhan pengelolaan persampahan	100%	40.153.640.420	44.169.004.462

	1.08.02.01.15.05		Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Kota Denpasar	Peningkatan pengelolaan sampah	40%	Terlaksananya pengurangan sampah	100%	Pemenuhan pengurangan sampah	100%	781.961.480	860.157.628
	1.08.02.01.15.06		Bimbingan Teknis Persampahan	Kota Denpasar	Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan	100 orang	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang persampahan	100 orang	Meningkatnya kemampuan/ pengetahuan akan arti pentingnya kebersihan	100 orang	184.050.000	202.455.000
	1.08.02.01.15.11		Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Denpasar	Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan	40%	Terlaksananya peranserta masyarakat secara mandiri dalam pengelolaan persampahan di lingkungannya	100%	Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan	100%	422.167.000	464.383.700
	1.08.02.01.15.12		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Denpasar	Peningkatan evaluasi kinerja persampahan	40%	Terlaksananya pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan	100%	Peningkatan pengelolaan persampahan	100%	1.865.032.130	2.051.535.343
	1.08.02.01.15.15		Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan	Kota Denpasar	Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan	40%	Terlaksananya kerjasama bidang persampahan	100%	Pemenuhan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	100%	421.055.000	463.160.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.02.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									336.994.500	370.693.950
	1.08.02.01.17.14		Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Kota Denpasar	Perlindungan dan konservasi tanaman hias dan tanaman toga	40%	Perlunya konservasi tanaman hias dan tanaman penghijauan dan toga	100%	Pemenuhan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	100%	336.994.500	370.693.950
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.02.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									1.152.289.000	1.267.517.900
	1.08.02.01.24.06		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota	Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan	40%	Tersedianya sejumlah tanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan	100%	Terwujudnya kota yang rindang	100%	749.004.000	823.904.400
	1.08.02.01.24.11		Pengembangan Taman Rekreasi	Kota Denpasar	Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	40%	Terlaksananya Pengembangan Taman Rekreasi Kota Denpasar	100%	Pemenuhan Taman Rekreasi, Taman Lumintang dan Lapangan Puputan Badung Kota Denpasar	100%	403.285.000	443.613.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.02.01.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan									28.520.858.108	31.372.943.919
	1.08.02.01.25.01		Penataan Taman	Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan	40%	Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	100%	Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar	100%	2.989.067.750	3.287.974.525

	1.08.02.01.25.03		Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota	40%	Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar	100%	Pemenuhan pemeliharaan LPJU	100%	22.957.470.358	25.253.217.394
	1.08.02.01.25.04		Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota	40%	Tercapainya pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	100%	Terpasangnya sejumlah titik lampu di Kota Denpasar (200 titik)	100%	2.574.320.000	2.831.752.000
	Total										127.126.852.035	139.839.537.239

BAGIAN HUKUM

BAGIAN HUKUM

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			Presentase penyelesaian sengketa hukum dan legislasi kota denpasar yang teruji secara materiil	100%					2.375.249.000	2.663.395.900
	1.20.03.02.26.01.		Koordinasi kerjasama permasalahan Peraturan Per-UU-an (Koordinasi dan Konsultasi penyelesaian sengketa hukum)	Kota Denpasar			Koordinasi,Konsultasi dan Jasa Kuasa Hukum	100%	1. Tim Kuasa Hukum 2. Bantuan hukum terhadap PNS Pemkot yang terkena permasalahan hukum terkait kedinasan	100%	784.878.000	863.365.800
	1.20.03.02.26.02.		Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar			Disahkannya Perda Kota Denpasar yang teruji secara materiil	100%	Perda Kota Denpasar yang teruji secara materiil	100%	831.149.500	967.064.450
	1.20.03.02.26.05.		Publikasi Peraturan Perundang - undangan	Kota Denpasar			Basis data dan peraturan hukum daerah kota denpasar	100%	Terdokumentasinya produk hukum secara digital	100%	516.260.000	536.800.000
	1.20.03.02.26.12		Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum(Kadarkum) antar Kecamatan se-Kota Denpasar	Kota Denpasar			Wakil Kadarkum Kota Denpasar ke Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi	100%	Terwakilinya Kota Denpasar di Lomba Tingkat Provinsi	100%	181.755.500	228.839.050
	1.20.03.02.26.14		Kajian Peraturan Perundang - undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah	Kota Denpasar		0%	Pelaksanaan Ranham di Kota Denpasar	100%	Terlaksananya Ranham di Kota Denpasar	1000%	61.206.000	67.326.600
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Pelayanan administrasi perkantoran			Presentase meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					97.339.000	107.072.900
	1.20.03.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar			Kegiatan administrasi perkantoran pada Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	100%	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	100%	97.339.000	107.072.900
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Presentase meningkatnya komptensi aparatur yang menguasai legal drafting	100%					67.545.000	74.299.500

	1.21.03.02.16.05		Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah (Legal Drafting)	Kota Denpasar			Pelaksanaan Bimbingan Teknis Legal Drafting	100%	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting	100%	49.545.000	54.499.500
	1.21.03.02.16.06		Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Denpasar			Aparatur yang mengikuti pelatihan	100%	Aparatur yang bersertifikat	100%	18.000.000	19.800.000
	Total										2.540.133.000	2.844.768.300

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Terwujudnya Pelayanan prima di bidang Perijinan dan Penanaman Modal	100%					1.297.172.000	1.426.889.200
			Penyusunan Sertifikasi ISO	BPPTSP & PM			Upgrading Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 laporan	- Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin	Peningkatan 2 %	227.500.000	250.250.000
									- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan jani layanan	70%		
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan	BPPTSP & PM			Terjaminnya sistem IT pelayanan perijinan dan penyimpan data perijinan	1 sistem	Jumlah produk Inovasi yang terlaksana dalam satu tahun	1 produk inovasi	322.800.000	355.080.000
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	BPPTSP & PM			Rancangan Peraturan Daerah	2 Ranperda	- Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin	Peningkatan 2 %	218.400.000	240.240.000
									- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan jani layanan	70%		
			Monitoring Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	BPPTSP & PM			Laporan Monitoring Pelayanan Perijinan dan Pengaduan Masyarakat	1 Laporan	Persentase peningkatan jumlah penerimaan retribusi perijinan	Peningkatan 2 %	81.100.000	89.210.000
			Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat	BPPTSP & PM			Laporan SKM dan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	-Persepsi Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai 75	61.070.000	67.177.000
									-Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat	80%		
			Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	BPPTSP & PM			Laporan Intensifikasi Pelayanan Perijinan	1 Laporan	- Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin	Peningkatan 2 %	259.290.000	285.219.000

									- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan jani layanan	70%		
			Pelayanan Perijinan Keliling	Kota Denpasar			Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat secara langsung	4 kali	- Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin	Peningkatan 2 %	127.012.000	139.713.200
									- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan jani layanan	70%		
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komonikasi Dan Informatika		Program kerjasama informasi dengan mass media			Terlaksananya penyuluhan mekanisme perijinan	100%					568.450.000	625.295.000
			Penyebarluasan informasi perijinan	BPPTSP & PM			Meningkatnya Pemahaman masyarakat melalui sosialisasi perijinan		Penilaian masyarakat terhadap transparansi Informasi pelayanan Perijinan	nilai 3,00	568.450.000	625.295.000
									Penilaian Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	nilai 800		
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Pelayanan administrasi perkantoran			Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					3.068.744.450	3.375.618.895
			Pelayanan administrasi perkantoran	BPPTSP & PM			Laporan untuk pelayanan administrasi perkantoran	1 laporan	- Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin	Peningkatan 2 %	3.068.744.450	3.375.618.895
									- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan jani layanan	70%		
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Pemenuhan Sarana dan prasarana Aparatur BPPTSP & PM Kota Denpasar	100%					2.134.521.750	2.347.973.925
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPPTSP & PM			Laporan Peningkatan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	- Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin	Peningkatan 2 %	2.134.521.750	2.347.973.925

									- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	70%		
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur			Pemenuhan Peningkatan Kapasitas dan kepribadian Aparatur BPPTSP & PM	100%					1.163.722.300	1.280.094.530
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPPTSP & PM			Terlatihnya petugas pelayanan perijinan	15 orang	Penilaian masyarakat terhadap kualitas SDM BPPTSP & PM yang tertuang dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kategori baik	nilai 3,00	250.000.000	275.000.000
			Bintek Pengembangan Aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal	BPPTSP & PM			Terselenggaranya Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur BPPTSP & PM	138 orang	Penilaian masyarakat terhadap kualitas SDM BPPTSP & PM yang tertuang dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kategori baik	nilai 3,00	696.500.000	766.150.000
			Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan	BPPTSP & PM			Terlatihnya petugas pelayanan perijinan	50 orang	Penilaian masyarakat terhadap kualitas SDM BPPTSP & PM yang tertuang dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kategori baik	nilai 3,00	217.222.300	238.944.530
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			Terlaksananya peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	100%					835.290.000	918.819.000
			Pembinaan dan Pelaporan	BPPTSP & PM			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi terhadap 60 Perusahaan PMDN dan PMA	100%	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	131.115.000	144.226.500
			Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar	BPPTSP & PM			Terlaksananya Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar Tahun 2017	1 Laporan	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	181.200.000	199.320.000

			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	BPPTSP & PM			Terlaksananya Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Laporan	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	181.200.000	199.320.000
			Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal	BPPTSP & PM			Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman modal	100%	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	108.075.000	118.882.500
			Penyusunan Profil Investasi Unggulan dan Buku Direktori Perijinan Kota Denpasar	BPPTSP & PM			Buku Profil Investasi Unggulan	100 buku	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	204.000.000	224.400.000
							Buku direktori perijinan Kota Denpasar	100 buku				
			Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada dunia Usaha	BPPTSP & PM			Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal	1 kali	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	29.700.000	32.670.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	100%					682.580.000	750.838.000
			Promosi Penanaman Modal	BPPTSP & PM			Pameran	1 kali pameran	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	460.000.000	506.000.000
			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Kota Denpasar			Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	100%	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	100%	95.680.000	105.248.000
			Pengelenggaraan fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kota dengan pengusaha tingkat provinsi atau Nasional	BPPTSP & PM			terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kota dengan pengusaha tingkat provinsi atau Nasional	100%	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2%	126.900.000	139.590.000
	Total										9.750.480.500	10.725.528.550

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Denpasar	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	1.574.506.000	1.731.956.600
	1.20.1.20.08.01.07		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Denpasar		-	Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor	100%	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.574.506.000	1.731.956.600
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Denpasar	Cakupan penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	-	-	-	381.030.000	419.133.000
	1.20.1.20.08.02.12		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Denpasar		-	Persentase belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	381.030.000	419.133.000
Urusan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	1.21.1.20.08.15	Program Pendidikan Kedinasan		Provinsi Bali	Persentase Meningkatnya ASN yang memiliki kompetensi manajerial, bidang dan teknis	100%	-	-	-	-	1.751.180.000	1.926.298.000
	1.21.1.20.08.15.07		1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II)	Provinsi Bali			Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat	5 Orang	Jumlah Pejabat Eselon II yang Lulus dan memiliki kompetensi Manajerial	5 Orang	239.470.000	263.417.000
	1.21.1.20.08.15.08		2. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III)	Provinsi Bali			Jumlah Pejabat Eselon III yang mengikuti Diklat	25 Orang	Jumlah Pejabat Eselon III yang Lulus dan memiliki kompetensi Bidang	25 Orang	705.952.500	776.547.750
	1.21.1.20.08.15.09		3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV)	Provinsi Bali			Jumlah Pejabat Eselon IV yang mengikuti Diklat	35 orang	Jumlah Pejabat Eselon IV yang Lulus dan memiliki kompetensi Teknis	35 Orang	805.757.500	886.333.250
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.21.1.20.08.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Denpasar	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	-	-	1.032.796.100	1.136.075.710
	1.21.1.20.08.16.04		1. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/ BinteK Workshop	Denpasar			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional/BinteK workshop	25 orang	Jumlah PNS yang memiliki kompetensi teknis	25 orang	667.895.000	734.684.500

	1.21.1.20.08.16.06		2. Diklat Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Denpasar			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	68 orang	Jumlah PNS yang lulus ujian sertifikasi dan memiliki kompetensi Pengadaan Barang dan jasa	20 orang	225.951.500	248.546.650
	1.21.1.20.08.16.07		3. Diklat Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	Denpasar			Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat pengembangan budaya kerja aparatur	34 orang	Jumlah Pejabat yang memahami budaya kerja untuk peningkatan kinerja aparatur	34 orang	138.949.600	152.844.560
Urusan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	1.21.1.20.08.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Denpasar	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	-	-	-	-	1.099.831.550	1.209.814.705
	1.21.1.20.08.17.02		1. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Denpasar			Jumlah pelamar yang lulus seleksi untuk mengisi formasi CPNS yang lowong	271 Orang	jumlah Pelamar yang diangkat menjadi CPNS	271 Orang	187.139.000	205.852.900
	1.21.1.20.08.17.03		2. Penempatan dan penyempahan	Denpasar			Jumlah CPNS yang diangkat dan Disumpah sebagai PNS	300 Orang	Jumlah CPNS yang mendapat SK Pengangkatan dan Disumpah sebagai PNS tepat waktu	300 Orang	25.785.000	28.363.500
	1.21.1.20.08.17.17		3. Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	Denpasar			Persentase akurasi Data ASN	100%	persentase Data yang valid dan akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	100%	72.301.550	79.531.705
	1.21.1.20.08.17.18		4. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS	Denpasar			Jumlah Usulan SK Pensiun Pegawai yang di proses tepat waktu	262 usulan	Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun Tepat waktu	262 Orang	59.191.300	65.110.430
							Terbinanya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun	198 PNS pensiun	Meningkatnya rasa percaya diri PNS yang memasuki BUP dalam menyongsong masa Pensiun	198 PNS pensiun		
	1.21.1.20.08.17.20		5. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	Denpasar			Jumlah Usulan SK Kenaikan Pangkat Pegawai yang di proses tepat waktu	783 usulan KP	Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	783 orang	99.240.500	109.164.550

							Terselenggaranya sosialisasi dalam rangka administrasi kepegawaian pada pemerintah Kota Denpasar	100 orang	SKPD mengerti mengenai Administrasi Kepegawaian	100 orang		
	1.21.1.20.08.17.31		6. Digitalisasi dan Penataan Arsip PNS	Denpasar			Jumlah File PNS dan penataan arsip PNS yang sudah terdigitalisasi	3000 Berkas	Jumlah Tersedianya arsip PNS dalam bentuk file Digital untuk proses pelayanan kepegawaian	3000 Berkas	91.341.000	100.475.100
	1.21.1.20.08.17.32		7. Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Denpasar			Jumlah data Formasi Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	250 Formasi	Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensi	250 Orang	8.430.300	9.273.330
	1.21.1.20.08.17.33		8. Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	Denpasar			Jumlah data Formasi Jabatan administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	56 Formasi	Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan administrasi sesuai kompetensi	56 orang	31.956.300	35.151.930
	1.21.1.20.08.17.34		9. Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Denpasar			Jumlah data Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	3 Formasi	Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama sesuai kompetensi	3 Orang	313.391.300	344.730.430
	1.21.1.20.08.17.35		10. Pembinaan Kepegawaian	Denpasar			- Persentase Jumlah penyelesaian kasus Disiplin Pegawai	100%	- Persentase Jumlah penyelesaian kasus Disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	48.445.300	53.289.830
							- Jumlah pejabat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Penegakan disiplin dan Kode etik	60 Orang	- Jumlah pejabat yang mampu menyelesaikan kasus-kasus disiplin dan Kode etik pegawai	60 Orang		
							- Jumlah usulan Satya lencana Karya Satya yang diproses sesuai persyaratan	250 Orang	- Jumlah usulan satya lencana karya satya yang disetujui tepat waktu	250 Orang		
	1.21.1.20.08.17.36		11. Bimbingan Teknis Soft Skill Aparatur	Denpasar			Jumlah PNS di Lingkungan BKPP yang mengikuti Bintek	54 Orang	Jumlah PNS yang memperoleh pemahaman soft Skill	54 Orang	162.610.000	178.871.000
	TOTAL										5.839.343.650	6.423.278.015

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.08.1.08.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dps	persentase peningkatan kinerja aparatur	100%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	persentase peningkatan kinerja aparatur	100%	1.077.897.000	1.129.294.100
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.08.1.08.01.02.12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dps	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah jenis buku laporan	1 jenis	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	552.080.000	607.288.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.08.1.08.01.05.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan pelatihan formal	Dps	Persentase peningkatan penyelesaian pekerjaan	100%	Jumlah SDM yang mengikuti diklat	10 orang	Persentase peningkatan penyelesaian pekerjaan	100%	135.000.000	148.500.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.08.01.16.01	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan perusakan LH	75%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	-Jumlah tropi adi pura '-Jumlah desa sa dar lingkungan	- 1 buah '- 1 buah	199.935.250	210.000.000
	1.08.1.08.01.16.02		Koordinasi penilaian langit biru	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan perusakan LH	100%	Jumlah jenis laporan kajian	2 jenis	-Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu dari 9 parameter yang diukur '- Jumlah peserta sosialisasi yang paham kualitas udara	100% 250 orang	387.238.800	425.962.680
	1.08.1.08.01.16.03		Pemantauan kualitas lingkungan	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan perusakan LH	96%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Persentase hasil ujikualitas air sungai, air laut dan kebisingan yang memenuhi baku mutu dari 15 parameter yang diukur	100%	196.140.100	500.000.000
	1.08.1.08.01.16.04		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan perusakan LH	89%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH yang ditindaklanjuti	20 bh	55.352.250	60.887.475
	1.08.1.08.01.16.06		Pengelolaan B3 dan limbah B3	Denbar	Persentase penurunan pencemaran dan perusakan LH	96%	jumlah jenis laporan	1 jenis	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil LB3	5 buah	167.950.150	1.843.745.165

	1.08.1.08.01.16.07		Pengkajian dampak lingkungan	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan LH	100%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	% hasil uji kualitas air limbah produksi tahu tempe yang memenuhi baku mutu dari 4 parameter yang diukur	100%	13.619.600	25.000.000
	1.08.1.08.01.16.10		Koordinasi pengelolaan prokasi	Dps/	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan LH	94%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah juara lomba bersih	6 lokasi	165.871.500	200.000.000
	1.08.1.08.01.16.12		Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan LH	87%	jumlah penerbitan dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL)	200 buah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL)	200 buah	222.251.480	230.680.000
	1.08.1.08.01.16.13		Koordinasi penyusunan AMDAL	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan LH	91%	jumlah penerbitan dokumen AMDAL	1 buah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL)	1 buah	218.904.000	225.500.000
	1.08.1.08.01.16.14		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan LH	95%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	- Jumlah sekolah adiwiyata Tk. Kota - Jumlah sekolah adiwiyata Tk. Provinsi - Jumlah sekolah adiwiyata Tk. Nasional - Jumlah sekolah adiwiyata Tk. Mandiri - Jumlah Sekolah Tk. Asean	- 5 buah - 3 buah - 3 buah - 2 buah - 2 buah	410.837.250	425.000.000
	1.08.1.08.01.16.17		Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan	Dps	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan LH	98%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah penanggungjawab usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang dibangun dan diawasi	60 buah	52.085.000	65.250.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.08.01.17.01	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber daya air	Dps	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	96%	Jumlah jenis buku laporan	2 jenis	- Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu dari 10 parameter yang diukur	100%	145.553.450	160.108.795
	1.08.1.08.01.17.02		Pantai dan laut lestari	Densel/Dentim	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	83%	Jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah wilayah pesisir yang didata 9 jenis potensi ekosistemnya	1 buah	146.680.000	150.000.000
	1.08.1.08.01.17.03		Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka periikanan dan keanekaragaman hayati laut	Dps	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	90%	jumlah pakan penyu	2.160 Kg	prosentase peningkatan pelestarian satwa penyu	10%	155.670.000	175.000.000

	1.08.1.08.01.17.04		Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Subak :-sembung-kerdung	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	99%	Jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah desa/Kel.yang dibina sesuai dengan potensi desa/kel.	2 buah	160.276.000	350.000.000
	1.08.1.08.01.17.05		Pengendalian dampak perubahan iklim Pengendalian kerusakan hutan	Dps	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi SDA	90%	Jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah penurunan emisi GRK	1.291.540,36 Gg	142.868.500	157.155.350
	1.08.1.08.01.17.06		Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Dps/4 Kec.	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	99%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	3.556,65 Ha	111.733.000	200.000.000
	1.08.1.08.01.17.10		Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem	Dps	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	98%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah jenis flora dan fauna yang diinventarisir Jumlah masyarakat pesisir yang terampil menyelam	- 200 jns flora - 100 jns fauna	69.100.500	80.000.000
	1.08.1.08.01.17.14		Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Densel	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi SDA	90%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah masyarakat pesisir yang terampil menyelam	10 orang	134.155.000	175.000.000
	1.08.1.08.01.17.15		Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	Dps	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi SDA	83%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah pembentukan kelompok DAS	1 bh klp	103.385.000	120.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.08.01.18.03	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi hutan dan lahan	Dps	Persentase luasan perindangan lahan	95%	jumlah bibit pohon penghijauan/perindangan	1.600 pohon	Jumlah luasan perindangan lahan	0,8 Ha	358.988.440	350.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.08.01.19.02	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Dps	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam	100%	Jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah jenis informasi data kualitas lingkungan yang terpublikasi melalui jaringan website	3 jenis	112.942.400	120.500.500
	1.08.1.08.01.19.03		Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional & daerah	Dps	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam	100%	jumlah jenis buku laporan	2 jenis	Persentase keterse diaan informasi data kualitas lingkungan	100%	238.091.000	251.300.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.08.01.20.01	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Dps	Persentase penurunan polusi lingkungan	94%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah kendaraan yang diuji emisi	1.000 buah	132.617.900	300.000.000
	1.08.1.08.01.20.02		Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Dps	Persentase penurunan polusi lingkungan	97%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara	32 buah	70.117.850	77.129.635

	1.08.1.08.01.20.03		Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Dps	Persentase penurunan polusi lingkungan	98%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Jumlah usaha dan/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87 buah	211.019.850	232.121.835
	1.08.1.08.01.20.03		Pembinaan lomba sanimas	Dps	Persentase penurunan polusi lingkungan	86%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Persentase peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sanimas	10%	38.401.600	42.241.760
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.08.01.23.01	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (monitoring terumbu karang, padang lamun)	Densel (Sanur, serangan)	Persentase Luasan Terumbu karang dan padang lamun hidup	100%	jumlah jenis buku laporan	1 jenis	Luasan Terumbu karang dan padang lamun hidup	1 Ha	106.645.000	120.000.000
										TOTAL	6.293.407.870	9.157.665.295

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.10.01.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran			Pemenuhan Pelayanan administrasi Perkantoran						1.996.706.000	2.040.500.000
	1.10.01.01.07		Pelayanan Administrasi perkantoran	kota Denpasar		100%	Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran	1 Laporan	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.996.706.000	2.040.500.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur						946.950.000	1.003.000.000
	1.10.01.02.12		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Denpasar		100%	Laporan Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	1 Laporan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	946.950.000	1.003.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur						70.000.000	75.000.000
	1.10.01.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Denpasar		100%	Laporan kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran	1 Laporan	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	70.000.000	75.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			Tertib Administrasi Kependudukan						2.576.603.000	2.537.644.400
	1.10.01.15.07		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam bidang Kpendudukan dan Capil	Kota Denpasar		100%	Laporan hasil Pelayanan Jemput Bola	Laporan	Kepemilikan Akta bagi Masyarakat	15 Desa / Kelurahan	479.737.500	527.711.250
	1.10.01.15.12		Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Kota Denpasar		Jumlah masyarakat yang mengerti tentang Pencatatan Sipil	Laporan hasil Sosialisasi	1 laporan	Pemahaman masyarakat tentang Pencatatan Sipil	400 orang (unsur masyarakat)	82.930.000	91.223.000
	1.10.01.15.13		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	kota Denpasar		43 Desa / Kelurahan	Termonitoringnya Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Pembentukan Aparat Desa / Kelurahan yang Memahami Administrasi Kependudukan	6 Desa / Kelurahan terbaik	278.130.000	305.943.000
	1.10.01.15.16		Pengolahan dan Pengarsipan data Catatan Sipil	Kota Denpasar		1000 Buku	Tertatanya Data Catatan Sipil	1000 Buku	Data Base Warkah Akta Catatan Sipil	100%	157.190.000	172.909.000
	1.10.01.15.28		Penertiban Administrasi di Bidang Kependudukan	Kota Denpasar		25 Desa dan Kelurahan	Laporan administrasi Penduduk	43 Desa dan Kelurahan	Data Administrasi Penduduk Pendatang	100%	201.709.500	221.880.450

	1.10.01.15.22		Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Kota Denpasar		Penduduk Pendatang	Terkendalinya Mobilitas Penduduk Pendatang	Penduduk Pendatang	Data penduduk pendatang	100%	50.000.000	50.000.000
	1.10.01.15.19		Pelaksanaan e - KTP di Kota Denpasar	Kota Denpasar		108.799	Pelaksanaan E - KTP di kota Denpasar	108.799	e - KTP	108799%	483.068.000	531.374.800
	1.10.01.15.15		Re Sertifikasi ISO	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar			Serifikasi ISO Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	Sertifikasi ISO	100%	241.179.000	-
			Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Kota Denpasar		100%	Buku Profil Perkembangan Kependudukan	50 Buku	Kepuasan Masyarakat akan Informasi Perkembangan Kependudukan	100%	113.570.000	124.927.000
	1.10.01.15.15		Audit Surveillance ISO 9001 : 2008	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar		Tercapainya Standar Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	Dokumen ISO 9001 : 2008	100%	Sertifikasi ISO 9001 : 2008	100%	-	125.500.000
	1.10.01.15.38		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar		100%	Laporan Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPM	KTP :100%, KK:100%, Akta Kelahiran : 90%, Akta Kematian: 70%	Keakuratan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	20.875.000	22.962.500
	1.10.01.15.46		Pemutahiran Data DP4 Kota Denpasar	Kota Denpasar							256.128.000	281.465.800
	1.10.1.15.47		Penyusunan sistem informasi Teknologi Pelayanan Publik	4 kecamatan		100%	data sistem informasi teknologi pelayanan publik	100%	audiovisual data dokumen kependudukan	100%	137.770.000	-
	1.10.1.15.45		Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	4 kecamatan		1 laporan	Termonitoringnya administrasi kependudukan	1 laporan	data penduduk rentan administrasi kependudukan	1 laporan	74.316.000	81.747.600
									Total		5.590.259.000	5.656.144.400

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan adm perkantoran	100%					1.960.150.343	2.156.165.377
	1.19.1.19.02.01.07		Pelayanan Adm. Perkantoran	Kota Denpasar			Terselenggaranya kebutuhan adm perkantoran	100%	Terpenuhinya pelayanan adm perkantoran dalam 1 tahun	100%	1.960.150.343	2.156.165.377
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.19.1.19.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.030.685.700	1.133.754.270
	1.19.1.19.02.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kota Denpasar			Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang layak	100%	Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana yang layak	100%	1.030.685.700	1.133.754.270
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.19.1.19.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan pegawai dan anggota sat.pol.pp	100%					576.983.000	634.681.300
	1.19.1.19.02.03.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Denpasar			Pengadaan bahan pakaian dinas	179 Orang	Meningkatkan disiplin aparatur	100%	576.983.000	634.681.300
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.19.1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kota Denpasar	Meningkatnya kapasitas SDM melalui pemenuhan pendidikan dan pelatihan	100%					324.096.550	356.506.205
	1.19.1.19.02.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Denpasar			Terselenggaranya kapasitas sumber daya aparatur	4 Orang	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal	100%	66.506.800	73.157.480
	1.19.1.19.02.05.16		Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan	Kota Denpasar			Terlaksananya pelatihan kesemaptaan	150 Orang	Meningkatnya keterampilan anggota	100%	257.589.750	283.348.725
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.19.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Kota Denpasar	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan perlindungan, tertib, aman dan nyaman di lingkungan melalui pengakan Perda	100%					352.217.350	404.441.895
	1.19.1.19.02.15.03		Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas)	Kota Denpasar			Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya ditegakkan	1 laporan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Peraturan lainnya	100%	141.040.350	155.144.385

	1.19.1.19.02.15.07		Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat	Kota Denpasar			Terpantaunya perlindungan masyarakat di 43 desa kelurahan di Kota Denpasar	1 laporan	Laporan kegiatan pemantauan upaya perlindungan masyarakat	100%	35.881.000	56.471.910
	1.19.1.19.02.15.22		Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar			Seluruh kecamatan di kota denpasar	720 kali turun	terpantaunya keamanan dan ketertiban di kota denpasar	100%	103.120.600	113.432.660
	1.19.1.19.02.15.23		Pasukan Pengaman Kegiatan Pimpinan (Paspampin)	Kota Denpasar			Terjaganya keamanan Pimpinan	7 orang	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pimpinan	100%	72.175.400	79.392.940
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.19.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Kota Denpasar	Pencegahan dan Pemeliharaan Tramtibum dan Tramtibmas di Kota Denpasar	100%					509.764.839	560.741.322
	1.19.1.19.02.16.10		Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar								159.276.376	175.204.013
	1.19.1.19.02.16.13		Penertiban Baliho/Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru yang sudah lewat tenggang waktu dan melanggar perda di Kota Denpasar								54.362.000	59.798.200
	1.19.1.19.02.16.14		Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila, Orang Terlantar dan Tuna Susila di Kota Denpasar								93.858.463	103.244.309
	1.19.1.19.02.16.15		Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang diatas trotoar, badan jalan, taman dan telajakan jalan di Kota Denpasar								101.920.830	112.112.913
	1.19.1.19.02.16.16		Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar								100.347.170	110.381.887
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.19.1.19.02.23	Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur		Kota Denpasar	Peningkatan Nasionalisme sumber daya aparatur	100%					66.039.325	72.643.258
	1.19.1.19.02.23.01		Hut Sat Pol PP	Kota Denpasar			Lancarnya pelaksanaan HUT Sat. Pol. PP Kota Denpasar	1600 Orang	Terselenggaranya Acara HUT Pol. PP di Kota Denpasar	100%	66.039.325	72.643.258

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.19.02.25	Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban		Kota Denpasar	Pemeliharaan tramtibmas umum yang tidak berijin	100%					117.948.600	129.743.460
	1.19.1.19.02.25.02		Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Ditertibkannya reklame tanpa ijin atau tidak sesuai dengan ijin	1 Laporan	Tertibnya pemasangan reklame	100%	117.948.600	129.743.460
	JUMLAH										4.937.885.707	5.448.677.087

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.15	Program Keluarga Berencana									449.755.000	
	1.12.1.12.01.15.01		1 Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Badan KBPP / 4 Kec	1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin		1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin		1.Cakupan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin		41.600.000	45.760.000
	1.12.1.12.01.15.02		2. Pelayanan KIE	Badan KBPP / 4 Kec	2.Frekuensi pelayanan KIE		2.Frekuensi pelayanan KIE		2.Frekuensi pelayanan KIE		155.880.000	171.468.000
	1.12.1.12.01.15.03		3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Badan KBPP / 4 Kec	3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu		3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu		3.Cakupan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu		44.800.000	49.280.000
	1.12.1.12.01.15.04		4. Promosi pelayanan KHIBA	Badan KBPP / 4 Kec	4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA		4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA		4.Frekuensi promosi pelayanan KHIBA		39.600.000	43.560.000
	1.12.1.12.01.15.05		5. Pembinaan keluarga berencana	Badan KBPP / 4 Kec	5.Cakupan pembinaan keluarga berencana		5.Cakupan pembinaan keluarga berencana		5.Cakupan pembinaan keluarga berencana			
	1.12.1.12.01.15.06		6. Peringatan Harganas	Badan KBPP Kota Denpasar	6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB		6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB		6. Jumlah kesadaran masyarakat miskin mengikuti program KB		123.075.000	135.382.500
	1.12.1.12.01.15.07		7. Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB/KR	Badan KBPP / 4 Kec	7. Pemenuhan Kebutuhan Partisipasi Masyarakat KB/KR		7. Jumlah Pembinaan Partisipasi Pri dalam KB/KR		Pemahaman terhadap kegiatan KB/KR dapat Meningkat		44.800.000	49.280.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.17	Program Pelayanan kontrasepsi									205.510.000	
	1.12.1.12.01.17.01		1.Pelayanan Konseling KB	Badan KBPP / 4 Kec	1.Pelayanan Konseling KB		1.Pelayanan Konseling KB		1.Pelayanan Konseling KB		156.210.000	171.831.000
	1.12.1.12.01.17.03		3. Pengadaan alat kontrasepsi	Badan KBPP Kota Denpasar	3.Jumlah pengadaan alat kontrasepsi		3.Jumlah pengadaan alat kontrasepsi		3.Jumlah pengadaan alat kontrasepsi		49.300.000	54.230.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.16	Program Kesehatan reproduksi remaja									166.300.000	
	1.12.1.12.01.16.01		1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Badan KBPP / 4 Kec	1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja		1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja		1.Frekuensi advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja		92.200.000	101.420.000
	1.12.1.12.01.16.02		2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Badan KBPP / 4 Kec	2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat		2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat		2.Cakupan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat		74.100.000	81.510.000

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.20	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR									269.875.000	
	1.12.1.12.01.20.01		1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Badan KBPP / 4 Kec	1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		1.Jumlah pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		269.875.000	296.862.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS										
	1.12.1.12.01.21.01		1. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll	Badan KBPP / 4 Kec	1.Cakupan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll		1.Cakupan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll		1.Cakupan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah,diluar sekolah,kelompok khusus dll			
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak									396.370.000	
	1.12.1.12.01.22.01		1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Badan KBPP / 4 Kec	1. Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		1. Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		1. Jumlah dan Cakupan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		396.370.000	436.007.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga									236.765.000	
	1.12.1.12.01.23.01		1.Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	Badan KBPP / 4 Kec	1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan		1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan		1.Cakupan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan		236.765.000	260.441.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU, PAUD									168.900.000	
	1.12.1.12.01.24.01		1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PAUD	Badan KBPP / 4 Kec	1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PAUD		1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PAUD		1. Frekuensi Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PAUD		168.900.000	185.790.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.12.01.18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri									679.919.000	
	1.12.1.12.01.18.02		1. Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Badan KBPP / 4 Kec	1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB		1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB		1.Cakupan kelompok masyarakat peduli KB		182.275.000	200.502.500

	1.12.1.12.01.18.03		2. Koordinasi Pengelolaan Program	Badan KBPP / 4 Kec	2. Cakupan Pengelolaan Program KB		1. Cakupan Pengelolaan Program KB		1. Cakupan Pengelolaan Program KB		43.356.000	47.691.600
	1.12.1.12.01.18.05		3. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Badan KBPP / 4 Kec	3. Cakupan Data dan Informasi		3. Cakupan Data dan Informasi		3. Cakupan Data dan Informasi		345.168.000	379.684.800
	1.12.1.12.01.18.06		4. Peningkatan kualitas data dan kemampuan pengelola data dan informasi program KKBPK	Badan KBPP / 4 Kec	4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		4. Cakupan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		109.120.000	120.032.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.12.1.12.01.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran									1.543.100.000	
	1.12.1.12.01.01.07		1. Pelayanan Administrasi kantor	Badan KBPP Kota Denpasar	1. Cakupan Pelayanan Administrasi kantor		1. Cakupan Pelayanan Administrasi kantor		1. Cakupan Pelayanan Administrasi kantor		1.543.100.000	1.697.410.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.12.1.12.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur									775.742.000	
	1.12.1.12.01.02.12		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan KBPP Kota Denpasar	1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		775.742.000	853.316.200
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.12.1.12.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									150.000.000	
	1.12.1.12.01.05.05		1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan KBPP Kota Denpasar	1. Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan, Kursus Kursus , Seminar		1. Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan, Kursus Kursus , Seminar		1. Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan, Kursus Kursus , Seminar		150.000.000	165.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.12.01.15	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan									143.760.000	
	1.11.1.12.01.15.01		1. Sosialisasi Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan KBPP Kota Denpasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan yang memahami teknologi terkait gender		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan yang memahami teknologi terkait gender		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan yang memahami teknologi terkait gender		56.660.000	62.326.000
	1.11.1.12.01.15.02		2. Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Serta Posisi Perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik	Badan KBPP Kota Denpasar	Cakupan Kebijakan Peningkatan peran serta dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik		Cakupan Kebijakan Peningkatan peran serta dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik		Cakupan Kebijakan Peningkatan peran serta dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik		14.050.000	15.455.000

	1.11.1.12.01.15.03		3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Badan KBPP Kota Denpasar	3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		3.Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		20.050.000	22.055.000
	1.11.1.12.01.15.04		4.Monitoring,evaluasi dan pelaporan	Badan KBPP Kota Denpasar	4. Cakupan Monitoring,evaluasi dan pelaporan		4. Cakupan Monitoring,evaluasi dan pelaporan		4. Cakupan Monitoring,evaluasi dan pelaporan		53.000.000	58.300.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.12.01.16	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak									1.218.238.000	
	1.11.1.12.01.16.02		1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Badan KBPP Kota Denpasar	1.Frekuensi fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)		1.Frekuensi fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)		1.Frekuensi fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)		305.025.000	335.527.500
	1.11.1.12.01.16.05		2.Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Badan KBPP Kota Denpasar	2. Cakupan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		2. Cakupan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		2. Cakupan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		740.183.000	814.201.500
	1.11.1.12.01.16.06		3.Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Badan KBPP Kota Denpasar	3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak		3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak		3. Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak		149.730.000	164.703.000
	1.11.1.12.01.16.07		4. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	Badan KBPP Kota Denpasar	4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik (Psikoedukasi bagi orang tua dan anak)		4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik (Psikoedukasi bagi orang tua dan anak)		4. Jumlah pemahaman pencapaian diri antara orang tua pendidik (Psikoedukasi bagi orang tua dan anak)		23.300.000	25.630.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.12.01.17	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan									295.580.200	
	1.11.1.12.01.17.01		1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Badan KBPP / 4 Kec	1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah		1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah		1.Frekuensi Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah		189.175.000	208.092.500
	1.11.1.12.01.17.06		2. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT		Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT		Pencatatan dan Pelaporan KDRT		Penyusunan Laporan KDRT		34.050.000	37.455.000
	1.11.1.12.01.17.07		3. Penyusunan Profil Perlindungan dan perempuan lansia dan cacat				Cakupan Pelaksanaan kebijakan Perlindungan perempuan dan lansia cacat		Tersusunnya profil statistik Gender		37.750.000	41.525.000

	1.11.1.12.01.17.08		4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Badan KBPP / 4 Kec	4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		4.Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		34.605.200	38.065.700
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.12.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan									114.875.000	
	1.11.1.12.01.18.02		1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Badan KBPP Kota Denpasar	1.Frekuensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		1.Frekuensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		1.Frekuensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		96.125.000	105.737.500
	1.11.1.12.01.18.04		2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan	Badan KBPP Kota Denpasar	2.Frekuensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan		2.Frekuensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan		2.Frekuensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha bagi perempuan		18.750.000	20.625.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.12.01.19	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak										
	1.11.1.12.01.19.02		1. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Badan KBPP Kota Denpasar	1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender		1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender		1.Frekuensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender			
TOTAL											6.814.689.200	7.496.158.300

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komonikasi Dan Informatika	1.25.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Cakupan pengembangan dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik dan informasi penting lainnya	100%					16.827.760.260	18.510.536.286
	1.25.01.15.28		Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Denpasar			Laporan Pelayanan administrasi pada Upt. Pelayanan Publik Kota Denpasar	100%	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi pada UPT.	100%	9.435.376.960	10.378.914.656
	1.25.01.15.45		Desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar	Kota Denpasar			Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah,pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya	100%	Terselenggaranya penyiaran publik tentang informasi pembangunan daerah,pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya	100%	826.287.500	908.916.250
	1.25.01.15.48		Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali	Kota Denpasar			Terwujudnya Stand Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	100%	Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kota Dps	100%	142.045.000	156.249.500
	1.25.01.15.59		Pameran pembangunan HUT Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terwujudnya Stand Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	100%	Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kota Dps	100%	680.759.000	748.834.900
	1.25.01.15.63		Penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kota Denpasar			Promosi pemasaran produk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Denpasar	100%	Usaha dan produksi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Denpasar berkembang.	100%	669.700.000	736.670.000
	1.25.01.15.68		Pameran Luar Daerah	Kota Denpasar			Terwujudnya Stand Pameran Pemerintah Kota Denpasar	100%	Terpublikasinya data dan informasi pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kota Dps	100%	285.535.000	314.088.500
	1.25.01.15.86		Pekan Informasi Nasional (PIN)	Kota Denpasar			Terlaksananya Pekan Informasi Nasional (PIN)	100%	Terselenggaranya Pekan Informasi Nasional (PIN)	100%	285.980.000	314.578.000
			Festival Animasi tingkat SMA/SMK, Mahasiswa di kota Denpasar	Kota Denpasar			Terlaksananya Festival Animasi Tingkat SMA/SMK dan Mahasiswa	100%	Tergalinya potensi Animator Tingkat SMA/SMK dan Mahasiswa	100%	546.794.000	601.473.400

	1.25.01.15.95		Desiminasi Informasi melalui Promosi dan Publikasi Pelayanan Publik	Kota Denpasar			Terwujudnya Promosi Denpasar Festival 2017 dan publikasi pelayanan masyarakat di Kota Denpasar serta pada media elektronik	100%	Terpublikasinya Promosi Denpasar Festival 2017 yang menarik wisata untuk mengunjungi Kota Denpasar	100%	139.395.000	153.334.500
	1.25.01.15.14		Pengelolaan website dan subdoain, perencanaan dan penyusunan kegiatan dan evaluasi pelaporan pada dinas kominfo kota denpasar	Kota Denpasar			Data yang terkini di webKota Denpasar dan Subdomain Kominfo	100%	Informasi yang up to date di website Kota Denpasar	100%	190.971.000	210.068.100
	1.25.01.15.73		Penyusunan Profil Dinas Kominfo Kota Denpasar	Kota Denpasar			Video DVD, Buku Profil, Banner	100%	Profil Dinas Kominfo Kota Denpasar	100%	144.270.000	158.697.000
	1.25.01.15.79		smart system platform (smart system control room)	Kota Denpasar			Tersedianya sarana smart system control room di Kota Denpasar	100%	Terlaksananya pengembangan sarana prasarana smart system control room dalam peningkatan pelayanan publik	100%	365.617.800	402.179.580
	1.25.01.15.81		Pelaksanaan Audit TIK	Kota Denpasar			Dokumen Laporan Audit	1 SKPD	Buku laporan Audit	1 SKPD	174.385.000	191.823.500
	1.25.01.15.82		Pemeliharaan dan penyebarluasan sistem egov di lingkungan pemerintah Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terpeliharanya Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	100%	Pemeliharaan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	100%	144.770.000	159.247.000
	1.25.01.15.83		Pemeliharaan Konektivitas sistem Informasi	Kota Denpasar			Terpeliharanya Koneksitas Sistem Informasi	100%	Pemeliharaan Koneksitas Sistem Informasi	100%	68.250.000	75.075.000
	1.25.01.15.86		Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terciptanya sistem informasi terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar	100%	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar	100%	188.225.000	207.047.500
	1.25.01.15.84		Pengembangan website Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terlaksananya pengembangan website Kota Denpasar	website	Terlaksananya pengembangan website Kota Denpasar	website	87.375.000	96.112.500
	1.25.01.15.85		Pembangunan sistem data warehouse	Kota Denpasar			Tercipatanya sistem datawarehouse	100%	Terwujudnya sistem data warehouse	100%	367.175.000	403.892.500
	1.25.01.15.77		pengembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan Fiber Optik (FO) di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Tersedianya infrastruktur jaringan dan Fiber Optik di Kota Denpasar	5 SKPD	Terlaksananya pengembangan infrastruktur jaringan dalam peningkatan pelayanan publik	5 SKPD	559.790.000	615.769.000
	1.25.01.15.80		pengelolaan dan pemeliharaan Inprastruktur jaringan Internet di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terselenggaranya pengelolaan dan pemeliharaan inprastruktur jaringan internet di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	25 titik koneksi	Tertatanya jaringan internet di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	25 titik koneksi	110.084.000	121.092.400

	1.25.01.15.78		Pengelolaan infrastruktur jaringan Internet di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Tersedianya pengelolaan infrastruktur jaringan internet Kota Denpasar	43 SKPD	Tertatanya jaringan internet SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dps	43 SKPD	1.191.000.000	1.310.100.000
	1.25.01.15.79		Cinema Tancap (CINTA) Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terselenggaranya diseminasi dan sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK di Kota Denpasar	100%	Terlaksananya diseminasi TIK melalui Cinema Tancap (CINTA) Kota Denpasar	100%	223.975.000	246.372.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komonikasi Dan Informatika	1.25.01.20.	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			Penyusunan acuan teknis standar operasional prosedur	100%					90.670.000	99.737.000
	1.25.01.18.14		Penyusunan SOP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Kota Denpasar			Tersedianya SOP Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Terciptanya SOP Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	90.670.000	99.737.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komonikasi Dan Informatika	1.25.01.18	Program Kerjasama informasi dengan mass media			Terlaksananya informasi dan publikasi pembangunan melalui mass media	100%					473.075.000	520.382.500
	1.25.01.18.01		Desiminasi Informasi melalui mass media	Kota Denpasar							473.075.000	520.382.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.25.01.01.07	Program Pelayanan administrasi perkantoran			Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.394.420.500	1.533.862.550
			Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar			Laporan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kominikasi pada dinas kominfo kota denpasar	100%	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran pd dinas kominfo kota dps	100%	1.394.420.500	1.533.862.550
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.25.01.02.12	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.109.030.000	1.219.933.000
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Denpasar			Laporan sarana dan prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	100%	1.109.030.000	1.219.933.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.25.01.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					33.200.000	36.520.000

			Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kota Denpasar			Pelatihan Sumber Daya Aparatur dibidang informasi dan komunikasi	100%	Terlaksananya Pelatihan/Kursus/Bintek /Diklat dan Workshop	100%	33.200.000	36.520.000
	Total										19.928.155.760	21.920.971.336

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komonikasi Dan Informatika	1.25.1.20.03.09.17.08.08	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media									4.776.563.000	4.881.563.000
			a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Majalah	Denpasar	Tersedianya informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui media massa.	100%	Terbitnya majalah Sewaka Dharma.	100%	Jumlah Tersebar nya informasi evaluasi program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kota Denpasar melalui Majalah Sewaka Dharma	100%	431.900.000	436.900.000
			b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Denpasar	Tersedianya informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada media massa.	100%	Jumlah termuatnya informasi pembangunan daerah pada media massa.	100%	Prosentase tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui media massa	100%	4.344.663.000	4.444.663.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komonikasi Dan Informatika	1.25.1.20.03.09.17	Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi									665.000.000	680.000.000
			a. Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	Daerah lain	Terpenuhinya fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	100%	Terlaksananya pekan Informasi Pembangunan dan peningkatan wawasan SDM	100%	Jumlah informasi pembangunan yang didapat dari daerah lain, sebagai pembanding yang mempunyai keunggulan dalam bidang tertentu	100%	665.000.000	680.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.09.01	Program pelayanan administrasi perkantoran									5.631.183.595	5.731.183.595
			a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Denpasar	Tersedianya barangbarang keperluan administrasi perkantoran	100%	Terlaksananya administrasi perkantoran.	100%	Jumlah terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran	100%	5.631.183.595	5.731.183.595
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur									49.300.000	50.000.000
			a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja	Denpasar	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah tersedianya pakaian kerja pegawai	100%	Jumlah terpenuhinya pakaian kerja pegawai	100%	49.300.000	50.000.000

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.05.05.05	Program peningkatan disiplin aparatur									78.240.000	80.240.000
			a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Denpasar	Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Jumlah pegawai humas dan protokol yang ikut diklat dan bimtek	100%	jumlah pegawai humas dan protokol yang meningkat kemampuan dalam pelaksanaan tugas	100%	78.240.000	80.240.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.120.03.09.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah									2.500.000.000	3.100.000.000
			a. Kegiatan Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan (Bazzar)	Denpasar	Terpenuhinya keperluan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	100%	Frekuensi terlaksananya dialog/audience pimpinan daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	100%	Frekuensi terjalinya komunikasi timbal balik dan hubungan harmonis dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	100%	1.000.000.000	1.500.000.000
			b. Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri (tamu)	Denpasar	Terpenuhinya keperluan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	100%	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lem baga pemerintah non departemen/luar negeri	100%	Jumlah terpenuhinya keperluan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lem baga pemerintah non departemen/luar negeri	100%	1.500.000.000	1.600.000.000
	TOTAL										13.700.286.595	14.522.986.595

KECAMATAN DENPASAR BARAT

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	Persentase meningkatnya pelayanan perkantoran di kecamatan Denbar	100%	-	-	-	-	4.004.113.000	4.204.318.650
	1.20.1.20.09.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Denbar		-	Jumlah belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang operasional Kelurahan dan Kecamatan Denbar	100%	Pemenuhan pelayanan perkantoran di kecamatan Denbar	100%	4.004.113.000	4.204.318.650
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	-	-	-	1.784.180.000	1.873.389.000
	1.20.1.20.09.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Denbar		-	Jumlah belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana	100%	Terpenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.784.180.000	1.873.389.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.09.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			Persentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kaling/Kadus	100%	-	-	-	-	68.327.000	71.743.350
	1.20.1.20.09.05.05		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop Bagi PNS Daerah	Kec. Denbar			Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat	2 orang	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Sesuai Standart Mutu	2 orang	28.350.000	29.767.500
	1.20.1.20.09.05.19		Bintek Kaling / Kadus	Kec. Denbar			Meningkatnya Sumber Daya Aparatur kaling/Kadus	1 kali/112 orang	Meningkatnya Pengetahuan Kaling/Kadus	1 kali/112 orang	39.977.000	41.975.850
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	1.01.1.20.09.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	Persentase Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini	100%	-	-	-	-	37.610.000	39.490.500
	1.01.1.20.09.15.59		Bunda PAUD	Kec. Denbar		-	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini	1 PAUD/10 Desa/Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Anak Yang Mendapatkan Pendidikan	1 PAUD/10 Desa/Kelurahan	37.610.000	39.490.500
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.09.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Kanker	100%	-	-	-	-	210.129.000	220.635.450

	1.02.1.20.09.16.04		Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah (POKJANAL DBD)	Kec. Denbar		-	Terlaksananya kegiatan kelompok kerja DBD		Terbinanya masyarakat tentang kegiatan POKJANAL DBD		165.395.000	173.664.750
	1.02.1.20.09.16.28		Peningkatan Masyarakat (PKTP)	Kec. Denbar		-	Menurunnya Persentase Penderita Kanker	3 Sekolah	Menurunnya Jumlah Penderita Kanker	3 Sekolah	44.734.000	46.970.700
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.09.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Meningkatnya Kesehatan Anak Sekolah	100%	-	-	-	-	20.242.000	21.254.100
	1.02.1.20.09.19.01		Pembinaan UKS	Kec. Denbar			Terbinanya UKS Yang Ada DI Denpasar Selatan	3 sekolah	Meningkatnya Jumlah UKS Yang Terbina	3 sekolah	20.242.000	21.254.100
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.09.22.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular			Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan	100%	-	-	-	-	160.000.000	168.000.000
	1.02.1.20.09.22.07		Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular (Lomba PSN) dan Lomba Kebersihan Lingkungan	Kec. Denbar			Menurunnya Volume Penderita Demam Berdarah	11 Desa/Kelurahan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	11 Desa/Kelurahan	160.000.000	168.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.09.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	Kec. Denbar	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	-	-	-	-	12.000.000	12.600.000
	1.02.1.20.09.30.08		Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN))	Kec. Denbar			Meningkatnya Persentase Kesejahteraan Para Lanjut Usia	3 Kelurahan	Jumlah Kesejahtera Para Lanjut Usia Meningkat	3 Kelurahan	12.000.000	12.600.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.1.20.09.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Porsentase Jumlah Drainase	100%	-	-	-	-	214.305.000	225.020.250
	1.03.1.20.09.16.03		Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Kec. Denbar		-	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	3 Kelurahan	Jumlah Daerah Rawan Banjir Menurun	3 Kelurahan	214.305.000	225.020.250
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.03.1.20.09.33.	Program Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Dan Pemukiman	-	-	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan	100%	-	-	-	-	203.400.000	213.570.000
	1.03.1.20.09.33.08		Pengadaan Kontruksi Jalan	Kec. Denbar		-	Pengadaan Kontruksi Jalan	3 Kelurahan	Tercapainya pemapangan jalan lingkungan	3 Kelurahan	203.400.000	213.570.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.20.09.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	Meningkatkan Pembangunan Daerah	100%	-	-	-	-	58.684.000	61.618.200
	1.06.1.20.09.21.15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Denbar			Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	11 Desa/Kelurahan	Terwujudnya Pembangunan Yang Berskala Prioritas	11 Desa/Kelurahan	58.684.000	61.618.200
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.20.09.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	100%	-	-	-	-	166.386.000	174.705.300

	1.08.1.20.09.15.11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan Pemeliharaan Taman	Kec. Denbar			Meningkatnya kebersihan lingkungan	3 kelurahan	Meningkatnya kebersihan lingkungan	3 kelurahan	166.386.000	174.705.300
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.10.1.20.09.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			Meningkatkan Ketertiban Administrasi Penduduk	100%	-	-	-	-	148.310.000	155.725.500
	1.10.1.20.09.15.22		Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Kec. Denbar			Terlaksananya Pengendalian Mobilitas Penduduk dan Penertiban	10 Desa/Kelurahan	Menurunnya Jumlah Penduduk Pendatang	10 Desa/Kelurahan	148.310.000	155.725.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.20.09.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			Persentase Meningkatnya Peran Perem Perempuan Dalam Masyarakat	100%	-	-	-	-	8.900.000	9.345.000
	1.11.1.20.09.17.01		Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Pembinaan Gerakan Sayang Ibu/GSI)	Kec. Denbar			Persentase Meningkatnya Peran Perem Perempuan Dalam Masyarakat	11 Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan GSI	11 Desa/Kelurahan	8.900.000	9.345.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.09.15	Program Keluarga Berencana	-	-	Persentase Jumlah KBKes yang Terbinanya	100%	-	-	-	-	30.000.000	31.500.000
	1.12.1.20.09.15.12		Pembinaan KB - Kes	Kec. Denbar		-	Terbinanya jumlah KB-Kes di Masyarakat	3 Kelurahan	Meningkatnya Persentase Jumlah KB-Kes	3 Kelurahan	30.000.000	31.500.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.09.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan masyarakat			Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	100%	-	-	-	-	165.149.000	173.406.450
	1.12.1.20.09.19.05		Lomba Balita Indonesia (LBI)	Kec. Denbar			Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	22 kelompok	Jumlah Balita Sehat Meningkat	22 kelompok	20.522.000	21.548.100
	1.12.1.20.09.19.06		Pembinaan Posyandu	Kec. Denbar			Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	3 kelurahan	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Untuk Datang Ke Posyandu	3 kelurahan	144.627.000	151.858.350
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.09.21.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Penyakit Menular	100%	-	-	-	-	50.235.000	52.746.750
	1.12.1.20.09.21.01		Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Kec. Denbar			Menurunnya Persentase Penderita HIV/AIDS	3 sekolah	Jumlah Penderita HIV Menurun	3 sekolah	50.235.000	52.746.750
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	1.13.1.20.09.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Jumlah Pembinaan Berkaitan Dengan Pemberdayaan	100%	-	-	-	-	289.736.000	304.222.800
	1.13.1.20.09.21.20		Pembinaan PSM	Kec. Denbar			Terlaksananya Pembinaan PSM	1 Desa/ Kelurahan	Jumlah PSM Yang Terbina	1 Desa/ Kelurahan	20.966.000	22.014.300
	1.13.1.20.09.21.34		Pembinaan Karang Taruna	Kec. Denbar			Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna	1 kelompok	Terbinanya Karang Taruna	1 kelompok	120.503.000	126.528.150

	1.13.1.20.09.21.44		Pembinaan Forum Aksi Pramuka (Jambore)	Kec. Denbar			Terlaksananya Kegiatan Forum Aksi Pramuka	200 orang	Terbinanya Forum Aksi Pramuka	200 orang	104.177.000	109.385.850
	1.13.1.20.09.21.38		Pembinaan P2WKSS	Kec. Denbar			Terlaksananya Pembinaan P2WKSS	3 kelurahan dan 8 Desa	Jumlah P2WKSS Yang Terbina	3 kelurahan dan 8 Desa	12.066.000	12.669.300
	1.13.1.20.09.21.39		Pembinaan UP2K	Kec. Denbar			Terlaksananya Pembinaan UP2K	1 kegiatan	Jumlah UP2K Yang Terbina	1 kegiatan	12.024.000	12.625.200
	1.13.1.20.09.21.42		Lomba Kuis Siapa Bisa	Kec. Denbar			Terlaksananya Kuis Siapa Bisa	3 kelurahan	Terbinanya Peserta Kuis Siapa Bisa	3 kelurahan	20.000.000	21.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.15.1.20.09.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kewirausahaan	100%	-	-	-	-	30.000.000	31.500.000
	1.15.1.20.09.16.06		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kec. Denbar		-	Tersedianya Hasil Kerajinan	3 Kelurahan	Terciptanya Kreatifitas Masyarakat	3 Kelurahan	30.000.000	31.500.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.1.20.09.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			Meningkat Budaya Di Masyarakat	100%	-	-	-	-	327.198.000	343.557.900
	1.17.1.20.09.15.08		Pembinaan Sekaa Teruna	Kec. Denbar			Terbinanya Sekaa Teruna	1 Sekaa Teruna	Jumlah Sekaa Teruna Yang Terbina	1 Sekaa Teruna	40.013.000	42.013.650
	1.17.1.20.09.15.65		Dharma Shanti	Kec. Denbar			Terlaksananya Kegiatan Dharma Shanti	1 Kecamatan	Terlaksananya Dharma Shanti	1 Kecamatan	56.583.000	59.412.150
	1.17.1.20.09.15.66		Pembinaan Desa Pekraman	Kec. Denbar			Terlaksananya Pembinaan Desa Pekraman	1 Desa Pekraman	Jumlah Desa Pekraman Yang Terbina	1 Desa Pekraman	74.133.000	77.839.650
	1.17.1.20.09.15.73		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Utsawa Dharma Gita)	Kec. Denbar			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelestarian Adat Budaya Daerah	56 orang	Terwujudnya Masyarakat Yang Berbudaya	56 orang	156.469.000	164.292.450
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga	1.18.1.20.09.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			Jumlah Peserta Kompetisi Olahraga	100%	-	-	-	-	381.477.000	400.550.850
	1.18.1.20.09.20.27		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKOT)	Kec. Denbar			Terbinanya Bibit Atlet Untuk Ajang Kompetisi	3 Kelurahan	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Berolahraga	3 Kelurahan	207.633.000	218.014.650
	1.18.1.20.09.20.28		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKEL)	Kec. Denbar			Terbinanya Bibit Atlet Untuk Ajang Kompetisi	3 Kelurahan	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Berolahraga	3 Kelurahan	173.844.000	182.536.200
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.09.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan	100%	-	-	-	-	155.098.000	162.852.900
	1.19.1.20.09.15.05		Pengendalian Keamanan Lingkungan				Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Di Masyarakat	3 Kelurahan	Menurunnya Tindak Kriminalitas Pada Waktu Perayaan Nyepi dan Tahun Baru	3 Kelurahan	155.098.000	162.852.900
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.09.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Persentase Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	100%	-	-	-	-	54.132.000	56.838.600

	1.19.1.20.09.17.03		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kec. Denbar			Laporan Hasil Kegiatan	Kecamatan/ Kelurahan	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan/ Kelurahan	54.132.000	56.838.600
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.09.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Persentase Meningkatkan Masyarakat Sadar Hukum	100%	-	-	-	-	38.153.000	40.060.650
	1.20.1.20.09.26.15		Pembinaan/Publikasi Dalam Rangka Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Kec. Denbar			Terbinanya Kesadaran Masyarakat Akan Hukum	1 kelompok	Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Hukum	1 kelompok	38.153.000	40.060.650
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.09.29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	-	-	-	-	23.331.000	24.497.550
	1.20.1.20.09.29.05		Peningkatan Pelayanan Umum (PATEN)	Kec. Denbar		-	Meningkatnya Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan	3 kelurahan	Peningkatan Masyarakat Yang menerima Pelayanan	3 kelurahan	23.331.000	24.497.550
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.09.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	-	Tercapainya kemitraan dan usaha mikro kecil	100%	-	-	-	-	74.897.000	78.641.850
	1.22.1.20.09.16.06		Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan	Denpasar Barat			Terfasilitasinya kemitraan dan usaha mikro kecil	3 kelurahan	Tercapainya kemitraan swasta dan UKM	3 kelurahan	74.897.000	78.641.850
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.09.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	-	-	-	-	243.015.000	255.165.750
	1.22.1.20.09.17.05		Monitoring Pelaporan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Denbar		-	Tersusunnya Profil Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan dan 3 Kelurahan	Tersedianya Profil Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan dan 3 Kelurahan	109.965.000	115.463.250
	1.22.1.20.09.17.10		Bulan Bhakti Gotong Royong	Kec. Denbar		-	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	3 Kelurahan	Terciptanya Lingkungan Bersih dan Asri	3 Kelurahan	45.054.000	47.306.700
	1.22.1.20.09.17.11		Monitoring dan Pembinaan Evaluasi Kelurahan	Kec. Denbar		-	Meningkatkan Kinerja Kelurahan	1 Kelurahan/3 Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kelurahan	1 Kelurahan/3 Kelurahan	87.996.000	92.395.800
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.09.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	-	-	Jumlah Terbinanya Administrasi PKK	100%	-	-	-	-	279.512.000	293.487.600
	1.22.1.20.09.19.08		Pembinaan Administrasi PKK	Kec. Denbar		-	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	3 Kelurahan dan 8 Desa	Jumlah PKK Terbina	3 Kelurahan dan 8 Desa	279.512.000	293.487.600
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.22.1.20.09.21.	Program pengembangan Lingkungan Sehat	-	-	Jumlah Terbinanya Kota Sehat	100%	-	-	-	-	13.179.320	13.838.286
	1.22.1.20.09.21.04		Monitoring dan Pelaporan Kota Sehat	Kec. Denbar			Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1 kali	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	1 kali	13.179.320	13.838.286

Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	2.06.1.20.09.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Jumlah Pedagang Yang Ikut Dalam Pasar Rakyat	100%	-	-	-	-	113.690.000	119.374.500
	2.06.1.20.09.18.08		Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah			-	Terlaksananya Pasar Rakyat	30 Pedagang	Meningkatnya Pendapatan Pedagang Kecil dan menengah	30 Pedagang	113.690.000	119.374.500
	TOTAL										9.365.388.320	9.833.657.736

KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	Persentase meningkatnya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel	100%	-	-	-	-	6.433.822.275	7.077.204.503
	1.20.1.20.11.01.07		Administrasi perkantoran	Kec. Densel		-	Jumlah belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang operasional Kelurahan dan Kecamatan Densel	100%	Pemenuhan pelayanan perkantoran di kecamatan Densel	100%	6.433.822.275	7.077.204.503
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	-	-	Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	-	-	-	2.351.771.250	2.586.948.375
	1.20.1.20.11.02.12		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Densel		-	Jumlah belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana	100%	Terpenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.351.771.250	2.586.948.375
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.21.1.20.11.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			Persentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kaling/Kadus	100%	-	-	-	-	175.538.000	193.091.800
	1.21.1.20.11.16.04		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop Bagi PNS Daerah	kec Densel			Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat	16 Orang	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Sesuai Standart Mutu	16 Orang	132.000.000	145.200.000
	1.21.1.20.11.16.08		Bintek Kaling / Kadus	Kec. Densel			Meningkatnya Sumber Daya Aparatur kaling/Kadus	105 Kaling/Kadus	Meningkatnya Pengetahuan Kaling/Kadus	105 Kaling/Kadus	43.538.000	47.891.800
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	1.01.1.20.11.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	Persentase Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini	100%	-	-	-	-	9.520.500	10.472.550
	1.01.1.20.11.15.59		Bunda PAUD	Kec. Densel		-	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini	1 PAUD/10 Desa/Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Anak Yang Mendapatkan Pendidikan	1 PAUD/10 Desa/Kelurahan	9.520.500	10.472.550
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	1.08.1.20.11.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	100%	-	-	-	-	31.185.000	34.303.500
	1.08.1.20.11.15.11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kec. Densel			Terlaksananya Lomba Kebersihan Lingkungan	1 Lingkungan / 6 Kelurahan	Tertatanya Kebersihan Lingkungan	1 Lingkungan / 6 Kelurahan	31.185.000	34.303.500

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.11.05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	-	-	-	-	23.331.000	25.664.100
	1.20.1.20.11.05.29		Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	Kec. Densel		-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100%	Peningkatannya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	100%	23.331.000	25.664.100
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.10.1.20.11.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			Meningkatkan Ketertiban Administrasi Penduduk	100%	-	-	-	-	470.783.500	517.861.850
	1.10.1.20.11.15.22		Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Kec. Densel			Terlaksananya Pengendalian Mobilitas Penduduk dan Penertiban	10 Desa/Kelurahan	Menurunnya Jumlah Penduduk Pendetang	10 Desa/Kelurahan	458.573.500	504.430.850
	1.10.1.20.11.15.44		Penyelenggaraan Lomba Administrasi Kependudukan Antar Lingkungan	Kec. Densel			Terbinanya Administrasi Di Masing-Masing Lingkungan	1 Kelurahan / 6 Kelurahan	Meningkatnya Penertiban Dalam Pelaporan Administrasi Penduduk	1 Kelurahan / 6 Kelurahan	12.210.000	13.431.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.12.1.20.11.15	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	-	-	Persentase Jumlah KBKES yang Terbinanya	100%	-	-	-	-	55.715.000	61.286.500
	1.12.1.20.11.15.12		Pembinaan KB - Kes	Kec. Densel		-	Terbinanya jumlah KB-Kes di Masyarakat	6 Kelurahan	Meningkatnya Persentase Jumlah KB-Kes	6 Kelurahan	55.715.000	61.286.500
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.1.20.11.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			Meningkat Budaya Di Masyarakat	100%	-	-	-	-	930.253.500	1.023.278.850
	1.17.1.20.11.15.01		Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah (Lomba Bapang Barong)	Kec. Densel			Terbinanya Sekaa Kesenian Yang Ada Di Kelurahan Panjer	1Kelurahan/ 6 Kelurahan	Jumlah Sekaa Kesenian Di Kelurahan Panjer Meningkat	1Kelurahan /6 Kelurahan	94.391.000	103.830.100
	1.17.1.20.11.15.08		Pembinaan Sekaa Teruna	Kec. Densel			Terbinanya Sekaa Teruna	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	Jumlah Sekaa Teruna Yang Terbina	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	105.176.500	115.694.150
	1.17.1.20.11.15.65		Dharma Shanti	Kec. Densel			Terlaksananya Kegiatan Dharma Shanti	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	Terlaksananya Dharma Shanti	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	33.852.500	37.237.750
	1.17.1.20.11.15.66		Pembinaan Desa Pekraman	Kec. Densel			Terlaksananya Pembinaan Desa Pekraman	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	Jumlah Desa Pekraman Yang Terbina	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	63.525.000	69.877.500
	1.17.1.20.11.15.73		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Utsawa Dharma Gita)	Kec. Densel			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelestarian Adat Budaya Daerah	11 Desa Pekraman/ 10 Desa/Kelurahan	Terwujudnya Masyarakat Yang Berbudaya	11 Desa Pekraman/ 10 Desa/Kelurahan	633.308.500	696.639.350

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.11.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan	100%	-	-	-	-	30.987.000	34.085.700
	1.19.1.20.11.15.05		Pengendalian Keamanan Lingkungan				Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Di Masyarakat	100%	Menurunnya Tindak Kriminalitas Pada Waktu Perayaan Nyepi dan Tahun Baru	100%	30.987.000	34.085.700
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.11.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Kanker	100%	-	-	-	-	27.885.000	30.673.500
	1.02.1.20.11.16.28		Peningkatan Masyarakat (PKTP)	Kec. Densel		-	Menurunnya Persentase Penderita Kanker	4 Sekolah	Menurunnya Jumlah Penderita Kanker	4 Sekolah	27.885.000	30.673.500
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.1.20.11.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Porsentase Jumlah Drainase	100%	-	-	-	-	278.399.440	306.239.384
	1.03.1.20.11.16.03		Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Kec. Densel		-	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	1000 M3	Jumlah Daerah Rawan Banjir Menurun	1000 M3	278.399.440	306.239.384
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.15.1.20.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kewirausahaan	100%	-	-	-	-	91.228.610	100.351.471
	1.15.1.20.11.16.06		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kec. Densel		-	Tersedianya Hasil Kerajinan	6 Kelurahan	Terciptanya Kreatifitas Masyarakat	6 Kelurahan	91.228.610	100.351.471
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.11.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Persentase Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	100%	-	-	-	-	40.191.250	44.210.375
	1.19.1.20.11.17.03		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kec. Densel			Laporan Hasil Kegiatan	100%	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	100%	40.191.250	44.210.375
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.1.20.11.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			Persentase Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Masyarakat	100%	-	-	-	-	8.030.000	8.833.000
	1.11.1.20.11.17.01		Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Pembinaan Gerakan Sayang Ibu/GSI)	Kec.Densel			Persentase Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Masyarakat	100%	Terlaksananya Kegiatan GSI	100%	8.030.000	8.833.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.11.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	-	-	-	-	387.640.000	426.404.000
	1.22.1.20.11.17.05		Monitoring Pelaporan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Densel		-	Tersusunnya Profil Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan dan 6 Kelurahan	Tersedianya Profil Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan dan 6 Kelurahan	249.067.500	273.974.250
	1.22.1.20.11.17.10		Bulan Bhakti Gotong Royong	Kec. Densel		-	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	6 Kelurahan	Terciptanya Lingkungan Bersih dan Asri	6 Kelurahan	84.892.500	93.381.750

	1.22.1.20.11.17.11		Monitoring dan Pembinaan Evaluasi Kelurahan	Kec. Densel		-	Meningkatkan Kinerja Kelurahan	1 Kelurahan/6 Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kelurahan	1 Kelurahan/6 Kelurahan	53.680.000	59.048.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.11.17.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	100%	-	-	-	-	9.443.500	10.387.850
	1.22.1.20.11.17.13		Pembinaan LPM	Kec. Densel		-	Terpenuhinya Peralatan Kantor	6 Kelurahan	Memperlancar Kegiatan	6 Kelurahan	9.443.500	10.387.850
Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	2.06.1.20.11.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Jumlah Pedagang Yang Ikut Dalam Pasar Rakyat	100%	-	-	-	-	124.597.000	137.056.700
	1.15.1.20.11.18.06		Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah			-	Terlaksananya Pasar Rakyat	30 Pedagang	Meningkatnya Pendapatan Pedagang Kecil dan menengah	30 Pedagang	124.597.000	137.056.700
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.12.1.20.11.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Meningkatnya Kesehatan Anak Sekolah	100%	-	-	-	-	49.841.000	54.825.100
	1.13.1.20.11.19.01		Pembinaan UKS	Kec. Densel			Terbinanya UKS Yang Ada DI Denpasar Selatan	4 Sekolah (10 Desa/Kelurahan)	Meningkatnya Jumlah UKS Yang Terbina	4 Sekolah (10 Desa/Kelurahan)	49.841.000	54.825.100
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.11.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat			Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	100%	-	-	-	-	208.279.500	229.107.450
	1.12.1.20.11.19.05		Lomba Balita Indonesia (LBI)	Kec. Densel			Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	100%	Jumlah Balita Sehat Meningkat	100%	19.544.250	21.498.675
	1.12.1.20.11.19.06		Pembinaan Posyandu	Kec. Densel			Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	100%	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Untuk Datang Ke Posyandu	100%	188.735.250	207.608.775
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.22.1.20.11.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	-	-	Jumlah Terbinanya Administrasi PKK	100%	-	-	-	-	335.216.750	368.738.425
	1.22.1.20.11.19.08		Pembinaan Administrasi PKK	Kec. Densel		-	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	6 Kelurahan	Jumlah PKK Terbina	6 Kelurahan	335.216.750	368.738.425
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga	1.18.1.20.11.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			Jumlah Peserta Kompetisi Olahraga	100%	-	-	-	-	1.298.943.250	1.428.837.575
	1.18.1.20.11.20.27		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKOT)	Kec. Densel			Terbinanya Bibit Atlet Untuk Ajang Kompetisi	6 Kelurahan	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Berolahraga	6 Kelurahan	616.052.250	677.657.475
	1.18.1.20.11.20.28		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKEL)	Kec. Densel			Terbinanya Bibit Atlet Untuk Ajang Kompetisi	6 Kelurahan	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Berolahraga	6 Kelurahan	682.891.000	751.180.100
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.22.1.20.11.21.	Program pengembangan Lingkungan Sehat	-	-	Jumlah Terbinanya Kota Sehat	100%	-	-	-	-	10.675.500	11.743.050

	1.22.1.20.11.21.04		Monitoring dan Pelaporan Kota Sehat	Kec.Densel			Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1 Kecamatan/6 Kelurahan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	1 Kecamatan/6 Kelurahan	10.675.500	11.743.050
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.20.11.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	Meningkatkan Pembangunan Daerah	100%	-	-	-	-	55.591.250	61.150.375
	1.06.1.20.11.21.15		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Densel			Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	150 Usulan	Terwujudnya Pembangunan Yang Berskala Prioritas	150 Usulan	55.591.250	61.150.375
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.12.1.20.11.21.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS			Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Penyakit Menular	100%	-	-	-	-	72.113.800	79.325.180
	1.12.1.20.11.21.01		Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Kec. Densel			Menurunnya Persentase Penderita HIV/AIDS	100%	Jumlah Penderita HIV Menurun	100%	72.113.800	79.325.180
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	1.13.1.20.11.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Jumlah Pembinaan Berkaitan Dengan Pemberdayaan	100%	-	-	-	-	340.549.000	374.603.900
	1.13.1.20.11.21.20		Pembinaan PSM	Kec. Densel			Terlaksananya Pembinaan PSM	1 Desa/ Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	Jumlah PSM Yang Terbina	1 Desa/ Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	18.892.500	20.781.750
	1.13.1.20.11.21.34		Pembinaan Karang Taruna	Kec. Densel			Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna	1 Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	Terbinanya Karang Taruna	1 Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)	161.880.400	178.068.440
			Pembinaan Forum Aksi Pramuka (Jambore)	Kec. Densel			Terlaksananya Kegiatan Forum Aksi Pramuka	8 Gugus	Terbinanya Forum Aksi Pramuka	8 Gugus	125.758.600	138.334.460
	1.13.1.20.11.21.38		Pembinaan P2WKSS	Kec. Densel			Terlaksananya Pembinaan P2WKSS	1 Desa Kelurahan/10 Desa/Kelurahan	Jumlah P2WKSS Yang Terbina	1 Desa Kelurahan/10 Desa/Kelurahan	11.550.000	12.705.000
	1.13.1.20.11.21.39		Pembinaan UP2K	Kec. Densel			Terlaksananya Pembinaan UP2K	1 Desa Kelurahan/10 Desa/Kelurahan	Jumlah UP2K Yang Terbina	1 Desa Kelurahan/10 Desa/Kelurahan	11.550.000	12.705.000
	1.13.1.20.11.21.42		Lomba Kuis Siapa Bisa	Kec. Densel			Terlaksananya Kuis Siapa Bisa	1 Kelurahan/ 6 Kelurahan	Terbinanya Peserta Kuis Siapa Bisa	1 Kelurahan/ 6 Kelurahan	10.917.500	12.009.250
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.20.11.22.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular			Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan	100%	-	-	-	-	225.167.250	247.683.975
	1.02.1.20.11.22.07		Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular (Lomba PSN)	Kec.Densel			Menurunnya Volume Penderita Demam Berdarah	10 Desa/Kelurahan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	10 Desa/Kelurahan	225.167.250	247.683.975

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.11.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Persentase Meningkatkan Masyarakat Sadar Hukum	100%	-	-	-	-	69.102.000	76.012.200
	1.20.1.20.11.26.15		Pembinaan/Publikasi Dalam Rangka Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Kec. Densel			Terbinanya Kesadaran Masyarakat Akan Hukum	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kel)	Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Hukum	1 Ds/Kel/10 Ds/Kel	69.102.000	76.012.200
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.20.1.20.11.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	Kec. Densel	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	-	-	-	-	633.308.500	696.639.350
	1.20.1.20.11.30.08		Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN))	Kec. Densel			Meningkatnya Persentase Kesejahteraan Para Lanjut Usia	6 Kelurahan	Jumlah Kesejahtera Para Lanjut Usia Meningkat	6 Kelurahan	633.308.500	696.639.350
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.03.1.20.11.33.	Program Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Dan Pemukiman	-	-	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan	100%	-	-	-	-	850.016.085	935.017.693
	1.03.1.20.11.33.08		Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Kec. Densel		-	Menurunnya Jumlah Jalan Yang Rusak	1800 M2	Jumlah Jalan Yang Rusak Menurun	1800 M2	850.016.085	935.017.693
	Total										15.629.125.710	17.192.038.281

BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Bag.Pemerintahan	Pelayanan administrasi kantor	100%	-	-	-	-	492.168.500	546.830.350
	1.20.1.20.03.10.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bag.Pemerintahan		-	Tersedianya Barang dan Jasa pada Bagian Pemerintahan	8 belanja	Lancarnya Pelayanan Administrasi kantor	8 belanja	492.168.500	546.830.350
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Bag.Pemerintahan	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai dilingkungan Setda Kota Denpasar	100%	-	-	-	-	26.000.000	28.600.000
	1.20.1.20.03.10.05.05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat dan BinteK	2 org	pegawai yang meningkat kemampuan dlm pelaksanaan tugas	2 org	26.000.000	28.600.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.10.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Denpasar	LPPD Kota Denpasar	100%	-	-	-	-	95.890.000	105.479.000
	1.20.1.20.03.10.16.09		Koordinasi dalam penyusunan LPPD Kota Denpasar	Denpasar		-	Jumlah LPPD yang tersusun selama 1 tahun	1 laporan	Laporan dan evaluasi kinerja penyelenggara pemerintahan Daerah	1 laporan	95.890.000	105.479.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.20.1.20.03.10.31	Program Kerjasama Pembangunan	-	2 kota	Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia	100%	-	-	-	-	182.700.000	184.000.000
	1.20.1.20.03.10.31.03		Pelaksanaan Kegiatan APEKSI Tahunan	2 kota		-	Jumlah informasi pembangunan yang diperoleh antar anggota APEKSI	2 kota	Terjalinnnya Kerjasama Antar Daerah Seluruh Anggota APEKSI	2 kota	182.700.000	184.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.10.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	Dentim dan Denut	Terlaksananya Penataan Daerah	100%	-	-	-	-	271.572.500	298.730.000
	1.20.03.10.27.03		-Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah /Kecamatan	Dentim dan Denut		-	Terfasilitasinya Penyelesaian Batas Daerah Yang Jelas Antar Kecamatan	2 Kec	Terwujudnya Kejelasan Batas Daerah Wilayah Penyelenggara Administrasi Pemerintahan	2 kec	271.572.500	298.730.000
			Penataan Nama-Nama Rupabumi Unsur Buatan dan Unsur Alami	Denbar,Dentim,Denut dan Densel		-	Terdatanya Nama-Nama Rupabumi Unsur Buatan dan Unsur Alami	4 Kec	Terwujudnya Kejelasan Nama-Nama Rupa Bumi Unsur Buatan dan Unsur Alami	4 Kec	-	-

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.10.37	Program Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan	-	Denbar,Dentim,Denut dan Densel	Terlaksananya Tata kelola pemerintahan yang baik	100%	-	-	-	-	82.430.000	90.672.000
	1.20.03.10.37.03		- Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar	Denbar,Dentim,Denut dan Densel		100%	Terbinanya Kelurahan di Kota Denpasar	4 Kel	Efektifitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan	4 Kel	17.110.000	18.820.000
	1.20.03.10.37.04		- Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Denbar,Dentim,Denut dan Densel		100%	Terbentuknya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kec.Denbar,Dentim,Denut dan Densel	4 Kec	Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	4 Kec	65.320.000	71.852.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	1.09.1.20.03.10.16	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	-	Denbar,Dentim,Denut dan Densel	Adanya kepastian pemilikan tanah	100%	-	-	-	-	158.725.000	188.840.000
	1.09.1.20.03.10.16.01		penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-		-	Data tanah aset daerah	10 sertifikat	Peta bidang	10 aset sertifikat	158.725.000	188.840.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	1.09.1.20.03.10.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	-	Denbar,Dentim,Denut dan Densel	Adanya kepastian pemilikan tanah	100%	-	-	(298.730.000)	-	93.390.000	102.729.000
	1.09.1.20.03.10.17.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan (Penanganan masalah LC)	Denbar,Dentim,Denut dan Densel		-	Data tanah aset daerah	10 bh peta	Peta bidang	10 bh	93.390.000	102.729.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.03.10.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	-	Denpasar	Terselenggaranya Hut Kota dan Hut RI	100%	-	-	-	-	1.112.995.000	1.168.644.750
	1.19.1.20.03.10.17.08		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Denpasar		-	Terselenggaranya Hut Kota dan Hut RI	2 kali	Meningkatnya rasa kebangsaan	Kota Denpasar	1.112.995.000	1.168.644.750
Total											2.515.871.000	2.714.525.100

SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.04.15	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			Meningkatnya pelaksanaan tugas fungsi DPRD	100%					30.795.197.000	33.874.716.700
	1.20.04.15.01		1) Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kota Denpasar	Peningkatan pembahasan rancangan peraturan daerah	100%	Pembahasan rancangan peraturan daerah	32 kali	Peraturan daerah yang ditetapkan	15 perda	7.766.865.000	8.543.551.500
	1.20.04.15.02		2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan tokoh masyarakat / tokoh agama	Kota Denpasar	Peningkatan hearing,dialog,kordinasi dengan tokoh masyarakat/tokoh agama	100%		12 kali	Ditetapkannya Keputusan rapat	12 kep	25.310.000	27.841.000
	1.20.04.15.03		3) Rapat rapat alat kelengkapan Dewan	Kota Denpasar	Peningkatan rapatrapat alat kelengkapan	100%	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	104 kali	Ditetapkannya keputusan rapat	20 kep	184.034.500	202.437.950
	1.20.04.15.04		4) Rapat-rapat paripurna	Kota Denpasar	Peningkatan rapatrapat paripurna	100%	Rapat-rapat paripurna DPRD	14 kali	Ditetapkannya keputusan paripurna Dewan	14 kep	500.540.000	550.594.000
	1.20.04.15.05		5) Pelaksanaan Reses	Luar Kota Denpasar	Peningkatan pelaksanaan reses	100%	Terlaksananya komunikasi dan konsultasi antara DPRD dengan konstituen di daerah pemilihan	3 kali	Tersalurnya usulan masyarakat/konstituen	3 dokumen	4.476.200.000	4.923.820.000
	1.20.04.15.06		6) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	dalam dan Luar negeri	Peningkatan kunker Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	Pimpinan dan Anggota DPRD kunker dalam dan ke luar negeri	13 kali	Terakomodirnya hasil kunker dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	13 dokumen	5.527.550.000	6.080.305.000
	1.20.04.15.07		7) Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/Bimtek	Luar /dalam Kota Denpasar	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	Pimpinan dan Anggota DPRD bimbingan teknis	3 kali	Ofimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	100%	1.790.700.000	1.969.770.000
	1.20.04.15.08		8) Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan Dewan	Luar Kota Denpasar	Peningkatan kunker untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan	100%	Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD	19 kali	Terakomodirnya hasil kunker sebagai bahan pembandingan dalam pengambilan keputusan rapat dengan SKPD	19 dokumen	9.965.850.000	10.962.435.000
	1.20.04.15.10		9) Pelaksanaan rapat Fraksi	Kota Denpasar	Peningkatan rapat fraksi	100%	Terlaksananya rapat rapat fraksi	25 kali	Ditetapkannya keputusan fraksi	25 dokumen	213.597.500	234.957.250
	1.20.04.15.11		10) Pengadaan pakaian dinas DPRD	Kota Denpasar	Peningkatan pengadaan pakaian dinas DPRD	100%	Pakaian dinas DPRD	180 stel	Peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	285.450.000	313.995.000
	1.20.04.15.13		11) Penyelenggaraan peringatan HUT Kota Denpasar	Kota Denpasar	Peningkatan kemeriahan HUT Kota Denpasar	100%	Pertandingan olahraga dalam rangka HUT Kota Denpasar	1 kali	Partisipasi DPRD dan Sekretariat dalam memperingati HUT Kota Denpasar.	100%	59.100.000	65.010.000

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.04.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran			Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD.	100%					3.560.805.000	3.916.885.500
	1.20.04.01.07		1) Pelayanan Administrasi perkantoran	Kota Denpasar	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat	100%	3.113.547.000	3.424.901.700
	1.20.04.01.19		2) Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip	Kota Denpasar	Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	100%	Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip	6 dokumen	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip	6 dokumen	22.712.000	24.983.200
	1.20.04.01.21		3) Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Denpasar	Peningkatan jasa administrasi keuangan	100%	Jasa administrasi keuangan	100%	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang dimanfaatkan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran	100%	70.401.000	77.441.100
	1.20.04.01.22		4) Pelayanan Humas dan Keprotokolan	Kota Denpasar	Peningkatan pelayanan humas dan keprotokolan	100%	Pelayanan humas dan keprotokolan	100%	optimalnya hubungan dan komunikasi antar lembaga dan masyarakat di kota Denpasar	100%	354.145.000	389.559.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.04.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Mengoptimalkan tugas fungsi DPRD.	100%					1.815.269.000	1.996.795.900
	1.20.04.02.12		1) Peningkatan sarana dan prasarana	Kota Denpasar	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8%	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	8%	Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat t	100%	1.815.269.000	1.996.795.900
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.04.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Meningkatnya mutu pelayanan Sekretariat.						133.000.000	146.300.000
	1.20.04.05.03		1) Kursus/ pelatihan Bimbingan teknis PNS	Luar/dalam Kota Denpasar	Peningkatan sumber daya aparatur	100%	Bimbingan teknis Staf Sekretariat	1 kali	Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Sekretariat	100%	133.000.000	146.300.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.20.04.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Meningkatnya sistim pelaporan capaian kinerja.	100%					20.429.000	22.471.900
	1.20.04.06.01		1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Denpasar	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan	100%	Laporan capaian kinerja dan keuangan	3 dokumen	Dokumen kinerja dan keuangan sebagai alat penilaian SKPD	3 dokumen	20.429.000	22.471.900
	TOTAL										36.324.700.000	39.957.170.000

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Bag. Umum Setda Daerah Kota Denpasar	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%					5.456.194.345,00	6.001.813.780
	1.20.1.20.03.07.01.02		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Bag. Umum Setda Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya Administrasi dan meningkatnya keterpaduan/singronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral	100%	jumlah (frekuensi) penyelesaian tagihan telepon,listrik dan air	100%	lancarnya administrasi perkantoran	100%	1.855.430.940,00	2.040.974.034,00
	1.20.1.20.03.07.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran	Bag. Umum Setda Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya Administrasi dan meningkatnya keterpaduan/singronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral	100%	jumlah (frekuensi) penyelesaian administrasi perkantoran	100%	lancarnya administrasi perkantoran	100%	2.602.350.000,00	2.862.585.000,00
	1.20.1.20.03.07.01.10		Penyediaan alat tulis Kantor	Bag. Umum Setda Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya Administrasi dan meningkatnya keterpaduan/singronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral	100%	Jumlah (frekuensi) Pemakaian Alat Tulis Kantor	100%	lancarnya administrasi perkantoran	100%	133.981.760,00	147.379.936,00
	1.20.1.20.03.07.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bag. Umum Setda Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya Administrasi dan meningkatnya keterpaduan/singronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral	100%	Jumlah (frekuensi) pemakaian kebutuhan barang cetakan dan poenggandaan	100%	lancarnya administrasi perkantoran	100%	122.902.395,00	135.192.635,00
	1.20.1.20.03.07.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Bag. Umum Setda Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya Administrasi dan meningkatnya keterpaduan/singronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral	100%	Jumlah (frekuensi) kegiatan rapat - rapat dan penerimaan tamu	100%	lancarnya administrasi perkantoran	100%	741.529.250,00	815.682.175,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Bagian Umum Sekretariat DaerahKota Denpasar	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang andal	100%					7.369.084.800,00	8.105.993.280,00
	1.20.1.20.03.07.02.05		Pengadaan perlengkapan kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum Sekretariat DaerahKota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarananapenyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan perlengkapan kendaraan dinas / operasional	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	2.821.365.800,00	3.103.502.380,00

	1.20.1.20.03.07.02.06		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	69.080.000,00	75.988.000,00
	1.20.1.20.03.07.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	2.821.291.000,00	3.103.420.100,00
	1.20.1.20.03.07.02.11		Belanja Modal	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	terseapnya anggaran belanja modal untuk mendukung kelancaran pelayanan	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	223.575.000,00	245.932.500,00
	1.20.1.20.03.07.02.20		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	255.200.000,00	280.720.000,00
	1.20.1.20.03.07.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	482.273.000,00	530.500.300,00
	1.20.1.20.03.07.02.29		Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala mebeulair rumah jabatan	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	63.800.000,00	70.180.000,00
	1.20.1.20.03.07.02.42		Rehabilitasi Sedang Berat gedung kantor	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan rehabilitasi rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	632.500.000,00	695.750.000,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Prosentase tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					39.600.000,00	43.560.000,00
	1.20.1.20.03.07.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik	100%	jumlah (frekuensi) pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	100%	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi	100%	39.600.000,00	43.560.000,00
	TOTAL										12.864.879.145	14.151.367.060

BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH SETDA KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					5.847.523.275	6.139.899.439
	1.20.03.01.07		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat Kota Denpasar			Prosentase Kebutuhan ATK, Sewa, Jasa Kantor	100%	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran	100%	5.847.523.275	6.139.899.439
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Yang Handal	100%					2.734.160.000	2.928.826.000
	1.20.03.02.05		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Sekretariat Kota Denpasar			Jumlah kebutuhan kendaraan dinas operasional Pemkot Denpasar	5 Minibus, 20 Sepeda Motor	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas dinas	5 Minibus, 20 Sepeda Motor	1.575.000.000	1.653.750.000
	1.20.03.02.12		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat Kota Denpasar			Tersedianya jumlah sarana dan prasarana aparatur	20 AC,2 wireless,2 white board,5 TV,korden,2 exhaust fan,10 PC,5 note book,10 printer,10 UPS,7 meja krj,meja rapat,28 kursi kerja, 20 kursi rapat,karpet, 1 proyektor,1 sound system,3 tablet/PC	Terjaganya kualitas kinerja aparatur yang lebih baik	100%	1.159.160.000	1.275.076.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Seragam Aparatur Pemkot Denpasar	Bahan pakaian seragam dinas beserta kelengkapan nya bagi Aparatur Pemkot Denpasar					6.211.540.840	6.832.694.924

	1.20.03.03.02		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Sekretariat Kota Denpasar			Jumlah bahan seragam Pakaian Dinas Harian/PDH	8.000 potong Pegawai Pemkot Denpasar	Keseragaman pakaian dinas aparat Pemerintah Kota Denpasar	8.000 potong bahan pakaian seragam dinas Pegawai Pemkot Denpasar beserta kelengkapannya	6.211.540.840	6.832.694.924
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									89.000.000	93.450.000
					Prosentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%						
	1.20.03.05.05		1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat Kota Denpasar			Prosentase Pegawai Pemkot yang ikut Diklat dan Bimtek	100%	Meningkatnya jumlah pegawai Pemkot Denpasar yang mampu dalam pelaksanaan tugas	100%	89.000.000	93.450.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	1.09.03.16	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah			Tersusunnya laporan pemetaan/sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Denpasar	100%					376.643.800	395.475.990
	1.09.03.16.01		1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sekretariat Kota Denpasar			Prosentase laporan pemetaan/sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Denpasar	100%	Kepastian Hukum atas Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	376.643.800	395.475.990
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dalam Meningkatkan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%					304.768.400	328.694.975

	1.20.03.17.02		1. Penyusunan Standar Satuan Harga	Sekretariat Kota Denpasar			Jumlah Buku Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah 2018 dan Buku DKBMD Tahun 2017	150 Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 dan 100 buku DKBMD Tahun 2017	Tersedianya acuan pelaksanaan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Pemerintah Kota Denpasar	150 Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 dan 100 buku DKBMD Tahun 2017	131.005.300	137.555.565
	1.20.03.17.16		2. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Sekretariat Kota Denpasar			Prosentase laporan data / inventarisasi barang milik daerah se-perangkat daerah Kota Denpasar	100%	Tersusunnya data aset milik daerah Pemerintah Kota Denpasar	100%	173.763.100	191.139.410
	JUMLAH										15.563.636.315	16.719.041.328

DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.01.17	Program Pengelolaan keragaman budaya			Meningkatnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%					3.758.101.450	4.133.911.595
	1.17.01.17.01		Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	Denpasar			Pelaksanaan PKB Kota Denpasar dan mengikuti PKB tingkat Provinsi Bali	26 Sekaa/sanggar	Terlaksananya PKB Kota Denpasar dan mengikuti PKB tingkat Provinsi Bali	26 Sekaa/sanggar	2.194.050.450	2.413.455.495
	1.17.01.17.03		Penyelenggaraan dialog budaya	Denpasar			Pelaksanaan kegiatan dialog Budaya, Rembug Sastra Purnama Badrawada, Rembug, Budaya Dipa Bhawana, Pelaksanaan Grebeg Aksara, Pelaksanaan Parum - Param	12 Bulan, 6 sekaa, 100 Orang	Pelaksanaan kegiatan dialog Budaya, Rembug Sastra Purnama Badrawada, Rembug, Budaya Dipa Bhawana, Pelaksanaan Grebeg Aksara, Pelaksanaan Parum - Param	12 Bulan, 6 sekaa, 100 Orang	411.231.000	452.354.100
	1.17.01.17.04		Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah	Denpasar			Pelaksanaan musyawarah sabha upadesa (organisasi propesi tradisional)	12 Kali	Terlaksananya musyawarah sabha upadesa (organisasi propesi tradisional)	12 Kali	331.166.000	364.282.600
	1.17.01.17.05		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Denpasar			Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan	40 sekaa teruna	Tersedianya ogoh-ogoh dimasing-masing kecamatan hasil seleksi	40 sekaa teruna	717.687.000	789.455.700
	1.17.01.17.12		Lomba Kaligrafi & Bali Simbar	Denpasar			Pelaksanaan lomba pembuatan kaligrafi dan bali simbar	200 siswa SMP & SMA/SMK	Terlaksananya lomba pembuatan kaligrafi dan bali simbar	200 siswa SMP & SMA/SMK	103.967.000	114.363.700
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.01.15	Program Pengembangan nilai budaya			Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi budaya daerah						12.522.834.950	13.775.118.445
	1.17.01.15.01		Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	Denpasar			- Pelaksanaan pentas budaya dan workshop sanggar/sekaa se-kota denpasar, Pelaksanaan pelatihan tabuh, rebab, suling dan makendang, pelaksanan pementasan tabuh, rebab, suling dan makendang, Pelaksanaan lomba tari bali	120 Sanggar/sekaa, 500 Orang, 70 Orang, 250 Peserta lomba	- Pelaksanaan pentas budaya dan workshop sanggar/sekaa se-kota denpasar, Pelaksanaan pelatihan tabuh, rebab, suling dan makendang, pelaksanan pementasan tabuh, rebab, suling dan makendang, Pelaksanaan lomba tari bali	120 Sanggar/sekaa, 500 Orang, 70 Orang, 250 Peserta lomba	758.408.450	834.249.295

	1.17.01.15.04		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Denpasar			Pelaksanaan pentas seni TK & SD di lapangan puputan badung (I Gusti Ngurah Made Agung)	48 Gugus TK & SD	Terlaksananya pentas seni TK & SD di lapangan puputan badung (I Gusti Ngurah Made Agung)	48 Gugus TK & SD	116.532.500	128.185.750
	1.17.01.15.05		Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Denpasar			Pelaksanaan pemberian penghargaan seni kerti budaya, parama budaya dan sanggar	5 Orang, 5 Orang, 5 Orang	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada kerti budaya, parama budaya dan sanggar	5 Orang, 5 Orang, 5 Orang	402.437.000	442.680.700
	1.17.01.15.27		Pengembangan sarana prasarana subak	Denpasar			Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana subak	2 Subak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana subak	2 Subak	309.420.000	340.362.000
	1.17.01.15.32		Penyelenggaraan kreativitas budaya	Denpasar			Pelaksanaan lomba ngelawar, sate renteng dan meprani, Pelaksanaan lomba tari legong keraton	4 Kategori, 60 sekaa, 4 Kategori	Pelaksanaan lomba ngelawar, sate renteng dan meprani, Pelaksanaan lomba tari legong keraton	4 Kategori, 60 sekaa, 4 Kategori	421.100.000	463.210.000
	1.17.01.15.39		Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Denpasar			Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang	50 orang, pementasan 20 kali	Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang	50 orang, pementasan 20 kali	543.900.000	598.290.000
	1.17.01.15.46		Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)	Denpasar			Pelaksanaan pementasan dalam rangka upacara agama	14 sekaa kesenian	Terlaksananya pementasan dalam rangka upacara agama	14 sekaa kesenian	109.527.000	120.479.700
	1.17.01.15.49		Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT KOTA)	Denpasar			Pelaksanaan pementasan kesenian dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar	22 sekaa/ sanggar/ Group	Terlaksananya pementasan kesenian dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar	22 sekaa/ sanggar/ Group	194.645.000	214.109.500
	1.17.01.15.50		Kaderisasi pelestarian budaya daerah	Denpasar			Pelaksanaan kemah budaya tingkat Kota Denpasar dan tingkat Provinsi Bali	60 Siswa - siswi	Terlaksananya kemah budaya tingkat Kota Denpasar dan tingkat Provinsi Bali	60 Siswa - siswi	284.578.800	313.036.680
	1.17.01.15.51		Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Subak Kota Denpasar	Denpasar			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi subak di Kota Denpasar	42 Subak	Terlaksananya monitoring dan evaluasi subak di Kota Denpasar	42 Subak	2.234.141.000	2.457.555.100
	1.17.01.15.52		Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah	Denpasar			Pelaksanaan lomba sunari dan lelakut	4 sekaa teruna & 42 subak	Terlaksananya lomba sunari dan lelakut	4 sekaa teruna & 42 subak	439.235.000	483.158.500
	1.17.01.15.54		Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi desa pakraman				Pelaksanaan Pembinaan Desa Pakraman	5 Desa pakraman, 35 Pecalang	Terlaksananya Pembinaan Desa Pakraman	5 Desa pakraman, 35 Pecalang	1.109.121.000	1.220.033.100

	1.17.01.15.55		Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya sabha)	Denpasar			Pelaksanaan pembinaan Utsawa Dharma Gita di 4 Kecamatan	Camat Denut 25 orang, Camat Denbar 25 orang, Camat Dentim 25 orang, Camat Densel 25 orang, Desa Pakraman 25 orang	Terlaksananya pembinaan Utsawa Dharma Gita di 4 Kecamatan	Camat Denut 25 orang, Camat Denbar 25 orang, Camat Dentim 25 orang, Camat Densel 25 orang, Desa Pakraman 25 orang	633.976.500	697.374.150
	1.17.01.15.56		Pembinaan dan pelatihan seni rupa	Denpasar			Pelaksanaan pelatihan dan pameran seni rupa	peserta 2 sanggar/komunitas, siswa 75 orang	Terlaksananya pelatihan dan pameran seni rupa	peserta 2 sanggar/komunitas, siswa 75 orang	290.075.000	319.082.500
	1.17.01.15.58		Pembinaan kelompok kesenian	Denpasar			Pelaksanaan Pembinaan kelompok kesenian di Kota Denpasar	12 Sekaa, 2 barung gamelan gong kebyar, 1 barung gamelan gong baleganjur, 1 barong, 1 set pakaian tari gambuh, Pembinaan ketrampilan anak-anak dan Festival Puputan Badung	Terlaksananya Pembinaan kelompok kesenian di Kota Denpasar	12 Sekaa, 2 barung gamelan gong kebyar, 1 barung gamelan gong baleganjur, 1 barong, 1 set pakaian tari gambuh, Pembinaan ketrampilan anak-anak dan Festival Puputan Badung	1.748.487.700	1.923.336.470
	1.17.01.15.59		Jelajah Pusaka	Denpasar			Pelaksanaan lomba fotografi, Pelaksanaan jelajah pusaka	SMK/SMA se-Kota Denpasar, 20 SD	Pelaksanaan lomba fotografi, Pelaksanaan jelajah pusaka	SMK/SMA se-Kota Denpasar, 20 SD	189.185.000	208.103.500
	1.17.01.15.68		Pengembangan nilai budaya dan keagamaan	Denpasar			Pelaksanaan parum sulinggih	2 kali	Terlaksananya parum sulinggih	2 kali	2.515.502.000	2.767.052.200
	1.17.01.15.69		Pengembangan kreatifitas seni tradisional di kota denpasar	Denpasar			Pelaksanaan workshop layang-layang, permainan tradisional dan pahat	100 Orang	Terlaksananya workshop layang-layang, permainan tradisional dan pahat	100 Orang	222.563.000	244.819.300
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				100%					6.782.813.050	7.461.094.355
	1.17.01.16.01		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya kota denpasar	Denpasar			Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tk. Kota denpasar dan tk. Nasional	356 Peserta	Terlaksananya Utsawa Dharma Gita tk. Kota denpasar dan tk. Nasional	356 Peserta	1.068.581.000	1.175.439.100

	1.17.01.16.04		Sosialisasi pengembangan kekayaan budaya daerah lokal	Denpasar			Pelaksanaan sosialisasi tari klasik, pelaksanaan cetak buku	300 Buah, 50 SMK, 100 Universitas, 5 tokoh/seniman/masyarakat	Pelaksanaan sosialisasi tari klasik, pelaksanaan cetak buku	300 Buah, 50 SMK, 100 Universitas, 5 tokoh/seniman/masyarakat	111.040.000	122.144.000
	1.17.01.16.05		Validasi data peninggalan sejarah purbakala	Denpasar			Pelaksanaan validasi data peninggalan sejarah purbakala di Kota Denpasar	35 Cagar budaya	Pelaksanaan validasi data peninggalan sejarah purbakala di Kota Denpasar	35 Cagar budaya	194.114.000	213.525.400
	1.17.01.16.06		Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Denpasar			Pelaksanaan parade gong kebyar dan kesenian klasik	44 Sekaa	Terlaksananya parade gong kebyar dan kesenian klasik	44 Sekaa	1.020.795.000	1.122.874.500
	1.17.01.16.12		Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Denpasar			Pelaksanaan penggandaan buku sastra kegamaan dan budaya	1.300 buku	Terlaksananya penggandaan buku sastra kegamaan dan budaya	1.300 buku	535.450.000	588.995.000
	1.17.01.16.15		Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha	Denpasar			Pelaksanaan Maha Bandana Prasada	4 kecamatan, 7 sekaa	Terlaksananya Maha Bandana Prasada	4 kecamatan, 7 sekaa	457.987.400	503.786.140
	1.17.01.16.16		Pesantian Sekolah tk. SD, SMP, SMA/SMK	Denpasar			Pelaksanaan lomba pesantian	350 Siswa SD, SMP, & SMA/SMK	Terlaksananya lomba pesantian	350 Siswa SD, SMP, & SMA/SMK	171.200.000	188.320.000
	1.17.01.16.17		Misi kesenian ke luar daerah (Promosi Seni)				Pelaksanaan gelar seni budaya ke luar daerah dan dalam daerah	42 Orang, 6 sekaa	Terlaksananya gelar seni budaya ke luar daerah dan dalam daerah	42 Orang, 6 sekaa	578.181.650	635.999.815
	1.17.01.16.18		Melepas Matahari 2017	Denpasar			Pelaksanaan kreativitas berkesenian	23 Sekaa	Terlaksananya kreativitas berkesenian	23 Sekaa	532.383.000	585.621.300
	1.17.01.16.21		Denpasar Film Festival	Denpasar			Pelaksanaan denpasar film festival	10 film (100 orang siswa siswi)	Terlaksananya denpasar film festival	10 film (100 orang siswa siswi)	348.755.000	383.630.500
	1.17.01.16.23		Rekam budaya riset dan pendokumentasian pustaka seni dan budaya di Kota Denpasar	Denpasar			Pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1080 buku, 20 master DVD kegiatan, 250 Buah DVD, 66 Album kegiatan, 1 film profil disbud, 1 film omed-omedan	Terlaksananya pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1080 buku, 20 master DVD kegiatan, 250 Buah DVD, 66 Album kegiatan, 1 film profil disbud, 1 film omed-omedan	540.210.000	594.231.000
	1.17.01.16.25		Kreatifitas seni tradisional di Kota Denpasar	Denpasar			Pelaksanaan kreatifitas seni tradisional d kota denpasar	STT. Satya Dharma Kerti	Terlaksananya kreatifitas seni tradisional d kota denpasar	STT. Satya Dharma Kerti	109.516.000	120.467.600
	1.17.01.16.27		Denpasar Festival 2017	Denpasar			Pelaksanaan pentas seni dalam rangka Denpasar Festival	9 Sekaa	Terlaksananya pentas seni dalam rangka Denpasar Festival	9 Sekaa	373.800.000	411.180.000
	1.17.01.16.28		Partisipasi Parade/ Festival Budaya Luar Daerah	Denpasar			Pelaksanaan event festival budaya luar daerah	1 Sekaa/ sanggar, 48 orang	Terlaksananya event festival budaya luar daerah	1 Sekaa/ sanggar, 48 orang	573.300.000	630.630.000

	1.17.01.16.32		Profil Budayawan/seniman/sulinggih kota Denpasar	Denpasar			Pelaksanaan Pembuatan profil budayawan/ seniman/ sulinggih kota Denpasar	10 Patung dokumentasi / budayawan/ sulinggih kota Denpasar, 400 buku budayawan	tersedianya profil budayawan/ seniman/ sulinggih kota Denpasar	10 Patung dokumentasi i/ budayawan/ sulinggih kota Denpasar, 400 buku budayawan	167.500.000	184.250.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.17.01.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%					2.045.382.300	2.249.920.530
	1.17.01.01.07		Pelayanan administrasi perkantoran	Denpasar			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2.045.382.300	2.249.920.530
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.17.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%					891.890.000	981.079.000
	1.17.01.02.12		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Denpasar			Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	891.890.000	981.079.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.17.01.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Jumlah laporan akuntabilitas yang tepat waktu	100%					94.500.000	103.950.000

	1.17.01.05.05		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Denpasar			Jumlah Peserta Bimtek, pelatihan, kursus-kursus, seminar	7 Kali	Jumlah Peserta Bimtek, pelatihan, kursus-kursus, seminar	7 Kali	94.500.000	103.950.000
	TOTAL										26.095.521.750	28.705.073.925

DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.04.2.04.01.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran									1.865.259.250	2.051.785.175
	2.04.2.04.01.01		1.Pelayanan Administrasi Perkantoran	Denpasar	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Laporan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.865.259.250	2.051.785.175
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.04.2.04.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur									2.885.155.500	3.173.671.050
	2.04.2.04.01.02.12		1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Denpasar	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Kendaraan dinas dan peralatan gedung kantor	100%	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	2.885.155.500	3.173.671.050
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.04.2.04.01.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									77.500.000	85.250.000
	2.04.2.04.01.05.05		1.Pendidikan dan pelatihan formal	Denpasar	Pemenuhan kebutuhan pendidikan & pelatihan formal	24 orang	Terselenggaranya diklat	100%	Pendidikan & pelatihan SDM pegawai		77.500.000	85.250.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata	2.04.2.04.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									4.000.532.800	3.046.042.060
	2.04.2.04.01.15.01		1. Analisa Pasar Statistik Kepariwisataaan	Denpasar	Tersedianya data analisa pasar pariwisata sebagai dasar pengambilan kebijakan dlm pengembangan kepariwisataaan	1000 buku	Terbitnya laporan analisa pasar pariwisata	1 laporan	Tersebar nya infrmasi kondisi kepariwisataaan Kota Denpasar	1 laporan	102.041.500	112.245.650
	2.04.2.04.01.15.03		2.Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Denpasar	Meningkatnya kerja sama antara pemerintah dan stakeholder pariwisata dl bidang promosi pariwisata	100%	Terlaksananya jaringan kerja sama promosi pariwisata dengan stakeholder pariwisata	1 kali	Berkembangnya kerjasama antar stakeholder pariwisata di Kota Denpasar dengan daerah lain	1 lokasi	386.525.400	425.177.940
	2.04.2.04.01.15.05		3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	Denpasar	Meningkatnya kunjungan wisatawan Kota Denpasar	100%	Terlaksananya promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan luar negeri	2 kali	Tersebar nya informasi potensi dan daya tarik wisata Kota Denpasar sebagai destinasi pariwisata Bali	2 lokasi	1.614.548.700	1.776.003.570

	2.04.2.04.01.15.07		4. Pengembangan statistik kepariwisataan	Denpasar	Tersedianya data kepariwisataan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan kepariwisataan	1000 buku	Terbitnya buku data kepariwisataan	1000 buku	Tersebar nya informasi kondisi kepariwisataan Kota Denpasar	1 laporan	73.794.000	81.173.400
	2.04.2.04.01.15.08		5. Pelatihan Pemandu Wisata	Denpasar	pelatihan pemandu pariwisata dalam upaya peningkatan sumber daya pemandu wisata	1 kali	Terlatih pemandu wisata	1 kali	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek city tour	4 objek wisata	49.320.800	61.651.000
	2.04.2.04.01.15.09		6. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	Denpasar	Tersedianya data neraca satelit pariwisata sebagai dasar pengmabilan kebijakan dalam pengembangan kepariwisataan	1 laporan	Terbitnya laporan neraca satelit pariwisata	1 laporan	Tersedianya neraca satelit pariwisata Kota Denpasar	1 laporan	1.302.470.000	-
	2.04.2.04.01.15.10		7. Penyuluhan kepariwisataan	Denpasar	Penyuluhan kepariwisataan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata	10 kali	Terlaksananya penyuluhan pariwisata kepada masyarakat	10 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata	100%	471.832.400	589.790.500
Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata	2.04.2.04.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									3.521.579.050	2.753.736.955
	2.04.2.04.01.16.02		1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Denpasar	Meningkatnya sarana sarana dan prasarana pariwisata di Kota Denpasar	100%	Tersedianya 4 buah papan informasi, 2 unit kendaraan micro bus	2 unit	Meningktanya kunjungan wisatawan ke daya tarik di Kota Denpasar	Tersedianya 4 buah papan informasi, 2 unit kendaraan micro bus	1.200.000.000	200.000.000
	2.04.2.04.01.16.03		2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Denpasar	Pemenuhan kebutuhan destinasi pariwisata	100%	Terlaksananya kegiatan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	4 atraksi	Jumlah paket wisata unggulan	4 atraksi	1.899.466.650	2.089.413.315
	2.04.2.04.01.16.08		3.Pengembangan, sosialisasi dan penilaian green hotel	Denpasar	Terlaksananya pemasaran pariwisata	100%	Terlaksananya sosialisasi dan penilaian menuju green hotel	60 usaha akomodasi	Meningkatnya pemahaman tentang green hotel	60 orang	422.112.400	464.323.640
Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata	2.04.2.04.01.17	Program Pengembangan Kemitraan									1.050.403.400	456.409.455
	2.04.2.04.01.17.01		1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base	Denpasar	Tersedianya data kepariwisataan sebagai dasar pengambilan kebijakan, pengembangan usaha akomodasi pariwisata	100%	Terbitnya buku data kajian kebutuhan kamar usaha akomodasi	1 laporan	Sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan usaha akomodasi pariwisata di Kota Denpasar	1 laporan	58.071.200	63.878.320
	2.04.2.04.01.17.02		2. Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan, dan Pariwisata	Denpasar	Terlaksananya program kemitraan pariwisata	100%	Terbitnya dokumen rivew RIPPDA	500 dokumen	Tersedianya rencana induk pengembangan pariwisata daerah	1 kegiatan	632.331.200	-

	2.04.2.04.01.17.07		3.Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Denpasar	Terlaksananya peningkatan mutu pengelolaan & pelayanan usaha rumah makan di Kota Dps	50 orang	Terlaksananya pelatihan management usaha rumah makan	50 orang	Terlatihnya tenaga management usaha rumah makan	50 orang	89.078.500	97.986.350
	2.04.2.04.01.17.08		4.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Denpasar	Anggota kelompok sadar wisata dan forum tata kelola pariwisata	2 kegiatan	Laporan peningkatan peran serta dalam pengembangan kemitraan pariwisata	2 laporan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1 kelompok sadar wisata dan 1 forum tata kelola pariwisata	147.750.400	162.525.440
	2.04.2.04.01.17.09		5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Denpasar	Peningkatan jumlah kerjasama kemitraan	100%	Buku Direktori Kepariwisataan	200 buku	Laporan penerbitan Buku Direktori Kepariwisataan	1 laporan	36.251.800	38.064.390
	2.04.2.04.01.17.10		6. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum	Denpasar	Peningkatan jml kerjasam kemitraan	18 jenis usaha	Laporan keg.pembinaan & pengawasan usaha rekreasi & hiburan umum	1 laporan	Kegiatan pembinaan & pengawasan usaha rekreasi & hiburan umum	1 laporan	33.147.500	34.804.875
	2.04.2.04.01.17.11		7.Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana wisata	Denpasar	Peningkatan jumlah kerjasama kemitraan	6 jenis uaha	Laporan keg.pembinaan,penge dalian & penertiban usaha jasa & sarana wisata	1 kali	Tertib adm.usaha jasa & sarana wisata	1 kali	53.772.800	59.150.080
	TOTAL										13.400.430.000	11.566.894.695

DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran									8.815.689.600	
	1.03.1.03.01.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPU Kota Denpasar	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	8.815.689.600	
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									9.929.770.680	
	1.03.1.03.01.01.02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPU Kota Denpasar	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	100%	Ketersediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	9.929.770.680	
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									150.000.000	
	1.03.1.03.01.01.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPU Kota Denpasar	Terpenuhinya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Prosentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Aparatur			100%	150.000.000	
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah									18.259.487.000	26.330.974.000
			Penyediaan Prasana dan Sarana Air Limbah	Kota Denpasar	Terpenuhinya Pelayanan Air Limbah	404 SR	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah	404 SR	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi	100%	6.055.000.000	6.660.500.000
			Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)	Kota Denpasar	Terpenuhinya Pelayanan Air Minum	13.330 Ml	Pembuatan Sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan Rumah Air Minum	4.978,58 Ml	Meningkatnya Pelayanan Air Minum	100%	6.939.487.000	13.878.974.000
			Penataan Sanitasi (DAK)	Kota Denpasar	Terpenuhinya Pelayanan Air Limbah	250 SR	Pembuatan IPAL	250 SR	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi	100%	5.265.000.000	5.791.500.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman									27.855.920.000	30.641.512.000
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman	Kec. Denbar Dentim Densel dan Denut	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan jalan lingkungan	8.803 Ml	Terpeliharanya Jalan Lingkungan	8.803 Ml	Terpenuhinya aksesibilitas jalan lingkungan yang mantap	100%	4.332.610.000	4.765.871.000

			Peningkatan Jalan Lingkungan	Kec. Denbar Dentim Densel dan Denut	Terpenuhiya Kebutuhan Peningkatan jalan lingkungan	9.096 M1	Peningkatan Jalan Lingkungan	9.096 M1	Terpenuhiya akseibilitas jalan lingkungan yang mantap	100%	11.619.400.000	12.781.340.000
			Penataan Lingkungan Permukiman	Kec. Densel	Terpenuhiya Kebutuhan Peningkatan jalan lingkungan	1.000 M	Tertatanya lingkungan Permukiman	1.000 M	Pemenuhan kebutuhan Peningkatan akseibilitas jalan Lingkungan	100%	11.903.910.000	13.094.301.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan									63.395.099.400	69.734.609.340
			Pengembangan Kawasan Permukiman Baru / Kawasn LC	Kota Denpasar	Terbangunnya jalan pada Lingkungan LC	9.082 M	Panjang Jalan pada lingkungan LC	9.082 M	Terbangunnya jalan pada Lingkungan LC	9.082 M	63.395.099.400	69.734.609.340
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan									4.114.927.500	5.004.560.000
			Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Kota Denpasar	jumlah paving yang terdistribusi untuk swadaya masyarakat	22.557 m2	- Jumlah Aspal Swadaya yang terdistribusi untuk Masyarakat.	22.557 m2	- Jumlah Aspal Swadaya yang terdistribusi untuk Masyarakat.	22.557 m2	4.114.927.500	5.004.560.000
					jumlah aspal yang terdistribusi untuk swadaya masyarakat	1000 drum	- Jumlah Paving yang terdistribusi untuk Masyarakat.	1000 drum	- Jumlah Paving yang terdistribusi untuk Masyarakat.	1000 drum		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan									641.710.512.254	705.881.563.479
			Pembangunan Jembatan di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Terbangunnya Jembatan	11 Buah	Pembangunan Jembatan	11 Buah	Meningkatnya aksesibilitas	11 Buah Jembatan	38.343.266.000	42.177.592.600
			Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar		Terbangunnya Trotoar	21.457,9 m'	Pembuatan Trotoar	21.457,9 m'	Meningkatnya Akses Pejalan Kaki	21.457,9 m'	73.400.973.000	80.741.070.300
			Pembuatan Box Culvert		Terbangunnya Box culvert	1 Buah	Pembuatan Box culvert	1 Buah	Meningkatnya aksesibilitas	1 Buah	845.055.000	929.560.500
			Peningkatan Jalan di Kota Denpasar		Meningkatnya Kondisi Jalan	79.642,4 m'	Peningkatan Jalan	79.642,4 m'	Tersedianya Aksesibilitas Jalan yang Mantap	79.642,4 m'	529.121.218.254	582.033.340.079
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									6.934.133.900	7.627.547.290
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Kota Denpasar	Terpeliharanya Kondisi Jalan	30.000 m'	Pemeliharaan Jalan	30.000 m'	Terpenuhiya Aksesibilitas Jalan yang Mantap	30.000 m'	6.934.133.900	7.627.547.290
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan									507.798.000	558.577.800
			Penyusunan Leger Jalan	Kota Denpasar	Tersusunnya Sistem Informasi Jalan berupa Data Leger	30 Km	Tersusunnya Leger Jalan	30 km	Adanya Informasi Data Leger Jalan	30 km	507.798.000	558.577.800
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong									19.431.691.314	21.374.860.445
			Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong		Pemenuhan Kebutuhan Saluran Drainase		Pemenuhan Kebutuhan Saluran Drainase		Pemenuhan Kebutuhan Saluran Drainase		14.500.000.000	

			Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Denbar, Dentim, Densel dan Denut							4.931.691.314	5.424.860.445
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya			Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi		Terpeliharanya Jaringan Irigasi		Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi		4.823.724.222	5.306.096.644
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Denbar, Dentim, Densel dan Denut							2.323.724.222	5.000.000.000
			Perbaikan Saluran Irigasi								750.000.000	
			Peningkatan Jalan Usaha Tani								1.750.000.000	
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengendalian Banjir			Perbaikan Daerah Aliran Sungai		Pengerukan Saluran Drainase		Pengendalian Banjir		2.000.000.000	2.200.000.000
			Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali								2.000.000.000	
	TOTAL										807.928.753.870	874.660.300.999

DINAS PENDAPATAN

DINAS PENDAPATAN

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					3.939.137.600	4.217.000.000
	1.20.05.01.07		Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar			Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	Pemenuhan Keperluan adiministrasi kantor	100%	3.939.137.600	4.217.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			Prosentase Pengadaan,Pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana kantor	100%					2.852.042.000	2.570.000.000
	1.20.05.02.12		Kegiatan Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur	Kota Denpasar			Jumlah tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	1 Tahun	Tersedianya peralatan kantor untuk memperlancar tugas kantor	100%	2.852.042.000	2.570.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Prosentase Peningkatan dan Pengembangan ketrampilan SDM	100%					75.000.000	100.000.000
	1.20.05.05.05		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Denpasar			Jumlah Pegawai dan petugas yang mendapat pendidikan pelatihan	1 Tahun	Pegawai dan petugas pungut mendapat pengetahuan tugas-tugas dinas	100%	75.000.000	100.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Prosentase Peningkatan kedisiplinan aparat	100%					30.450.000	38.000.000
	1.20.05.03.05		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Denpasar			jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	210 Buah	Pakaian Khusus hari-har tertentu untuk sesuai dengan bidang	210 Buah	30.450.000	38.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.20.05.17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Prosentase Peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan	100%					6.066.460.500	5.491.000.000
	1.20.05.17.19		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah	Kota Denpasar			Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan intensifikasi dan eksistensi sumber pendapatan daerah	20 aparatur 200 wp watermeter	Tersedianya Pelaporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan	20 aparatur 200 wp watermeter	580.000.000	600.000.000
	1.20.05.17.24		Pelayanan PBB	Kota Denpasar			Penerbitan Laporan Hasil kegiatan pelayanan	6.428 WP	Tersedianya Pelayanan PBB kepada Masyarakat	6.428 WP	410.556.000	420.000.000

	1.20.05.17.32		Pemberian Kompensasi Pembayaran bagi Wajib Pajak yang Tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota dan Bagi Tanah Produktif yang diperuntukan untuk pertanian	Kota Denpasar			Penerbitan Pelaporan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB	4.919 WP	Tersedianya pelaksanaan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB	4.919 WP	4.250.000.000	4.377.000.000
	1.20.05.17.33		Pelayanan BPHTB	Kota Denpasar			Penerbitan Laporan Hasil kegiatan pelayanan	8.236 Wp	Tersedianya Pelayanan BPHTB kepada Masyarakat	8.236 wp	23.904.500	69.000.000
	1.20.05.17.35		Penyampaian Data dan Informasi sistem Pengelolaan Pajak Daerah (Pameran /promosi)	Kota Denpasar			Terwujudnya Pelaksanaan pameran tentang pelayanan pajak daerah	110 Orang	Tersedianya Pelaksanaan pameran tentang pelayanan pajak daerah	110 Orang	23.000.000	25.000.000
	1.20.05.17.53		Penambahan Aplikasi Sistem Online	Kota Denpasar			Tertatanya pelaksanaan penambahan Aplikasi Sistem Online	1 Sistem	Tersedianya satu sistem Aplikasi Online	1 Sistem	200.000.000	-
	1.20.05.17.54		Kajian nilai jual obyek Pajak (NJOP)	Kota Denpasar			terwujudnya Kajian Nilai Jual Obyek Pajak	1 Kajian	Tersedianya kajian obyek pajak Yang akurat	1 Kajian	185.000.000	-
	1.20.05.17.55		Teknik-teknik dan Etika dalam penagihan Pajak Daerah yang efektif	Kota Denpasar			Terwujudnya teknik-teknik dan etika dalam penagihan Pajak Daerah yang efektif	5 personal petugas pajak yang terdidik dan terlatih	Tersedianya teknik-teknik dan etika dalam penagihan Pajak Daerah yang efektif	5 personal petugas pajak yang terdidik dan terlatih	219.000.000	-
	1.20.05.17.56		Pendampingan, penghitungan dan penetapan target Pajak Daerah	Kota Denpasar			Terwujudnya penentuan target Pajak daerah yang efektif	1 laporan	Tersedianya kajian penentuan target yang efektif	1 laporan	175.000.000	-
	TOTAL										12.963.090.100	12.416.000.000

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Denpasar	Jumlah Kelompok yang dilatih Pengelolaan Manajemen dan Pemasaran dan Pelatihan Teknik bercocok tanam dalam pekarangan yang sempit	2 Kelompok					28.894.750	35.000.000
	2.01.2.01.01.15.01		Pelatihan Petani dan Agribisnis	Denpasar			- Tercapainya Pelatihan Pengelolaan Manajemen dan Pemasaran - Tercapainya Pelatihan Teknik Bercocok Tanam dalam Pekarangan yang sempit	1 Kelompok 1 Kelompok	- Jumlah Kelompok yang terampil dalam pengelolaan Manajemen dan Pemasaran - Jumlah Kelompok yang terampil dalam Teknik Bercocok Tanam dalam pekarangan yang sempit	1 Kelompok 1 Kelompok	28.894.750	35.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		Denpasar	Meningkatnya ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan)						1.655.258.750	1.820.000.000
	2.01.2.01.01.16.09		Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Denpasar	Meningkatnya jumlah kelompok tani penanan sayuran di Pekarangan	8 Kelompok	Jumlah fasilitas tanaman hortikultura yang disediakan untuk pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	2400 Polybag	Meningkatnya jumlah kelompok tani penanan sayur di pekarangan	8 Kelompok	78.225.000	85.000.000
	2.01.2.01.01.16.12		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Denpasar	Meningkatnya Mutu Hasil Pertanian	5 Kelompok, 10 analisa	- Pelatihan Pembuatan Sabun dan Bolu Buah Naga - Tersedianya jumlah Data sebagai Bahan Perencanaan Usaha Tani	1 Kelompok 2 Analisa	-Terlaksananya BinteK Pengolahan Hasil Hortikultura '-Mengetahui keuntungan yang diperoleh petani	1 Kelompok 2 Analisa	29.397.500	35.000.000
	2.01.2.01.01.16.16		Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Denpasar	Jumlah lahan dalam pengembangan tanaman hortikultura	4 Ha/10 buah	- Melaksanakan pengembangan Hortikultura - Melaksanakan Pengenalan Tanaman Hortikultura kepada masyarakat/ petani yang bisa dijadikan pertanian perkotaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	-Terlaksananya Pengembangan Hortikultura -Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat/ Petani tentang Tanaman Hortikultura yang bisa dijadikan Pertanian Perkotaan	2 Kelompok 2 Kelompok	309.635.000	340.000.000

	2.01.2.01.01.16.20		Pengembangan Perbenihan Pertanian	Denpasar	Jumlah luas sawah yang menghasilkan benih padi, Kedelai, Bawang Merah dan Bawang putih	5 ha, 5 ha, 0.10 ha, 0.50 ha	- Jumlah fasilitas benih padi dan kedelai yang disalurkan pada kelompok tani yang melaksanakan penangkaran padi dan kedelai - Demplot Bawang putih - Demplot bawang Merah	125 Kg, 300 Kg, 175 Kg, 850 Kg	Jumlah luas sawah yang menghasilkan benih - padi - Kedelai - bawang merah - bawang putih	5 Ha, 5 Ha, 0.50 ha, 0.10 Ha	140.744.250	155.000.000
	2.01.2.01.01.16.29		Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian	Denpasar	Jumlah Intensitas produksi padi dalam melaksanakan teknologi pertanian	0.5 Ton/ 66.5Ton	Jumlah untuk mengetahui penyebaran Varietas, Jumlah Benih padi untuk pengembangan Intensifikasi padi	4 Kecamatan, 14.000Kg	-Jumlah luasan penanaman varietas padi - Jumlah Benih kedelai untuk pengembangan Intensifikasi tanaman kedelai - Jumlah luasan penanaman kedelai	700 Ha 7.000 Kg 200 Ha	457.204.000	500.000.000
	2.01.2.01.01.16.31		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Denpasar	Jumlah buku hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi pada Program dan kegiatan Dinas	4 Kecamatan, 85 Buku	Jumlah fasilitas yang tersedia untuk Monitoring dan evaluasi pada program dinas '- Buku Laporan Monev 2016 '- Buku laporan tahunan dinas 2016 '- Buku lakip 2016 '- Buku selayang pandang 2016	10 buku 25 buku 20 buku 30 buku	Jumlah buku hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada program Dinas	85 Buku	38.896.000	45.000.000
	2.01.2.01.01.16.38		Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian	Denpasar	Jaringan Irigasi	1 Subak	terlaksananya Perbaikan jaringan Irigasi	1 Subak	Jumlah terlaksananya Jaringan Irigasi	1 Subak	459.375.000	500.000.000
	2.01.2.01.01.16.39		Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Denpasar	Jumlah buku hasil Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian	165 Buku	Jumlah data/informasi untuk perencanaan pembangunan	165 Buku	-Buku program dan kegiatan '-Buku RKA dan DPA induk dan perubahan '-Buku Renja '-Brosur Pertanian kreatif	10 buku 120 buku 10 buku 25 buku	87.900.750	95.000.000

	2.01.2.01.01.16.40		Pengelolaan dan Peyusunan Data Statistik	Denpasar	Jumlah buku hasil kegiatan pengolahan dan penyusunan data statistik Pertanian	115 Buku	- Jumlah paket penyusunan dan pengumpulan data informasi, Kebutuhan penyusunan dan Pengolahan data laporan statistik Pertanian - Buku Data Base Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar - Sasaran Padi Palawija dan Hortikultura - Laporan Tahunan Inventarisasi Lahan Sawah	25 Buku 25 Buku 35 Buku 30 Buku	Jumlah buku hasil kegiatan pengolahan dan penyusunan data Statistik Pertanian	115 buku	53.881.250	65.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		Denpasar	Meningkatnya Pemasaran Produk Pertanian	20 kali					381.152.500	450.000.000
			Promosi atas hasil-hasil produksi Petani unggulan daerah	Denpasar			-Intensitas pelaku usah agribisnisikut sertanya pelaku usaha pertanian dalam pameran skala daerah '- intensitas pelaksanaan pasar murah komoditi pertanian dalam rangka hari Raya keagamaan '-Intensitas partisipasi pelaku agribisnis ikut dalam pameran komoditi pertanian '- Intensitas pelaku agribisnis ikut berpartisipasi dalam pasar murah hari raya keagamaan	4 kali event 2 Kali 4 Kali 2 Kali	Menumbuh kembangkan pelaku usaha dibidang pertanian	4 kali event, 2 kali	381.152.500	450.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Denpasar	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	100%					319.042.000	350.000.000

			1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanian Tepat Guna	Denpasar	Jumlah penelitian dan pengembangan Teknologi Pertanian tepat guna	3 kali	- Jumlah kajian tumpang sari - Jumlah subak yang Melaksanakan budidaya kedelai spesifik lokasi - Jumlah subak yang Melaksanakan budidaya padi spesifik lokasi - Jumlah petani yang ikut Rembug Tani - Jumlah fasilitas obat-obatan, bahan praktek, bahan kimia dan alat kerja yang disediakan dalam Melaksanakan pelatihan dan penerapan teknologi	2 Kajian 1 Subak 1 Subak 200 orang 4 liter, 29 bks, 220 bh, 8 lbr, 2kg 120 kali 40 orang	- Jumlah subak yang sudah terampil dalam kajian teknologi tumpang sari - Jumlah subak yang ikut Evaluasi kedelai - Jumlah subak yang ikut Evaluasi padi - Jumlah petani yang ikut Rembug Tani - Jumlah kelompok/ mudi dalam pelatihan penerapan teknologi pertanian	2 subak 1 subak 1 subak 200 orang 4 kelompok	243.957.000	250.000.000
			Pengadaan Sarana dan prasarana Teknologi pertanian	Denpasar	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian	32 unit	- Jumlah fasilitas alat-alat pertanian yang disediakan untuk Melaksanakan teknologi	16 unit	Tersalurnya alat-alat pertanian Jumlah persediaan sarana Produksi pertanian	16 unit	75.085.000	100.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		Denpasar	Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Penyuluh						154.915.000	160.000.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Denpasar	Jumlah peningkatan kemampuan Penyuluh	4 kali, 50 buku, 1 kali, 3 orang, 1 poktan	- Tersusunnya Program Penyuluhan - Tumbuhnya Kelompok Tan - Penilaian kelompok tani - Terealisasinya penilaian PPL, PPL Swadaya - Terealisasinya penilaian Gapoktan - Terealisasinya Sarasehan Penyuluh	50 Buku 4 Kelompok 4 Kali 3 orang 1 Gapoktan 1 kali	- Jumlah Program Penyuluhan yang tersusun - Frekwensi penumbuhan Kelompok Tan - Frekwensi Penilaian kelompok tani - Frekwensi Evaluasi PPL, PPL Swadaya - Frekwensi penilaian Gapokta - Frekwensi Sarasehan Penyuluh	50 Buku 4 Kelompok 4 Kali 3 orang 1 Gapoktan 1 kali	154.915.000	160.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Denpasar	Terpenuhinya sarana pendukung administrasi perkantoran	100%					1.635.288.000	1.700.000.000
			Pelayanan Administrasi Kantor	Denpasar			Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran	100%	Peningkatan aktifitas pelayanan aparatur	20%	1.635.288.000	1.700.000.000

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Denpasar	Terpenuhinya sarana pendukung Pelayanan aparatur	100%					881.600.000	1.100.000.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Denpasar			Lancarnya operaional pelayanan aparatur	100%	Peningkatan aktivitas pelayanan aparatur	20%	881.600.000	1.100.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.01.2.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Denpasar	Peningkatan sumberdaya manusia pertanian	100%					100.000.000	110.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Denpasar			Terpenuhinya sumberdaya manusia pertanian	100%	Meningkatnya pengetahuan sumberdaya manusia pertanian	20%	100.000.000	110.000.000
	TOTAL										5.156.151.000	5.725.000.000

BAGIAN PEREKONOMIAN

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	3.03.01.07		Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Perekonomian	Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor	100%	287.428.600,00	316.171.460,00
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal	03.03.15.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi										
	03.03.15.02		Kegiatan : Pengembangan potensi unggulan daerah	Bagian Perekonomian	Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan	100%	Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan		Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan	100%	466.900.000,00	513.590.000,00
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	03.03.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan										-
	03.03.16.02		Kegiatan : Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Bagian Perekonomian	Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar		Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar		Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar			-
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	03.03.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan										
	03.03.16.07		Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bagian Perekonomian	Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar	100%	Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar	35 LPD	Peningkatan Kemampuan LPD di Kota Denpasar	100%	165.500.000,00	182.050.000,00
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal	3.03.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
	03.03.16.10		Kegiatan : Profil daya tarik dan evaluasi investasi	Bagian Perekonomian	Terdatanya Potensi dan Peluang investasi di Kota Denpasar	100%	Terdatanya Potensi dan Peluang investasi di Kota Denpasar		Terdatanya Potensi dan Peluang investasi di Kota Denpasar		165.850.000,00	182.435.000,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	3.03.16.	Program Kerjasama Pembangunan										-
	03.03.16.11		Kegiatan : Fasilitas Kerjasama dengan Dunia / Lembaga	Bagian Kerjasama	Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR	100%	Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR		Terjadinya Sinergi antara Pemerintah dengan Swasta dalam CSR		-	-
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	3.03.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan										
	3.3.16.32		Kegiatan:Pekan Nasional	Bagian Perekonomian	Diperolehnya KTNA yang Handal di Bidangny Masingmasing	100%	Diperolehnya KTNA yang Handal di Bidangny Masing-masing	100%	Diperolehnya KTNA yang Handal di Bidangny Masing-masing	100%	1.139.100.000,00	1.253.010.000,00

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	3.3.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan										
	3.3.16.33		Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian dalam arti luas	Bagian Perekonomian	Meningkatkan Hasil Produksi kelompok Tani dalam Arti Luas	100%	Meningkatkan Hasil Produksi kelompok Tani dalam Arti Luas	31 KTNA	Meningkatkan Hasil Produksi kelompok Tani dalam Arti Luas	100%	155.023.000,00	170.525.300,00
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	3.3.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan										-
	3.3.16.34		Kegiatan:Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin	BPMPD								-
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	3.3.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan										-
	3.3.16.35		Kegiatan: Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	BPMPD								-
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	3.3.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah										
	3.3.17.09		Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Bagian Perekonomian	UMKM di Kota Denpasar berkembang.	100%	UMKM di Kota Denpasar berkembang.	100 UMKM	UMKM di Kota Denpasar berkembang.	100%	1.912.775.000,00	2.104.052.500,00
	3.3.17.10		Kegiatan : Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Bagian Perekonomian	Terselenggaranya Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar	100%	Terselenggaranya Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar	1 Kegiatan	Terselenggaranya Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar	100%	374.500.000,00	411.950.000,00
	3.3.17.13		Kegiatan : Pelatihan Kuliner Usaha Mikro kecil menengah	Bagian Perekonomian	UMKM di Kota Denpasar berkembang.		UMKM di Kota Denpasar berkembang.		UMKM di Kota Denpasar berkembang.			-
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.3.28.	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah										
	3.3.28.9		Pengawas dan pengendalian inflasi daerah	Bagian Perekonomian	1 Kegiatan	100%	APBD		1 Kegiatan	100%	550.000.000,00	605.000.000,00
	TOTAL										5.217.076.600	5.738.784.260

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1.857.615.250	2.043.376.775
	2.07.2.07.01.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar	Prosentase tersedianya pelayanan administrator perkantoran	100%	tersedianya administrasi	100%	Prosentase tersedianya p	100%	1.857.615.250	2.043.376.775
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									953.193.250	1.048.512.575
	2.07.2.07.01.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Denpasar	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	tersedianya sarana dan prasana bagi aparatur	100%	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	953.193.250	1.048.512.575
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									100.000.000	110.000.000
	2.07.2.07.01.05.05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	10 orang	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100.000.000	110.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	2.07.2.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									197.000.000	216.700.000
	2.07.2.06.01.15.07		Kegiatan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP)	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda tera syah	8%	jumlah UTTP yang tertera	25350 UTTP	Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda tera syah	8%	87.000.000	95.700.000
	2.07.2.06.01.15.08		Sosialisasi Kebijakan Kemetrolagian	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda tera syah	8%	jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	1200 pelaku usaha	prosentase pemahaman pelaku usaha tentang kemetrolagian	78%	55.000.000	60.500.000
	2.07.2.06.01.15.09		Pengawasan UTTP dan BDKT	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda tera syah	8%	jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	25350 UTTP dan BDKT	prosentase peningkatan pelaku usaha yang mau menera alat timbangnya	8%	55.000.000	60.500.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Industri	2.07.2.07.01.15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi									846.694.000	931.363.400

	2.07.2.07.01.15.07		Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan IKM yang berkualitas	0,25%	- Jumlah IKM yang dibina untuk menerapkan GKM - Jumlah IKM yang dibina untuk menerapkan Good Manufacturing Practice - Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan langsung (UPL) - Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	- 2 IKM - 2 IKM - 2 IKM - 20 orang	- Prosentase IKM yang menerapkan GKM - Prosentase IKM yang menerapkan GMP - Prosentase IKM yang mendapat solusi untuk perbaikan manajemen perusahaan - Prosentase peningkatan pemahaman dalam menjaga mutu hasil produksi yang dihasilkan para IKM melalui GKM	- 100% - 100% - 100% - 80%	846.694.000	931.363.400
Urusan Pemerintahan Pilihan Industri	2.07.2.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah									645.903.000	710.493.300
	2.07.2.07.01.16.07		Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan penjualan produk industri	25%	- Terlaksananya pameran Petinget Rahina Tumpek Landep - Jumlah peserta yang mengikuti pameran - Jumlah peserta saraschen	- 1 event - 30 perajin - 100 orang	- Prosentase peningkatan penjualan produk industri - Prosentase peningkatan pemahaman peserta saraschen tentang Rahina Tumpek Landep	- 25% - 95%	645.903.000	710.493.300
Urusan Pemerintahan Pilihan Industri	2.07.2.07.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri									628.318.550	691.150.405
	2.07.2.07.01.17.01		Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Kota Denpasar	Jumlah IKM yang berinovasi baik	80 IKM	- jumlah peserta pelatihan - terlaksananya studi banding - jumlah peserta study banding	- 60 perajin - 1 kali - 20 perajin	- Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang mendapatkan pelatihan	80%	324.748.000	357.222.800
	2.07.2.07.01.17.02		Pengembangan dan Pelayanan Tekonologi Industri	Kota Denpasar	Jumlah IKM yang berinovasi baik	80 IKM	- Jumlah peserta pelatihan desain produk, desain kemasan, dan merek produk IKM - Jumlah peserta lomba cipta karya kreatif	- 30 IKM - 120 orang	- Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang memiliki desain produk, desain kemasan dan merek produk yang berkualitas - Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan melalui Denpasar Desain Center - Peningkatan jumlah peserta lomba yang berinovasi baik	- 80% - 50 orang - 45 orang	303.570.550	333.927.605

Urusan Pemerintahan Pilihan Industri	2.07.2.07.01.19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial									247.361.000	272.097.100
	2.07.2.07.01.19.02		Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan industri baru yang berkembang di Kota Denpasar	1,3%	- Frekuensi monitoring evaluasi industri - Tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di Kota Denpasar - Tersedianya informasi produk IKM yang ada di Kota Denpasar	- 50 kali - 30 buku - 100 katalog	- Prosentase peningkatan industri baru yang berkembang di Kota Denpasar	1,3%	247.361.000	272.097.100
Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	2.07.2.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									656.375.000	722.012.500
	2.07.2.06.01.17.03		Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan nilai ekspor	2,5%	Jumlah peserta sosialisasi	30 pelaku usaha	Prosentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	70%	65.598.000	72.157.800
	2.07.2.06.01.17.04		Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan	Kota Denpasar	Prosentase peningkatan nilai ekspor	2,5%	Tersedianya database informasi potensi unggulan dan potensi ekspor	50 buku	Prosentase peningkatan jumlah pengusaha potensi unggulan dan pengusaha ekspor	2,5%	33.397.000	36.736.700
	2.07.2.06.01.17.12		Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Akses pasar Tingkat Nasional di Indonesia	Prosentase peningkatan nilai ekspor	2,5%	- frekuensi pameran skala nasional dan internasional - jumlah peserta pameran skala nasional dan internasional - jumlah peserta pelatihan service excelent - jumlah peserta pelatihan strategi sukses pameran dagang	- 5 kali - 15 pelaku usaha - 20 pelaku usaha - 20 pelaku usaha	- Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang mengikuti pameran - Prosentase peningkatan pemahaman peserta pelatihan	- 30% - 80%	557.380.000	613.118.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	2.07.2.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri									251.573.916.000	1.731.307.600

	2.07.2.06.01.18.04		Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Luar Daerah	Prosentase pasar tradisional / pasar rakyat kondisi baik dan layak Prosentase pasar modern yang baik Prosentase kelompok pedagang yang baik Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	- 0,03% - 20% - 80% - 10 kesepakatan - 3 media	jumlah peserta misi dagang	12 pelaku usaha	Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan	10 kesepakatan kerjasama	425.000.000	467.500.000
	2.07.2.06.01.18											
	2.07.2.06.01.18.06		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Denpasar	Prosentase pasar tradisional / pasar rakyat kondisi baik dan layak Prosentase pasar modern yang baik Prosentase kelompok pedagang yang baik Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	- 0,03% - 20% - 80% - 10 kesepakatan - 3 media	- Jumlah anggota e-Commerce yang tergabung dalam www.balidenpasartradnng.com - Jumlah peserta pameran - Jumlah peserta pelatihan Trading of Branding Design - Jumlah peserta pelatihan packaging and display product	- 100 pelaku usaha - 3 pelaku usaha - 20 pelaku usaha - 20 pelaku usaha	- Prosentase bertambah nya anggota e-Commerce yang tergabung dalam www.balidenpasartradnng.com - Prosentase peningkatan pengetahuan anggota e-Commerce melalui pelatihan Trading of Branding Design	- 14% - 80%	186.420.000	205.062.000
	2.07.2.06.01.18.08		Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Kota Denpasar	Prosentase pasar tradisional / pasar rakyat kondisi baik dan layak Prosentase pasar modern yang baik Prosentase kelompok pedagang yang baik Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	- 0,03% - 20% - 80% - 10 kesepakatan - 3 media	- Jumlah peserta seminar - Jumlah pasar tradisional / pasar rakyat yang difasilitasi - Jumlah warung kuliner tradisional yang direvitalisasi	- 50 orang - 2 pasar - 4 warung	- Prosentase peningkatan pemberdayaan UKM dan kualitas SDM - Prosentase peningkatan kualitas pedagang di pasar tradisional / pasar rakyat - Prosentase peningkatan pendapatan pemilik warung yang direvitalisasi	- 80% - 0,06% - 40%	125.373.000	137.910.300

2.07.2.06.01.18.09		Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor	Kota Denpasar	Prosentase pasar tradisional / pasar rakyat kondisi baik dan layak Prosentase pasar modern yang baik Prosentase kelompok pedagang yang baik Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	- 0,03% - 20% - 80% - 10 kesepakatan - 3 media	Terdatanya informasi harga kebutuhan bahan pokok di pasar badung, pasar sanglah, pasar kreneng, dan pasar agung	96 laporan informasi harga	Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	3 media	125.000.000	137.500.000
2.07.2.06.01.18.11		Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Kota Denpasar	Prosentase pasar tradisional / pasar rakyat kondisi baik dan layak Prosentase pasar modern yang baik Prosentase kelompok pedagang yang baik Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	- 0,03% - 20% - 80% - 10 kesepakatan - 3 media	- jumlah peserta duta endek - jumlah peserta pelatihan public speaking, pembekalan duta endek, pelatihan desain motif	- 200 orang - 24 orang	Prosentase peningkatan daya tarik remaja mengikuti pemilihan duta endek	20%	557.358.000	613.093.800
2.07.2.06.01.18.17		Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional	Kota Denpasar	Prosentase pasar tradisional / pasar rakyat kondisi baik dan layak Prosentase pasar modern yang baik Prosentase kelompok pedagang yang baik Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	- 0,03% - 20% - 80% - 10 kesepakatan - 3 media	- jumlah peserta pelatihan - jumlah pasar yang mendapatkan bantuan	- 200 pedagang - 1 pasar	- Prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan usaha dan sarana pasar - Prosentase pasar yang direvitalisasi	- 80% - 0,03%	250.154.765.000	170.241.500
TOTAL										257.706.376.050	8.477.013.655

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.17.1.20.03.11.15	Program Pengembangan nilai budaya			Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah							
			1. Pembinaan Kegiatan keagamaan	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali							1.021.829.000	1.175.103.350
			a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali		70 orang	a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten	70 orang	a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten	100%		
			b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali		190 orang	b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih	190 orang	b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih	100%		
			c. Penyerahan Punia Pemangku dan Tukang Banten	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali		70 orang	c. Penyerahan Punia Pemangku dan Tukang Banten	70 orang	c. Penyerahan Punia Pemangku dan Tukang Banten	100%		
			d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali		70 orang	d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra	70 orang	d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra	100%		
	1.17.1.20.03.11.15.16.16		2. Upakara Piodalan Keagamaan	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali							6.236.088.750	7.171.502.063
			a. Kegiatan Tumpek Krulut	Kota Denpasar		1 kali	a. Upakara Piodalan Tumpek Krulut	1 kali	a. Upakara Piodalan Tumpek Krulut	100%		
			b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri	Kota Denpasar, Bali		1 kali	b. Upakara Piodalan Siwa Ratri	1 kali	b. Upakara Piodalan Siwa Ratri	100%		
			c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha dan Pura Lokanatha Denpasar	Kota Denpasar		1 kali	c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha dan Pura Lokanatha Denpasar	1 kali	c. Kegiatan Piodalan Pura Agung Jagatnatha dan Pura Lokanatha Denpasar	100%		
			d. Kegiatan Tawur Kesanga	Kota Denpasar		1 kali	d.Upakara Piodalan Tawur Kesanga	1 kali	d.Upakara Piodalan Tawur Kesanga	100%		
			e. Kegiatan Piodalan Saraswati	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali		1 kali	e. Upakara Piodalan Saraswati	1 kali	e. Upakara Piodalan Saraswati	100%		
			f. Pagelaran Tradisi Ngelawang	Kota Denpasar		1 kali	f. Pagelaran Tradisi Ngelawang	1 kali	f. Pagelaran Tradisi Ngelawang	100%		
			g. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali		1 kali	g. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional	1 kali	g. Dharma Santhi Kota Denpasar dan Tingkat Nasional	100%		
	1.17.1.20.03.11.15.17.17		3. Ngaturang Pengayar	Kota Denpasar, Bali dan luar Bali							2.775.845.000	3.192.221.750
			a. Pengayar Pura Batur	Bali		1 kali	a. Ngaturang Pengayar ke Pura Batur	1 kali	a. Ngaturang Pengayar ke Pura Batur	100%		
			b. Pengayar Pura Besakih	Bali		1 kali	b. Ngaturang Pengayar ke Pura Besakih	1 kali	b. Ngaturang Pengayar ke Pura Besakih	100%		

			c. Pengayar Pura Pengubengan	Bali		1 kali	c. Ngaturang Pengayar ke Pura Pengubengan	1 kali	c. Ngaturang Pengayar ke Pura Pengubengan	100%		
			e. Pengayar Pura Pasar Agung	Bali		1 kali	d. Ngaturang Pengayar ke Pura Pasar Agung	1 kali	d. Ngaturang Pengayar ke Pura Pasar Agung	100%		
			f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru	Luar Bali		1 kali	f. Ngaturang Pengayar ke Pura Mandara Giri Semeru	1 kali	f. Ngaturang Pengayar ke Pura Mandara Giri Semeru	100%		
			g. Pengayar Pura merajan Selonding	Bali		1 kali	g. Ngaturang Pengayar ke Pura merajan Selonding	1 kali	g. Ngaturang Pengayar ke Pura merajan Selonding	100%		
			h. Penganyar Pura Kentel Gumi	Bali		1 kali	h. Ngaturang Penganyar ke Pura Kentel Gumi	1 kali	h. Ngaturang Penganyar ke Pura Kentel Gumi	100%		
	1.17.1.20.03.11.15.30.		4. Pemberdayaan Sekaa Teruna								1.057.362.500	1.215.966.875
			a. Pembinaan Sekaa Teruna	4 Kecamatan		5 Sekaa Teruna	Menanamkan & menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi	5 Sekaa Teruna	Menanamkan & menumbuhkan sikap mental, watak dan prilaku Sekaa teruna di Kota Denpasar melalui Pembinaan Sekaa Teruna Tk. Kota dan Tk. Propinsi	100%		
			b. Pelatihan Sekaa Teruna Mewujudkan Ekonomi Kreatif	4 Kecamatan		413 Sekaa	Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar	413 Sekaa	Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya pada Sekaa Teruna Kota Denpasar	100%		
			5. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Kota Denpasar		1 kegiatan	Pelaksanaan Seminar / penyuluhan, kegiatan dalam rangka Sosialisasi program WHDI Kota Denpasar	1 kegiatan	Peningkatan Peranan Wanita Hindu Dharma untuk ikut serta dalam pembangunan di Kota Denpasar	100%	335.440.000	385.756.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian	1.17.1.20.03.20.14	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Tranparansi Penyaluran Hibah Kepada Masyarakat						195.927.800	225.316.970
	1.17.1.20.03.20.14		1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	Kota Denpasar		Laporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberian Hibah di Kota Denpasar	Laporan	Laporan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah di Kota Denpasar	100%		
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga	1.18.1.20.03.11.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			Penyediaan Atlet dan Artis						847.617.000	974.759.550

	1.19.1.20.03.11.20.25		1. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar	Kota Denpasar		43 Desa / Lurah	Terselenggaranya Festival Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia dan Apel Haornas	43 Desa / Lurah	Meningkatnya Kesehatan Jasmani, Rohani dan Prestasi.	100%		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.19.1.20.03.11.17.09.09	Program Pengembangan wawasan kebangsaan			Prosentase Pencapaian Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
	1.19.1.20.03.11.17.09.09		1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar								964.696.250	1.109.400.688
				Kota Denpasar		104 veteran	a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial, penyerahan Bingkisan dan penghargaan uang kepada veteran	104 veteran	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar	100%		
						20 sekaa	b. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar	20 sekaa	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar	100%		
	1.19.1.20.03.11.17.10.10		2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional								221.110.000	254.276.500
				Kota Denpasar		1 Kegiatan	Pementasan Hiburan Rakyat	1 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional	100%		
	1.19.1.20.03.11.17.13.13		3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana								773.544.000	889.575.600
				Kota Denpasar,Bali dan diluar Bali		1 Kegiatan	Upacara Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai.	1 Kegiatan	Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	100%		
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.1.20.03.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pemenuhan Pelayanan Administasi Perkantoran.						564.758.500	649.472.275
	1.20.1.20.03.11.01.07		1. Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar		1 kegiatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Pelaporan, Belanja Pegawai pada Bag. Kesra Setda Kota Denpasar	1 kegiatan	Lancarnya Pelayanan Administrasi padaBagian Kesra Setda Kota Denpasar	100%		

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.07.2.06.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PNS						20.700.000	23.805.000
	2.07.2.06.01.18.17		1. Peningkatan dan Pelatihan Fungsional / Bintek / Workhsop/ Bagi PNS	Kota Denpasar		2 orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis PNS	2 orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		
	TOTAL										15.014.918.800	17.267.156.620

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.01.2.01.02.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%					1.276.507.500	1.934.856.000
	2.01.2.01.02.01.07		Pelayanan administrasi perkantoran				Terlaksananya pelayanan listrik	5 unit	Terlaksananya pelayanan listrik	100%	1.276.507.500	1.934.856.000
							Terlaksananya pelayanan telepon	3 unit	Terlaksananya pelayanan telepon	100%		
							Terlaksananya pelayanan air	1 unit	Terlaksananya pelayanan air	100%		
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.01.2.01.02.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Denpasar	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					1.000.211.000	1.202.785.000
	2.01.2.01.02.02.12		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Denpasar			Tersedianya Sarana prasarana Perkantoran elektronik	6 unit	Tersedianya Sarana prasarana Perkantoran elektronik	100%	1.000.211.000	1.202.785.000
							Tersedianya Sarana prasarana perkantoran Non Elektronik	5 unit	Tersedianya Sarana prasarana perkantoran Non Elektronik	100%		
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.01.2.01.02.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Denpasar	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,00%					22.500.000	28.800.000
	2.01.2.01.02.05.01		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Denpasar			Terlaksannanya kursus-kursus singkat, pelatihan	3 orang	Terlaksannanya kursus-kursus singkat, pelatihan	100%	22.500.000	28.800.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.02.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Denpasar	Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Peternakan	100,00%					179.686.000	215.624.000
	2.01.2.01.02.20.01		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Denpasar			- Terlaksananya Bimtek/pelatihan penyuluh peternakan	8 orang	- Terlaksananya Bimtek/pelatihan penyuluh peternakan	100%	91.903.000	110.284.000
							- Terlaksananya Sistem Pelatihan dan Kunjungan penyuluh peternakan	8 0rang	- Terlaksananya Sistem Pelatihan dan Kunjungan penyuluh peternakan	100%		
	2.01.2.01.02.20.03		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan				- Terlaksananya penilaian kelas kelompok	34 klp	- Terlaksananya penilaian kelas kelompok	100%	87.783.000	105.340.000
							- Terlaksananya demplot bagi kelompok	4 unit	- Terlaksananya demplot bagi kelompok	100%		
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.02.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak		Denpasar	Cakupan Vaksinasi rabies	100,00%					482.049.000	578.459.000

					Cakupan spraying unggas	97,11%						
	2.01.2.01.02.21.08		Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis	Denpasar			- Terlaksananya Vaksinasi rabies	68553 ekor	- Terlaksananya Vaksinasi rabies	100%	482.049.000	578.459.000
							- Terlaksananya spraying unggas	191015 ekor	- Terlaksananya spraying unggas	100%		
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.02.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Denpasar	Peningkatan keberhasilan IB : Sapi	72,00%					1.287.160.000	1.481.592.000
					Babi	100,00%						
					Peningkatan Produksi Ternak : Sapi	99,77%						
					kambing	64,89%						
					Babi	87,64%						
					Unggas	100,00%						
					Peningkatan Populasi aneka ternak	96,66%						
					Peningkatan SDM kelompok tani ternak	100,00%						
	2.01.2.01.02.22.02		Pembibitan dan perawatan ternak	Denpasar			- Terlaksananya IB sapi	2525 ekor	- Terlaksananya IB sapi	100%	160.700.000	192.840.000
							- Terlaksananya IB babi	3030 ekor	- Terlaksananya IB babi	100%		
							- Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan pada sapi	2525 ekor	- Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan pada sapi	100%		
							- Terlaksananya Pemeriksaan ATR pada Sapi	20 ekor	- Terlaksananya Pemeriksaan ATR pada Sapi	100%		
							- Terlaksananya recording sapi	2500 ekor	- Terlaksananya recording sapi	100%		
							- Terlaksananya recording babi	24240 ekor	- Terlaksananya recording babi	100%		
							Tersedianya sarana dan prasarana IB	14 unit	Tersedianya sarana dan prasarana IB	100%		
	2.01.2.01.02.22.08		Pengembangan agribisnis peternakan	Denpasar			Terlaksananya bimtek budidaya ternak	1 klp	Terlaksananya bimtek budidaya ternak	100%	973.500.000	1.105.200.000
							Terlaksananya kontes dan pameran ternak	12 orang	Terlaksananya kontes dan pameran ternak	100%		
							Tersedianya ternak	100 ekor	Tersedianya ternak	100%		
							- Tersedianya sarana dan prasarana peternakan	10 unit	- Tersedianya sarana dan prasarana peternakan	100%		
	2.01.2.01.02.22.21		Pengembangan gizi dan pakan ternak	Denpasar			- Tersedianya sarana prasarana alsin peternakan	4 unit	- Tersedianya sarana prasarana alsin peternakan	100%	152.960.000	183.552.000
							- Terlaksananya pengembangan pakan ternak	4 klp	- Terlaksananya pengembangan pakan ternak	100%		

Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.02.23	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		Denpasar	Peningkatan produksi olahan hasil peternakan	100,00%					254.380.000	312.492.000
					Peningkatan SDM kelompok pengolah hasil peternakan	100,00%						
	2.01.2.01.02.23.07		Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah	Denpasar			Terlaksananya Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah	5 klp		100%	254.380.000	312.492.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan	2.01.2.01.02.25	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani			Peningkatan ketersediaan bahan asal hewan yang ASUH	100,00%					737.325.500	1.214.110.000
					Peningkatan Ketersediaan Hasil Bahan Asal Hewan yang Asuh	100,00%						
					Peningkatan angka konsumsi daging	100,00%						
					Peningkatan angka konsumsi protein hewani	100,00%						
	2.01.2.01.02.25.01		Penjaminan pangan asal hewan	Denpasar			- Terlaksananya pemeriksaan sampel daging secara laboratoris	50 sampel		100%	39.300.000	47.160.000
							- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan daging	7939,89 ton		100%		
	2.01.2.01.02.25.02		Pengembangan dan pemeliharaan RPH	Denpasar			- Terlaksananya pemotongan sapi	9350 ekor		100%	508.693.000	939.751.000
							- Terlaksananya pemotongan babi	29100 ekor		100%		
							- Tersedianya sarana dan prasarana RPH	5 unit		100%		
	2.01.2.01.02.25.03		Penjaminan pangan hasil asal hewan	Denpasar			- Terlaksananya Bimtek/pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil peternakan dan pengolahan limbah	6 klp		100%	189.332.500	227.199.000
							Terlaksananya pemeriksaan sampel limbah dan sampel produk olahan hasil peternakan secara laboratoris	50 sampel		100%		
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian	2.01.2.01.02.26	Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan		Denpasar	Peningkatan ketersediaan data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan yang valid	100,00%					216.837.300	256.568.000

	2.01.2.01.02.26.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan kelautan	Denpasar			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan kelautan	30 buku	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan kelautan	100%	60.433.500	68.884.000
	2.01.2.01.02.26.02		Penyusunan Laporan Pelaksanaan kegiatan Peternakan, perikanan dan kelautan	Denpasar			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan Peternakan, perikanan dan kelautan	30 buku	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan Peternakan, perikanan dan kelautan	100%	48.887.800	58.665.000
	2.01.2.01.02.26.03		Penyusunan data statistik Peternakan, perikanan dan kelautan	Denpasar			Tersusunnya data statistik Peternakan, perikanan dan kelautan	50 buku	Tersusunnya data statistik Peternakan, perikanan dan kelautan	100%	107.516.000	129.019.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan Dan Perikanan	2.05.2.01.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		Denpasar	Peningkatan SDM Pokmaswas yang terlatih	100,00%					453.952.300	544.743.000
	2.05.2.01.01.15.05		Pengembangan sarana prasarana dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Denpasar			- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir	5 klp	- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir	100%	453.952.300	544.743.000
							- Tersedianya sarana pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	54 unit	- Tersedianya sarana pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	100%		
Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan Dan Perikanan	2.05.2.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan		Denpasar	Peningkatan produksi benih ikan	100,00%					368.993.000	1.051.350.000
					Peningkatan produksi perikanan budidaya	100,00%						
					Peningkatan SDM kelompok perikanan budidaya	100,00%						
	2.05.2.01.01.20.11		Pengembangan PBI dan BBI	Denpasar			Tersedianya pakan ikan	4550 Kg	Tersedianya pakan ikan	100%	112.509.000	743.564.000
							Tersedianya sarana dan prasarana BBI dan PB	2 unit	Tersedianya sarana dan prasarana BBI dan PB	100%		
	2.05.2.01.01.20.12		Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Denpasar			Terlaksananya penerapan teknologi perikanan budidaya	18 klp	Terlaksananya penerapan teknologi perikanan budidaya	100%	256.484.000	307.786.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan Dan Perikanan	2.05.2.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap		Denpasar	Peningkatan produksi perikanan tangkap	100,00%					297.258.000	413.533.000
					Peningkatan SDM kelompok perikanan tangkap	100,00%					=	
	2.05.2.01.01.21.09		Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap	Denpasar			Terlaksananya penerapan teknologi perikanan dan tangkap	14 klp	Terlaksananya penerapan teknologi perikanan dan tangkap	100%	297.258.000	413.533.000

Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan Dan Perikanan	2.05.2.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan		Denpasar	Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	100,00%					241.377.200	289.653.000
					Peningkatan SDM kelompok pengolah hasil perikanan	100,00%						
	2.05.2.01.01.23.01		Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	Denpasar			- Terlaksanya pemeriksaan sampel ikan dan produk olahan perikanan secara laboratoris	50 sampel	- Terlaksanya pemeriksaan sampel ikan dan produk olahan perikanan secara laboratoris	100%	110.411.200	132.493.000
							- Terlaksananya Bimtek/Pelatihan/lomba pengolahan dan pengemasan hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi	4 Klp	- Terlaksananya Bimtek/Pelatihan/lomba pengolahan dan pengemasan hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi	100%		
	2.05.2.01.01.23.03		Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah	Denpasar			Terlaksananya Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah	3 klp	Terlaksananya Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah	100%	130.966.000	157.160.000
	Total										6.818.236.800	9.524.565.000

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.02.1.02.01.07	Program Pelayanan administrasi perkantoran										
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Pusk./dikes,UPT Farmasi	Terpenuhinya kebutuhan admin	100%	Pemenuhan kebutuhan admin	1 Paket	Terlaksananya kebutuhan admin	1 Paket	6.958.885.000	7.689.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	1.02.1.02.01.02.12		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Pusk./dikes,UPT Farmasi	Terpenuhinya kebutuhan Sapras	100%	Pemenuhan kebutuhan Sapras	1 Paket	Terlaksananya kebutuhan Sapras	1 Paket	7.255.872.240	7.255.872.240
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur			Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan	100%	Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan		Jumlah Tenaga yang mendapat pendidikan	100%		
	1.02.1.02.01.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Pusk./dikes,UPT Farmasi	Pelatihan PNS Puskesmas dan Dinas	11 Pusk	Pusk./dikes,UPT Farmasi	11 Pusk	Pusk./dikes,UPT Farmasi	11 Pusk	250.000.000	250.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi tepat waktu	100%	Tersedianya buku propil , Laporan Tahunan	100%	Tersedianya informasi Kesehatan	100%		
	1.02.1.02.01.06.01		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Pukesmas dan Dinas Kesehatan							125.000.000	125.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase desa siaga aktif	100%						
	1.02.1.02.01.19.01		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	36 Sekolah	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80%	Penyuluhan keliling	4 Kec	siaran keliling	4 Kec%	415.982.500	455.890.000
				4 Kecamatan	Persentase posyandu aktif	68%						
					Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan	100%	Terdistribusinya UKS kit, leaflet, poster dan benner		Terdistribusinya UKS kit, leaflet, poster dan benner	43/ds,kel		

					Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan	100%	Terbinanya 20 sekolah UKS		Terbinanya 20 sekolah UKS	20 UKS		
					Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100%	Terlaksananya BinteK Sekretariat UKS Kecamatan		Terlaksananya BinteK Sekretariat UKS Kecamatan			
					Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	Terdistribusinya IMT anak sekolah tk TK, SD, SMP dan SMA/SMK		Terdistribusinya IMT anak sekolah tk TK, SD, SMP dan SMA/SMK	4 Kec		
	1.02.1.02.01.19.02		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	4 Kecamatan	Persentase Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%					602.191.500	650.000.000
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	10%	cetak kartu PHBS		cetak kartu PHBS	1 Paket		
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	10%	Pembinaan PHBS		Pembinaan PHBS	4 Kec%		
	1.02.1.02.01.19.03		Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	1 Dikes							50.000.000	61.000.000
					Perijinan yang di tindaklanjuti	100%	Terlaksananya proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan	4 Kec	Terlaksananya proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan	4 Kec		
							Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan	4 Kec	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan	4 Kec		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%						
	1.02.1.02.01.21.01		Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	4 Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN Tingkat Kota Denpasar	4 desa/kel di 4 kec					385.314.000	443.111.000
							Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kota Sehat	100%	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kota Sehat	100%		
	1.02.1.02.01.21.02		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan sehat	4 desa/kel							138.148.800	151.963.680

							Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan serta Penilaian Lomba PSN, dan Kebersihan, Dusun/Lingkungan di Kota Denpasar	43 Desa/Kel	Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan serta Penilaian Lomba PSN, dan Kebersihan, Dusun/Lingkungan di Kota Denpasar	43 Desa/Kel		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
	1.02.1.02.01.16.01		Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya	43 desa/kel	Pelayanan Penduduk miskin	100%					117.802.000	128.900.000
					jumlah wanita usia 3050 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks	1700 orang	Terlayannya penduduk miskin melalui program JKBM dan JKN	4 Kec	Terlayannya penduduk miskin melalui program JKBM dan JKN	4 Kec		-
					Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan PKPR (Pelayanan kesehatan peduli remaja)	100%	Tersosialisasinya kepesertaan JKN	4 Kec	Tersosialisasinya kepesertaan JKN	4 Kec		
	1.02.1.02.01.16.02		Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	4 Kecamatan	Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	15 sekolah					210.752.300	250.750.200
					Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan	64%	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa Masy		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa Masy	4 Kec		
					Persentase rumah sehat	98%	Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji		Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji	4 Kec		
	1.02.1.02.01.16.03		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	4 Puskesmas	Prsentase perbaikan Sapras Kesehatan	4 unit (Denut III)	Prsentase perbaikan Sapras Kesehatan	4 unit	Tersedianya Sapars Puskesmas yag memadai	4 Unit	4.500.000.000	5.667.000.000
	1.02.1.02.01.16.09		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	23 Sekolah	Presentase Pebinaan PKTP	100%	Terlaksananya Pembinaan PKTP di sekolah	100%	Terlaksananya Pembinaan PKTP di sekolah	100%	673.767.000	850.000.000
				11 puskesmas	Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat	100%	Terlaksananya pencegahan dan penanggullangan kanker	100%	Terlaksananya pencegahan dan penanggullangan kanker	100%		
					Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat	100%	Terlaksananya Pelayanan Pap Smear	100%	Terlaksananya Pelayanan Pap Smear	100%		
					Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS	100%	Terlaksananya pelayanan IVA	100%	Terlaksananya pelayanan IVA	100%		

					Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	75%	Terpilainya Juara untuk mewakili Kota ke tk propinsi	75%	Terpilainya Juara untuk mewakili Kota ke tk propinsi	75%		
	1.02.1.02.01.16.12		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	4 Kecamatan							54.523.700	60.654.000
							Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	4 Kec	terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			
	1.02.1.02.01.16.14		Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	43 desa/kel	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%					340.345.000	359.090.000
					Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	Terlaksananya Pengambilan sampel darah (cholinesterase)	4 Kec	jumlah Pengambilan sampel darah (cholinesterase)	4 Kec		
							Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air minum	4 Kec	jumlah pengambilan sampel bakteri air minum	4 Kec		
							Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air bersih	4 Kec	jumlah pengambilan sampel bakteri air bersih	4 Kec		
							Terlaksananya sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat	4 Kec	jumlah pelaksanaan sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat	Kec		
							Terlaksananya pembinaan Pasar Rakyat	4 Kec	Terlaksananya pembinaan Pasar Rakyat	4 Kec		
	1.02.1.02.01.16.17		Penyelenggaraan Penyehatan Tempat Umum	43 desa/kel	Persentase tempattempat umum memenuhi syarat kesehatan	95%	Pembinaan TTU	95%	Jumlah TTU yang di bina	95%	861.572.000	990.807.800
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
	1.02.1.02.01.22.01		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	43 Desa/Kel	Pencegahan dan Pembrantasan DBD	100%	Pencegahan dan Pembrantasan DBD	100%	Terlaksananya Foging Fokus	100%	438.880.000	500.000.000
	1.02.1.02.01.22.02		Pengadaan alat foging dan bahan foging	43 desa/kel	Incidence rate penyakit DBD	210/100.000 pddk	Pelaksanaan Foging Masal	43 ds/Kel	Jumlah Foging Masal yang dilaksanakan	43 ds/Kel	2.270.785.000	2.870.785.000
					CFR penyakit DBD	< 1 %	Pelaksanaan Foging Fokus	43 ds/Kel	Jumlah Foging Fokus yang dilaksanakan	43 ds/Kel		
	1.02.1.02.01.22.03		Pengadaan Vaksin Penyakit Menular	1 Dikes							1.399.274.100	1.599.274.100

					Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	11 Pusk	Terlaksananya Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk Mencegah Penularan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)		Terlaksananya Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk Mencegah Penularan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	16200 vial		
							Terlaksananya Distribusi Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Rabies Center		Terlaksananya Distribusi Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Rabies Center	2 lokasi		
	1.02.1.02.01.22.04		Pelayanan Vaksin bagi balita dan anak sekoah	11 puskesmas	Persentase bayi usia 011 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%					5.646.383.500	6.414.184.000
					Persentase desa yang mencapai universal child immunisation (UCI)	100%	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Vaksinasi BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B dan Campak untuk Bayi dan Balita	100%	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Vaksinasi BCG,Polio,DPT-HB,Hepatitis B dan Campak untuk Bayi dan Balita	100%		
							Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil yang belum mencapai TT 5 Dosis	100%	Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi TT untuk Ibu Hamil yang belum mencapai TT 5 Dosis	100%		
							Terlaksananya Vaksinasi Kanker Serviks untuk siswi SMP	100%	Terlaksananya Vaksinasi Kanker Serviks untuk siswi SMP	100%		
							Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Campak, DT dan Td untuk Anak Sekolah	43 DEsa	Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Campak, DT dan Td untuk Anak Sekolah	100%		
	1.02.1.02.01.22.05		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	43 desa/kel							1.806.028.300	2.167.233.960
				11 puskesmas								
					Angka kesembuhan penderita TB	100%	Terlaksananya Monitoring PMO dan KPMO ke Praktisi Swasta	4 Kec	Terlaksananya Monitoring PMO dan KPMO ke Praktisi Swasta	4 Kec		
					Persentase Penderita TB mendapatkan pengobatan lengkap	100%				5 Kec		
	1.02.1.02.01.22.09		Peningkatan Surveyllance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	4 Kecamatan							131.287.000	131.287.000
							Terdeteksi lebih dini kejadian suatu penyakit	43 ds/kel	Terdeteksi lebih dini kejadian suatu penyakit	43 ds/kel		

	1.02.1.02.01.22.06		Pencegahan Penyakit endemik /epidemik	43 desa/kel	Pelaksanaan pencegahan endemik dan epidemik	43 Ds/Kel					7.907.607.000	7.907.607.000
	1.02.1.02.01.22.10		Peningkatan Komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan Penyakit	4 Kecamatan	Pelaksanaan KIE	43 Ds/Kel	Meningkatnya Upaya Pencegahan terhadap Penyakit	43 ds/kel	Menurunkan kasus Penyakit menular dan tidak menular	43 ds/kel	273.426.000	273.426.000
	1.02.1.02.01.22.12		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC)	4 Kecamatan	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC)	4 Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC)	4 Kecamatan	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulose (TBC)	4 Kecamatan	608.732.000	658.732.000
	1.02.1.02.01.22.13		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	4 Kecamatan	Prevalensi HIV /AIDS		Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/Aids dari Ibu ke Anak (PPIA)	4 Kec	Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/Aids dari Ibu ke Anak (PPIA)	4 Kec%	1.937.627.772	1.937.627.772
					Persentase angka kasus HIV yang diobati		Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	4 Kec	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	4 Kec		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					Tersedianya bahan Lab klinik IMS dan VCT	9 Kec	Tersedianya bahan Lab klinik IMS dan VCT	9 Kec		
	1.02.1.02.01.20.03		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), GAKY dan lainnya	4 Kecamatan	Persentase bayi usia 06 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	44%						
					Persentase balita usia 659 bulan mendapat kapsul Vit A	99%	Terintervensinya Balita Kurang Gizi dan Balita Gizi Kurang	4 Kec	Terintervensinya Balita Kurang Gizi dan Balita Gizi Kurang	4 Kec	250.084.300	300.000.000
					Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	Terlaksananya pemberian MP ASI untuk Gakin umur 6-24 bulan	4 Kec	Terpenuhiya pemberian MP ASI untuk Gakin umur 6-24 bulan	4 Kec		
					Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)	99%	Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)	99%	Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)	99%		
	1.02.1.02.01.20				persentase puskesmas melaksanakan surveilans gizi	100%						
	1.02.1.02.01.20.04		Pemberdayaan Masyarakat Untuk pencapaian n Keluarga Sadar Gizi	1 Dikes	Persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)	65%					305.021.600	60.650.000
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)	42%	Terlaksananya Lomba Balita		Terlaksananya Lomba Balita			
					Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	80%	Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional		Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional			

							Terlaksananya Pelatihan Konselor ASI		Terlaksananya Pelatihan Konselor ASI			
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.15	Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan										
	1.02.1.02.01.15.01		Pengadain Obat dan Perbekalan Kesehatan	11 puskesmas							2.600.000.000	2.580.000.000
							Terpenuhinya Pengadaan Obat PKD, Obat Gigi PKD, Perbekalan Kesehatan PKD, Obat Penunjang, Obat Klinik Praja, Reagen Laboratorium	11 Pusk	Terlaksananya Pengadaan Obat PKD, Obat Gigi PKD, Perbekalan Kesehatan PKD, Obat Penunjang, Obat Klinik Praja, Reagen Laboratorium	11 Pusk		
	1.02.1.02.01.15.2		Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	11 puskesmas							1.086.119.200	1.500.000.000
							pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	11 Pusk	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	11 Pusk		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan makanan										
	1.02.1.02.01.17.02		Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	20 lokasi							27.410.000	100.000.000
							Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan/minuman	43 Desa	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan/minuman	43 Desa		
							Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	43 Desa	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	43 Desa		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.18.03	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia			Menyebarkan manfaat Toga							
			Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri	33 Batra	Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri	33 Batra	Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri	33 Batra	Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri	33 Batra	173.901.300	173.901.300
				Peningkatan Promosi Obat Bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri	33 Batra							
							Pembinaan/Lomba TOGA	43 Desa/Kel	Pembinaan/Lomba TOGA	43 Ds/Kel		
							Pembinaan Batra	43 Ds/Kel	Pembinaan Batra	43 Ds/Kel		

[illegible]

							Pembuatan sarana pengolahan air limbah puskesmas	1 Ipal	Pembuatan sarana pengolahan air limbah puskesmas	1 Ipal		
	1.02.1.02.01.25.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Poyandu	11 puskesmas							18.186.400	60.000.000
							Dacin/Timbangan	43 Ds	Dacin/Timbangan	43 Ds		
							Microtoise		Microtoise			
							KMS Balita		KMS Balita			
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			Terlayannya masyarakat melalui program JKN	100%		100%	Terlayannya masyarakat melalui program JKN	100%		
	1.02.1.02.01.28.01		Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	11 puskesmas							4.613.074.400	4.890.074.000
							Penyelenggaraan Kapitasi Askes	43 ds	Penyelenggaraan Kapitasi Askes	43 ds		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita			cakupan kunjungan balita	92%						
	1.02.1.02.01.29.04		Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Balita	11 Pusk	Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA (kekerasan terhadap anak)	100%					144.747.600	44.000.000
					Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita	100%	Terlaksananya Pelayanan kesehatan anak Balita	100%	Terlaksananya Pelayanan kesehatan anak Balita	100%		
					persentase anak balita di SDIDTK (Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang)	93%	Terdeteksinya Tumbuh Kembang anak di puskesmas , TK, posyandu		Terdeteksinya Tumbuh Kembang anak di puskesmas , TK, posyandu			
					Persentase puskesmas melaksanakan manajemen terpadu balita sakit (MTBS dan Manajemen terpadu balita muda (MTBM)	100%	Terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi Guru TK	43 Ds	Terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi Guru TK	43 ds		
							Terlaksananya kelas ibu Balita	11 Pusk	Terlaksananya kelas ibu Balita	11 Pusk		
							Terlaksananya penyegaran KTA		Terlaksananya penyegaran KTA			
							Terlaksananya pelatihan Sistem pelaporan SDIDTK bagi Nakes		Terlaksananya pelatihan Sistem pelaporan SDIDTK bagi Nakes			
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan	73%	Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan	73%	Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan	73%		
	1.02.1.02.01.30.06		Pelayanan Kesehatan	43 desa/kel	Persentase puskesmas ramah lansia	100%					833.414.000	833.414.000

							Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia/sulinggih		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia/sulinggih			
							Terlaksananya Kegiatan Pemberian PMT bagi kelompok Rawan/Resti	4 Kec	Terlaksananya Kegiatan Pemberian PMT bagi kelompok Rawan/Resti	4 Kec		
							Terlaksananya Kegiatan Safari Kesehatan		Terlaksananya Kegiatan Safari Kesehatan			
							Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan	4 Kec	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan	4 Kec		
	1.02.1.02.01.30.08		Pel.pemeliharaan kes (lansia)	11 puskesmas							166.248.000	300.000.000
							Dilaksanakan lomba senam lansia		Dilaksanakan lomba senam lansia			
							Dilaksanakanya penyegaran Intelegensi Lansia		Dilaksanakanya penyegaran Intelegensi Lansia			
							Dilaksanakanya Penyegaran Kader Lansia		Dilaksanakanya Penyegaran Kader Lansia			
							Diberikannya obat - obatan untuk lansia		Diberikannya obat - obatan untuk lansia	1 Paket		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.31	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	30%	Pembinaan dan Pengawasan penglolanan makanan	30%	Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan penglolanan makanan			
	1.02.1.02.01.31.03		Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran	4 Kecamatan	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	30%					88.500.000	130.500.000
							Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan restaurant	4 Kec	Terlaksananya pembinaa	4 Kec		
	1.02.1.02.01.31.05		Pembinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah	4 Kecamatan	Presentase Kanti yang di Periksa	100%					130.500.000	150.000.000
							Terlaksananya embinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah	4 Kec	Terlaksananya embinaan dan Pemeriksaan Kantin Sekolah	4 Kec		
							Terlaksananya lomba Kantin Sehat	4 Kec	Terlaksananya lomba Kantin Sehat	4 Kec		
	1.02.1.02.01.31.02		Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga	4 Kecamatan							91.500.000	95.000.000

							Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	4 Kec	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	4 Kec		
							Terlaksananya pembinaan TPM/tempat produksi pangan industri rumah tangga	4 Kec	Terlaksananya pembinaan TPM/tempat produksi pangan industri rumah tangga	4 Kec		
							Terlaksananya pengawasan dan pembinaan tempat-tempat pengelolaan makanan	4 Kec	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan tempat-tempat pengelolaan makanan	4 Kec		
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak			Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	100%						
	1.02.1.02.01.32.04		Pelayanan Kesehatan Ibu	43 desa/kel	cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1	100%					73.887.000	150.000.000
					cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4	98%	Audit Maternal Perinatal (AMP)		Audit Maternal Perinatal (AMP)			
					Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani	80%	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani	80%	Penyegaran P4K	11 Pusk		
					persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100%	persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100%				
					Menurunkan angka kematian ibu melahirkan	98/100.000 KH	Terbentuknya Tim Rujukan Maternal Neonatal		Terbentuknya Tim Rujukan Maternal Neonatal			
					Menurunkan angka kematian bayi	12/1000 KH	Menurunkan angka kematian bayi	12/1000 KH	Menurunkan angka kematian bayi	12/1000 KH		
	1.02.1.02.01.32.05		Pelayanan Kesehatan Ibu	4 Kecamatan	Menurunkan angka kematian Balita	12/1000 KH	Menurunkan angka kematian Balita	12/1000 KH	Menurunkan angka kematian Balita	12/1000 KH	192.607.050	250.000.000
				1 puskesmas	Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)	98%						
					Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3 (KF3)	98%	Menurunnya kasus bayi BBLR	100%	Menurunnya kasus bayi BBLR	100%		
					Cakupan kunjungan neonatus pertama kali (KN1)	100%	Menurunnya kasus bayi Aspyksia	100%	Menurunnya kasus bayi Aspyksia	100%		
					Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)	98%	Menurunnya kematian Neonatal	100%	Menurunnya kematian Neonatal	100%		
					Cakupan Neonatal dengan komplikasi ditangani	80%	terpilihnya bidan teladan kota Denpasar	100%	terpilihnya bidan teladan kota Denpasar	100%		
					Cakupan pelayanan bayi	93%	Meningkatnya Kunjungan K4 ibu hamil	100%	Presentase Kunjungan K4 ibu hamil	100%		

					Cakupan pelayanan balita	81%	Cakupan pelayanan balita	81%	Cakupan pelayanan balita	81%		
					Persentase bayi dengan BBLR	<5%	Persentase bayi dengan BBLR	<5%	Persentase bayi dengan BBLR	<5%		
					Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	100%	puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	100%	Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	100%		
					Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%		
					Persentase Ibu Bersalin dan Nifas Mendapatkan Pelayanan	100%	Persentase Ibu Bersalin dan Nifas Mendapatkan Pelayanan	100%	Persentase Ibu Bersalin dan Nifas Mendapatkan Pelayanan	100%		
					Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya	100%	Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya	100%	Persentase aPersalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya	100%		
					Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	Terlaksananya Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		
					Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		
					Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar	100%	Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar	100%	Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar	100%		
					Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%		
	Jumlah										58.016.430.462	63.367.767.952

RSUD WANGAYA

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018	
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	1.02.1.02.02.33.01	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit		Denpasar Utara	Terlayannya Masyarakat degan baik	100%					115.893.463.000,00	127.482.809.300,00	
			Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Denpasar Utara			Terpenuhi kebutuhan rumah sakit	100%	Tersedia Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	115.893.463.000,00	127.482.809.300,00	
	TOTAL											115.893.463.000,00	127.482.809.300,00

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.15.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan publik	100%					1.093.873.000	1.203.260.300
	1.15.01.01.01		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar			Jumlah pelayanan admistrasi perkantoran	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan publik	1 Tahun	1.093.873.000	1.203.260.300
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.15.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur			Persentase pelayanan di bidang barang/aset	100%					572.500.000	629.750.000
	1.15.01.02.01		1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Denpasar			Jumlah tersedianya sarana dan prasara na aparatur	1 tahun	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	572.500.000	629.750.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.15.01.05.	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Persentase peningkatan SDM kepegawaian						50.000.000	55.000.000
	1.15.01.05.01		1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Denpasar			Jumlah pegawai yang mengikuti kursus singkat/ pelatihan	1 tahun	Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur	1 tahun	50.000.000	55.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.15.01.06.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Persentase peningkatan di bidang penyusunan program, perencanaan dan Penyampaian data informasi	100%					34.778.500	38.256.350
	1.15.01.06.05		1. Penyusunan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Denpasar			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	34.778.500	38.256.350
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.15.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			persentase peningkatan produktivitas UKM	100%					960.640.000	1.056.704.000
	1.15.01.15.06		1. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Denpasar			Jumlah Koordinasi yang dilaku-kan	12 UKM	Koordinasi yang dilakukan untuk mengkases dana pemerintah bagi UMKM	12 UKM	182.375.000	200.612.500
	1.15.01.15.08		2. Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Denpasar			Jumlah UKM yang di fasilitasi pengemb-anngan usahanya	77 UKM	Peningkatan Pengembangan bagi UKM di Kota Denpasar	77 UKM	764.215.000	840.636.500

	1.15.01.15.11		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Denpasar			Jumlah Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM	250 UKM	Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM	250 UKM	14.050.000	15.455.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.15.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			prosentase meningkatnya kemitraan UKM dan Koperasi	100%					2.882.392.800	3.170.632.080
	1.15.01.16.02		1. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Kota Denpasar			Jumlah UKM yang di fasilitasi kemitraan usahanya	25 UKM	Meningkatnya kemitraan usaha UMKM	25 UKM	359.740.000	395.714.000
	1.15.01.16.06		2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kota Denpasar			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan peningkatan wawasan	30 UKM	Meningkatnya jumlah UMKM tertib administrasi	30 UKM	229.368.000	252.304.800
	1.15.01.16.08		4. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kota Denpasar			Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi HAKI	50 UKM	Jumlah UKM yang memahami HAKI	50 UKM	95.868.500	105.455.350
	1.15.01.16.11		6. Penyelenggaraan Talkshow bagi gerakan koperasi	Kota Denpasar			700 0rang mengikuti talkshow	200 Koperasi	tercapainya standar pelayanan & peningkatan kinerja dalam tata kelola koperasi	200 Koperasi	269.346.700	296.281.370
	1.15.01.16.12		7. Rintisan pasar ikan bersih,sehat dan aman di Kota Denpasar	Kota Denpasar			terwujudnya percontohan pasar ikan bersih,sehat dan aman.	1 pasar	terwujudnya produksi ikan pasca panen yg layak di dikonsumsi	1 pasar	341.969.000	376.165.900
	1.15.01.16.13		8. Pelatihan Achievement Motivation bagi pimpinan koperasi	Kota Denpasar			Terlatihnya 30 pimpinan koperasi	30 koperasi	Termotivasinya pimpinan koperasi yang berprestasi	30 koperasi	608.816.000	669.697.600
	1.15.01.16.14		9. Pelatihan Advokasi Perkoperasian	Kota Denpasar			30 Pengurus koperasi yang teradvokasi	30 koperasi	Pengurus koperasi yang teradvokasi	30 koperasi	189.276.000	208.203.600
	1.15.01.16.15		11. Raker Penyusunan RKT Perkoperasian	Kota Denpasar			Terlaksananya Rapat Kerja Tahunan bersama Dekopinda dan Koperasi	65 koperasi	Terwujudnya rencana kerja yang berorientasi pada botton up planing	65 koperasi	247.816.000	272.597.600
	1.15.01.16.16		12.Penyusunan Master Plan Program Inovasi Koperasi	Kota Denpasar			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka menengah Program Inovasi Koperasi	1 lap	Terwujudnya Koperasi yang berorientasi kepada Kreatifitas dan Inovasi berbasis Budaya Unggulan	1 lap	260.131.200	286.144.320
	1.15.01.16.17		13.Magang Kewirausahaan Koperasi	Kota Denpasar			Terlaksananya kegiatan magang kewirausahaan pada koperasi berprestasi	4 koperasi	Terwujudnya Koperasi Berprestasi dan Inovatif di Kota Denpasar	4 koperasi	245.818.200	270.400.020
	1.15.01.16.18		14.Pendampingan Kepada Kopwan	Kota Denpasar			Terlaksananya kegiatan Pendampingan kepada Kopwan	2 kopwan	Terwujudnya Kopwan yang memiliki aksibilitas Permodalan dan Pemasaran	2 kopwan	34.243.200	37.667.520

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.15.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			persentase penumbuhan usaha koperasi dan UKM	100%					806.174.300	886.791.730
	1.15.01.17.02		1.Sosialisasi dukungan Informasi penyediaan permodalan	Kota Denpasar			Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	50 koperasi	Terwujudnya alternatif sumber pembiayaan bagi	50 koperasi	75.391.100	82.930.210
	1.15.01.17.07		2. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Kota Denpasar			Jumlah UMKM dalam penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	120 UKM	Prosentase peningkatan UMKM yang dibina	120 UKM	36.056.000	39.661.600
	1.15.01.17.09		3. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Denpasar			Jumlah UMKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah	8 UKM	Peningkatan produktifitas UKM	8 UKM	458.150.000	503.965.000
	1.15.01.17.12		4. Kom stat data koperasi	Kota Denpasar			Validitas data koperasi secara berkala	1 Laporan	tersedianya data komunikasi informasi koperasi	1 Laporan	236.577.200	260.234.920
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.15.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	100%					2.532.253.000	2.785.056.000
	1.15.01.18.01		1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Kota Denpasar			Jumlah Koordinasi yang dilakukan	2 kali	Koordinasi yang dilakukan untuk pengembangan dan kemajuan bagi Koperasi di Kota Denpasar	2 kali	96.355.000	105.990.500
			2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kota Denpasar			Terlaksananya program kerja dekopinda dan dikla	1 Laporan	terwujudnya program kerja dekopinda	1 Laporan	167.030.100	183.733.110
	1.15.01.18.04		3. Sosialisasi Pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian (pelatihan)	Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dan peningkatan wawasan	30 koperasi	Peningkatan koperasi tertib administrasi	30 koperasi	57.840.000	63.624.000
	1.15.01.18.05		4. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang dapat dibina, diawasi dan diberi penghargaan	100 koperasi	Peningkatan koperasi yang berkualitas	100 koperasi	216.372.000	237.586.900
	1.15.01.18.06		5. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Koperasi	Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang mengembangkan jaringan kerja sama usaha koperasi	4 Koperasi	Meningkatnya dan mengembangkannya jaringan kerjasama usaha koperasi melalui pameran	4 Koperasi	881.854.000	970.039.400

	1.15.01.18.11		6. Perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi	Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang ikut dalam perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi	1 Laporan	Kesadaraan masyarakat Kota Denpasar akan pentingnya berkoperasi	1 Laporan	180.165.900	198.182.490
	1.15.01.18.14		7. Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi online	Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	150 Koperasi	koperasi yang memenuhi kriteria sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat san sangat tidak sehat	150 Koperasi	136.523.200	150.175.520
	15		8. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Manajemen Perkoperasian	Kota Denpasar			Jumlah pengurus koperasi yang disertifikasi	90 Koperasi	pengurus koperasi yang mengikuti sertifikasi	90 Koperasi	174.669.000	192.135.900
	16		9. Temu Konsultasi dan Kemitraan	Kota Denpasar			Terlaksananya Temu Konsultasi dan konsultasi dan Kemitraan Koperasi	100 koperasi	Terwujudnya Kerjasama Antar Lembaga Koperasi dan Antar Koperasi dengan Lembaga Usaha	100 koperasi	180.308.200	198.339.020
	17		10. Monev Pembentukan Holding Koperasi di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terbentuknya holding koperasi di Kota denpasar	1 Laporan	Perkuatan sinergi antar koperasi dan Peningkatan daya saing koperasi	1 Laporan	441.135.600	485.249.160
	TOTAL										8.932.611.600	9.825.450.460

DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									2.520.825.200	2.772.907.720
	1 .05. 1.05.01.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	1 Paket	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	100%	2.520.825.200	2.772.907.720
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1.258.217.352	1.384.039.088
	1 .05. 1.05.01.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Denpasar	Jumlah dana yang dibutuhkan	100%	Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Paket	Penyediaan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	1.258.217.352	1.384.039.088
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									200.000.000	220.000.000
	1 .05. 1.05.01.05.1		Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kota Denpasar	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Terlaksananya kursus - kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku	1 Paket	Kapasitas Aparatur yang meningkat	100%	200.000.000	220.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		Program Pengembangan Perumahan									3.550.848.000	3.905.932.800
	1 .05. 1.05.15.11		Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR /RTM)	Kota Denpasar	Mengembangkan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Denpasar	100%	Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	4 Paket	Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang lebih baik	4 paket	2.326.480.000	2.559.128.000
	1 .05. 1.05.15.		Penyusunan Norma, Standar ,Pedoman dan Manual (NSPM)	Kota Denpasar	Tersusunnya Dokumen Norma, standar,pedoman dan Manual (NSPM) di Kota Denpasar	100%	Dokumen Norma,Standar, Pedom,an dan Manual (NSPM)	1 Laporan	Tersedianya Dok. Norma,Standar,Pedoma n dan Manual (NSPM) di Kota Denpasar	1 laporan	477.800.000	525.580.000
	1 .05. 1.05.15.		Pendataan Pemetaan Titik Kumuh di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Terciptanya perumahan yang sehat dan asri	100%	Dokumen Titik Kumuh di Kota Denpasar	1 laporan	Pemanfaatan hasil Dokumen Titik Kumuh di Kota Denpasar	1 laporan	337.800.000	371.580.000
	2 .05. 1.05.15.		Kegiatan Penyusunan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Tersusunnya Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	100%	Dokumen Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	1 laporan	Tersedianya Dokumen Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	1 laporan	408.768.000	449.644.800

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Perencanaan Tata Ruang									668.684.000	735.552.400
	1.05.1.05.15.15		Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kota Denpasar	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar	100%	Tersusunnya DED untuk Penataan Kawasan Setra Badung Kota Denpasar	1 laporan	Tersedianya DED untuk Penataan Kawasan Setra Badung Kota Denpasar	1 laporan	362.050.000	398.255.000
	1.05.1.05.15.15		Penyusunan rencana Blok LC Margaya	Kota Denpasar	Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat	50%	Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat	1 Paket	Tertatanya Kawasan Terpadu berupa Konsolidasi Tanah (LC) di Kec. Denpasar Barat	50%	306.634.000	337.297.400
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pemanfaatan Ruang									464.369.994.300	510.806.993.730
	1.05.1.05.16		Pembangunan Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta	Kota Denpasar	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar	100%	Terbangunnya Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta di Kota Denpasar	1 Unit	Tersedianya Tembok Setra Desa Sumerta yang lebih baik	1 unit	2.268.705.000	2.495.575.500
	1.05.1.05.16.23		Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar	100%	Terehabilitasinya Kantor Desa di Kota Denpasar	9 Unit	Tersedianya Kantor Desa di Kota Denpasar yang lebih baik	9 unit	5.782.970.000	6.361.267.000
	1.05.1.05.16		Penataan Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Denpasar	Kota Denpasar	Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan	100%	tertatanya Taman Pemuda di Lapangan Lumintang Kota Denpasar	1 kegiatan	Terlaksananya Penataan Taman Pemuda di Lapangan Lumintang Kota Denpasar	1 Kegiatan	5.163.682.000	5.680.050.200
	1.05.1.05.16.24		Pembangunan Pasar Badung Kota Denpasar	Kota Denpasar	Pembangunan Pasar Badung Kota Denpasar	100%	Pasar Badung Kota Denpasar	1 Unit	tersedianya Pasar Badung Kota Denpasar	100%	352.086.800.000	387.295.480.000
	1.05.1.05.16.		Penataan Tukad Bindhu di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan	100%	Tertatanya Tukad Bindhu di Kota Denpasar	1 Kawasan	Terlaksananya Penataan Tukad Bindhu di Kota Denpasar	100%	1.542.682.000	1.696.950.200
	0.05.1.05..01.21		Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar	100%	Terehabilitasinya Kantor Lurah di Kota Denpasar	4 Unit	Tersedianya Kantor Lurah di Kota Denpasar yang lebih baik	4 unit	5.125.147.000	5.637.661.700
	1.05.1.05.01.16.83		Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Terwujudnya Pasar Desa yang baik di Kota Denpasar	100%	Terenovasinya Pasar Desa Adat Anggabaya Penatih	1 Unit	Bangunan Pasar Desa Adat anggabaya Penatih	1 Unit	5.568.927.000	6.125.819.700
	1.05.01.05.01.16		Pemeliharaan Kawasan Pendestrian di Pusat Kota	Kota Denpasar	Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan	100%	terpeliharanya Pendestrian di Pusat Kota dan sekitarnya	1 kawasan	Terpeliharanya Pendestrian di Pusat Kota dan sekitarnya	100%	53.482.000	58.830.200
	1.05.1.05..01.16.25		Pembuatan DED Pasar Badung Kota Denpasar	Kota Denpasar	Pembuatan DED Pasar Badung Kota Denpasar	100%	DED Pasar Badung Kota Denpasar	1 laporan	Tersedianya DED Pasar Badung Kota Denpasar	100%	2.145.385.000	2.359.923.500

	1.05.1.05..01.16		Pemeliharaan Planterbox Taman di Jl.Sudirman	Kota Denpasar	Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan	100%	terpeliharanya Planterbox Taman Jalan Sudirman di Kota Denpasar	1 kawasan	Planterbox Taman sekitar Jalan Sudirman Kota Denpasar yang lebih indah	100%	41.482.000	45.630.200
	1.05.1.05..01.16		Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang	Kota Denpasar	terkoordinirnya pemecahan masalah pemanfaatan ruang secara terpadu	100%	terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang	1 laporan	terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang (arsitektur , struktur dan mekanikal)	100%	830.440.000	913.484.000
	1.05.1.05..01.16		Operasional Pemanfaatan Ruang	Kota Denpasar	Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan bangunan	100%	tersusunnya laporan informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar		Informasi pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar	100%	188.336.000	207.169.600
	1.05.1.05..01.16		Koordinasi Pemecahan Masalah Pelestarian Bangunan Cagar Budaya	Kota Denpasar	Terkordinirnyan Pemecahan Masalah Pelestarian Bangunan Cagar Budaya	100%	terpecahkannya Masalah Pelestarian Bangunan Cagar Budaya	1 Laporan	terpecahkannya Masalah Pelestarian Bangunan Cagar Budaya	1 Laporan	419.940.000	461.934.000
	1.05.1.05..01.16		Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	Pembuatan Analisa Tahun 2017	100%	Pembuatan analisa Tahun 2017	1 Laporan	tersedianya Analisa Tahun 2017	100%	180.469.800	198.516.780
	1.05.1.05.01.16.24		Pembangunan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	Kota Denpasar	Pembangunan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	100%	Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	1 Unit	Tersedianya Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	100%	61.286.620.000	67.415.282.000
	1.05.1.05..01.16		Monitoring,Evaluasi dan pelaporan dalam Pemanfaatan Ruang	Kota Denpasar	Pemenuhan Informasi Pendataan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi	20%	Laporan Informasi Data pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi sebagai bahan kajian Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Tim BKPRD	1 laporan	Terwujudnya Informasi Data pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi sebagai bahan kajian Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Tim BKPRD	1 laporan	261.400.000	287.540.000
	1.05.1.05..01.16.03		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Denpasar	Pemenuhan Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar	100%	Laporan Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar	1 laporan	terelisasinya Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar	1laporan	371.400.000	408.540.000
	1.05.1.05..01.16		Sosialisasi Kebijakan,Norma, Standar,Prosedur dan Manual pemanfaatan Ruang	Kota Denpasar	Identifikasi Norma,Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang		Terlaksananya kajian tentang norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	1 laporan	Tersedianya hasil analisa sebagai pedoman norma,standar pemanfaatan ruang	1 laporan	254.277.500	279.705.250
	1.05.1.05..01.16.69		Operasional Penataan Reklame di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Penataan Reklame di Kota Denpasar	100%	Tertatanya Reklame di Kota Denpasar	1 Paket	Terlaksananya Penataan Reklame di Kota Denpasar	100%	46.943.500	51.637.850
	1.05.1.05..01.16.69		Penataan Papan Nama Usaha di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Penataan Papan Nama Usaha di Denpasar	100%	Tertatanya Papan Nama Usaha di Denpasar	1 Paket	Terlaksananya Penataan Papan Nama Usaha di Denpasar	100%	271.943.500	299.137.850

	1.05.1.05..01.16		Rehabilitasi Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran	Kota Denpasar	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar	100%	Terehabilitasinya Pura Batur Desa Pekraman Intaran	1 Unit	Tersedianya Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran yang Lebih Baik	1 Unit	419.551.000	461.506.100
	1.05.1.05..01.16.28		Operasional Sentral Parkir	Kota Denpasar	Opedrasional Pemeliharaan Sentral Parkir	100%	Terpeliharanya Sentral Parkir	1 laporan	Adanya Operasional Pemeliharaan Sentral Parkir	100%	628.590.000	691.449.000
	1.05.1.05..01.16.31		Penataan Koridor di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Pemeliharaan Koridor di Kota Denpasar	100%	Terpeliharanya Koridor di Kota Denpasar	1 Unit	Adanya Pemeliharaan Koridor di Kota Denpasar	100%	801.940.000	882.134.000
	1.05.1.05..01.16		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Kelurahan Serangan	Kota Denpasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Kelurahan Serangan	100%	Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Kelurahan Serangan	1 Unit	Adanya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Kelurahan Serangan	100%	273.870.000	301.257.000
	1.05.1.05..01.16.23		Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Renon di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar	100%	Terehabilitasinya Gedung Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Renon di Kota Denpasar	1 Unit	Tersedianya Gedung Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Renon di Kota Denpasar	1 Unit	2.061.524.000	2.267.676.400
	1.05.1.05..01.16.24		Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Barat	Kota Denpasar	Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Barat	100%	Gedung Kantor Camat Denpasar Barat	1 Unit	Tersedianya Gedung Kantor Camat Denpasar Barat	100%	6.222.678.000	6.844.945.800
	1.05.1.05..01.16.10		Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum untuk Representatif	Kota Denpasar	Terlaksananya Rahab Bangunan Gedung Sarana Olahraga Indoor Kompyang Sujana	100%	Terchabnya Bangunan Gedung Sarana Indoor Kompyang Sujana	1 Paket	Terbangunnya Gedung Sarana Indoor Kompyang Sujana yang representatif	100%	521.051.500	573.156.650
	1.05.1.05..01.16.10		Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum untuk Representatif	Kota Denpasar	Terwujudnya Pembangunan Wantilan Pura Puseh dan Pura Desa Adat Serangan	100%	Pembangunan Wantilan Pura Puseh dan Pura Desa Adat Serangan	1 Paket	Terbangunnya Wantilan Pura Puseh dan Pura Desa Adat Serangan	100%	1.285.271.500	1.413.798.650
	1.05.1.05..01.16.		Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum	Kota Denpasar	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar	100%	Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar	2 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar yang lebih baik	2 Unit	647.746.000	712.520.600
	1.05.1.05..01.16.83		Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Terwujudnya Pasar Desa yang baik di Kota Denpasar	100%	Terenovasinya Pasar Desa di Kota Denpasar	1 Unit	Bangunan Pasar Desa di Kota Denpasar	1 Unit	7.616.740.000	8.378.414.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang									15.444.377.400	16.988.815.140
	1.05.1.05.17.09		Operasional dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Denpasar	Tercapainya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang akibat terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang untuk bangunan,Reklame dan tower	20%	Laporan OP Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan Reklame dan Tower	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Laporan OP Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan Reklame dan Tower	1 Laporan	983.158.000	1.081.473.800

	1.05.1.05.17.03		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Tata Ruang	Kota Denpasar	Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan	100%	Pembuatan Jogging Track di Subak Sembung Tembus Tagtag di Kec. Denpasar Utara	1 Paket	Jogging Track di Subak Tembus Tagtag di Kec. Denpasar Utara	100%	3.634.000.000	3.997.400.000
	1.05.1.05.17.03		Pengendalian dan Pemanfaatan RTH	Kota Denpasar	Terkendalinya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Denpasar	20%	Terkendali dan tertatanya Ruang terbuka Hijau Publik di Kota Denpasar	2 Paket	terwujudnya Penataan Ruang terbuka Hijau Publik di Kota Denpasar	100%	10.827.219.400	11.909.941.340
	TOTAL										488.012.946.252,35	536.814.240.877,59

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	40%					18.840.000.000	19.000.000.000
	1.07.01.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Lancarnya pelayanan kantor	100%	18.840.000.000	19.000.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	45%					4.500.000.000	4.000.000.000
	1.07.01.02.12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pemeliharaan, Pemeliharaan Derek, Belanja Modal kendaraan Patwal dan Kendaraan Crane)	Kota Denpasar			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 paket	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	4.500.000.000	4.000.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Pemenuhan Kebutuhan apasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang					250.000.000	300.000.000
	1.07.01.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Denpasar			Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	25 orang	Peningkatan Kompetensi Pegawai	100%	250.000.000	300.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan	1.07.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			Pemenuhan optimalisasi Kelancaran Arus lalu lintas	40%					10.393.000.000	9.232.300.000
	1.07.01.16.06		Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (Guardrail, Rambu, RPPJ)	Kota Denpasar			Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat yang terpelihara	1 paket	Pemenuhan Keamanan dan ketertiban Lalu Lintas	100%	1.026.000.000	1.128.600.000
	1.07.01.16.07		Operasional Lalu Lintas (Pemeliharaan Marka, Trafic Light, Kansteen, Rambu)	Kota Denpasar			Terpeliharanya Traffic Light dengan Baik	65 unit	Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Yang Berfungsi dengan Baik	100%	3.217.000.000	3.538.700.000
	1.07.01.16.14		Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas (Belanja Modal Marka, Cermin, Rambu dan Pembuatan Taman Lalu Lintas)	Kota Denpasar			Tersedianya Fasilitas Lalu Lintas dengan Baik	4 kecamatan	Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Yang Berfungsi dengan Baik	100%	6.150.000.000	4.565.000.000

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan	1.07.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			Meningkatkan kualitas ketersediaan prasarana untuk menunjang kelengkapan dan keselamatan angkutan	40%					20.761.810.103	13.532.991.113
	1.07.01.17.12		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (Pengaspalan, Pembangunan Gudang baru)	Kota Denpasar			Terbangunannya Fasilitas Terminal Barang dan Pengaspalan Gudang lanjutan kegiatan 2013 yang one prestasi oleh penyedia	1 lokasi	Terpenuhinya Fasilitas Terminal Barang	100%	3.700.000.000	-
	1.07.01.17.15		Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kota Denpasar			Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan AKUT	6 orang	Terpilihnya sopir angkutan teladan di kota Denpasar	100%	275.000.000	302.500.000
	1.07.01.17.18		Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha	Kota Denpasar			Keikutsertaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan	1 Kali	Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin Berlalu Lintas	100%	258.000.000	283.800.000
	1.07.01.17.19		Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	Kota Denpasar			Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan Lebaran di Terminal Ubung	2 unit	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan angkutan lebaran	100%	265.000.000	291.500.000
	1.07.01.17.21		Operasional Pelayanan Transportasi Darat	Kota Denpasar			Terpenuhinya Operasional CC Room ATCS	1 lokasi	Peningkatan Program Transportasi Darat	100%	1.169.213.625	1.286.134.987
	1.07.01.17.23		Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Kota Denpasar			Terbentuknya Posko terpadu Angkutan Nataru dan Denpasar Festival	2 lokasi	Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	250.000.000	275.000.000
	1.07.01.17.28		Penyediaan Layanan Angkutan Perkotaan (Belanja Modal Pengadaan Bus Sekolah)	Kota Denpasar			Terlaksananya layanan angkutan sekolah	1 paket	Terealisasinya layanan Angkutan sekolah di Kota Denpasar	100%	11.619.596.478	7.281.556.126
	1.07.01.17.29		Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar	1 keg	Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	150.000.000	165.000.000
	1.07.01.17.30		Pelaksanaan Kompetisi Dokar Hias Kreatif	Kota Denpasar			Terlaksananya Kompetisi Dokar Hias Kreatif	6 orang	Terpilihnya Awak Kendaraan Dokar Hias	100%	300.000.000	330.000.000
	1.07.01.17.31		Pembinaan Usaha Angkutan Laut di Kota Denpasar				Mewujudkan tertib penyelenggaraan Angkutan Laut di Kota Denpasar	1 laporan	Laporan Hasil Penyuluhan Operator Angkutan Laut	100%	175.000.000	192.500.000

	1.07.01.17.32		Pelaksanaan Program Aksi Keselamatan (Penyuluhan ke Sekolah, Andal Lalin, sosialisasi Kursus Mengemudi, Pemeliharaan Taman Lalu Lintas)	Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	1 paket	Prosentasi terbinanya siswa di Kota Denpasar	100%	750.000.000	825.000.000
	1.07.01.17.34		Operasional Pelayanan Terminal Penumpang	Kota Denpasar			Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Penumpang	1 lokasi	Lancarnya pelayanan jasa angkutan penumpang	100%	500.000.000	650.000.000
	1.07.01.17.35		Operasional Pelayanan UPT PKB	Kota Denpasar			Pemenuhan Kebutuhan Operasional PKB	1 lokasi	Lancarnya pelayanan Pengujian	100%	700.000.000	750.000.000
	1.07.01.17.36		Operasional Pelayanan Terminal Barang	Kota Denpasar			Pemenuhan Kebutuhan Operasional Terminal Barang	1 lokasi	Lancarnya pelayanan Terminal Barang	100%	650.000.000	900.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan	1.07.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Pemenuhan Prasarana Kelancaran Arus Lalu Lintas	50%					8.593.414.890	3.952.756.379
	1.07.01.18.04		Pengembangan Sistem ATCS (Penggantian APILL 12 Simpang dan Penyambungan link Komunikasi fiber optik ke CC room)	Kota Denpasar			Terpenuhinya perangkat Sistem ATCS di simpang dan jaringan link komunikasi	12 simpang	Peningkatan Kelancaran Lalu lintas di Simpang	100%	8.593.414.890	3.952.756.379
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan	1.07.01.19.	Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas			Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mampu Menunjang Sektor Lain	40%					1.550.000.000	1.660.000.000
	1.07.01.19.08		Pengendalian Operasional Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Denpasar			Terpenuhinya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	200 kali	Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	1.000.000.000	1.055.000.000
	1.07.01.19.13		Kajian Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kota Denpasar	Kota Denpasar	Terwujudnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas perkotaan	-	Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Gajah Mada, Teuku Umar (Lanjutan), Gn. Sopotan	1 buku	Terpenuhinya Perencanaan Kajian dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kawasan ajah Mada, Teuku Umar (Lanjutan), Gn. Sopotan	100%	550.000.000	605.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan	1.07.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor			Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	40%					1.699.358.930	1.319.312.822

	1.07.01.20.03		Uji Petik Kendaraan Bermotor	Kota Denpasar			Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	2 kali	Tercapainya peningkatan keselamatan dan keamanan berlalu-lintas	100%	57.561.460	63.317.606
	1.07.01.20.06		Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Kota Denpasar			Meningkatnya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	1 kali	Monitoring/pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor	100%	20.568.130	22.642.943
	1.07.01.20.07		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Denpasar			Tersedianya sarana dan prasarana pada pengujian kendaraan bermotor	2 gate	Tercapainya kualitas dan kuantitas wajib uji kendaraan bermotor	100%	1.107.162.413	667.878.654
	1.07.01.20.08		Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	Kota Denpasar			Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan mobil pengujian kendaraan bermotor keliling	4 kecamatan	Terciptanya kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.	100%	514.066.927	565.473.619
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan	1.07.01.21.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor			Kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar dalam rangka mendukung ramah lingkungan	40%					375.000.000	395.625.000
	1.07.01.21.01		Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar	Kota Denpasar			Terlaksananya kegiatan Car Free Day setiap hari minggu	1 lokasi	Kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas baik pengguna lalu lintas maupun masyarakat pada umumnya	100%	375.000.000	395.625.000
	TOTAL										66.962.583.923	53.392.985.314

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik	1.06.1.06.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi			Persentase pemenuhan data dan informasi sebagai bahan perencanaan	100%					831.630.000	914.793.000
	1.06.1.06.01.15.02		1. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Denpasar dan Masyarakat			Buku Denpasar Membangun	50 buku	Prosentase tersedianya data / informasi Denpasar membangun dan SIPD	100%	153.102.000	168.412.200
	1.06.1.06.01.15.05		2. Penyusunan profil daerah	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Denpasar dan Masyarakat			Buku profil daerah Kota Denpasar	75 buku	Tersedianya data/informasi ttg gambaran umum Kota Denpasar	100%	137.318.000	151.049.800
	1.06.1.06.01.15.06		3. Implementasi Modul Perencanaan pada SIPKD Pemerintah Kota Denpasar	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Denpasar dan Masyarakat			1. jml Modul yg terimplementasi pada SIPKD Kota Dps; 2. Terlatihnya Admin Modul Perencanaan SIPKD Kota Denpasar; 3. Terlatihnya Operator Masing-masing Perangkat Daerah	1 Modul; 9 Orang; 88 orang	Tersusunnya Data perencanaan pePembangunan daerah secara terpadu	100%	361.210.000	397.331.000
	1.06.1.06.01.15...		4.Penyusunan Profil calon Penerima Anugerah Iptek	Kota Denpasar			Buku Profil Calon Penerima Anugerah Iptek Calon Penerima Anugerah IPTEK	100 buku 3 orang	Tersedianya Dokumen Calon Penerima Anugerah IPTEK	1 dokumen%	180.000.000	198.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan			Optimalisasi eksistensi kerjasama pembangunan	100%					784.650.000	863.115.000
	1.06.1.06.01.16.04		5. Koordinasi dalam pemecahan masalah daerah									
			-Kelompok ahli	Kota Denpasar			buku bunga rampai, Penggandaan Buku Bunga Rampai, Kajian-kajian Isu Strategis	200 buku, (4 triwulan x 9 or) 36 kajian	Tersedianya data koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	100%	784.650.000	863.115.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			Pemenuhan kebutuhan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%					1.475.656.000	1.623.221.600

	1.06.1.06.01.18.02		6. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD)	seluruh masyarakat kota Denpasar			laporan Tim BKPRD, Laporan Hasil Sosialisasi RDTR Kota Denpasar, Laporan Identifikasi RTH 4 Kec. Review RTRW Kota Dps., Workshop Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Denpasar, Koordinasi P2KH	115 buku, 3 Laporan	Penataan Ruang Kota Denpasar yang terkendali, Perda RDTR Kota Dps, Identifikasi RTH di 4 Kec., Kajian Reviw RTRW, SDM yang memahami Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	1.475.656.000	1.623.221.600
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar			Pemenuhan kebutuhan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%					286.173.000	314.790.300
	1.06.1.06.01.18.02		7. Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	seluruh masyarakat kota Denpasar			Buku Review Studi EHRA, SSK, Buku Putih dan Memorandum Program Sanitasi	1 Laporan	Tersedianya Buku Review Studi EHRA, SSK, Buku Putih dan Memorandum Program Sanitasi	100%	286.173.000	314.790.300
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			Peningkatan Aparat Perencana pembangunan daerah	100%					186.970.000	205.667.000
	1.06.1.06.01.20.03		8. Bimbingan Teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Kota Denpasar			Terlatihnya SDM perencana dalam bidang perencanaan pembangunan daerah	50 org	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%	186.970.000	205.667.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 dokumen					887.277.500	970.149.950
	1.06.1.06.01.21.01		9. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (Forum SKPD & Konsultasi Publik)	Kec. Denbar, Dentim, Densel dan Denut			Buku Panduan forum Perangkat Daerah, Terlaksananya forum Perangkat Daerah, Terlaksananya konsultasi publik, rekapitulasi hasil usulan program kegiatan	150 buku, 1 kali 1 kali	Tersedianya program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah sbg bahan Musrenbang thn 2018	100%	79.556.000	87.511.600
	1.06.1.06.01.21.08		10. Penyusunan Rancangan RKPD	Kec. Denbar, Dentim, Densel dan Denut			Draft Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2018, RKPD Perubahan	20 buku, 20 buku	Tersedianya rancangan program prioritas RKPD tahun 2018 sbg acuan penyusunan Renja SKPD	100%	53.725.000	59.097.500

	1.06.1.06.01.21.09		11. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kec. Denbar, Dentim, Densel dan Denut		Buku Panduan Musrenbang RKPD tahun 2018, Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2018, Buku Rekap hasil Musrenbang RKPD Tahun 2018	120 buku, 1 kali, 120 buku	Tersedianya program dan kegiatan TA 2018 sebagai acuan penyusunan KUA PPAS tahun 2018	100%	327.487.500	360.236.250
	1.06.1.06.01.21.10		12. Penetapan RKPD	Kec. Denbar, Dentim, Densel dan Denut		Buku Dokumen RKPD 2018	120 buku	Tersedianya RKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD TA 2018	100%	35.659.000	39.224.900
	1.06.1.06.01.21.12		13. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Kec. Denbar, Dentim, Densel dan Denut		Pidato Pengantar LKPJ, Buku LKPJ Walikota	130 buku, 200 buku	Tersedianya LKPJ Walikota untuk menunjang program Good Governance	100%	59.840.000	59.968.700
	1.06.1.06.01.21.13		14. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Denpasar		Buku laporan Pelaksanaan Renc. Aksi Inpres 7 triwulan IV thn 2016; Pelaksanaan Renc. Aksi Inpres 7 Triwulan I, II, III Th 2017; Evaluasi hasil RKPD Triwulan !V 2016Evaluasi hasil RKPD Triwulan I,II,III th 2017; Triwulan IV DAK th 2016; Triwulan I,II,III DAK 2017;Triwulan IV TP th 2016; Triwulan I,II,III TP 2017;Akhir Th DAK 2016 Buku evaluasi Kab/Kota oleh Prov smt I th 2016; paparan ev.	15 buku, 45 buku, 15 buku, 15 buku, 45 buku, 15 buku, 15 buku, 15 buku	Prosentase tersedianya data realisasi pembangunan daerah Kota Denpasar dalam kaitannya dengan capaian kinerja	100%	169.716.000	186.687.600
	1.06.1.06.01.21.14		15. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Kota Denpasar		Draft KUA PPAS Induk 2018 dan Perubahan tahun 2017 Kota Denpasar Buku KUA PPAS Induk 2018 dan Perubahan tahun 2017 Kota Denpasar	400 buku	Tersedianya program dan kegiatan prioritas sbg acuan penyusunan RAPBD Kota Denpasar	100%	142.629.000	156.891.900
	1.06.1.06.01.21.15		16. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	Kota Denpasar		Sinkronisasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan Aparatur	10 Perangkat Daerah	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan aparatur sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	18.665.000	20.531.500

Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.22	Program Perencanaan pembangunan ekonomi			Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%					703.191.000	570.388.200
	1.06.1.06.01.22.04		17.Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kota Denpasar			Laporan hasil sinkronisasi program prioritas lingkup koordinasi bidang ekonomi	14 buku	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang terintegrasi dan sesuai RPJM, RKPD, Renstra dan renja Perangkat Daerah	100%	168.235.000	185.058.500
	1.06.1.06.01.22.19		18.Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Kota Denpasar			Laporan Penyusunan Laha pertanian berkelanjutan	1 laporan	Tersedianya data perencanaan pembangunan pertanian	100%	209.642.000	210.642.000
	1.06.1.06.01.22.21		19.Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan	Kota Denpasar			Laporan Perencanaan Pembangunan Perikanan	1 laporan	Tersedianya data perencanaan pembangunan perikanan	100%	158.807.000	174.687.700
	1.06.1.06.01.22.....		20. Kajian Ekonomi kreatif usaha kecil dan mikro	Kota Denpasar			Buku kajian ekonomi kreatif usaha kecil dan mikro (UKM)	50 buku	Tersedianya data kajian ekonomi kreatif usaha kecil dan mikro (UKM)	100%	166.507.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial Budaya		Kota Denpasar	Terintegrasinya pembangunan bidang sosial budaya	100%					1.793.336.800	1.972.670.480
	1.06.1.06.01.23.01		21. Penyusunan Review Masterplan Pendidikan	Kota Denpasar			Buku Masterplan Pendidikan	150 buku,	Tersedianya Rencana Induk Pendidikan (masterplan Kota Denpasar)	100%	303.885.500	334.274.050
	1.06.1.06.01.23.03		22. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang soial dan budaya :	Kota Denpasar			Laporan Hasil SinkronisasiProgram Prioritas Lingkup Koordinasi bidang sosial Budaya	24 buku	Perencanaan pembangunan bidang sosbud yg terintegrasi dan sesuai RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD	100%	113.441.800	124.785.980
	1.06.1.06.01.23.12		23. Simposium Internasional Orange Ekonomi	Kota Denpasar			Buku Simposium Internasional orange Ekonomi	75 buku	Terselenggaranya Simposium Internasional Orange Ekonomi	100%	384.375.000	422.812.500
	1.06.1.06.01.23.28		24. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota Denpasar			Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	50 buku	Terkoordinasinya Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	100%	127.839.500	140.623.450
	1.06.1.06.01.23...		25.Penyusunan Rencana Induk Pengmbangan (RIP) Denpasar sebagai Kota Cerdas tahun 2018-2027	Kota Denpasar			Buku rencana induk pengmbangan (RIP) Denpasar sebagai Kota Cerdas tahun 2018-2027	200 buku, (4 triwulan x 9 or) 36 kajian	Jumlah buku rencana induk pengmbangan (RIP) Denpasar sebagai Kota Cerdas tahun 2018-2027	100%	207.000.000	227.700.000

	1.06.1.06.01.23...		26.Konstruksi Ilmu Pusaka (heritologi) Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi	Kota Denpasar			buku Konstruksi Ilmu Pusaka (heritologi) Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi (Indonesia-Inggris)	200 buku	Jumlah Konstruksi Ilmu Pusaka (heritologi) Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi (Indonesia-Inggris)	100%	401.355.000	441.490.500
	1.06.1.06.01.23...		27.Penelitian Indeks Kebahagiaan di Kota Denpasar Tahun 2016	Kota Denpasar			Buku Indeks Kebahagiaan di Kota Denpasar (Indonesia - Inggris)	300 buku	Jumlah buku Indeks Kebahagiaan di Kota Denpasar (Indonesia-Inggris)	100%	255.440.000	280.984.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Perencanaan Pembangunan	1.06.1.06.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			Penanganan sanitasi secara terintegrasi	100%					1.512.148.000	1.663.362.800
	1.06.1.06.01.24.02		28.Koordinasi Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Seluruh Masyarakat Kota Denpasar			Buku Review Masterplan Persampahan Kota Denpasar; Buku Masterplan Pertamanan Kota Denpasar	1 Laporan, 1 Laporan	Tersedianya masterplan Persampahan dan Pertamanan Kota Denpasar	100%	823.148.000	905.462.800
	1.06.1.06.01.24.05		29.Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Seluruh Masyarakat Kota Denpasar			Buku Laporan Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, Masterplan Pedestrian Kota Denpasar dan Review Masterplan Kawasan Lumintang	40 buku, 1 Laporan, 1 Laporan	Prosentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	100%	689.000.000	757.900.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					2.188.077.830	2.406.885.613
	1.06.1.06.01.01.07		30.Pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda Kota Denpasar			Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran; Terpenuhinya kebutuhan fasilitas perkantoran	12 bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.188.077.830	2.406.885.613
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.022.500.000	1.124.750.000

	1.06.1.06.01.02.12		31.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bappeda Kota Denpasar			Prosentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Perawatan Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2 dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan, 12 unit, 26 unit, 100%	1.022.500.000	1.124.750.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Pemenuhan kebutuhan kapasitas sumberdaya aparatur	100%					162.000.000	178.200.000
	1.06.1.06.01.05.01		32. Pendidikan dan pelatihan formal	Bappeda Kota Denpasar			Terlatihnya sumber daya aparatur;	36 orang	terdidiknya sumber daya aparatur sesuai kualifikasi	100%	162.000.000	178.200.000
TOTAL											11.833.610.130	12.807.993.943

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program pelayanan Administrasi perkantoran	1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Denpasar	Terpenuhnya kebutuhan Adm	100	Adm Perkantoran	100	terpenuhnya Kebutuhan Adm	100	1.534.831.500	1.841.797.800
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Denpasar	terpenuhnya kebutuhan Sapras	100	terlaksananya Kegiatan Satpras	100	terpenuhnya Kebutuhan Satpras	100	656.686.000	788.023.200
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	1. Frekuensi pendidikan dan Pelatihan Formal	Denpasar	terpenuhnya kebutuhan PNS yg mengikuti bintek	100	terlaksananya Kegiatan Bintek utk PNS	100	PNS yg mengikuti Bintek	100	100.000.000	120.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1. Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Denpasar	Terlatihnya Pencari Kerja	100	Terwujudnya Pelatihan Pencari Kerja	100	Menurunnya pengangguran	100	640.815.500	768.978.600
			2. Pembinaan lembaga pelatihan Kerja swasta(LPKS)	Denpasar	Meningkatnya Kemampuan LPKS	100	Terbinanya LPKS	100	Meningkatnya Kemampuan LPKS	100	29.667.700	35.601.240
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja	Denpasar	Pemenuhan kebutuhan informasi pasar kerja (IPK)	100	Tersusunnya laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)	100	Pemenuhan kebutuhan informasi pasar kerja (IPK)	100	52.428.500	62.914.200
			2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Denpasar	Pemenuhan kebutuhan informasi pasar kerja	100	siswa yang mendapat penyuluhan jabatan dan jumlah layanan iklan	100	Peningkatan penyebaran Informasi Pasar kerja melalui Media masa dan elektronik	100	49.760.000	59.712.000
			3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Denpasar	Terbinanya Perusahaan pengguna TKA	100	Pembinaan Perusahaan Pengguna TKA	100	Terbinanya Perusahaan pengguna TKA	100	193.917.950	232.701.540
			4. Peningkatan Ketrampilan Bagi Pencari Keja	Denpasar	Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja	100	Terfasilitasinya Antara Pengguna Tenaga Kerja Dengan Pencari Kerja	100	Meningkatnya Kesejahteran Tenaga Kerja	100	388.926.000	406.711.200
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja		Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Denpasar	Penyelesaian Kasus Akibat PHK/PHI	100	Terselesainya kasus akibat PHK/PHI	100	Terselesainya kasus akibat PHK/PHI	100	26.331.300	31.597.560
			2. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial	Denpasar	Peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	Penetapan KHL dan UMK	100	Peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	363.054.600	435.665.520
			3. sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Denpasar	Sosialisasi Jamsostek ke Perusahaan	100	Perusahaan yang disosialisasi	100	Tersosialisasinya berbagai peraturan	100	71.112.500	85.335.000

			Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional /May Day	Denpasar	Memperingati Hari buruh May Day	100	Terlaksananya Memperingati Kegiatan Hari Buruh	100	Meningkatnya Solidaritas Buruh	100	79.596.000	95.515.200
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah kesejahtraan Sosial (Pembinaan Lanjut Usia luar Panti)	Denpasar	Pulihnya fungsi sosial lanjut usia	100	lanjut usia yg memperoleh pembinaan	100	meningkatnya kesejahteraan sosial lanjut usia	100	29.907.200	35.888.640
			2.Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Denpasar	Terwujudnya pelatihan ketrampilan	100	Terlatihnya ketrampilan masyarakat miskin	100	meningkatnya kemampuan ttg berusaha	100	300.563.000	360.675.600
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1, Pelayanan dan Perlindungan Social, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Denpasar	Pemulihnya fungsi sosial anak	100	Jumlah anak yg di berikan Bintek	100	Menurunnya jumlah anak korban	100	342.389.000	410.866.800
			2. penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosila bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS	Denpasar	Tersusunnya data PMKS dan PSKS	100	Tersedianya data PMKS dan PSKS	100	memperoleh gambaran umum ttg PMKS dan PSKS	100	160.045.250	192.054.300
			3.Penanganan masalah- masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Jumlah bantuan bencana yang diadakan.	Denpasar	Terlaksanya penanganan masalahstrategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	100	pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial	100	pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial	100	67.173.000	80.607.600
			4. bimbingan motivasi sosial pencegahan tuna sosial	Denpasar	Pemulihnya fungsi sosial utk tuna sosial	100	meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan tuna sosial	100	Menurunnya Tuna sosial yang ada di kota denpasar	100	37.327.000	44.792.400
			5. Penyusunan Program Perencanaan Berbagai Pelayanan di bidang Sosial dan Tenaga Kerja	Denpasar	terwujudnya sosialisasi dan singkronisasi berbagai perencanaan	100	tersusun kegiatan perencanaan	100	terwujudnya sosialisasi dan singkronisasi berbagai perencanaan	100	125.557.950	150.669.540
			6. Penerapan Sistem dan Informasi Pendataan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja	Denpasar	terlaksananya penerapan sistem dan informasi bidang sosnaker	100	tersusunnya buku propil sosnaker	100	Data dan informasi pendataan	100	52.443.500	62.932.200
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Denpasar	meningkatnya ketrampilan penyandang cacat	100	jumlah penyandang cacat yang memperoleh pelatihan		penyandang cacat mampu bekerja mandiri		196.579.500	235.895.400
			2. Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat	Denpasar	meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang cacat	100	paca yg memperoleh akses pelayanan sosial		meningkatnya fungsi sosial penyandang cacat		175.575.700	210.690.840

			3. Tirtayatra penyandang cacat	Denpasar	meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat		paca yg memperoleh akses pelayanan sosial		meningkatnya fungsi sosial penyandang cacat		315.835.000	379.002.000
			4. Pengadaan alat bantu penyandang cacat :	Denpasar	meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat		paca yg memperoleh akses pelayanan sosial		meningkatnya fungsi sosial penyandang cacat		124.101.000	148.921.200
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha(HLUN,HAN,FK. Panti)	Denpasar	pemulihan fungsi anak		jumlah anak yg memperoleh pembinaan		meningkatnya kesejahteraan sosial anak		71.420.200	85.704.240
			2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Denpasar	pemenuhan kebutuhan PSM yg berkualitas		meningkatnya kualitas PSM		pemenuhan kebutuhan PSM yg berkualitas		169.856.000	203.827.200
			3. Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar	Denpasar	pemenuhan kebutuhan karang taruna yg berkualitas		meningkatnya kualitas KT		pemenuhan kebutuhan KT yg berkualitas		330.724.900	396.869.880
			4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar	Denpasar	pemenuhan kebutuhan Pws yg berkualitas		meningkatnya kualitas Pws		pemenuhan kebutuhan Pws yg berkualitas		115.987.000	139.184.400
			5. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar	Denpasar	pemenuhan kebutuhan PWRI yg berkualitas		meningkatnya kualitas PWRI		pemenuhan kebutuhan PWRI yg berkualitas		126.133.000	151.359.600
			6. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar	Denpasar	pemenuhan kebutuhan KKKS yg berkualitas		meningkatnya kualitas KKKS		pemenuhan kebutuhan KKKS yg berkualitas		108.507.000	130.208.400
			7. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Denpasar	pemenuhan kebutuhan LVRI yg berkualitas		meningkatnya kualitas LVRI		pemenuhan kebutuhan LVRI yg berkualitas		61.245.250	73.494.300
			8. Pembinaan kepahlawanan dan kejuangan (Pemberian sembako kepada keluarga pahlawan/veteran kurang mampu dan sarasehan)	Denpasar	pemberdayaan kelembagaab dan kejuangan		terbinanya kepahlawanan, kejuangan		terbinanya kepahlawanan, kejuangan		221.373.600	265.648.320
			9. Peringatan hari lanjut usia nasional	Denpasar	pemulihan fungsi lanjut usia		jumlah lanjut usia yg memperoleh pembinaan		meningkatnya kesejahteraan sosial lanjut usia		342.154.900	41.059.080
			10. Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja	Denpasar	terlaksananya penyusunan SPM di Bidang Sosnaker		tersusunnya SPM Sosnaker		terlaksananya penyusunan SPM di Bidang Sosnaker		46.493.000	55.791.600
			11.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Sosial dan Tenga Kerja	Denpasar	terlaksananya penyusunan LAKIP di Bidang Sosnaker		tersusunnya LAKIP Sosnaker		terlaksananya penyusunan LAKIP di Bidang Sosnaker		126.115.000	151.338.000
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	1.13.1.14.1.22	Program Keluarga Harapan	1.Pemberdayaan Fakir Miskin	Denpasar	Terlaksananya Program Keluarga Harapan	100	Meningkatnya Pemahaman Keluarga Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan	100	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin	100	133.910.000	160.692.000

		Program Peningkatan Solidaritas Aparat di dalam Rangka Hut Kota	1. Pameran HUT Kota Denpasar	Denpasar	Terlaksanannya Kegiatan Pameran Sosnaker dan Lomba lomba dalam rangka HUT Kota	100	Terpenuhnya Kegiatan Sosnaker terkait HUT Kota	100	Meningkatnya Rasa Solidaritas Aparatur Antara SKPD	100	73.708.000	88.449.600
		Program Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Denpasar	Terlaksanannya Kegiatan Penyusunan Tentang Ketenaga Kerjaan	100	Tersusunya Buku Ketenagakerjaan	100	Terpenuhnya Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	100	59.433.000	71.319.600
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Penyusutan Dokumen Arsip Daerah	Denpasar	Pemenuhan Pemusnahan Arsip	100	Arsip - arsip yang tidak diperlukan termusnahkan	100	Terpenuhnya Pemusnahan Arsip	100	49.402.000	59.282.400
	TOTAL										8.151.087.500	9.351.778.200

BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					957.674.500	1.053.441.950
	1.20.03.01.07		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Denpasar			Penerbitan SP2D	20,500 SP2D yg terbit	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor	100%	957.674.500	1.053.441.950
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			Terwujudnya laporan semesteran dan laporan bulanan realisasi APBD	100%					30.235.000	33.258.500
	1.20.03.06.05		Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	Denpasar			jumlah buku	100 buku laporan semesteran dan 120 buku laporan bulanan realisasi APBD kota denpasar	Terwujudnya laporan semesteran dan laporan bulanan realisasi APBD	100%	30.235.000	33.258.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemda Bidang Keuangan	1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			terwujudnya perda ttg APBD pemerintah kota denpasar, Terwujudnya peraturan walikota ttg penjabaran APBD kota denpasar, Terwujudnya Perda ttg APBD pemerintah kota denpasar, Terwujudnya peraturan walikota ttg penjabaran perubahan APBD pemerintah kota denpasar, Terwujudnya peraturan daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota denpasar, Terwujudnya peraturan Walikota ttg penjabaran	100%					2.354.781.200	2.590.259.320

	1.20.03.17.06		penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD	Denpasar			jumlah buku	Rancangan perda sebanyak 125 buku, nota keuangan sebanyak 125 buku, pengantar nota keuangan sebanyak 125 buku dan buku perda ttg APBD kota Denpasar sebanyak 200 buku	terwujudnya perda ttg APBD pemerintah kota Denpasar	100%	331.450.700	364.595.770
	1.20.03.17.07		penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Denpasar			jumlah buku	Rancangan perwali sebanyak 400 buku dan 475 buku peraturan Walikota ttg penjabaran APBD Kota Denpasar	Terwujudnya peraturan Walikota ttg penjabaran APBD kota Denpasar	100%	376.820.000	414.502.000
	1.20.03.17.08		penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Denpasar			jumlah buku	Rancangan perda sebanyak 125 buku, nota keuangan sebanyak 125 buku, pengantar nota keuangan sebanyak 125 buku dan buku perda ttg perubahan APBD kota Denpasar sebanyak 200 buku	Terwujudnya Perda ttg APBD pemerintah kota Denpasar	100%	238.124.000	261.936.400
	1.20.03.17.09		Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Denpasar			jumlah buku	Rancangan perwali sebanyak 400 buku dan 475 buku peraturan Walikota ttg penjabaran perubahan APBD Kota Denpasar	Terwujudnya peraturan Walikota ttg penjabaran perubahan APBD pemerintah kota Denpasar	100%	273.874.000	301.261.400

	1.20.03.17.10		penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Denpasar			jumlah buku	200 buah buku perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 100 buku perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya peraturan daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota denpasar	100%	207.585.000	228.343.500
	1.20.03.17.11		Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Denpasar			jumlah buku	200 bukuPeraturan Daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota denpasar	Terwujudnya peraturan Walikota ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota denpasar	100%	137.334.000	151.067.400
	1.20.03.17.20		Bimbingan teknis standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Accrual	Denpasar			jumlah bendaharawan penerima dan pengeluaran	bendaharawan yang terlatih	Meningkatnya pengetahuan bendaharawan tentang SAP berbasis accrual	100%	70.726.000	77.798.600
	1.20.03.17.50		Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Denpasar			Jumlah Pengelola Keuangan SKPD	Pengelola Keuangan Yang Terlatih	Terwujudnya penganggaran , Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD	100%	718.867.500	790.754.250
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian	1.20.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Temuan yg ditindak lanjuti	tindak lanjut sesuai temuan					11.169.000	12.285.900
	1.20.03.20.06		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Denpasar			laporan hasil tindak lanjut temuan	laporan hasil tindak lanjut	tercapainya hasil tindak lanjut sesuai temuan	100%	11.169.000	12.285.900
TOTAL											3.353.859.700	3.689.245.670

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

Urusan/Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah			Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Tahun 2017	Perkiraan Maju 2018
	No. Rekening	Program	Kegiatan		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terwujudnya Pelayanan Prima pada Masyarakat	100%						
	1.01.1.01.01.01.07		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU)	DIKPORA Kota Denpasar			Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU)	1 Laporan	menunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran(TU)	100%	112.563.372.151	10.595.886.400
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Terwujudnya Pelayanan Prima pada Masyarakat	100%					-	-
	1.01.1.01.01.02.12		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas dan Sekolah	100%	5.718.766.800	6.290.643.480
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			Terbebtuknya Sumber Daya Manusia yang sigap	100%					-	-
	1.01.1.01.01.05.01		1.Pendidikan dan pelatihan Formal	Dalam dan Luar Daerah			Laporan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal bid kepegawaian,keuangan dan kearsipan	1 Laporan	terlatihnya aparatu/kepegawaian	200 orang	238.193.000	262.012.300
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Program Pendidikan anak Usia Dini			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	100%					-	-
	1.01.1.01.01.15.18		Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (APE)	DIKPORA Kota Denpasar	Peningkatan Kwalitas Pelayanan PAUD		Terlaksananya Pemberian Bantuan APE Bagi Lembaga PAUD di Kota Denpasar	15 Lembaga	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	15 Lembaga	231.446.148	254.590.763
	1.01.1.01.01.15.57		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan	DIKPORA Kota Denpasar	Peningkatan kualitas Pendidik/Pengasuh PAUD di Kota Denpasar		Workshop dan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini	80 Orang	Tersedianya Pendidik/Pengasuh PAUD sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhka	80 Orang	104.032.245	114.435.470

	1.01.1.01.01.15.62		Workshop Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	DIKPORA Kota Denpasar	Peningkatan Pemahaman dalam penyusunan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD (TK dan KB) yang sesuai dengan Kebutuhan		Penyusunan dan pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	128 orang	Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran TK dan KB yang sesuai dengan Kebutuhan	128 orang	146.144.921	160.759.413
	1.01.1.01.01.15.65		5. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	DIKPORA Kota Denpasar	Membentuk anak yang berkualitas dan siap menyongsong pendidikan forma		Lomba-lomba kegiatan PAUD dan pentas kreatifitas PAUD	350 lembaga	TerlaksananyaLomba-lomba kegiatan PAUD dan pentas kreatifitas PAUD	350 lembaga	228.123.959	250.936.355
	1.01.1.01.01.15.66		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	DIKPORA Kota Denpasar	Peningkatan Kualitas pelayanan PAUD		Pelaksanaan Monitoring dan Pemberian Bantuan Hibah APE	20 Lembaga	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program-Program PNF	20 Lembaga	189.709.635	208.680.599
	1.01.1.01.01.15.68		6. Lomba Gugus ,Lembaga dan Bunda PAUD Berprestasi	DIKPORA Kota Denpasar	Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini		pelaksanaan kegiatan lomba Gugus PAUD dan lomba Lembaga PAUD berprestasi	4gugus,4 lembaga dan 4 bunda PAUD	Meningkatnya kinerja Gugus PAUD dan lembaga PAUD berprestasi	4gugus,4 lembaga dan 4 bunda PAUD	273.031.528	300.334.681
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun			Meningkatnya Mutu Pendidikan Wajar Sembilan Tahun	100%					-	-
	1.01.1.01.01.16.01		1. Pembangunan Gedung Sekolah	DIKPORA Kota Denpasar			Siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik	24 ruang kelas	Dapat MengevaluasiMutu Pendidikan di Kota Denpasar	24 ruang kelas	110.823.435.840	121.905.779.424
	1.01.1.01.01.16.19		3. Pengadaan Meubelair Sekolah	DIKPORA Kota Denpasar			Siswa dapat mengikuti pelajaran Dengan Baik	2000 set	Dapat Mengevaluasi Mutu Pendidikan Di Kota Denpasar	2000 set	3.364.240.000	3.700.664.000
	1.01.1.01.01.16.79		Pasraman Siswa SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinnya Siswa SMP melalui Pesraman SMP	240orang siswa smp	Meningkatnya Moralitas SMP melalui pemahaman jati diri siswa	240orang siswa smp	162.734.775	179.008.253
	1.01.1.01.01.23.16		6. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sain Tingkat SD dan SMP)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinanya Siswa Peserta Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju Ke Tingkat Propinsi dan Nasional	1 Laporan	Meningkatnya Prestasi Siswa Peerta Olimpiade Sains SD dan SMP Untuk Maju ke Tingkat Provinsi dan nasional	200 Orang SISWA sd & smp	44.560.200	49.016.220
	1.01.1.01.01.16.67		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Ujian Nasional Paket A setara SD	1 Laporan	Peningkatan tingkat pencapaian lulusan setara SD	75 orang	44.560.200	49.016.220
	1.01.1.01.01.16.68		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Kegiatan ujian nasional paket B setara SMP	1 Laporan	Tercapainya warga belajar yang lulus setara SMP	300 orang	74.008.538	81.409.392
	1.01.1.01.01.16.81		10. Dana BOS Pendamping : - Negeri : SD/SLDB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Membebaskan Pungutan Bagi Peserta Didik	1 Laporan	Mempercepat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	95,59 Siswa	17.746.333.100	19.520.966.410
	1.01.1.01.01.16.89		Workshop Kinerja Gugus SD	DIKPORA Kota Denpasar			Terlatihnya Tenaga Pendidik di Gugus SD se Kota Denpasar untuk peningkatan Kinerja	1 Laporan	Menigkatnya Kinerja Gugus SD se Kota Denpasar melalui Workshop kinerja Gugus SD	180 orang	116.951.550	128.646.705

	1.01.1.01.01.16.87		12. Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terlatihnya Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar	1 Laporan	Meningkatnya Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP Kota Denpasar u/ bersaing di tingkat Provinsi	180 Tenaga Pendidik	120.464.800	132.511.280
	1.01.1.01.01.23.27		Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada : Siswa,Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD dan SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Termotivasinya siswa,Guru dan sekolah untuk Meraih Prestasi	1 Laporan	Menigkatnya prestasi siswa, Guru dan Sekolah di Tingkat Provinsi dan Nasional	263 Orang	247.946.325	272.740.958
	1.01.1.01.01.16.88		Workshoop Pembinaan OSIS SMP	DIKPORA Kota Denpasar			TerlatihnyaPembina OSIS SMP Kota Denpasar	1 Laporan	Meningkatnya Pemahaman OSIS Untuk Pembinaan Siswa SMP	90 orang pembina OSIS	114.453.175	125.898.493
	1.01.1.01.01.16.90		5.Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTS Negeri dan Swasta	Sekolah SMP			laoran Ujian Pemantapan	1 Laporan	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa	14500	629.637.900	692.601.690
	1.01.1.01.01.16.91		7.Ujian Pemantapan Siswa SD / MI Negeri dan Swasta				Laporan Ujian pemantapan siswa SD MI	1 Laporan	Terlaksanya ujian pemantapan siswa SD MI kota Denpasar	15500	695.808.400	765.389.240
	1.01.1.01.01.16.92		14. Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Ujian nasional Sekolah Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar	1 Laporan	Terlaksanya Ujian Sekolah Terkoordinasi Provinsi siswa SD MI Kota Denpasar	15500 Siswa	332.966.170	366.262.787
	1.01.1.01.01.16.93		15. Ujian Nasional SMP/ MTS	DIKPORA Kota Denpasar			laporan Ujian Nasional Siswa SMP se Kota Denpasar	1 Laporan	Terlaksananya Ujian SMP Se Kota Denpasar	13500 orang siswa SMP	345.119.600	379.631.560
	1.01.1.01.01.16.88		Pusat Layanan AUTIS Kota denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Tercapainya Kegiatan Pusat Layanan Autis Kota Denpasar	100 Orang	Terpenuhinya pelayanan Pusat layanan Autis Kota Denpasar	100 Orang	1.344.606.450	1.479.067.095
	1.01.1.01.01.16.90		Workshop Penanganan Anak AUTIS di Pusat Layanan Autis	DIKPORA Kota Denpasar			Workshop Penyusunan Program Intervensi Terpadu dan Kelas Transisi	1 Laporan	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pusat Layanan Autis dan Lembaga yang Menangani autis	40 orang	241.296.508	265.426.158
	1.01.1.01.01.16.73		Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar(AUTIS)	DIKPORA Kota Denpasar			Sosialisasi ,Parenting dan pentas Kreativitas Anak dalam Rangka peringatan Hari Peduli Autis Internasional	1 Laporan	Peningkatan Pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang anak dengan Autisme	750 orang	142.873.550	157.160.905
			Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	DIKPORA Kota Denpasar			Pelatihan Kurikulum bagi SMP MTS	1 Laporan	Tersedianya tenaga pendidik yang sesuai SPM		1.034.478.500	1.137.926.350
			Workshop Review Kurikulum SD/MI	DIKPORA Kota Denpasar			Pelatihan Kurikulum 2013	1 Laporan	tersedianya tenaga pendidk yang sesuai SPM	916 orang guru	477.105.200	524.815.720
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Program Pendidikan Menengah			Terwujudnya standar pelayanan minimum bidang Pendidikan Menengah	100%					-	-

	1.01.1.01.01.17.71		Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (Bintek TPK)	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum	1 Laporan	Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik yang Sesuai Dengan SPM .Pengawas Sekolah,Guru,dan Panitia	100 orang Guru dan pengawas	106.420.000	117.062.000
	1.01.1.01.01.17.62		6. Penyediaan Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan kegiatan pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu	1 Laporan	Pembeian Beasiswa Kurang Mampu	450 siswa SMA/SMK	15.310.000	16.841.000
	1.01.1.01.01.17.63		Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan pelaksanaan Ujian Nasionan Paket C Setara SMA	1 Laporan	Peningkatan tingkat pencapaian lulusan Paket C setara SMA	600 orang	115.301.760	126.831.936
	1.01.1.01.01.17.67		9. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Melalui Kegiatan lomba-Lomba	1 Laporan	Meningkatnya Pengetahuan Sains Siswa SMA/ SMK	1300 Orang Siswa SMA SMK	870.282.900	957.311.190
	1.01.1.01.01.17.72		10. Lomba Kompetensi Siswa(LKS) SMK	DIKPORA Kota Denpasar			Pelaksanaan Lomba Kopetensi siswa (LKS) SMK	1 Laporan	Terlaksananya Lomba LKS Tingkat SMK di Kota Denpasar	18 Mata Lomba	332.263.000	365.489.300
	1.01.1.01.01.17.73		Peningkatan Pembinaan Kesiswaaan	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananan Lomba Wiata Mandala	1 Laporan	Terlaksananya Lomba 4 Pilar Kebangsaan	1 Paket Kegiatan	301.753.600	331.928.960
	1.01.1.01.01.17.76		Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Pendidikan Menengah	DIKPORA Kota Denpasar			Meningkatnya Kreativitas siswa SMA SMK	1 Laporan	Peningkatan Kretivitas siswa SMA SMK Melalui lomba penelitian Ilmiah Remaja	180 siswa	36.598.150	40.257.965
	1.01.1.01.01.17.77		Masa Orientasi Siswa Berwawasan Budaya	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan masa Orientasi siswa Berwawasan budaya	1 Laporan	Terlaksananya Masa Orientasi siwa Berwawasan budaya	3300 Siswa	51.071.210	56.178.331
	1.01.1.01.01.17.77		Kebangkitan Budaya	DIKPORA Kota Denpasar			Pelaksanaan Kegiatan Kebangkitan Budaya	1500 Siswa	Terlaksannya Peningkatan Kebangkitan Budaya	1500 Siswa	231.652.000	254.817.200
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Program Pendidikan Non Formal			Meninmgkatnya Pendidikan di Luar Persekolahan	100%					-	-
	1.01.1.01.01.18.02		Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di SKB	SKB Kota Denpasar			Terlayannya 220 peserta didik Program PAUDNI dan Kesetaraan di SKB Kota Denpasar	1 Laporan	Meningkatnya APK dan APM pendidikan serta ketrampilan peserta didik program PAUDNI	250 orang	373.524.500	410.876.950
	1.01.1.01.01.18.05		Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	DIKPORA Kota Denpasar			Pelatihan tata rias wajah dan rambut, membuat makanan tradisional dan disain grafis	1 Laporan	Peningkatan pengetahuan/keterampil an kecakapan hidup	50 orang	111.049.056	122.153.962

	1.01.1.01.01.18.09		4. Pengembangan Kurikulum , Bahan Ajar dan model pembelajaran PNF	DIKPORA Kota Denpasar			Penyusunan dan pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	1 Laporan	Ketersediaan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF yang sesuai dengan Kebutuhan	50 orang	46.394.000	51.033.400
	1.01.1.01.01.18.19		5. Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar	Tempat Disesuaikan			Pelaksanaan Lomba Proposal Jambore, Seleksi Guru dan Kepsek TK Berprestasi, Lomba Pameran PNF dan Lomba Penjur dalam rangka HAI Tingkat Kota Denpasar	1 Laporan	Peserta hasil seleksi Tk. Kota untuk Jambore HAI ke Tingkat Provinsi	76 orang	270.849.320	297.934.252
	1.01.1.01.01.18.25		Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat	SKB Kota Denpasar			Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Membuat Banten	1 Laporan	Tenaga Trampil dalam Membuat dan Berwirausaha Banten	20 Orang	95.748.400	105.323.240
	1.01.1.01.01.18.24		Diklat Dasar Berjenjang Pendidikan PAUD Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Kegiatan Diklat Dasar Berjenjang Bagi Pendidik PAUD Kota PAUD	1 Laporan	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik PAUDI	60 orang	148.724.400	163.596.840
	1.01.1.01.01.18.37		Workshop pembelajaran dan Penilaian Program PAUD dan DIKMAS	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Workshop Pembelajaran dan Penilaian PAUD dan DIKMAS	1 Laporan	Meningkatnya Kapasitas Pamong Belajar dan Tenaga Pendidik PAUD dan DIKMAS	20 Orang	129.948.400	142.943.240
	1.01.1.01.01.18.35		Penyelenggaraan Seminar Bagi Pendidik PAUD	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya kegiatan seminar/talkshow	1 Laporan	Pendidik PAUD mengetahui perkembangan dunia pendidikan	400 orang	144.351.880	158.787.068
	1.19.1.01.01.17.03		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	DIKPORA Kota Denpasar			Pelaksanaan lomba-lomba penjur dalam rangka Hut Kota Denpasar	1 Laporan	Juara Lomba Penjur antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	48 SKPD	24.599.800	27.059.780
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			Tersedianya Pendidikan dan Tenaga Pendidik Yang Memiliki Daya Saing	100%					-	-
	1.01.1.01.01.20.22		Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tempat Disesuaikan			Terlaksananya Uji Kompetensi	1 Laporan	Terpenuhinya tenaga Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi	1500 guru	74.374.500	81.811.950
	1.01.1.01.01.20.07		Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik Dalam Memenuhi Standar Kualifikasi	Tempat Disesuaikan			Terlaksananya pemberian Beasiswa Tugas belajar SI dan S2 Bagi Guru	1 Laporan	pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi	190 Guru	720.573.600	792.630.960
	1.01.1.01.01.20.18		Pendataan Tenaga Pendidik	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Tenaga Pendidik	1 Laporan	Pemenuhan data dan Pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik	1 Laporan	50.225.400	55.247.940

	1.01.1.01.01.20.19		Workshop Penilaian Karya Tulis Ilmiah/PTK	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Uji Kompetensi Workshop Penulisan Karya ilmiah	1 Laporan	Terciptanya Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	40Guru	41.476.600	45.624.260
	1.01.1.01.01.20.20		Workshop Berbagai Informasi Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan(TPG & TTP)	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi Pendidik	1 Laporan	Pemenuhan Kebutuhan tanga Pendidik yang Memnuhi Standar kopetensi	1500 Guru	67.604.400	74.364.840
	1.01.1.01.01.20.22		Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Guru	640 Guru	Terbitnya PAK Tenaga Kependidikan	640 Guru	351.663.700	386.830.070
	1.01.1.01.01.20.04		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (Workshop Penilaian Kinerja Guru) (PKG)	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)	40 Kepala sekolah	Terpenuhinya Peninhkatan Kualitas Pendidik	40 Kepala sekolah	48.412.200	53.253.420
	1.01.1.01.01.20.23		Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Serti fikasi Pendidik	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	1 Laporan	Terpenuhnya Kebutuhan Tenaga Pendidik yang Memenuhi standar	1500 Guru	140.736.800	154.810.480
	1.01.1.01.01.20.24		. Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Workshop Pengawas Sekolah	1 Laporan	Meningkatnya Kwalitas Pengawas Sekolah Yang Memenuhi Standar Kompetensi	65 Pengawas Seklah	443.189.000	487.507.900
	1.01.1.01.01.20.25		. Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pangangkatan Kepala Sekolah)	DIKPORA Kota Denpasar			laporan pemenuhn Kebutuhan Kepala Sekolah SD,SMP,SMA,SMK	40 Calon Kepala sekolah	Tercapainya Pengangkatan Kepala Sekolah	40 Calon Kepala sekolah	25.676.400	28.244.040
	1.01.1.01.01.20.26		Penyiapan Calon Kepala Sekolah	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Diklat Calon Kepala sekolah	60 Calon Kepala serkolah	Tersedianya Calon Kepala Sekolah	60 Calon Kepala serkolah	543.095.800	597.405.380
	1.01.1.01.01.20.12		Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Monitoring monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian	1 Laporan	tersedianya laporan monitoring Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Kepegawaian	63 Pengawas Sekolah	95.988.700	105.587.570
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	100%					-	-
	1.01.1.01.01.21.02		1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Sekolah se Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya baca	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca melalui Lomba dalam rangka Bulan bahasa	300 Orang	49.966.925	54.963.618
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Pendidikan	100%					-	-
	1.01.1.01.01.22.02		1. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	DIKPORA Kota Denpasar			laporan Kegiatan Peningkatan sarana Prasarana Cyber School Kota Denpasar	1 Laporan	Pemenuhan Kebutuhan jaringan cyber School Kota denpasar	60 sekolah	1.173.938.750	1.291.332.625

	1.01.1.01.01.22.04		2. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan di Bidang Pendidikan	DIKPORA Kota Denpasar			Guru Memahami dan Mengetahui Peraturan tentang Pendidikan Yang Berlaku	1 Laporan	Guru Mampu mengimplementasikan dalam Proses Pembelajaran	2684 orang	142.413.500	156.654.850
	1.01.1.01.01.22.05		3. Pembinaan Dewan Pendidikan	DIKPORA Kota Denpasar			Guru memahami dan mengetahui peraturan yang berlaku	1 Laporan	Guru Mampu mengimplementasikan dalam Proses Pembelajaran	193 sekolah	43.160.000	47.476.000
	1.01.1.01.01.22.07		4. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	DIKPORA Kota Denpasar			laporan penerapan Tersedianya sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 Laporan	Memnuhi SIM sesuai standar Minimal	640 Orang	111.787.000	122.965.700
	1.01.1.01.01.22.08		5. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan penyelenggaraan pelatihan dan seminar Pendidikan	1 Laporan	program kerja yang sesuai dengan RPJM	1300 orang	356.098.300	391.708.130
	1.01.1.01.01.22.20		6. Rencana pengembangan Pendidikan Dasardan Menengah Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Kegiatan RPKD	1 Laporan	Pemenuhan SIM sesuai standar Minimal	640 Orang	105.098.500	115.608.350
	1.01.1.01.01.22.13		7. Profile Pendidikan Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			laporan kegiatan Profile Pendidikan Kota Denpasr	660 buah	Pemenuhan Kebutuhan Profile Pendidikan	660 buah	84.471.500	92.918.650
	1.01.1.01.01.22.14		8. Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Tersedianya sarana dan prasarana rumah pintar secara optimal	1 unit gedung baru	Tersedianya sarana dan prasarana rumah pintar yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota denpasar	1 unit gedung baru	2.223.168.000	2.445.484.800
	1.01.1.01.01.22.15		9. Penyelenggaraan Verifikasi Program Kerja Sekolah(RAPBS) : SD, SMP, SMA dan SMK se Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Sekolah(RAPBS)	1 Laporan	RAPBS sesuai dengan Standar	579 orang	133.023.500	146.325.850
	1.01.1.01.01.22.16		10. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Program kerja Dikpora	1 Laporan	Program Kerja Sesuai dengan RPJM	120 Orang	283.202.500	311.522.750
	1.01.1.01.01.22.17		11. Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan kegiatan Lomba bidang informasi berbasis budaya	1 Laporan	Pemenuhan kebutuhan IT di Sekolah	150 guru	136.109.150	149.720.065
	1.01.1.01.01.22.22		12. Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB On Line)	DIKPORA Kota Denpasar			Siswa dapat Menentukan Sekolah Pilihan Sesuai dengan Kemampuan	1 Laporan	Dapat Meningkatkan Mutu pendidikan di kota denpasar	12000 siswa	342.654.700	376.920.170
	1.01.1.01.01.22.21		13. Peningkatan Kemampuan Siswa Tentang Teknologi Informasi	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Lomba kretivitas siswa di bidang Teknologi Informasi	1 Laporan	Menumbuhkan kreativitas siswa tentang Teknologi Informasi	100%	107.260.050	117.986.055

	1.01.1.01.01.22.26		14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga	DIKPORA Kota Denpasar			Tersedianya Input Program kerja Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Yang Baik	1 Laporan	Program Kerja Sesuai dengan RPJM	50 orang	91.804.740	100.985.214
	1.01.1.01.01.22.27		15. Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP, SMA dan SMK Negeri se Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Guru Memahami dan Mengetahui Peraturan Yang Berlaku	1 Laporan	Guru Mampu Mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar	50 orang	409.010.000	449.911.000
	1.01.1.01.01.22.31		15. Kreativitas Rumah Pintar	Rumah Pintar			Terbinanya pendidik dan peserta didik untuk peningkatan kompetensi melalui kreativitas sekolah	1 Laporan	Meningkatnya Kompetensi pendidik dan peserta didik di sekolahnya masing masing melalui kreativitas sekolah	40 sekolah	607.388.200	668.127.020
	1.01.1.01.01.22.30		16. Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK se Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinanya SMK Negeri dan Swasta Kota Denpasar dengan Memamerkan hasil Karya Siswanya ke masyarakat	1 Laporan	Meningkatnya Motivasi SMK untuk Selalu berkarya dan berinovasi dalam bidang teknologi	50 SMK Kota Denpasar	551.688.600	606.857.460
	1.01.1.01.01.22.28		17. Workshop Pengadaan dan Penatausahaan Barang dan Jasa Sekolah Tingkat : SD, SMP, SMA dan SMK Negeri se Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Workshop Barang dan jasa	1 Laporan	Pengadaan Barang Sesuai dengan Standar	649 orang	182.594.200	200.853.620
	1.01.1.01.01.22.23		19. Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Kegiatan pelaporan pendidikan dasar dan menengah	1 Laporan	Pemenuhan SIM sesuai standar Minimal	640 orang	186.146.000	204.760.600
	1.01.1.01.01.22.29		18. Monitoring, Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan hasil monitoring dan Kegiatan	1 Laporan	Adanya Realisasi Program dan Kegiatan	109 orang	41.089.240	45.198.164
	1.01.1.01.01.22.24		21. Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran	DIKPORA Kota Denpasar			Terselenggaranya Penelitian Ilmiah di Bidang Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	1 Laporan	Masyarakat Dapat Mengaplikasikan Hasil Penelitian	90 orang	322.009.770	354.210.747
	1.01.1.01.01.22.25		Penyelenggaraan Lomba Carving Masal SMK se Kota Denpasar	DIKPORA Kota Denpasar			Terselenggaranya kegiatan Carving Masal untuk siswa di Kota Denpasar	1 Laporan	Siswa Dapat Mengapresiasikan Hasil Karya dan Menyalurkan Bakat seni Carving	1200 orang	120.698.020	132.767.822
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar			Meningkatnya Kualitas Siswa SD dan SMP	100%					-	-
	1.01.1.01.01.23.01		1. Lomba Gugus SD	DIKPORA Kota Denpasar			Terpilihnya Gugus SD untuk Lomba di Tingkat Provinsi bali	1 Laporan	Meningkatnya Kinerja Gugus SD	4 Gugus SD	200.089.500	220.098.450

	1.01.1.01.01.23.02		Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terpilihnya Karya Ilmiah Remaja Kota Denpasar untuk maju ke Tingkat Provinsi dan Nasional	1 Laporan	Meningkatnya Karya Ilmiah Remaja Kota Denpasar yang lolos ke Tingkat Nasional	50 Kelompok KIR	278.674.000	306.541.400
	1.01.1.01.01.23.03		Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinnya osis SMP se Kota Denpasar	1 Laporan	Meningkatnya pemahaman Pengurus Osis SMP terhadap Organisasi Sekolah	180 Orang Siswa	231.155.000	254.270.500
	1.01.1.01.01.23.04		Seleksi Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD dan SMP)	DIKPORA Kota Denpasar			Terlayannya siswa kurang mampu untuk melanjutkan sekolah	1 Laporan	Meningkatnya APK dan APM SD dan SMP	660 Orang Siswa SD dan SMP	862.926.500	949.219.150
	1.01.1.01.01.23.99		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (Workshop Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinanya SD/MI dan SMP/MTS Melalui Akreditasi	1 Laporan	Meningkatnya Status Akreditasi SD/MI dan SMP/MTS	200 SD/Midan SMP/MTS	51.045.500	56.150.050
	1.01.1.01.01.23.26		Olimpiade Sains Guru SD dan SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terpilihnya Guru Peserta Olimpiade Sains SD dan SMP untuk ke tingkat Propinsi	1 Laporan	Meningkatnya Prestasi guru peserta olimpiade sains SD dan SMP untuk maju ke tingkat Propinsi dan Nasional	150 Orang	250.674.500	275.741.950
	1.01.1.01.01.23.25		5. Penerimaan Siswa Baru SMP luar Provinsi	DIKPORA Kota Denpasar			Terdaftarnya Lulusan SD yang menuju ke SMP	1 Laporan	Meningkatnya APK SD	Semua lulusan SD Kota Denpasar	22.774.500	25.051.950
	1.01.1.01.01.23.11		6. Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat : SD, SMP/Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Siswa SD, SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terpilihnya Duta Seni Kota Denpasar Untuk Ke tingkat Provinsi	1 Laporan	Meningkatnya prestasi Seni SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Nasional	545 Orang Siswa	910.253.000	1.001.278.300
	1.01.1.01.01.23.12		7. Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD dan SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinanya Prestasi Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat SD dan SMP Kota Denpasar Tingkat Provinsi dan Nasional	1 Laporan	Meningkatnya Prestasi Siswa Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD dan SMP Tingkat Nasional	537 Orang	447.395.000	492.134.500
	1.01.1.01.01.23.14		8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapkan MBS di Satuan Pendidikan Dasar	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinanya Kepala SD dan SMP dalam pengelolaan sekolah	1 Laporan	Meningkatnya manajemen SD dan SMP kota Denpasar	120 Orang	98.438.500	108.282.350
	1.01.1.01.01.23.13		9.Lomba Wiyata Mandala SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terbinanya Sekolah dalam bidang Wiyatamandala	1 Laporan	Meningkatnya wawasan wiyata mandala SMP kota Denpasar	10Sekolah	160.523.500	176.575.850

	1.01.1.01.01.23.19		Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terpilainya peserta Lomba Pidato bahasa ingris ke tingkat Provinsi	1 Laporan	Menignkatnya prestasi siswa dalam Lomba Pidato Bahasa Inggris	140 Orang	151.974.500	167.171.950
	1.01.1.01.01.23.91		Bimbingan Teknis Tim MBS tingkat SD	DIKPORA Kota Denpasar			Terlaksananya Pembinaan Sd Oleh Tim MBS	1 Laporan	Meningkatnya pembinaan SD oleh tim MBS	126 Orang	135.113.500	148.624.850
	1.01.1.01.01.23.93		Workshoop Pembina Karya Ilmiah Remaja Tingkat SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terlatihnya Pembina KIR SMP Kota Denpasar	1 Laporan	Meningkatnya Pemahaman pembina KIR untuk Meraih Prestasi Tingkat Propinsi Dan Nasional	100 Orang	90.277.500	99.305.250
	1.01.1.01.01.23.99		Workshop Wawasan Wiata Mandala SMP	DIKPORA Kota Denpasar			Terlatihnya Penanggung Jawab Wawasan Wiata Mandala Tingkat SMP	1 Laporan	Meningkatnya Pemahaman Penanggung jawab Wawasan Wiata Mandala Tingkat SMP Kota Denpasar	100 Orang	114.171.500	125.588.650
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan		Program Pengelolaan Keragaman Budaya									-	-
	1.17.1.01.01.17.01		1.Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	DIKPORA Kota Denpasar			terlaksana pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah		terwujudnya pengembangan dan pelastarian seni dan budaya daerah	60 Orang	458.659.000	504.524.900
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			Menumbuhkan rasa kebangsaan di kalangan Generasi Muda	100%					-	-
	1.18.1.01.01.16.02		1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	DIKPORA Kota Denpasar			pelaksanaan seleksi pelatihan paskibraka	1 Laporan	terlaksana pelatihan dan seleksi paskibraka	40 Orang	55.467.500	61.014.250
	1.18.1.01.01.16.20		2. Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	150 Orang	21.520.000	23.672.000
	1.18.1.01.01.16.11		3. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	DIKPORA Kota Denpasar			seleksi dan pembinaan peserta jambore pemuda	1 Laporan	terpelihnya pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah dan nasional	1 paket kegiatan	107.287.000	118.015.700
	1.18.1.01.01.16.12		4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan, Memperingati Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	500 orang	139.150.000	153.065.000
	1.18.1.01.01.16.13		5. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Jambore Kwarcab Denpasar)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	650 orang	90.840.000	99.924.000
	1.18.1.01.01.16.14		6. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Tri Lomba Pramuka)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	750 orang	38.330.000	42.163.000

	1.18.1.01.01.16.15		7. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Dasar/KMD)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	100 orang	64.690.000	71.159.000
	1.18.1.01.01.16.22		8. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Lanjutan/KML)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	100 orang	64.690.000	71.159.000
	1.18.1.01.01.16.23		9. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Mengikuti Lomba Tingkat V dan Raimuna Nasional)	DIKPORA Kota Denpasar			Mengikuti Lomba Tingkat V dan Karang Pamitran Nasinoal	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	72 Orang	911.911.000	1.003.102.100
	1.18.1.01.01.16.17		10. Pembinaan Organisasi Kepemudaan(Mengikuti Lomba Gugus Depan Tingkat Kwarda Bali)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	2 Laporan	12.850.000	14.135.000
	1.18.1.01.01.16.18		11. Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Tingkat SMA/SMK	DIKPORA Kota Denpasar			terlaksanyanya festifal lomba siswa seni Nasional	1 Laporan	Pemenuhan Kebutuhan siswa berprestasi tingkat SMA dan SMK	1 paket kegiatan	133.525.000	146.877.500
	1.18.1.01.01.16.19		12. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Melaksanakan Kegiatan Raimuna Cabang ,Mengikuti Raimuna Daerah,danMengikuti Karang Pamitran Daerah)	DIKPORA Kota Denpasar			Terbentuknya nilai nilai patriotisme	1 Laporan	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	250 orang	162.190.000	178.409.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Meningkatnya insan olahraga	100%					-	-
	1.18.1.01.01.20.06		1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan pelaksanaan porsnijar	1 Laporan	Tersedianya Atlit berprestasi	900 orang	6.208.665.400	6.829.531.940
	1.18.1.01.01.20.17		2. Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi Dengan Lembaga /Instansi (Penyelenggaraan olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	DIKPORA Kota Denpasar			Lapotan Mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Propinsi dan Nasional	1 Laporan	Tersedianya Atlit Usia Dini Berprestasi	220 orang	769.793.200	846.772.520
	1.18.1.01.01.20.18		3. Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Pelaksanaan Porsnijar Kecamatan	1 Laporan	Tersedianya Kontingen Kecamatan Untuk Mengikuti PORSNIJAR Kota	4 Kontingen Kecamatan	562.976.400	619.274.040

	1.18.1.01.01.20.07		4. Penyelenggaraan Kegiatan Yoga	DIKPORA Kota Denpasar			Memiliki Jiwa Yang Sehat dan Kepribadian Yang Baik	1 Laporan	Memiliki Jiwa Yang Sehat dan Kepribadian Yang Baik	1 Paket Kegiatan	120.519.700	132.571.670
	1.18.1.01.01.20.08		5. Penyelenggaraan Olahraga HUT Kota	DIKPORA Kota Denpasar			Rasa Kebersamaan Antar SKPD se -Kota Denpasar	1 Laporan	Rasa Kebersamaan Antar SKPD se -Kota Denpasar	1 Paket Kegiatan	147.200.000	161.920.000
	1.18.1.01.01.20.20		6. Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni	DIKPORA Kota Denpasar			Laporan Penyediaan Alat dan Sarana olahraga dan Seni	1 Laporan	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan seni	800 orang Atlit	2.032.480.100	2.235.728.110
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Meningkatnya Jiwa Patriotisme Kebangsaan	100%					-	-
	1.19.1.01.01.17.11		1. Peringatan Sumpah Pemuda	DIKPORA Kota Denpasar			Peringatan Sumpah Pemuda dan Diskusi Pemuda	1 Laporan	Peningkatan Kebangsaan Generasi Muda	200 Orang	28.261.000	31.087.100
TOTAL											287.746.533.589	203.297.363.981